



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 yang mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah berakhirnya tahun anggaran untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud disusunnya LKPD adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: (1) Pendapatan-LRA; (2) Belanja; (3).Transfer; (4) Pembiayaan; (5) Saldo Anggaran Lebih; (6) Aset; (7) Kewajiban; (8) Ekuitas; (9) Pendapatan-LO; (10) Beban; dan (11) Arus Kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;



4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah, adapun dasar hukum penyusunan LKPD sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, sehingga tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami isi laporan keuangan yang dibuat.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan



- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
 - 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada pemerintah daerah.
 - 4.5. Akuntansi Kewajiban
 - 4.6. Akuntansi Ekuitas Dana
 - 4.7. Kebijakan Akuntansi Tertentu
- Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Rincian dari Penjelasan dari masing-masing pos – pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1. Pendapatan – LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Surplus Defisit
 - 5.1.5. Pembiayaan
 - 5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
 - 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
 - 5.3.4. Kewajiban dan Ekuitas



5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

- 5.4.1. Pendapatan – LO
- 5.4.2. Beban
- 5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi
- 5.4.4. Surplus/Defisit Nonoperasional
- 5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
- 5.4.6. Pos Luar Biasa
- 5.4.7. Surplus/Defisit - LO

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

- 5.5.1. Arus Kas dari Operasi
- 5.5.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
- 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
- 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI. Penutup

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan LPSAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LAK dan LPE. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mengamburkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.



- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.



Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Neraca Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas (untuk Tahun Anggaran 2021 adalah per 31 Desember 2021).

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam satu periode pelaporan.



Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;



- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

1. Kondisi Perekonomian

Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Indikator Makro Ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain Pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dari sisi penggunaan, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Namun dari sisi sektoral, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila hasil produksi dari seluruh sektor ekonomi dari sektor pertanian, pertambangan sampai sektor jasa-jasa pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya.

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi dalam praktik angka yang lebih sering dipakai adalah melalui PDRB, karena angka PDB/PDRB hanya melihat batas wilayah, terbebas pada negara yang bersangkutan. Sedangkan agar ekonomi semakin berkembang dan tumbuh juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal. Ekonomi Indonesia tidak akan maju dan berkembang jika tidak didukung oleh salah satu faktor tersebut, jadi antara satu dengan yang lainnya berkesinambungan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2022 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2021, seiring dengan terkendalinya kasus COVID-19 yang terus menunjukkan penurunan serta pelonggaran mobilitas masyarakat yang mendorong permintaan domestik, demikian juga dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Karena alasan letak geografis, dan karena data perekonomian yang tidak jauh berbeda dengan angka provinsi, maka gambaran perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari gambaran Perekonomian Provinsi Jambi, dimana Perekonomian Provinsi Jambi diproyeksikan akan tumbuh di rentang 4,50% - 5,25% (yoy) ditopang oleh perbaikan kinerja Lapangan Usaha (LU) utama, peningkatan ekspor serta konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah. Berlanjutnya Program Pemulihan



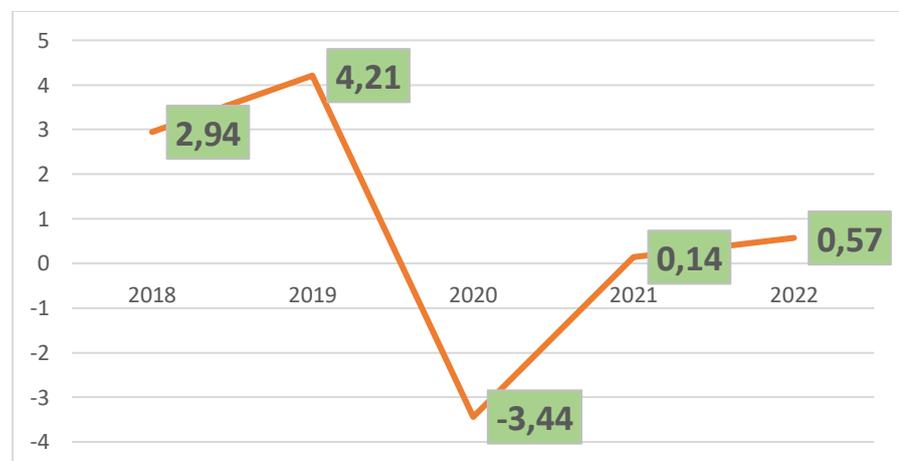
Ekonomi Nasional (PEN) 2022 serta berbagai stimulus fiskal dan moneter turut menopang perbaikan konsumsi masyarakat dan dunia usaha.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan kinerja di LU utama provinsi. Peningkatan Kinerja LU Pertanian terutama didorong oleh peningkatan produktivitas subsektor perkebunan dan permintaan komoditas perkebunan. Sementara itu, kinerja LU Pertambangan dan Penggalan ditopang oleh peningkatan permintaan komoditas energi primer di pasar global dan domestik di tengah penguatan harga komoditas. Selanjutnya, LU Perdagangan turut mengalami peningkatan yang disebabkan oleh mulai kembali normalnya konsumsi masyarakat. Selain itu, akselerasi perkembangan vaksinasi yang berjalan lancar diperkirakan mendorong peningkatan investasi di tengah peningkatan optimisme pelaku usaha.

Selanjutnya, dari sisi perkembangan harga, laju inflasi Provinsi Jambi pada tahun 2022 diperkirakan meningkat seiring dengan pemulihan perekonomian yang terus berlangsung, bias atas terhadap kisaran sasaran inflasi. Tekanan inflasi tahun 2022 utamanya dipengaruhi oleh tingkat vaksinasi yang semakin masif sehingga mendorong peningkatan mobilitas masyarakat yang akhirnya berdampak pada perbaikan daya beli masyarakat. Selain itu, peningkatan harga beberapa komoditas di pasar global akibat gangguan rantai pasok, peningkatan tarif dasar listrik dan BBRT, berlanjutnya insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor s.d triwulan III 2022, turut mendorong laju inflasi di Provinsi Jambi pada keseluruhan tahun 2022. Peningkatan tarif PPN menjadi 11% pada tahun 2022 juga diperkirakan akan mendorong para pelaku usaha untuk menaikkan harga menyesuaikan dengan biaya produksi.

Total PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan sebesar 0,43 persen dibandingkan tahun 2021.

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018 – 2022 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Tabel 2.1
Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,54	0,13	2,50
B	Pertambangan dan Penggalian	-6,50	-1,17	-1,20
C	Industri Pengolahan	1,25	-0,20	1,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,05	5,76	10,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,81	4,86	4,48
F	Konstruksi	-0,09	6,87	-0,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,01	2,56	4,88
H	Transportasi dan Pergudangan	-2,01	7,23	9,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,24	4,03	6,86
J	Informasi dan Komunikasi	7,73	5,15	6,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,72	2,80	-0,33
L	Real Estate	-0,18	2,86	1,40
M,N	Jasa Perusahaan	-5,50	2,05	10,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,41	2,57	-0,22
P	Jasa Pendidikan	0,40	0,94	2,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,13	4,15	-1,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	-2,12	3,04	4,40
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-3,44	0,14	0,57
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	0,62	2,21	2,92

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2020-2022

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022
1	2	3	4
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	4.725.573,38	5.040.197,89	5.489.654,40
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	6.990.575,57	8.452.180,10	11.015.375,28
C Industri Pengolahan/Manufacturing	1.753.195,60	1.801.663,55	2.043.818,67
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4.653,24	4.946,13	5.605,52
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	16.003,77	16.829,00	18.237,42
F Konstruksi/Construction	1.144.414,25	1.260.859,10	1.316.065,93
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1.794.792,71	1.889.780,27	2.164.466,38
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	286.403,77	311.236,64	365.197,13
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	87.778,52	92.058,41	99.846,86
J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	435.490,41	459.119,83	489.350,27
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	203.090,14	216.299,84	228.406,64
L Real Estat/Real Estate Activities	155.490,83	164.820,28	176.900,75
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	319.782,30	344.222,82	416.507,28
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ Publik Administration and Defence; Compulsory Social Security	592.995,25	607.495,25	605.513,29
P Jasa Pendidikan/Education	834.198,72	888.330,65	930.224,22
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	145.249,21	157.248,16	157.392,73
R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities	73.579,28	76.329,28	83.628,82
Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product	19.563.266,92	21.783.617,19	25.606.191,59
Produk Domestik Regional Bruto Non Migas	11.235.258,64	11.995.408,41	13.068.373,34
Produk Domestik Regional Bruto Non Pemerintah	18.970.271,68	21.176.121,94	25.000.678,30

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Tabel 2.3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)
Tahun 2020-2022

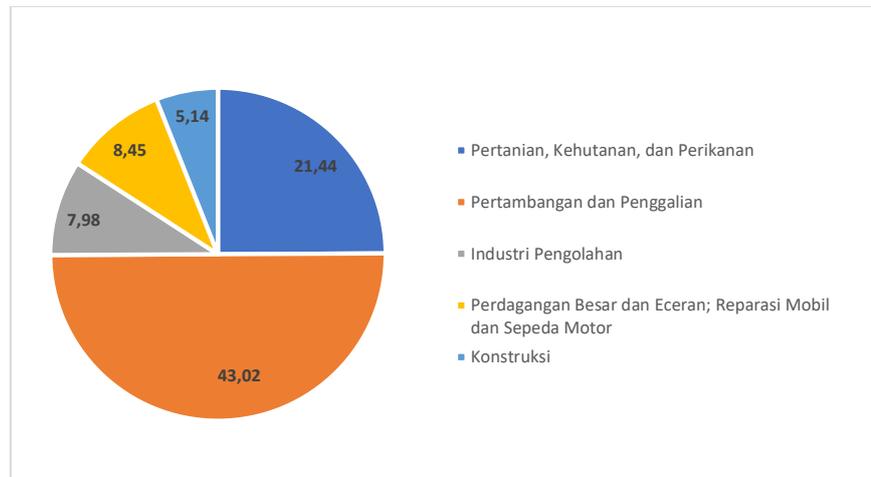
Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022
1		2	3	4
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2.823.629,11	2.827.197,80	2.897.868,01
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	9.692.842,33	9.579.062,87	9.463.668,29
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1.235.320,00	1.232.822,90	1.256.068,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	2.292,76	2.424,83	2.670,97
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	10.936,09	11.467,25	11.980,88
F	Konstruksi/Construction	800.784,46	855.831,53	854.611,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	966.229,80	990.953,59	1.039.315,29
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	182.039,97	195.210,35	213.504,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	54.504,02	56.698,38	60.589,10
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	257.938,29	271.214,59	289.806,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	126.523,33	130.063,79	129.631,75
L	Real Estat/Real Estate Activities	98.694,10	101.515,75	102.939,49
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	173.489,97	177.042,50	195.161,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ Publik Administration and Defence; Compulsory Social Security	291.126,81	298.616,42	297.964,58
P	Jasa Pendidikan/Education	498.621,70	503.289,00	515.011,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	86.591,50	90.186,99	89.026,94
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	48.418,56	49.891,68	52.087,37
Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product		17.349.982,79	17.373.490,21	17.471.905,18
Produk Domestik Regional Bruto Non Migas		6.688.322,22	6.836.305,00	7.036.151,38
Produk Domestik Regional Bruto Non Pemerintah		17.058.855,99	17.074.873,79	17.173.940,61

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dominasi struktur ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berada pada sektor pertambangan dan penggalian sekitar 43,02 persen yang mengalami kenaikan dari tahun 2021 lalu dimana pada tahun 2021 kontribusi sektor pertambangan sebesar 38,80 persen, demikian juga dengan sector Jasa Perusahaan yang mengalami peningkatan kontribusi sebesar 0,05 persen Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 lalu, namun Sebagian besar sektor yang lain mengalami penurunan pada tahun 2022 walaupun penurunannya tidak signifikan dan mendominasi, di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit dikarenakan krisis pandemi *Covid-19* yang masih terasa menghambat pergerakan geliat ekonomi, beberapa sektor mampu bertahan dan tumbuh cukup signifikan seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta sektor Industri Pengolahan. Sehingga sektor ini diharapkan akan menjadi sektor yang menjadi andalan untuk dikembangkan di masa yang akan datang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, selain sektor potensial lainnya.



Grafik 2.2
Struktur Perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2022



Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kemiskinan secara umum dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi memenuhi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kemiskinan ini akan terasa semakin mengimpit masyarakat ketika semua barang-barang kebutuhan dasar (*basic needs*) mengalami kenaikan harga.

Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi dan program penanggulangan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan negara.

Angka kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 mencapai 10,91 persen, mengalami penurunan dari Tahun 2021 sebesar 11,39 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa ada sekitar 10,91 persen penduduk Tanjung Jabung Timur masih berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan garis kemiskinan Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 sebesar Rp468.201,00 per kapita per bulan. Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
**Indikator Kemiskinan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, 2019-2022**

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	25.35	24.23	24.42	23,42
Tingkat Kemiskinan (PO) %	11.54	10.95	11.39	10,91
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.75	1.45	2.07	1,37
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0.47	0.31	0.61	0,31
Garis Kemiskinan (Ribu) (Rp/Kapita/Bulan)	374.735,00	392.778,00	406.772,00	468.201,00



2. Tantangan Pokok

Tantangan pokok yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah:

a. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Angka pengangguran masih relatif tinggi, sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

b. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi, akibat dampak dari pandemi *Covid-19* yang masih sangat terasa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga stabilitas ekonomi seharusnya dapat dipertahankan untuk mencegah dampak inflasi yang tidak terkendali dan mempengaruhi daya beli masyarakat.

3. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Pandemi *Covid-19* yang mewabah di awal Tahun 2021 dan walaupun saat ini masih sudah bisa dikendalikan, namun dampak ekonomi dari pandemi tersebut masih saja dirasakan terutama sektor ekonomi, ditambah nilai harga komoditi petani baik berupa kelapa dalam, kepala sawit serta pinang masih belum stabil, berakibat terhadap daya beli masyarakat yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup dalam, berbagai upaya Pemerintah telah dilakukan dalam mengatasi krisis ini, diantaranya memberikan berbagai kebijakan stimulus bagi dunia usaha yang berdampak secara signifikan oleh pandemi *Covid-19*.

Pada Tahun 2022, sesuai yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran, Kebijakan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan perikanan. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan dimaksud memiliki sasaran yaitu meningkatkan produksi tanaman pangan, meningkatkan produksi perkebunan, meningkatkan populasi hewan ternak, meningkatkan produksi hasil perikanan, meningkatkan infrastruktur penunjang pertanian dan perikanan, peningkatan daya saing pertanian dan perikanan melalui peningkatan kelas kelompok tani serta meningkatkan daya saing UKM/IKM sektor pertanian dan perikanan melalui proporsi produk IKM berbahan baku hasil pertanian yang berstandar.

Dengan kemampuan keuangan daerah yang relatif terbatas, maka ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga terbatas, untuk itu Pemerintah Daerah mengoptimalkan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat guna mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi mendorong untuk meningkatkan investasi dan ekspor non migas melalui penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan infrastruktur dasar, penyehatan iklim ketenagakerjaan maupun peningkatan akses koperasi, usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya pembangunan.

Berdasarkan asumsi yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, rencana target ekonomi makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.5.



Tabel 2.5
Kerangka Ekonomi Makro Pembangunan Tahun 2022

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET TAHUN BERJALAN (2021)	TARGET TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertumbuhan PDRB (%)	-3,87	1,25	1,6
2	Laju Inflasi (%)	3,09	3,20	3,35
3	Indeks Gini	0,25	0,26	0,27
4	Pendapatan Perkapita (Juta)	107,92	108,99	110,35
5	Angka Kemiskinan (%)	10,95	10,75	10,50
6	IPM	64,43	64,75	65,00

Arah kebijakan pembangunan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan visi dan misi Bupati Tahun 2016-2021 yang dilanjutkan dengan Bupati terpilih Tahun 2020-2024 sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-271 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jambi, menitik beratkan pada upaya meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata serta sektor jasa lainnya. Dalam rangka percepatan pencapaiannya maka diperlukan adanya strategi daerah seperti yang disampaikan di atas, yang kemudian akan menjadi arah kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan manusia, serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 dengan luas 5.445 Km² atau 10,2 % dari luas wilayah Provinsi Jambi, namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011–2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 27 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 km² yang terdiri dari daratan seluas 5.445 km² dan lautan/perairan seluas 3.560 km². Disamping itu memiliki panjang pantai sekitar 191 km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Wilayah perairan laut kabupaten ini merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara ke selatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang.

Keberadaannya terletak antara 0°53' Lintang Selatan sampai 1°41' Lintang Utara atau antara 103°23'-104°31' Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut China Selatan. Sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.



Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi ke dalam 11 Kecamatan, 20 Kelurahan, dan 73 Desa, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Dirinci per Kecamatan

No	Kecamatan	Kel.	Desa	Luas Kecamatan	
				Km ²	(%)
1.	Mendahara	1	8	911,15	16,73
2.	Mendahara Ulu	1	6	381,30	7,00
3.	Geragai	1	8	285,35	5,24
4.	Dendang	1	6	478,17	8,78
5.	Muara Sabak Timur	2	10	410,28	7,53
6.	Muara Sabak Barat	7	0	251,75	4,62
7.	Kuala Jambi	2	4	120,52	2,21
8.	Rantau Rasau	1	10	356,12	6,54
9.	Berbak	1	5	194,46	3,57
10.	Nipah Panjang	2	8	234,70	4,31
11.	Sadu	1	8	1.821,20	33,45
Jumlah		20	73	5.445,00	100

Sumber: Tanjung Jabung Timur Dalam Angka Tahun 2021

Topografi wilayah; dataran rendah, rawa-rawa, dengan ketinggian 0–10 meter dari permukaan laut. Jenis tanah: rawa bergambut, cocok untuk tanaman padi dan hortikultura lain; alluvial untuk hortikultura dan perkebunan; dan prozolik merah kuning (PMK) juga cocok untuk perkebunan.

Sekitar 37,45% (203.921 ha) luas daratan kabupaten ini merupakan kawasan hutan produksi, hutan lindung, tahura, dan kawasan Taman Nasional Berbak (TNB) yang luasnya mencapai 116.605 ha. Luas kawasan budidaya pertanian dan non pertanian: 340.579 ha (62,55%) sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Luas Lahan Kawasan Hutan dan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	DATA LAHAN	JUMLAH (Ha)	%
I	KAWASAN HUTAN	203.921,00	37,45
	Suaka Alam Lahan Bakau Pantai Timur	3.932,00	0,72
	Taman Nasional Berbak	116.605,00	21,42
	Tahura	2.678,00	0,49
	Hutan Lindung Gambut	24.288,00	4,46
	Hutan Produksi Tetap	55.083,00	10,12
	Hutan Produksi yang dapat di Konversi	1.335,00	0,25
II	BUDIDAYA PERTANIAN & NON PERTANIAN	340.579,00	62,55
	JUMLAH	544.500,00	100,00

Sumber: Tanjung Jabung Timur Dalam Angka Tahun 2021



2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Kebijakan anggaran berdasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau *output* dari rencana alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dititik beratkan pada :

1. Kebijakan pendapatan keuangan daerah yang diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi) dan diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi aset daerah, dan peningkatan dan perimbangan dan bagi hasil.
2. Kebijakan belanja keuangan daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dan program strategis yang memiliki dampak (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi



pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi yang dipandang dapat menggairahkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar, baik domestik maupun ekspor terus diupayakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah terutama pada sektor riil, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengupayakan dengan tidak lagi menambah beban masyarakat yang berimplikasi negatif terutama pada perdagangan lokal yang dilaksanakan pada sektor riil terutama pada pelaku ekonomi kecil yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi serta menyebabkan arus barang, jasa dan kapital dari luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi stagnan atau bahkan mungkin (dihindari) mengalirnya sejumlah modal yang tertanam di Tanjung Jabung Timur keluar daerah.

Secara umum Kebijakan Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah yang dilaksanakan melalui peningkatan Pendapatan Daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 dilaksanakan melalui upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah kabupaten yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dikelompokkan menjadi Belanja Pegawai; belanja barang; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

A. Belanja Pegawai

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran Belanja Pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
2. Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.



3. Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Belanja Pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

B. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.



3. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan.
6. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
7. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas
8. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum



13. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

14. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan karena program pemerintah, dan TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

D. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

E. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Belanja Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.



Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modagedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya.
 - c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri
- 3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

A. Belanja Bagi Hasil :

Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi



kepada pemerintah kabupaten dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan merupakan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mencukupi kebutuhan belanja daerah. Dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 terdapat kelebihan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

a. Kebijakan Pembiayaan Daerah :

a) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 diarahkan pada penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).

b) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 merupakan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja serta meningkatkan kinerja organisasi.



Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2022 untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan yang menjadi acuan untuk tahun berikutnya, dapat dilihat dari:

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;

Efektivitas evaluasi realisasi program dan kegiatan atas target kinerja hasil yang direncanakan, perlu dilakukan klasifikasi menurut urusan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa urusan.

Capaian kinerja menurut urusan Pemerintahan Daerah pada setiap SKPD pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. URUSAN WAJIB

1.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1.1. Pendidikan

Terdiri dari Dinas Pendidikan dengan Anggaran Belanja sebesar Rp281.452.347.179,00 terealisasi sebesar Rp270.207.539.659,60 atau sebesar 96,00 %.

1.1.2. Kesehatan

Terdiri dari Dinas Kesehatan dan RSUD Nurdin Hamzah dengan rincian Anggaran Belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp107.711.162.038,00 terealisasi sebesar Rp99.348.802.150,00 atau sebesar 92,24% dan Anggaran Belanja Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah sebesar Rp66.788.540.151,00 terealisasi sebesar Rp52.500.805.912 atau sebesar 78,61%.

1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Anggaran Belanja sebesar Rp229.334.549.136,00 terealisasi sebesar Rp214.853.464.088,42 atau sebesar 93,69 %.

1.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terdiri dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Anggaran sebesar Rp77.437.360.736,00 terealisasi sebesar Rp73.334.331.707,00 atau sebesar 94,70%.

1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rincian Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran sebesar Rp5.878.016.709,00 terealisasi sebesar Rp5.435.007.564,00 atau sebesar



92,46% dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.546.701.139,00 terealisasi sebesar Rp4.783.558.652,00 atau sebesar 86,24%.

1.1.6. Sosial

Terdiri dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Anggaran sebesar Rp6.045.952.522,00 terealisasi sebesar Rp5.516.082.814,00 atau sebesar 91,24%.

1.2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.2.1. Ketenagakerjaan

Terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Anggaran sebesar Rp4.915.349.232,00 terealisasi sebesar Rp4.738.577.396,00 atau sebesar 96,40%.

1.2.2. Pangan

Terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan dengan Anggaran sebesar Rp8.706.890.876,00 terealisasi sebesar Rp8.540.633.968,00 atau sebesar 98,09%.

1.2.3. Lingkungan Hidup

Terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dengan Anggaran sebesar Rp8.471.879.642,00 terealisasi sebesar Rp8.251.275.233,00 atau sebesar 97,40%.

1.2.4. Kependudukan dan Catatan Sipil

Terdiri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Anggaran sebesar Rp5.897.011.953,00 terealisasi sebesar Rp 5.584.323.763,00 atau sebesar 94,70%.

1.2.5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Anggaran sebesar Rp 7.072.886.175,00 terealisasi sebesar Rp6.606.123.226,00 atau sebesar 93,40%.

1.2.5. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Terdiri dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dengan Anggaran sebesar Rp7.850.348.430,00 terealisasi sebesar Rp7.173.097.431,00 atau sebesar 91,37%.

1.2.6. Perhubungan

Terdiri dari Dinas Perhubungan dengan Anggaran sebesar Rp7.867.647.780,00 terealisasi sebesar Rp 7.241.998.015,00 atau sebesar 92,05%.

1.2.7. Komunikasi dan Informatika

Terdiri dari Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Anggaran sebesar Rp7.274.393.493,00 terealisasi sebesar Rp7.196.693.815,00 atau sebesar 98,93%.

1.2.8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Terdiri dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan Anggaran sebesar Rp3.777.290.427,00 terealisasi



sebesar Rp3.685.523.597,00 atau sebesar 97,57%.

1.2.9. Penanaman Modal

Terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Anggaran sebesar Rp4.728.681.583,00 terealisasi sebesar Rp4.613.818.488,00 atau sebesar 97,57%.

1.2.10. Kepemudaan dan Olahraga

Terdiri dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dengan Anggaran sebesar Rp13.520.864.074,00 terealisasi sebesar Rp13.082.524.949,00 atau sebesar 96,76%.

1.2.11. Perpustakaan

Terdiri dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Anggaran sebesar Rp4.035.110.338,00 terealisasi sebesar Rp3.868.189.637,00 atau sebesar 95,86%.

2. URUSAN PILIHAN

2.1 Kelautan dan Perikanan

Terdiri dari Dinas Perikanan dengan Anggaran sebesar Rp8.431.989.167,00 terealisasi sebesar Rp8.056.929.348,00 atau sebesar 95,55%.

2.2 Pertanian

Terdiri dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan Anggaran sebesar Rp23.511.288.410,00 terealisasi sebesar Rp21.611.963.852,00 atau sebesar 91,92% dan Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Anggaran sebesar Rp10.866.326.123,00 terealisasi sebesar Rp10.198.043.166,00 atau sebesar 93,85%.

2.3 Industri

Terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Anggaran sebesar Rp7.175.954.621,00 terealisasi sebesar Rp6.857.280.054,00 atau sebesar 95,56%.

3. PENDUKUNG

3.1. Sekretariat Daerah

Terdiri dari Sekretariat Daerah dengan Anggaran sebesar Rp40.032.309.666,00 terealisasi sebesar Rp38.280.138.127,00 atau sebesar 95,62 %.

3.2. Sekretariat DPRD

Terdiri dari Sekretariat DPRD dengan Anggaran sebesar Rp45.360.752.989,00 terealisasi sebesar Rp43.549.425.128,00 atau sebesar 96,01%.



4. PENUNJANG URUSAN

4.1 Perencanaan

Terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran sebesar Rp8.222.417.600,00 terealisasi sebesar Rp7.314.060.467,00 atau sebesar 88,95%.

4.2. Keuangan

Terdiri dari Badan Keuangan Daerah dengan Anggaran sebesar Rp32.856.446.075,00 terealisasi sebesar Rp23.486.937.409,00 atau sebesar 71,48%.

4.3. Kepegawaian

Terdiri dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah dengan Anggaran sebesar Rp9.954.370.538,00 terealisasi sebesar Rp9.311.108.755,00 atau sebesar 93,54%.

4.4. Penelitian dan Pengembangan

Terdiri dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Anggaran sebesar Rp4.324.981.670,00 terealisasi sebesar Rp4.219.376.045,00 atau sebesar 97,56%.

4.5. Inspektorat

Terdiri dari Inspektorat dengan Anggaran sebesar Rp10.007.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.778.868.059,00 atau sebesar 97,72%.

5. KEWILAYAHAN

5.1 Kecamatan Muara Sabak Barat

Dengan Anggaran sebesar Rp11.019.276.513,00 terealisasi sebesar Rp 10.163.589.731,00 atau sebesar 92,23%.

5.2 Kecamatan Muara Sabak Timur

Dengan Anggaran sebesar Rp6.012.749.632,00 terealisasi sebesar Rp5.998.415.423,00 atau sebesar 99,76%.

5.3 Kecamatan Mendahara

Dengan Anggaran sebesar Rp3.468.339.274,00 terealisasi sebesar Rp3.338.968.209,00 atau sebesar 96,27%.

5.4 Kecamatan Mendahara Ulu

Dengan Anggaran sebesar Rp3.307.081.795,00 terealisasi sebesar Rp2.965.480.098,00 atau sebesar 89,67%.

5.5 Kecamatan Geragai

Dengan Anggaran sebesar Rp3.793.778.737,00 terealisasi sebesar Rp3.346.303.240,00 atau sebesar 88,21%.

5.6 Kecamatan Kuala Jambi

Dengan Anggaran sebesar Rp3.748.067.741,00 terealisasi sebesar Rp3.336.023.615,00 atau sebesar 89,01%.



5.7 Kecamatan Dendang

Dengan Anggaran sebesar Rp3.242.667.222,00 terealisasi sebesar Rp2.984.695.711,00 atau sebesar 92,04%.

5.8 Kecamatan Berbak

Dengan Anggaran sebesar Rp3.150.072.815,00 terealisasi sebesar Rp2.498.547.475,00 atau sebesar 79,32%.

5.9 Kecamatan Rantau Rasau

Dengan Anggaran sebesar Rp3.611.689.544,00 terealisasi sebesar Rp3.404.617.658,00 atau sebesar 94,27%.

5.10 Kecamatan Nipah Panjang

Dengan Anggaran sebesar Rp6.177.726.866,00 terealisasi sebesar Rp5.742.748.940,00 atau sebesar 92,96%.

5.11 Kecamatan Sadu

Dengan Anggaran sebesar Rp3.183.393.746,00 terealisasi sebesar Rp3.023.248.168,00 atau sebesar 94,97%.

6. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

6.1 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Anggaran sebesar Rp5.210.398.061,00 terealisasi sebesar Rp4.936.422.007,00 atau sebesar 94,74%.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka proses penganggaran APBD harus berdasarkan target kinerja yang terukur atau yang lebih dikenal dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja.

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan serta dalam bentuk alokasi anggaran yang akan diukur capaian kerjanya pada akhir Tahun Anggaran.

Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 dalam pencapaian target kinerja keuangan dapat dilihat pada Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana rincian pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK/ (TURUN)
1	Pendapatan	1.112.594.730.184,19	1.130.664.106.392,07	101,62	1.163.129.937.038,75	(32.465.830.646,68)
2	Belanja	1.120.982.062.418,00	1.040.965.562.750,02	92,86	903.858.662.058,18	137.106.900.691,84
3	Transfer	139.332.905.397,00	139.107.418.196,00	99,84	145.346.442.316,00	(6.239.024.120,00)
	Surplus/ (Defisit)	(147.720.237.630,81)	(49.408.874.553,95)	33,45	113.924.832.664,57	(163.333.707.218,52)
4	Penerimaan Pembiayaan	151.720.237.630,81	151.723.566.637,81	100,00	38.295.047.966,24	113.428.518.671,57
5	Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	3.486.000.000,00	87,15	499.643.000,00	2.986.357.000,00
	Pembiayaan Netto	147.720.237.630,81	148.237.566.637,81	100,35	37.795.404.966,24	110.442.161.671,57
	SILPA	0,00	98.828.692.083,86	-	151.720.237.630,81	(52.891.545.546,95)

3.1. PENDAPATAN

Target Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2022 sesuai anggaran bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah ditetapkan sebesar **Rp1.112.594.730.184,19** dengan realisasi sebesar **Rp1.130.664.106.392,07** atau sebesar **101,62%**. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2021 sebesar **Rp1.163.129.937.038,75** terjadi penurunan sebesar **Rp32.465.830.646,68**.

3.2. BELANJA

Anggaran Belanja sesuai dengan Anggaran Tahun 2022 sebesar **Rp1.120.982.062.418,00**. Dari anggaran tersebut, pada Tahun 2022 realisasi Belanja sebesar **Rp1.040.965.562.750,02** atau sebesar **92,86%**. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2021 sebesar **Rp903.858.662.058,18** terjadi kenaikan sebesar **Rp137.106.900.691,84**.



3.3. TRANSFER

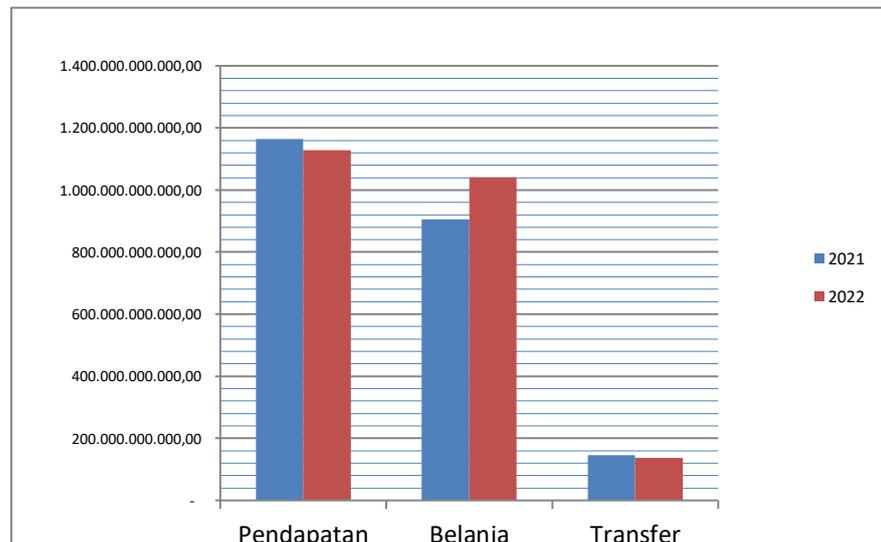
Anggaran Transfer sesuai dengan Anggaran Tahun 2022 sebesar **Rp139.332.905.397,00**. Dari target tersebut, pada Tahun 2022 direalisasikan Transfer sebesar **Rp139.107.418.196,00** atau sebesar **99,84%**. Dibandingkan dengan realisasi Transfer Tahun 2022 sebesar **Rp145.346.442.316,00** terjadi penurunan sebesar **Rp6.239.024.120,00**.

3.4. PEMBIAYAAN NETTO

Target Pembiayaan Netto Tahun 2022 pada anggaran sebesar **Rp147.720.237.630,81** dan direalisasikan sebesar **Rp148.237.566.637,81** atau sebesar **100,35%**. Dibandingkan dengan Tahun 2021 realisasi sebesar **Rp37.795.404.966,24** terdapat kenaikan sebesar **Rp110.442.161.671,57**.

Dari uraian di atas menunjukkan kinerja keuangan yang positif dimana Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja berhasil diseimbangkan, uraian lebih lanjut pada **Grafik 3.1** berikut.

Grafik 3.1
Perkembangan Pendapatan, Belanja, dan Transfer
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 dan 2021





BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau suatu organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Struktur dan pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 telah mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan mengacu pada Permendagri tersebut, Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Bupati sebagai kepala daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Permendagri tersebut di atas, pertanggungjawaban Bupati sebagai kepala daerah dalam pelaksanaan APBD adalah berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis Akuntansi, 2) Prinsip Nilai Historis, 3) Prinsip Realisasi, 4) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal, 5) Prinsip Periodisasi, 6) Prinsip Konsistensi, 7) Prinsip Pengungkapan Lengkap, 8) Prinsip Penyajian Wajar. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut.



Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau diterima SKPD atau entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap Tahun Anggaran. (Sisa perhitungan anggaran selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran).

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat Kas atau Setara Kas diterima atau dikeluarkan.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dikeluarkan.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

1. Pendapatan LRA dan Pendapatan LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.



Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak ditransfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/gubernur ke daerah jumlah hak perolehan daerah.

Dana transfer dalam penyampaiannya pada daerah sering mengalami kurang bayar atau lebih bayar, untuk hal tersebut diperlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut. Terhadap dana transfer yang telah diterima BUD, namun belum dilaksanakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang telah ditentukan, masih diperlakukan sebagai Pendapatan Transfer Provinsi/Pusat.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki hak atas pendapatan;
- b. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Independen;
- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, dan IMB langsung ditetapkan di depan.



2. Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban dan terjadinya pengeluaran kas.

Khusus Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

Koreksi atas pengeluaran Belanja (penerimaan kembali Belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran Belanja dibukukan sebagai *pengurangan Belanja* pada periode yang sama. Apabila diterima pada tahun berikutnya, koreksi atas pengeluaran Belanja dibukukan pada *Pendapatan Lain-Lain*.

3. Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan.

4. Pembiayaan

Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 Paragraf 52, Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 Paragraf 56 Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

5. Aset

Aset diakui pada saat diterima kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah, Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.



4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH DAERAH

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;



- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan - LO diakui bersamaan dengan penerimaan Kas selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan



a) Pendapatan-LO diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b) Pendapatan-LO diakui Setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau



konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO)

Pengakuan

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban
- b. Saat terjadinya konsumsi aset;
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
- b. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan. Beban bulan Desember yang belum dibayar diakui sebagai Utang Beban.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban



dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain.;
- b. Beban Non Operasional;
- c. Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan unit organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran;
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi Belanja Pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang telah terjadi di SKPD dan PPKD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK OPD;
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang pemerintah daerah, maka dalam Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan sebagai Transfer DAU dan Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer



diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.



- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

7. ASET LANCAR

a. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dan dilaporkan dalam Neraca.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

- a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengakuan

a) Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- 1) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau



- 2) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- 3) Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

b) Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

c) Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- 2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - (1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - (2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

d) Pengeluaran Kas dalam Rangka Pengeluaran Pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.

e) Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

f) Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

g) Penerimaan dan Pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak



mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan PFK yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran.

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Rincian kas dan setara kas;
- b) Kebijakan manajemen setara kas;
- c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

b. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang merupakan salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Piutang adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menerima pembayaran atau manfaat dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar



(BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a) Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
 - 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi Daerah; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- b) Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
 - 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;
- c) Transfer antar Pemerintahan, Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah;
 - 8) Piutang Kelebihan Transfer;
- d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui **pada saat penyusunan laporan keuangan** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a) **Piutang pajak dan Retribusi Daerah** diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi;
- b) **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;



- c) **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)** Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui;
- d) **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
- e) **Piutang Transfer Lainnya** diakui apabila:
 - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat;
- f) **Piutang Bagi Hasil dari Provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya;
- g) **Piutang TP/TGR.** Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan



terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - 4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- 1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten;
 - 2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
 - 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:



- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuhan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

a) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

<i>Kualitas</i>	<i>Kriteria</i>
a. Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b. Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
c. Diragukan	1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d. Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

b) Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

<i>Kualitas</i>	<i>Kriteria</i>
a. Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b. Kurang Lancar	umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c. Diragukan	umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan



d. *Macet* umur piutang lebih dari 12 bulan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a. <i>Lancar</i>	0,5 %
b. <i>Kurang Lancar</i>	10 %
c. <i>Diragukan</i>	50 %
d. <i>Macet</i>	100 %

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan didalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;



- 2) Memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas;
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 Milyar ditetapkan oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 Milyar ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Piutang tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan, piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang



perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

c. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan/harga pokok produksi/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya



perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b) **Harga pokok produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; dan
- b) Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

8. Aset Non lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset Non lancar meliputi:

a. Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi Non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;



- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 4) Investasi Non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian yang akan ditarik kembali.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

Investasi Jangka Panjang diakui ketika terjadi pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Memungkinkan Pemerintah Tanjung Jabung Timur memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*.)

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi, jurnal tersebut mencatat Investasi Jangka Panjang di Debit dan Kas di Kas Daerah di Kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah di Debit dan Estimasi Perubahan SAL di Kredit

Pengukuran

- a) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b) Investasi Non Permanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;



- 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Penilaian

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a) Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penyajian

Investasi Jangka Panjang dibagi ke dalam Investasi Non permanen dan Investasi Permanen.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;



- e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f) Perubahan pos investasi.

b. Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b) Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan Mesin;
- c) Gedung dan Bangunan;
- d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e) Aset Tetap Lainnya;
- f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan

a) Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- 7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.



Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan, bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b) Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1	Tanah	1.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	700.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	700.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	700.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	700.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-Alat Kantor	700.000,00
	- Alat-Alat Rumah Tangga	700.000,00



2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	700.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	700.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	700.000,00
2.9	Alat Keamanan	700.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	5.000.000,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000,00
4.3	Instalasi	10.000.000,00
4.4	Jaringan	10.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	200.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	1.000.000,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	- Hewan	1.500.000,00
	- Ternak	1.500.000,00
	- Tumbuhan Pohon	300.000,00
	- Tumbuhan Tanaman Hias	300.000,00
5.4	Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan dikeluarkan dari Nilai Aset.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal,



atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c) Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f) Konstruksi dalam Pengerjaan

Kebijakan perolehan konstruksi dalam pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

g) Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena



pengonsumsi potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara tahunan, dan aset tetap dianggap berumur 1 tahun apabila telah melewati tahun perolehan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai pada periode selanjutnya (satu tahun) setelah tahun perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- 1) Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kuitansi pembelian;
- 2) Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- 3) Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana;
- 4) Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Hewan Ternak, Tanaman dan Buku serta Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya. Untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset yang rusak berat, aset hilang juga tidak dilakukan penyusutan.

1. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

1) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan



perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

2) **Aset Tetap Digunakan Bersama**

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

3) **Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum**

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

4) **Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan



dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:

- (1) Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca;
- (2) Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima;
- (3) Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

5) **Aset Donasi**

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

6) **Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**



Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- (1) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- (3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- (4) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/ volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/ normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- d) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:



- 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

c. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Layaknya sebuah aset, Aset Lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan OPD.

Aset Lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a) Tagihan Jangka Panjang;
- b) Kemitraan dengan Pihak ketiga;
- c) Aset lain-lain.

Aset Lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a) Aset Tak Berwujud; dan
- b) Aset lain-lain.

Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah.



Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

c) Aset Tidak Berwujud

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud menyebutkan bahwa Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud terdiri atas:

1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak



terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Aset tidak berwujud diakui jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas;
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d) Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.



Pengukuran

a) Tagihan Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:



- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari;
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah yang direklasifikasikan kedalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi

Terhadap Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Besaran dan rincian aset lainnya;
- b) Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d) Informasi lainnya yang penting.

9. Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan,



kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinancing*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.



Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah



diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*),

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.



Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- a) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- b) Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a) **Utang Perhitungan Fihak Ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b) **Utang Bunga** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- d) **Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e) **Utang Beban**, diakui pada saat:
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f) **Utang Jangka Pendek** lainnya diakui pada saat terdapat/ timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g) **Utang kepada Fihak Ketiga** diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - 1) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - 2) Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau



- 3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h) **Utang Transfer DBH** yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i) **Kewajiban Jangka Panjang** diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
- c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya;
- d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

- a. **Utang PFK.** Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b. **Utang kepada Pihak Ketiga.** Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya,



pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

- c. **Utang Transfer** dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.
- d. **Utang Bunga** atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- e. **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. **Pendapatan Diterima Dimuka**, merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- g. **Utang Beban** merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- h. **Kewajiban Lancar Lainnya** merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;



- e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
- f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

10. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Klasifikasi

Ekuitas diklasifikasikan dalam:

- a. Ekuitas Awal,
- b. Surplus/Defisit LO, dan
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas.

Pengakuan

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun Investasi Jangka Pendek, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Dana Cadangan, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pendapatan, Biaya dan pengakuan Kewajiban.

**BAB V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Dalam bab ini diuraikan pos-pos dalam Laporan Keuangan, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. LRA menyajikan Realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan, serta perbandingannya dengan Anggaran dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2022. LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca menyajikan secara komparatif dengan mengungkapkan nilai pada akhir periode laporan maupun nilai pada akhir periode sebelumnya, yakni tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam satu periode pelaporan. LAK menjelaskan sumber, perubahan selama TA 2022, serta Saldo Kas dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk TA 2022 dengan penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut:

5.1.1. PENDAPATAN-LRA	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
	1.130.664.106.392,07	1.163.129.937.038,75

Jumlah anggaran Pendapatan TA 2022 sebesar Rp1.112.594.730.184,19 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp1.130.664.106.392,07 atau 101,62% dari anggaran, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2021 sebesar Rp1.163.129.937.038,75, turun sebesar Rp32.465.830.646,68 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.1 berikut.

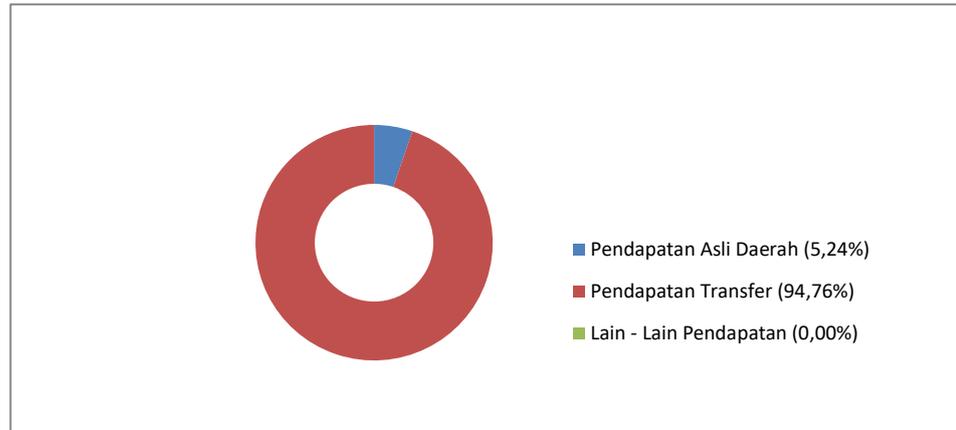
Tabel 5.1
Rincian Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / (TURUN)
1	Pendapatan Asli Daerah	66.080.770.330,19	59.208.362.622,07	89,60	81.601.471.901,75	(22.393.109.279,68)
2	Pendapatan Transfer	1.046.513.959.854,00	1.071.455.743.770,00	102,38	1.050.089.360.137,00	21.366.383.633,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00	31.439.105.000,00	(31.439.105.000,00)
	JUMLAH	1.112.594.730.184,19	1.130.664.106.392,07	101,62	1.163.129.937.038,75	(32.465.830.646,68)



Grafik 5.1



Perbandingan Komposisi Pendapatan TA 2022

Grafik 5.1 di atas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dari seluruh realisasi Pendapatan TA 2022 adalah Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.071.455.743.770,00 atau sebesar 94,76% dari seluruh realisasi Pendapatan TA 2022 sebesar Rp1.130.664.106.392,07. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp59.208.362.622,07 menyumbang porsi sebesar 5,24%.

Adapun upaya yang sudah ditempuh untuk mencapai target Pendapatan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan Reformasi Administrasi Perpajakan Daerah melalui:
 - Penyusunan Profiling Wajib Pajak Daerah yang digunakan sebagai penentuan potensi pajak daerah
 - Menggunakan system/teknologi informasi dalam pelayanan PDRD.
 - Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi seperti fungsi pengelola data, fungsi pelayanan, fungsi penagihan, fungsi pemeriksaan, dan fungsi pengawasan mengoptimalkan Aset Barang Milik Daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak, melakukan penilaian ulang atas dasar pengenaan pajak, yaitu: nilai jual objek pajak untuk PBB-P2, nilai jual pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk Pajak MBLB, nilai perolehan air tanah untuk Pajak Air Tanah, dan nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk BPHTB disesuaikan dengan potensi dan kemampuan pembayar pajak
3. Telah melaksanakan pemetaan zonasi nilai jual objek pajak khususnya terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan, dimana sampai Tahun 2022 telah dilakukan pada 2 (dua) Kecamatan yaitu di Kecamatan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam.

Secara rinci realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 adalah sebagai berikut.



5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH **TA 2022 (Rp)**
59.208.362.622,07 **TA 2021 (Rp)**
81.601.471.901,75

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp59.208.362.622,07 dari anggaran sebesar Rp66.080.770.330,19 atau 89,60%, jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 sebesar Rp81.601.471.901,75 turun sebesar Rp22.393.109.279,68 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2
Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN ASLI DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / (TURUN)
1	Pendapatan Pajak Daerah	23.314.813.984,00	23.152.323.336,80	99,30	19.776.698.793,50	3.375.624.543,30
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.954.705.840,00	1.331.496.540,00	68,12	1.836.406.808,43	(504.910.268,43)
3	Pendapatan Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.000.000.000,00	8.078.242.319,72	100,98	7.088.808.214,73	989.434.104,99
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.811.250.506,19	26.646.300.425,55	81,21	52.899.558.085,09	(26.253.257.659,54)
	JUMLAH	66.080.770.330,19	59.208.362.622,07	89,60	81.601.471.901,75	(22.393.109.279,68)

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah **TA 2022 (Rp)**
23.152.323.336,80 **TA 2021 (Rp)**
19.776.698.793,50

Pendapatan Pajak Daerah adalah pendapatan yang sifatnya memaksa dan pendapatan ini tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemungutan, penerimaan, dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Realisasi Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp23.152.323.336,80 dari anggaran sebesar Rp23.314.813.984,00 atau sebesar 99,30%, jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp19.776.698.793,50 naik sebesar Rp3.375.624.543,30. Realisasi Pajak Daerah per Objek Rekening TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per Objek Rekening
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	PAJAK DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / (TURUN)
1	Pajak Hotel	6.240.000,00	10.500.000,00	168,27	4.296.000,00	6.204.000,00
2	Pajak Restoran	3.710.933.984,00	3.771.315.169,80	101,63	3.004.177.830,50	767.137.339,30
3	Pajak Hiburan	5.200.000,00	10.373.500,00	199,49	1.300.000,00	9.073.500,00
4	Pajak Reklame	162.320.000,00	157.175.128,00	96,83	243.951.864,00	(86.776.736,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	10.692.920.000,00	11.173.457.149,00	104,49	10.544.927.678,00	628.529.471,00
6	Pajak Air Bawah Tanah	46.800.000,00	6.266.350,00	13,39	37.882.700,00	(31.616.350,00)
7	Pajak Sarang Burung Walet	114.400.000,00	71.485.000,00	62,49	93.333.000,00	(21.848.000,00)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	618.000.000,00	268.652.466,00	43,47	625.517.017,00	(356.864.551,00)
9	PBB Perdesaan dan Perkotaan	2.670.000.000,00	1.991.434.301,00	74,59	2.054.766.725,00	(63.332.424,00)
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.288.000.000,00	5.691.664.273,00	107,63	3.166.545.979,00	2.525.118.294,00
	JUMLAH	23.314.813.984,00	23.152.323.336,80	99,30	19.776.698.793,50	3.375.624.543,30



Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kontribusi terbesar pendapatan pajak daerah diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi sebesar Rp11.173.457.149,00 atau 48,26% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah sedangkan kontribusi terkecil diperoleh dari Pajak Air Bawah Tanah dengan realisasi sebesar Rp6.266.350,00 atau 0,03%.

Dari sisi capaian target, diketahui bahwa Pendapatan Pajak Hiburan memiliki tingkat pencapaian tertinggi yaitu sebesar 199,49% dari target sedangkan Pendapatan Pajak Pajak Air Bawah Tanah memiliki tingkat pencapaian terendah yaitu hanya sebesar 13,39% dari target.

Dibandingkan realisasi TA 2021 diketahui bahwa Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami nominal kenaikan tertinggi sebesar Rp2.525.118.294,00 dari sebesar Rp3.166.545.979,00 pada TA 2021 menjadi sebesar Rp5.691.664.273,00 pada TA 2022. Di sisi lain, Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami nominal penurunan tertinggi sebesar Rp356.864.551,00 dari sebesar Rp625.517.017,00 pada TA 2021 menjadi hanya sebesar Rp268.652.466,00.

Dari sepuluh jenis pajak terdapat lima jenis pajak yang mencapai target dan lima jenis pajak yang tidak mencapai target. Pajak yang mencapai target terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak BPHTB, sedangkan Pajak yang tidak mencapai target terdiri Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2, tidak tercapainya target pajak daerah dikarenakan masih pulihnya ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi *Covid-19* dan lesunya ekonomi global akibat dampak perang Rusia Ukraina, sehingga pelaksanaan penagihan di lapangan tetap berjalan dengan optimal. Kegagalan pencapaian target pajak daerah dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

- 1) Semakin menurunnya hasil produksi sarang burung walet diakibatkan semakin kurangnya populasi burung dimaksud.
- 2) Kurangnya kesadaran dari wajib pajak khususnya wajib pajak reklame terutama produk rokok yang beroperasi di wilayah Tanjung Jabung Timur serta kurangnya personal dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan pemasangan spanduk promosi dari vendor selaku wajib pajak.
- 3) Masih adanya klaim data ganda objek pajak sehingga menyulitkan dalam penagihan, sampai saat ini dilakukan pemutakhiran data objek pajak melalui sistem pemetaan secara bertahap.
- 4) Belum adanya penyesuaian terhadap tarif pajak daerah, dimana pajak daerah dimaksud harus menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, baik peraturan Gubernur maupun Peraturan Menteri ESDM.

Rincian realisasi Pajak Daerah TA 2022 diuraikan pada *Lampiran 1*.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
	1.331.496.540,00	1.836.406.808,43

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah dimana besaran pungutan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp1.331.496.540,00 dari anggaran sebesar Rp1.954.705.840,00 atau sebesar 68,12%, jika dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Daerah TA 2021 sebesar



Rp1.836.406.808,43, turun sebesar Rp504.910.268,43. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per Objek Rekening TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per Objek Rekening
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / (TURUN)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	425.880.000,00	288.667.900,00	67,78	465.100.600,00	(176.432.700,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.000.000,00	89.643.000,00	112,05	117.343.000,00	(27.700.000,00)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.460.000,00	7.775.000,00	142,40	7.600.000,00	175.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	92.440.000,00	88.800.000,00	96,06	74.900.000,00	13.900.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	312.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.113.840,00	1.050.000,00	94,27	2.400.000,00	(1.350.000,00)
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	40.000.000,00	23.121.000,00	57,80	25.695.500,00	(2.574.500,00)
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	310.000.000,00	319.433.400,00	103,04	292.377.800,00	27.055.600,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	326.360.000,00	245.486.622,00	75,22	413.823.000,00	(168.336.378,00)
10	Retribusi Tempat Pelelangan	4.368.000,00	900.000,00	20,60	5.030.000,00	(4.130.000,00)
11	Retribusi Terminal	43.680.000,00	5.150.000,00	11,79	4.975.000,00	175.000,00
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	43.680.000,00	31.200.000,00	71,43	28.855.000,00	2.345.000,00
13	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	0,00	0,00	0,00	10.108.000,00	(10.108.000,00)
14	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	27.300.000,00	35.187.998,00	128,89	32.712.948,00	2.475.050,00
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	24.024.000,00	39.675.000,00	165,15	20.805.000,00	18.870.000,00
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	218.400.000,00	155.406.620,00	71,16	334.680.960,43	(179.274.340,43)
	JUMLAH	1.954.705.840,00	1.331.496.540,00	68,12	1.836.406.808,43	(504.910.268,43)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kontribusi terbesar pendapatan retribusi daerah diperoleh dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp319.433.400,00 atau 103,04% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah, sedangkan kontribusi terkecil diperoleh dari Retribusi Tempat Pelelangan dengan realisasi sebesar Rp900.000,00 atau 0,07%. Dari sisi capaian target, diketahui bahwa Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga memiliki tingkat pencapaian tertinggi yaitu sebesar 165,15% dari target sedangkan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak terealisasi dari target yang ditetapkan.

Dibandingkan realisasi TA 2021 diketahui bahwa Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami nominal kenaikan tertinggi sebesar Rp26.780.000,00 dari sebesar Rp12.895.000,00 pada TA 2021 menjadi sebesar Rp39.675.000,00 pada TA 2022. Di sisi lain, Pendapatan Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami nominal penurunan terbesar sebesar Rp145.857.078,00 dari sebesar Rp391.343.700,00 pada TA 2021 menjadi hanya sebesar Rp245.486.622,00 pada TA 2022.

Dari 15 (lima belas) jenis retribusi daerah terdapat 5 (lima) jenis retribusi daerah yang mencapai target dan 10 (sepuluh) jenis retribusi yang tidak mencapai target. Retribusi Daerah yang mencapai target terdiri atas Retribusi Pelayanan



Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, keberhasilan pencapaian target ini dikarenakan upaya-upaya Bidang Pendapatan Daerah dan SKPD terkait, antara lain:

- 1) Semakin longgarnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), sehingga pelaku usaha di bidang hiburan dan olahraga semakin mengeliat, berdampak terhadap *event-event* hiburan dan olahraga yang diselenggarakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2) Optimalisasi pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang didukung dengan peningkatan pengawasan kepada seluruh vendor pemilik menara diseluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan cakupan wilayah kerja pelayanan kebersihan dan persampahan.

Retribusi yang tidak memenuhi target terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Pelelangan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Kegagalan pencapaian target retribusi daerah dikarenakan beberapa faktor,

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mencapai target yang diharapkan dikarenakan semakin berkurangnya pasien yang berobat dan dirawat di Pusat Pelayanan Kesehatan, serta semakin meningkatnya jumlah peserta BPJS.
2. Tidak terealisasinya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikarenakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan sekarang belum memenuhi standar akreditasi, sehingga tidak dapat menyelenggarakan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
3. Sedangkan jenis retribusi lain yang tidak mencapai target pada Tahun 2022 seperti retribusi pelayanan pasar, retribusi tempat khusus parkir, retribusi terminal dan retribusi tempat pelelangan, secara umum disebabkan masih kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat terhadap kegiatan ekonomi.

Rincian realisasi Retribusi Daerah TA 2022 diuraikan pada *Lampiran 2*.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil	TA. 2022(Rp)	TA. 2021 (Rp)
Pengelolaan Kekayaan	8.078.242.319,72	7.088.808.214,73
Daerah yang Dipisahkan		

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp 8.078.242.319,72 dari anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00 atau sebesar 100,98%, jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp7.088.808.214,73 naik sebesar Rp989.434.104,99 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari dividen atas Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Realisasi



Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5
Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
I	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	8.000.000.000,00	8.078.242.319,72	100,98	7.088.808.214,73	989.434.104,99
1	Perusahaan Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi	8.000.000.000,00	8.078.242.319,72	100,98	7.088.808.214,73	989.434.104,99
2	Perusahaan Daerah PT Bumi Samudra Perkasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	8.000.000.000,00	8.078.242.319,72	100,98	7.088.808.214,73	989.434.104,99

5.1.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah **TA. 2022(Rp)** **TA. 2021 (Rp)**
26.646.300.425,55 **52.899.558.085,09**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp26.646.300.425,55 dari anggaran sebesar Rp32.811.250.506,19 atau sebesar 81,21%, jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2021 sebesar Rp52.899.558.085,09 turun sebesar Rp26.253.257.659,54. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per Objek Rekening TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per Objek Rekening
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / (TURUN)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.345.760.000,00	1.904.707.850,00	81,20	247.536.399,00	1.657.171.451,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.985.153.932,00	(1.985.153.932,00)
3	Jasa Giro	4.462.507.851,00	3.042.720.573,09	68,18	1.768.232.423,95	1.274.488.149,14
4	Pendapatan Bunga	4.004.000.000,00	1.913.112.431,07	47,78	2.977.375.552,41	(1.064.263.121,34)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.120.000.000,00	1.768.622.320,60	56,69	1.660.693.927,21	107.928.393,39
6	Pendapatan Denda Pajak PBB	0,00	50.818.767,00	0,00	53.998.885,00	(3.180.118,00)
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	212.160.000,00	694.393.331,96	327,30	417.021.912,00	277.371.419,96
8	Pendapatan BLUD	12.000.000.000,00	10.905.463.007,83	90,88	37.535.081.808,52	(26.629.618.800,69)
9	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.666.822.655,19	6.366.462.144,00	95,49	6.254.463.245,00	111.998.899,00
	JUMLAH	32.811.250.506,19	26.646.300.425,55	81,21	52.899.558.085,09	(26.253.257.659,54)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kontribusi terbesar Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari Pendapatan BLUD dengan realisasi sebesar Rp10.905.463.007,83 atau 40,97% dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah sedangkan kontribusi terkecil diperoleh dari Pendapatan Denda Pajak PBB dengan



realisasi sebesar Rp50.818.767,00 atau 0,19%. Dari sisi capaian target, diketahui bahwa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan memiliki tingkat pencapaian tertinggi yaitu sebesar 327,30% dari target sedangkan Jasa Giro memiliki tingkat pencapaian terendah yaitu hanya sebesar 47,75% dari target.

Dibandingkan realisasi TA 2021 diketahui bahwa Pendapatan Jasa Giro Tahun 2022 mengalami nominal kenaikan tertinggi sebesar Rp1.274.488.149,14, yang mana realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.768.232.423,95 menjadi sebesar Rp3.042.720.573,09 pada TA 2022.

Di sisi lain, Pendapatan dari Pendapatan BLUD mengalami nominal penurunan tertinggi sebesar Rp26.629.618.800,69 dari sebesar Rp37.535.081.808,52 pada TA 2021 menjadi hanya sebesar Rp10.905.463.007,83 pada Tahun 2022, salah satu yang mempengaruhinya yaitu tingkat hunian pasien yang masih berkurang, karena Tahun 2021 peningkatan dipengaruhi oleh mewabahnya pandemi Covid 19.

Dari 9 (sembilan) jenis Lain-lain PAD yang Sah terdapat hanya 1 (satu) jenis pendapatan yang mencapai target, 7 (tujuh) jenis pendapatan yang tidak mencapai target, dan 1 (satu) jenis pendapatan yang tidak ditargetkan namun terealisasi, tidak tercapainya target Lain-lain PAD yang Sah disebabkan beberapa faktor :

- 1) Penurunan realisasi jasa giro Tahun 2022 dikarenakan efektivitas serapan anggaran kegiatan di masing-masing OPD;
- 2) Penurunan Pendapatan Bunga dikarenakan adanya perubahan penurunan tingkat suku bunga yang signifikan akibat kebijakan stimulus ekonomi akibat pandemi Covid-19.
- 3) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan juga tidak mencapai target, dikarenakan tidak optimalnya penjualan air minum seperti masih minimnya realisasi pendapatan dari rekening pelanggan air minum SPAM karena kurangnya pelayanan petugas.

Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2022 yang tidak mempunyai target namun terdapat realisasi yaitu Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp50.818.767,00.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 diuraikan pada **Lampiran 3**.

5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
	1.071.455.743.770,00	1.050.089.360.137,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp1.071.455.743.770,00 dari anggaran sebesar Rp1.046.513.959.854,00 atau sebesar 102,38%, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp1.050.089.360.137,00 naik sebesar Rp21.366.383.633,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN TRANSFER	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / (TURUN)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	904.548.578.405,00	927.142.786.023,00	102,50	887.564.206.912,00	39.578.579.111,00
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	80.938.218.000,00	80.938.218.000,00	100,00	106.563.874.980,00	(25.625.656.980,00)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	61.027.163.449,00	63.374.739.747,00	103,85	55.961.278.245,00	7.413.461.502,00
	JUMLAH	1.046.513.959.854,00	1.071.455.743.770,00	102,38	1.050.089.360.137,00	21.366.383.633,00



5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2022 (Rp)
927.142.786.023,00 TA 2021 (Rp)
887.564.206.912,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp927.142.786.023,00 dari anggaran sebesar Rp904.548.578.405,00 atau sebesar 102,50%, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp887.564.206.912,00 naik sebesar Rp39.578.579.111,00. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per Objek Rekening TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.8 berikut.

Tabel 5.8
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per Objek Rekening TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Bagi Hasil Pajak	66.446.167.000,00	63.706.499.143,00	95,88	100.966.517.510,00	(37.260.018.367,00)
2	Bagi Hasil bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	84.958.231.325,00	132.161.664.893,00	155,56	72.615.219.679,00	59.546.445.214,00
3	Dana Alokasi Umum	514.988.353.000,00	514.065.298.501,00	99,82	514.767.343.000,00	(702.044.499,00)
4	Dana Alokasi Khusus	238.155.827.080,00	217.209.323.486,00	91,20	199.215.126.723,00	17.994.196.763,00
	JUMLAH	904.548.578.405,00	927.142.786.023,00	102,50	887.564.206.912,00	39.578.579.111,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari empat jenis Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, yang memenuhi target hanya 1 (satu) jenis yaitu Bagi Hasil bukan Pajak/ Sumber Daya Alam. Serta terdapat 3 (tiga) jenis Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang tidak memenuhi target yaitu Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Realisasi tertinggi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang memenuhi target adalah Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebesar Rp132.161.664.893,00 dari anggaran sebesar Rp84.958.231.325,00 atau 155,56%. Keberhasilan pencapaian target Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dikarenakan adanya penyaluran kurang bayar dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 yang disalurkan pada Tahun 2022.

Selanjutnya Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang tidak memenuhi target dengan capaian terendah adalah Dana Alokasi Khusus dengan capaian hanya sebesar 91,20% atau sebesar Rp217.209.323.486,00, dikarenakan masih adanya kegiatan DAK Fisik yang tidak optimal dalam penyerapan dananya dari Rekening Kas Umum Negara. Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2022 diuraikan pada **Lampiran 4**.

Atas anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp63.706.499.143,00 dari anggaran sebesar Rp66.446.167.000,00 atau sebesar 95,88%. Jika dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2021 sebesar Rp100.966.517.510,00 turun sebesar Rp37.260.018.367,00. Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.9 berikut.



Tabel 5.9
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	DANA BAGI HASIL PAJAK	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK/ TURUN
1	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA	5.864.560.000,00	302.754.895,00	5,16	290.871.030,00	11.883.865,00
2	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau – LRA	54.728.000,00	29.655.688,00	54,19	28.010.198,00	1.645.490,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	60.377.870.000,00	56.103.024.145,00	92,92	93.179.742.009,00	(37.076.717.864,00)
4	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	149.009.000,00	7.271.064.415,00	4.879,61	7.467.894.273,00	(196.829.858,00)
	JUMLAH	66.446.167.000,00	63.706.499.143,00	95,88	100.966.517.510,00	(37.260.018.367,00)

- 2) Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2022 sebesar Rp132.161.664.893,00 dari anggaran sebesar Rp84.958.231.325,00 atau sebesar 155,56%. Jika dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2021 sebesar Rp72.615.219.679,00 naik sebesar Rp59.546.445.214,00. Anggaran dan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.10 berikut.

Tabel 5.10
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	DANA BAGI HASIL PAJAK	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK/ TURUN
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LRA	4.347.798.000,00	5.011.103.100,00	115,26	7.096.187.723,00	(2.085.084.623,00)
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) – LRA	11.684.945.000,00	19.312.235.311,00	165,27	8.147.161.450,00	11.165.073.861,00
3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LRA	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00	283.810.850,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	27.610.623.000,00	37.267.371.796,00	134,97	26.630.788.700,00	10.636.583.096,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	39.355.786.325,00	68.612.215.143,00	174,34	29.066.581.656,00	39.545.633.487,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	768.000,00	428.543,00	55,80	0,00	428.543,00
	JUMLAH	84.958.231.325,00	132.161.664.893,00	155,56	72.615.219.679,00	59.546.445.214,00

- 3) Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 sebesar Rp514.065.298.501,00 dari anggaran sebesar Rp514.988.353.000,00 atau sebesar 99,82%, jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2021 sebesar Rp514.767.343.000,00 turun sebesar Rp702.044.499,00.
- 4) Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2022 sebesar Rp217.209.323.486,00 dari anggaran sebesar Rp238.155.827.080,00 atau sebesar 91,20%, jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2021 sebesar Rp199.215.126.723,00 naik sebesar Rp17.994.196.763,00. Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.11 berikut.



Tabel 5.11
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	DANA ALOKASI KHUSUS	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	DAK Fisik Reguler	79.657.868.080,00	78.370.855.787,00	98,38	65.810.938.034,00	12.559.917.753,00
2	DAK Fisik Penugasan	37.628.872.000,00	35.688.380.918,00	94,84	43.289.645.118,00	(7.601.264.200,00)
3	DAK Fisik Afirmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DAK Non Fisik	120.869.087.000,00	103.150.086.781,00	85,34	90.114.543.571,00	13.035.543.210,00
	JUMLAH	238.155.827.080,00	217.209.323.486,00	91,20	199.215.126.723,00	17.994.196.763,00

Realisasi DAK Fisik Reguler TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp12.559.917.753,00 sedangkan Realisasi DAK Fisik Penugasan turun sebesar Rp7.601.264.200,00. Kondisi tersebut disebabkan karena mempedomani Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, dimana Alokasi DAK Fisik bidang Kesehatan dan KB hanya dialokasikan di jenis DAK Fisik Reguler sedangkan TA 2021 DAK Fisik bidang Kesehatan dan KB dialokasikan di 2 (dua) jenis DAK yaitu DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan.

Realisasi DAK Non Fisik TA 2022 meningkat sebesar Rp13.035.543.210. Hal tersebut dikarenakan kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 yang mempedomani Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dalam Lampiran V Salinan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 (V.01 s.d. V.09) mencantumkan Bantuan Operasional Sekolah merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik sedangkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dalam Lampiran V Salinan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 (V.01 s.d. V.09) mencantumkan Bantuan Operasional Sekolah tertuang pada Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Pendapatan Hibah.

Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik yang disajikan dalam tabel 5.11 termasuk salah satu di dalamnya Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri, sedangkan penerimaan Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Swasta tidak dicantumkan sebagai Pagu Anggaran maupun Realisasi Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dalam pasal 2 point b menyatakan bahwa Dana BOS Satdikmen swasta, Satdiksus swasta dan Satdikdas swasta dikelola pada APBD Provinsi.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi TKDD Tahun Anggaran 2022 Nomor 272/REKONTKDD/2022 Tanggal 29 maret 2023 realisasi BOS Satuan Pendidikan Dasar Swasta yaitu sebesar Rp811.714.000,00 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.12 berikut;



Tabel 5.12
Realisasi Penerimaan BOS Satuan Pendidikan Dasar Swasta
TA 2022

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Pagu Anggaran	Realisasi
1	SD ISLAM TERPADU NURUL HIKMAH	305.900.000,00	305.900.000,00
2	SD JARINABI	16.150.000,00	16.150.000,00
3	SD MUHAMMADIYAH	153.900.000,00	153.630.000,00
4	SMP ISLAM TERPADU NURUL HIKMAH	36.890.000,00	36.890.000,00
5	SMP JARINABI	214.200.000,00	214.200.000,00
6	SMP DARUT TAUHID	92.820.000,00	84.944.000,00
	JUMLAH TOTAL	819.860.000,00	811.714.000,00

5.1.1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	TA 2022 (Rp) 80.938.218.000,00	TA 2021 (Rp) 106.563.874.980,00
-------------------	--	---	--

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2022 sebesar Rp80.938.218.000,00 dari anggaran sebesar Rp80.938.218.000,00 atau sebesar 100,00%, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2021 sebesar Rp106.563.874.980,00 turun sebesar Rp25.625.656.980,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.13 berikut.

Tabel 5.13
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
I	Dana Penyesuaian					
1	Dana Insentif Daerah	16.457.861.000,00	16.457.861.000,00	100,00	29.915.703.000,00	(13.457.842.000,00)
2	Dana Desa	64.480.357.000,00	64.480.357.000,00	100,00	76.648.171.980,00	(12.167.814.980,00)
	JUMLAH	80.938.218.000,00	80.938.218.000,00	100,00	106.563.874.980,00	(25.625.656.980,00)

5.1.1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	TA 2022 (Rp) 63.374.739.747,00	TA 2021 (Rp) 55.961.278.245,00
-------------------	-------------------------------------	---	---

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 sebesar Rp63.374.739.747,00 dari anggaran sebesar Rp61.027.163.449,00 atau sebesar 103,85%, jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2021 sebesar Rp55.961.278.245,00 naik sebesar Rp7.413.461.502,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.14 berikut

Tabel 5.14
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
I	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	51.727.163.449,00	54.074.739.747,00	104,54	50.381.278.245,00	3.693.461.502,00
1	Bagi Hasil dari Pajak Provinsi Kendaraan Bermotor (DBH-PKB)	10.259.618.067,00	9.694.386.262,00	94,49	10.941.697.950,00	(1.247.311.688,00)
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kend. Bermotor (DBH-BBNKB)	7.229.787.779,00	9.883.897.121,00	136,71	6.722.879.617,00	3.161.017.504,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor (DBH-PBBNKB)	20.667.678.371,00	19.618.112.962,00	94,92	19.370.400.166,00	247.712.796,00



(dalam rupiah)

NO	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
4	Bagi Hasil dari Pengembalian & Pemanfaatan Air Permukaan	10.153.780,00	10.241.628,00	100,87	11.832.560,00	(1.590.932,00)
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	13.559.925.452,00	14.868.101.774,00	109,65	13.334.467.952,00	1.533.633.822,00
II	Bantuan Keuangan Desa	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	100,00	5.580.000.000,00	3.720.000.000,00
1	Bantuan Keuangan Desa	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	100,00	5.580.000.000,00	3.720.000.000,00
	JUMLAH	61.027.163.449,00	63.374.739.747,00	103,85	55.961.278.245,00	7.413.461.502,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2022 semua mencapai target yang diharapkan kecuali Bagi Hasil dari Pajak Provinsi Kendaraan Bermotor (DBH-PKB) dan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor (DBH-PBBNKB), hal ini dikarenakan perhitungan Dana Bagi Hasil Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dilakukan pada akhir triwulan IV sehingga perhitungan Dana Bagi Hasil Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi untuk triwulan IV TA 2022 belum disalurkan oleh pemerintah Provinsi pada TA 2022.

5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp)
0,00 **31.439.105.000,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00, jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 sebesar Rp31.439.105.000,00, turun sebesar Rp31.439.105.000,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.15 berikut.

Tabel 5.15
Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah berdasarkan Jenis Pendapatan TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / (TURUN)
1	Pendapatan Hibah dana BOS	0,00	0,00	0,00	31.439.105.000,00	(31.439.105.000,00)
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	31.439.105.000,00	(31.439.105.000,00)

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp)
0,00 **31.439.105.000,00**

Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2022 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah TA 2021 sebesar Rp31.439.105.000,00 turun sebesar Rp31.439.105.000,00. Hal ini dikarenakan pada APBD Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Hibah sebesar Rp31.439.105.000,00 merupakan pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 penyusunan APBD yang mempedomani Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dalam Lampiran V Salinan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 (V.01 s.d. V.09) mencamtumkan Bantuan Operasional Sekolah merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik



5.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya		<u>TA 2022 (Rp)</u>	<u>TA 2021 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2022 sebesar Rp0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%, sama jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lainnya TA 2021 sebesar Rp0,00.

5.1.2. BELANJA		<u>TA 2022 (Rp)</u>	<u>TA 2021 (Rp)</u>
		1.040.965.562.750,02	903.858.662.058,18

Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Pada TA 2022, Realisasi Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2022 sebesar Rp1.040.965.562.750,02 dari anggaran sebesar Rp1.120.982.062.418,00 atau sebesar 92,86%.

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja TA 2021 sebesar Rp903.858.662.058,18 turun sebesar Rp137.106.900.691,84. Rincian Realisasi Belanja TA 2022 per SKPD diuraikan dalam *Lampiran 5*.

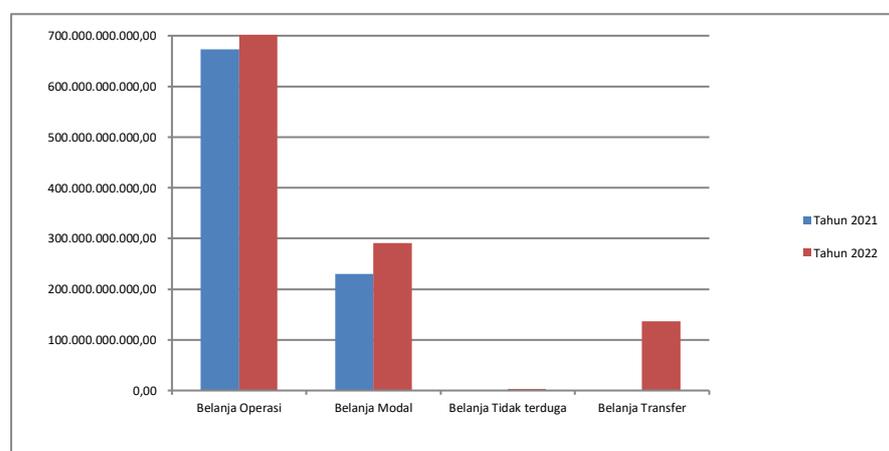
Realisasi Belanja Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2022 berdasarkan kelompok Belanja sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.16 berikut.

Tabel 5.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Kelompok Belanja TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	BELANJA	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Belanja Operasi	800.193.904.234,00	747.252.319.461,00	93,38	673.630.420.585,05	73.621.898.875,95
2	Belanja Modal	310.485.765.189,00	290.561.403.375,02	93,58	229.947.374.962,13	60.614.028.412,89
3	Belanja Tak Terduga	10.302.392.995,00	3.151.839.914,00	30,59	280.866.511,00	2.870.973.403,00
	JUMLAH	1.120.982.062.418,00	1.040.965.562.750,02	92,86	903.858.662.058,18	137.106.900.691,84

Grafik 5.2
Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah TA 2022 dan 2021



5.1.2.1. BELANJA OPERASI		<u>TA 2022 (Rp)</u>	<u>TA 2021 (Rp)</u>
		747.252.319.461,00	673.630.420.585,05

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Realisasi Belanja



Operasi TA 2022 sebesar Rp747.252.319.461,00 dari anggaran sebesar Rp800.193.904.234,00 atau sebesar 93,38%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp673.630.420.585,05 naik sebesar Rp73.621.898.875,95 Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.17 berikut.

Tabel 5.17
Realisasi Belanja Operasi Menurut Jenis Belanja
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	BELANJA OPERASI	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Belanja Pegawai	411.481.690.953,00	394.088.274.533,00	95,77	407.563.061.948,00	(13.474.787.415,00)
2	Belanja Barang	360.700.989.081,00	325.599.113.650,00	90,27	242.128.766.226,37	83.470.347.423,63
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	27.518.644.200,00	27.228.571.278,00	98,95	22.809.147.410,68	4.419.423.867,32
6	Belanja Bantuan Sosial	492.580.000,00	336.360.000,00	68,29	1.129.445.000,00	(793.085.000,00)
7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	800.193.904.234,00	747.252.319.461,00	93,38	673.630.420.585,05	73.621.898.875,95

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

TA 2022 (Rp)
394.088.274.533,00

TA 2021 (Rp)
407.563.061.948,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp394.088.274.533,00 dari anggaran sebesar Rp411.481.690.953,00 atau sebesar 95,77%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp407.563.061.948,00 turun sebesar Rp13.474.787.415,00. Rincian Realisasi Belanja Pegawai per SKPD diuraikan pada **Lampiran 6**. Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BLUD. Rincian Belanja Pegawai sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.18 berikut.

Tabel 5.18
Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	248.317.916.880,00	239.830.662.401,00	96,58	250.905.556.260,00	(11.074.893.859,00)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	72.323.198.041,00	68.969.512.040,00	95,36	66.732.076.988,00	2.237.435.052,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.143.090.682,00	70.350.868.291,00	93,62	75.109.136.911,00	(4.758.268.620,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.366.940.627,00	13.769.409.881,00	95,84	13.818.183.827,00	(48.773.946,00)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	533.836.198,00	409.021.920,00	76,62	449.867.962,00	(40.846.042,00)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	639.508.525,00	601.600.000,00	94,07	501.600.000,00	100.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	157.200.000,00	157.200.000,00	100,00	46.640.000,00	110.560.000,00
	JUMLAH	411.481.690.953,00	394.088.274.533,00	95,77	407.563.061.948,00	(13.474.787.415,00)

5.1.2.1.2. Belanja Barang

TA 2022 (Rp)
325.599.113.650,00

TA 2021 (Rp)
242.128.766.226,37

Realisasi Belanja Barang TA 2022 sebesar Rp325.599.113.650,00 dari anggaran sebesar Rp360.700.989.081,00 atau sebesar 90,27%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang TA 2021 sebesar Rp242.128.766.226,37 naik sebesar



Rp83.470.347.423,63. Realisasi Belanja Barang per Objek Rekening dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.19 berikut.

Tabel 5.19
Realisasi Belanja Barang per Objek Rekening
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	BELANJA BARANG	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
a	Belanja Barang	78.870.375.128,00	74.348.055.148,00	94,27	54.076.516.194,00	20.271.538.954,00
1	Belanja Barang Pakai Habis	74.968.785.128,00	70.449.006.682,00	93,97	54.076.516.194,00	16.372.490.488,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.901.590.000,00	3.899.048.466,00	99,93	0,00	3.899.048.466,00
b	Belanja Jasa	219.797.085.772,00	193.773.359.508,00	88,16	153.759.444.505,37	40.013.915.002,63
3	Belanja Jasa Kantor	112.789.766.939,00	104.615.025.243,00	92,75	96.794.846.088,00	7.820.179.155,00
4	Belanja Premi Asuransi	9.270.769.384,00	7.201.683.821,00	77,68	6.422.844.059,00	778.839.762,00
5	Belanja Sewa Tanah	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	7.000.000,00	21.500.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.629.858.000,00	2.187.140.767,00	83,17	1.951.112.000,00	236.028.767,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.084.899.750,00	986.410.400,00	90,92	783.280.000,00	203.130.400,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.734.692.716,00	19.337.973.032,00	93,26	13.356.352.335,70	5.981.620.696,30
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	715.950.000,00	702.704.780,00	98,15	1.307.580.000,00	(604.875.220,00)
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.582.473.147,00	4.295.696.838,00	93,74	1.318.257.000,00	2.977.439.838,00
11	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.610.078.872,00	5.520.025.122,00	98,39	1.303.759.514,00	4.216.265.608,00
12	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	44.240.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
13	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.999.933.495,00	21.872.261.055,00	95,10	22.640.381.475,67	(768.120.420,67)
14	Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.305.923.469,00	27.025.938.450,00	68,76	7.872.532.033,00	19.153.406.417,00
c	Belanja Pemeliharaan	21.104.662.569,00	19.664.510.269,00	93,18	16.925.496.198,00	2.739.014.071,00
11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.866.103.568,00	8.971.061.540,00	90,93	5.700.255.123,00	3.270.806.417,00
12	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.288.362.901,00	6.917.838.269,00	94,92	7.711.334.318,00	(793.496.049,00)
13	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.929.109.100,00	3.754.523.460,00	95,56	3.513.906.757,00	240.616.703,00
14	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	21.087.000,00	21.087.000,00	100,00	0,00	21.087.000,00
d	Belanja Perjalanan Dinas	40.928.865.612,00	37.813.188.725,00	92,39	17.367.309.329,00	20.445.879.396,00
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.523.865.612,00	37.425.832.629,00	92,36	17.367.309.329,00	20.058.523.300,00
16	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	405.000.000,00	387.356.096,00	95,64	0,00	387.356.096,00
	Jumlah	360.700.989.081,00	325.599.113.650,00	90,27	242.128.766.226,37	83.470.347.423,63

Rincian realisasi Belanja Barang TA 2022 per SKPD diuraikan pada *Lampiran 7 s.d. II*.

5.1.2.1.3. Belanja Bunga TA 2022 (Rp)
0,00 TA 2021 (Rp)
0,00

Realisasi Belanja Bunga TA 2022 sebesar Rp0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%, sama jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga TA 2021 sebesar Rp0,00.

5.1.2.1.4. Belanja Subsidi TA 2022 (Rp)
0,00 TA 2021 (Rp)
0,00

Realisasi Belanja Subsidi TA 2022 sebesar Rp0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%, sama jika dibandingkan dengan realisasi Subsidi TA 2021 sebesar Rp0,00



5.1.2.1.5. Belanja Hibah

TA 2022 (Rp)
27.228.571.278,00

TA 2021 (Rp)
22.809.147.410,68

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp27.228.571.278,00 dari anggaran sebesar Rp27.518.644.200,00 atau sebesar 98,95%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp22.809.147.410,68 naik sebesar Rp4.419.423.867,32. Rincian realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.20 berikut.

Tabel 5.20
Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK/(TURUN)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	640.000.000,00	470.000.000,00	73,44	1.792.356.310,68	(1.322.356.310,68)
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.372.194.000,00	2.318.581.000,00	97,74	35.552.000,00	2.283.029.000,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.994.410.000,00	4.989.369.000,00	99,90	5.030.700.000,00	(41.331.000,00)
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.090.500.000,00	14.060.406.227,00	99,79	13.057.990.000,00	1.002.416.227,00
5	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.620.065.000,00	4.588.739.851,00	99,32	2.091.073.900,00	2.497.665.951,00
6	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	801.475.200,00	801.475.200,00	100,00	801.475.200,00	0,00
	JUMLAH	27.518.644.200,00	27.228.571.278,00	98,95	22.809.147.410,68	4.419.423.867,32

Rincian realisasi Belanja Hibah TA 2022 per SKPD diuraikan pada *Lampiran 12*.

Selain itu terdapat Belanja Hibah yang merupakan Hibah Belanja Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Swasta dengan anggaran sebesar Rp819.860.000,00 dan realisasi sebesar Rp811.714.000,00. Mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah daerah dalam pasal 2 point b dijelaskan bahwa Pengelolaan Dana BOS Satdikmen swasta, Satdiksus swasta dan Satdikdas swasta terdapat pada APBD Provinsi, sehingga Anggaran dan realisasi hibah tersebut tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.21 berikut.

Tabel 5.21
Realisasi Belanja Hibah BOS Satuan Pendidikan Dasar Swasta TA 2022

No	Nama Sekolah	Anggaran	Realisasi
1	SD ISLAM TERPADU NURUL HIKMAH	305.900.000,00	305.900.000,00
2	SD JARINABI	16.150.000,00	16.150.000,00
3	SD MUHAMMADIYAH	153.900.000,00	153.630.000,00
4	SMP ISLAM TERPADU NURUL HIKMAH	36.890.000,00	36.890.000,00
5	SMP JARINABI	214.200.000,00	214.200.000,00
6	SMP DARUT TAUHID	92.820.000,00	84.944.000,00
	JUMLAH TOTAL	819.860.000,00	811.714.000,00



5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp)
336.360.000,00 **1.129.445.000,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 adalah sebesar Rp336.360.000,00 dari anggaran sebesar Rp492.580.000,00 atau sebesar 68,29%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp1.129.445.000,00 turun sebesar Rp793.085.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.22 berikut.

Tabel 5.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK/(TURUN)
I	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	29.400.000,00	21.400.000,00	72,79	1.000.000.000,00	(978.600.000,00)
I.1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
I.1.1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
I.2.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	29.400.000,00	21.400.000,00	72,79	0,00	21.400.000,00
I.2.1.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	29.400.000,00	21.400.000,00	72,79	0,00	21.400.000,00
II.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	463.180.000,00	314.960.000,00	68,00	129.445.000,00	185.515.000,00
II.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	463.180.000,00	314.960.000,00	68,00	129.445.000,00	185.515.000,00
II.1.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	463.180.000,00	314.960.000,00	68,00	129.445.000,00	185.515.000,00
	JUMLAH	492.580.000,00	336.360.000,00	68,29	1.129.445.000,00	(793.085.000,00)

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 per SKPD diuraikan pada *Lampiran 13*.

5.1.2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp)
0,00 **0,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 sebesar Rp0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%, sama jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp0,00.

5.1.2.2. BELANJA MODAL TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp)
290.561.403.375,02 **229.947.374.962,13**

Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan Aset Tetap. Belanja Modal meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp290.561.403.375,02 dari anggaran sebesar Rp310.485.765.189,00 atau sebesar 93,58%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp229.947.374.962,13 naik sebesar Rp60.614.028.412,89. Rincian realisasi Belanja Modal TA 2022 per SKPD diuraikan pada *Lampiran 14*.

Realisasi Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2022 menurut jenis belanja dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.23 berikut.



Tabel 5.23
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	BELANJA MODAL	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / (TURUN)
1	Belanja Tanah	731.000.000,00	636.221.000,00	87,03	433.812.965,00	202.408.035,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	34.506.457.963,00	31.447.159.821,00	91,13	51.406.129.983,00	(19.958.970.162,00)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	52.212.278.004,00	50.297.667.167,60	96,33	47.749.272.485,93	2.548.394.681,67
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	218.799.564.810,00	204.369.092.804,42	93,40	126.096.460.538,20	78.272.632.266,22
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.236.464.412,00	3.811.262.582,00	89,96	4.261.698.990,00	(450.436.408,00)
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	310.485.765.189,00	290.561.403.375,02	93,58	229.947.374.962,13	60.614.028.412,89

5.1.2.2.1. Belanja Tanah**TA 2022 (Rp)****636.221.000,00****TA 2021 (Rp)****433.812.965,00**

Realisasi Belanja Tanah TA 2022 sebesar Rp636.221.000,00 dari anggaran sebesar Rp731.000.000,00 atau sebesar 87,03%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah TA 2021 sebesar Rp433.812.965,00 naik sebesar Rp202.408.035,00. Realisasi Belanja Modal Tanah per Objek Rekening TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.24 berikut.

Tabel 5.24
Realisasi Belanja Modal Tanah per Objek Rekening TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	BELANJA MODAL TANAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	621.000.000,00	526.950.000,00	84,86	0,00	526.950.000,00
2	Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir	110.000.000,00	109.271.000,00	99,34	0,00	109.271.000,00
3	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00	373.935.840,00	(373.935.840,00)
4	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	59.877.125,00	(59.877.125,00)
	JUMLAH	731.000.000,00	636.221.000,00	87,03	433.812.965,00	202.408.035,00

Sedangkan rincian Belanja Tanah untuk TA 2022 per SKPD dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.25 berikut.

Tabel 5.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per OPD TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	82.300.000,00	(82.300.000,00)
2	Badan Keuangan Daerah	621.000.000,00	526.950.000,00	84,86	291.635.840,00	235.314.160,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	110.000.000,00	109.271.000,00	99,34	0,00	109.271.000,00
4	Kecamatan Mendahara	0,00	0,00	0,00	59.877.125,00	(59.877.125,00)
	JUMLAH	731.000.000,00	636.221.000,00	87,03	433.812.965,00	202.408.035,00

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin**TA 2022 (Rp)****31.447.159.821,00****TA 2021 (Rp)****51.406.129.983,00**

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp31.447.159.821,00 dari anggaran sebesar Rp34.506.457.963,00 atau sebesar 91,13%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar



Rp51.406.129.983,00 turun sebesar Rp19.958.970.162,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Objek Rekening TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.26 berikut.

Tabel 5.26
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Objek Rekening
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	3.563.900.000,00	(2.813.900.000,00)
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu	4.105.143.000,00	4.052.512.500,00	98,72	4.200.000,00	4.048.312.500,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.464.130.000,00	2.316.559.800,00	94,01	7.523.715.000,00	(5.207.155.200,00)
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	160.000.000,00	159.100.000,00	99,44	0,00	159.100.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	110.000.000,00	109.660.000,00	99,69	18.300.000,00	91.360.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	211.270.000,00	208.627.500,00	98,75	28.500.000,00	180.127.500,00
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	81.088.010,00	43.248.000,00	53,33	0,00	43.248.000,00
9	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	18.000.000,00
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	803.571.675,00	795.830.937,00	99,04	583.328.181,00	212.502.756,00
12	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.929.710.698,00	3.860.868.836,00	98,25	2.445.924.513,00	1.414.944.323,00
13	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.624.345.279,00	3.572.517.753,00	98,57	2.601.746.473,00	970.771.280,00
14	Belanja Modal Peralatan Komputer	723.442.115,00	714.931.289,00	98,82	614.054.750,00	100.876.539,00
15	Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	247.269.385,00	241.589.602,00	97,70	439.193.275,00	(197.603.673,00)
16	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	964.938.375,00	959.459.100,00	99,43	334.739.582,00	624.719.518,00
17	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	391.777.388,00	391.700.000,00	99,98	39.350.000,00	352.350.000,00
18	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	39.730.000,00	(39.730.000,00)
19	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	2.176.358.666,00	2.066.238.332,00	94,94	8.926.305.929,00	(6.860.067.597,00)
20	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Umum	841.200.000,00	829.256.689,00	98,58	10.796.571.237,00	(9.967.314.548,00)
21	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	75.903.044,00	70.506.300,00	92,89	215.550.000,00	(145.043.700,00)
22	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.380.000.000,00	2.379.047.500,00	99,96	8.162.267.825,00	(5.783.220.325,00)
23	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	2.600.000,00	2.200.000,00	84,62	3.890.000,00	(1.690.000,00)
24	Belanja Modal Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	1.225.000.000,00	1.222.110.000,00	99,76	29.950.000,00	1.192.160.000,00
26	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	111.860.000,00	96.815.360,00	86,55	0,00	96.815.360,00
29	Belanja Modal Sumur	75.000.000,00	74.897.850,00	99,86	105.121.032,00	(30.223.182,00)
30	Belanja Modal Alat SAR	9.000.000,00	8.950.000,00	99,44	0,00	8.950.000,00
31	Belanja Modal Pengolahan Dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	4.725.000,00	(4.725.000,00)
32	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	27.450.000,00	27.450.000,00	100,00	16.000.000,00	11.450.000,00
34	Belanja Modal Peralatan Olahraga	122.985.000,00	122.544.500,00	99,64	259.290.000,00	(136.745.500,00)
35	Belanja Modal Dana Bos.	5.022.671.318,00	3.523.787.172,00	70,16	4.588.377.315,00	(1.064.590.143,00)
36	Belanja Modal Blud Rsud	3.851.744.010,00	2.828.750.801,00	73,44	61.399.871,00	2.767.350.930,00
	JUMLAH	34.506.457.963,00	31.447.159.821,00	91,13	51.406.129.983,00	(19.958.970.162,00)

Rincian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin untuk TA 2022 diuraikan pada **Lampiran 15**.



5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 (Rp)
50.297.667.167,60 TA 2021 (Rp)
47.749.272.485,93

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp50.297.667.167,60 dari anggaran sebesar Rp52.212.278.004,00 atau sebesar 96,33%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp47.749.272.485,93 naik sebesar Rp2.548.394.681,67. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Objek Rekening TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.27 berikut.

Tabel 5.27
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Objek Rekening
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	49.976.906.450,00	48.283.918.367,60	96,61	43.838.352.063,93	4.445.566.303,67
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	191.800.000,00	95.168.300,00	49,62	1.016.993.500,00	(921.825.200,00)
4	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	285.336.000,00	(285.336.000,00)
5	Belanja Modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.895.315.564,00	1.774.503.500,00	93,63	2.608.590.922,00	(834.087.422,00)
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	148.255.990,00	144.077.000,00	97,18	0,00	144.077.000,00
	JUMLAH	52.212.278.004,00	50.297.667.167,60	96,33	47.749.272.485,93	2.548.394.681,67

Rincian realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 per SKPD diuraikan pada *Lampiran 16*.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 (Rp)
204.369.092.804,42 TA 2021 (Rp)
126.096.460.538,20

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp204.369.092.804,42 dari anggaran sebesar Rp218.799.564.810,00 atau sebesar 93,40%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp126.096.460.538,20 naik sebesar Rp78.272.632.266,22. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Objek Rekening TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.28 berikut.

Tabel 5.28
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Per Objek Rekening TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	BELANJA MODAL JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Belanja Modal Jalan	149.458.723.890,00	139.109.824.965,74	93,08	76.794.244.090,00	62.315.580.875,74
2	Belanja Modal Jembatan	23.929.732.920,00	23.610.213.639,00	98,66	17.816.021.000,00	5.794.192.639,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	25.928.887.946,20	(25.928.887.946,20)
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	886.595.809,00	(886.595.809,00)
5	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	40.521.134.000,00	36.824.415.573,68	90,88	0,00	36.824.415.573,68
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	581.346.000,00	569.860.000,00	98,02	217.672.000,00	352.188.000,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.066.038.000,00	2.026.773.700,00	98,10	733.133.000,00	1.293.640.700,00
8	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	16.000.000,00	15.302.000,00	95,64	0,00	15.302.000,00
9	Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	1.475.272.193,00	(1.475.272.193,00)



(dalam rupiah)

NO	BELANJA MODAL JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
10	Belanja Modal Instalasi Lain	20.000.000,00	19.998.426,00	99,99	0,00	19.998.426,00
11	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	(170.000.000,00)
12	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.206.590.000,00	2.192.704.500,00	99,37	2.074.634.500,00	118.070.000,00
	JUMLAH	218.799.564.810,00	204.369.092.804,42	93,40	126.096.460.538,20	78.272.632.266,22

Rincian realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 per SKPD diuraikan pada *Lampiran 17*.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
	3.811.262.582,00	4.261.698.990,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp3.811.262.582,00 dari anggaran sebesar Rp4.236.464.412,00 atau sebesar 89,96%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp4.261.698.990,00 turun sebesar Rp450.436.408,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Objek Rekening TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.29 berikut.

Tabel 5.29
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya
per Objek Rekening TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Belanja Modal Bahan Perustakaan	9.650.000,00	9.575.000,00	99,22	4.825.000,00	4.750.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	43.589.225,00	43.589.225,00	100,00	34.615.000,00	8.974.225,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.183.225.187,00	3.758.098.357,00	89,84	4.222.258.990,00	(464.160.633,00)
	JUMLAH	4.236.464.412,00	3.811.262.582,00	89,96	4.261.698.990,00	(450.436.408,00)

Rincian realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 per SKPD diuraikan pada *Lampiran 18*.

5.1.2.2.6. Belanja Aset Lainnya	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
	0,00	0,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan nilai Realisasi Belanja Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.1.2.3. BELANJA TAK TERDUGA	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
	3.151.839.914,00	280.866.511,00

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 sebesar Rp3.151.839.914,00 dari anggaran sebesar Rp10.302.392.995,00 atau sebesar 30,59%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 sebesar Rp280.866.511,00 naik sebesar Rp2.870.973.403,00. Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.30 berikut.



Tabel 5.30
Realisasi Belanja Tak Terduga
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Korban Bencana Kebakaran Dan Korban Bencana Angin Kencang (Angin Puting Bellung) Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tahun 2021 Sesuai Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 322 Tahun 2022	1.296.500.000,00	0,00	1.296.500.000,00
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pemberian Bantuan Kepada Pelaku Usaha Dan Nelayan Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sesuai Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 724 Tahun 2022	1.250.100.000,00	0,00	1.250.100.000,00
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian atas Penerimaan Ganda Pengembalian Pembayaran Gaji An. Armansyah Lubis Sesuai Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 805 Tahun 2022	23.567.200,00	0,00	23.567.200,00
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Sisa Anggaran Bantuan Keuangan Dan Bantuan Alat Berat Dan/Atau Alat Pendukung Lainnya Di Kecamatan Dalam Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 - 2021 Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sesuai Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 805 Tahun 2022	581.672.714,00	0,00	581.672.714,00
5	Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pembayaran kesalahan transfer Desa Remau Baku Tuo Kecamatan Sadu pada rekening kas daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai SK Bupati Nomor 644 tahun 2022 tanggal 17 November 2022	0,00	19.007.000,00	(19.007.000,00)
6	Pengeluaran Belanja Tidak Terduga pengembalian sisa dana bantuan keuangan Provinsi Jambi kegiatan relokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Desa Rasau Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 sesuai SK Bupati Nomor 643 Tahun 2022 tanggal 17 November 2022	0,00	66.859.511,00	(66.859.511,00)
7	Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk korban bencana abrasi (tanah longsor) dan kebakaran di Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan SK Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 385 Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022	0,00	195.000.000,00	(195.000.000,00)
	Jumlah	3.151.839.914,00	280.866.511,00	2.870.973.403,00

5.1.3. TRANSFER TA 2022 (Rp)
139.107.418.196,00 TA 2021 (Rp)
145.346.442.316,00

Realisasi Transfer TA 2022 sebesar Rp139.107.418.196,00 dari anggaran sebesar Rp139.332.905.397,00 atau sebesar 99,84%, jika dibandingkan dengan realisasi Transfer TA 2021 sebesar Rp145.346.442.316,00 turun sebesar Rp6.239.024.120,00 Realisasi Transfer TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.31 berikut.

Tabel 5.31
Realisasi Transfer TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	TRANSFER	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.331.937.048,00	2.331.937.048,00	100,00	1.930.294.681,00	401.642.367,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	137.000.968.349,00	136.775.481.148,00	99,84	143.416.147.635,00	(6.640.666.487,00)
	JUMLAH	139.332.905.397,00	139.107.418.196,00	99,84	145.346.442.316,00	(6.239.024.120,00)



5.1.3.1. TRANSFER BAGI HASIL	TA 2022 (Rp) 2.331.937.048,00	TA 2021 (Rp) 1.930.294.681,00
-------------------------------------	--	--

Realisasi Transfer Bagi Hasil TA 2022 sebesar Rp2.331.937.048,00 dari anggaran sebesar Rp2.331.937.048,00 atau sebesar 100,00%, jika dibandingkan dengan realisasi Transfer TA 2021 sebesar Rp1.930.294.681,00 naik sebesar Rp401.642.367,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.32 berikut

Tabel 5.32
Realisasi Transfer Bagi Hasil
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	TRANSFER BAGI HASIL	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Bagi Hasil Pajak	2.331.937.048,00	2.331.937.048,00	100,00	1.930.294.681,00	401.642.367,00
2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	2.331.937.048,00	2.331.937.048,00	100,00	1.930.294.681,00	401.642.367,00

5.1.3.2. TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	TA 2022 (Rp) 136.775.481.148,00	TA 2021 (Rp) 143.416.147.635,00
---	--	--

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 sebesar Rp136.775.481.148,00 dari anggaran sebesar Rp137.000.968.349,00 atau sebesar 99,84%, jika dibandingkan dengan realisasi Transfer TA 2021 sebesar Rp143.416.147.635,00 turun sebesar Rp6.640.666.487,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.33 berikut.

Tabel 5.33
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	137.000.968.349,00	136.775.481.148,00	99,84	143.416.147.635,00	(6.640.666.487,00)
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	137.000.968.349,00	136.775.481.148,00	99,84	143.416.147.635,00	(6.640.666.487,00)

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp136.775.481.148,00 terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp72.520.611.148,00 dan Dana Desa (DD) sebesar Rp64.254.870.000,00.

5.1.4. SURPLUS/DEFISIT	TA 2022 (Rp) (49.408.874.553,95)	TA 2021 (Rp) 113.924.832.664,57
-------------------------------	---	--

Berdasarkan realisasi Pendapatan, Belanja, dan Transfer maka Surplus/Defisit TA 2022 adalah defisit sebesar Rp49.408.874.553,95 dari anggaran Surplus/Defisit sebesar defisit Rp147.720.237.630,81 atau 33,45% dan jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit TA 2021 surplus sebesar Rp113.924.832.664,57 turun sebesar Rp163.333.707.218,52. Surplus/Defisit TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.34 berikut.



Tabel 5.34
Surplus/Defisit TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Pendapatan	1.112.594.730.184,19	1.130.664.106.392,07	101,62	1.163.129.937.038,75	(32.465.830.646,68)
2	Belanja	1.120.982.062.418,00	1.040.965.562.750,02	92,86	903.858.662.058,18	137.106.900.691,84
3	Transfer	139.332.905.397,00	139.107.418.196,00	99,84	145.346.442.316,00	(6.239.024.120,00)
	Surplus/(Defisit)	(147.720.237.630,81)	(49.408.874.553,95)	33,45	113.924.832.664,57	(163.333.707.218,52)

5.1.5. PEMBIAYAAN TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp)
148.237.566.637,81 **37.795.404.966,24**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Netto TA 2022 sebesar Rp148.237.566.637,81 dari anggaran sebesar Rp147.720.237.630,81 atau sebesar 100,35%, jika dibandingkan dengan Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp37.795.404.966,24 naik sebesar Rp110.442.161.671,57. Realisasi Pembiayaan untuk TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.35 berikut.

Tabel 5.35
Pembiayaan TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	PEMBIAYAAN NETTO	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Penerimaan Pembiayaan	151.720.237.630,81	151.723.566.637,81	100,00	38.295.047.966,24	113.428.518.671,57
2	Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	3.486.000.000,00	87,15	499.643.000,00	2.986.357.000,00
	JUMLAH	147.720.237.630,81	148.237.566.637,81	100,35	37.795.404.966,24	110.442.161.671,57

5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan TA 2022 (Rp) TA 2021 (Rp)
151.723.566.637,81 **38.295.047.966,24**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp151.723.566.637,81 dari anggaran sebesar Rp151.720.237.630,81 atau sebesar 100,00%, jika dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp38.295.047.966,24 naik sebesar Rp113.428.518.671,57 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.36 berikut.

Tabel 5.36
Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Penggunaan SiLPA	151.720.237.630,81	151.723.566.637,81	100,00	38.295.047.966,24	113.428.518.671,57
2	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	151.720.237.630,81	151.723.566.637,81	100,00	38.295.047.966,24	113.428.518.671,57

Penggunaan SiLPA sebesar Rp151.723.566.637,81 merupakan SiLPA TA 2021 sebesar Rp151.720.237.630,81 dan Rp3.329.007,00 merupakan Penerimaan Kembali sisa saldo dana Prolanis Tahun Anggaran 2021 yang digunakan untuk membiayai APBD Tahun 2022.



5.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
	3.486.000.000,00	499.643.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp3.486.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 atau sebesar 87,15%, jika dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp499.643.000,00 naik sebesar Rp2.986.357.000,00, merupakan tambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi TA 2022.

5.1.6. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
	98.828.692.083,86	151.720.237.630,81

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp98.828.692.083,86 jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2021 sebesar Rp151.720.237.630,81 turun sebesar Rp52.891.545.546,95. Realisasi SiLPA TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.37 berikut.

Tabel 5.37
Anggaran dan Realisasi SiLPA TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	SILPA	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Surplus (Defisit)	(147.720.237.630,81)	(49.408.874.553,95)	33,45	113.924.832.664,57	(163.333.707.218,52)
2	Pembiayaan Netto	147.720.237.630,81	148.237.566.637,81	100,35	37.795.404.966,24	110.442.161.671,57
	JUMLAH	0,00	98.828.692.083,86	0,00	151.720.237.630,81	(52.891.545.546,95)

SiLPA TA 2022 sebesar Rp98.828.692.083,86 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.38 berikut:

Tabel 5.38
Rincian SiLPA TA 2022

(dalam rupiah)

No	Rincian SiLPA	Nilai (Rp)
I	Dana Mengikat (Earmarked)	
1	Sisa Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri	172.632,00
2	Sisa Kas di BLUD RSUD Nurdin Hamzah	12.219.935.040,80
3	Sisa Dana JKN di Bendahara FKTP	751.839.503,64
	Jumlah Dana Mengikat (Earmarked)	12.971.947.176,44
II	Dana Mengikat di BUD	
	a. Sisa Dana DAK	7.303.593.929,00
	b. Sisa Dana Perimbangan Lainnya (DID)	94.867.979,00
	c. Sisa Dana BOS (Sisa Dana BOS Sekolah yang Regrouping)	1.423.600,00
	d. Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/Kel (2017 s/d 2022)	2.025.367.000,00
	e. UYHD Dana Desa Tahun 2020 (salah setor)	5.945.587,50
	f. Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi	0,00
	Jumlah Dana Mengikat	9.431.198.095,50
III	Dana Tidak Mengikat	
	a. Sisa Dana DAU	21.311.389.485,83
	b. Over Target Pendapatan	55.114.157.326,09
	c. Pencairan Deposito	0,00
	d. Dana Tidak Mengikat di Bendahara Penerimaan	0,00
	e. Dana Tidak Mengikat di Bendahara Pengeluaran	0,00
	Jumlah Dana Tidak Mengikat	76.425.546.811,92
	Jumlah SiLPA	98.828.692.083,86



5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA), Koreksi Kesalahan, dan SAL Akhir. LPSAL dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	31-12-2022 (Rp) 151.720.237.630,81	31-12-2021 (Rp) 38.295.149.755,44
---	---	--

SAL awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

5.2.2. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	31-12-2022 (Rp) 151.723.566.637,81	31-12-2021 (Rp) 38.295.047.966,24
---	---	--

Merupakan SAL yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp151.720.237.630,81 merupakan penggunaan SiLPA TA 2021 pada TA 2022 dan Penerimaan Pembiayaan Sebesar Rp3.329.007,00 merupakan Penerimaan Kembali sisa saldo dana Prolanis Tahun Anggaran 2021 yang pada tahun sebelumnya tidak tercatat sebagai saldo Kas di FKTP.

5.2.3. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	31-12-2022 (Rp) 98.828.692.083,86	31-12-2021 (Rp) 151.720.237.630,81
---	--	---

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja LRA, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp98.828.692.083,86 merupakan selisih antara:

a. Surplus/(Defisit)	Rp(49.408.874.553,95)
b. Pembiayaan Netto	<u>Rp148.237.566.637,81</u>
SiLPA Tahun berjalan	Rp98.828.692.083,86

5.2.4. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	31-12-2022 (Rp) 3.329.007,00	31-12-2021 (Rp) 101.789,20
--	---	---

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya, yaitu Sisa saldo kas di FKTP yang merupakan sisa dana kegiatan Prolanis Tahun Anggaran 2021.

5.2.5. LAIN-LAIN	31-12-2022 (Rp) 0,00	31-12-2021 (Rp) 0,00
-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Untuk Tahun 2022 tidak ada transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL.



5.2.6. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
	98.828.692.083,86	151.720.237.630,81

SAL Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp98.828.692.083,86. SAL Akhir Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel:

Tabel 5.39
Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	151.720.237.630,81	38.295.149.755,44
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	151.723.566.637,81	38.295.047.966,24
Saldo Anggaran Lebih Awal	(3.329.007,00)	101.789,20
Pembiayaan Tahun Berjalan		
Pendapatan	1.130.664.106.392,07	1.163.129.937.038,75
Belanja + Transfer	1.180.072.980.946,02	1.049.205.104.374,18
Surplus / Defisit	(49.408.874.553,95)	113.924.832.664,57
Penerimaan Pembiayaan	151.723.566.637,81	38.295.047.966,24
Pengeluaran Pembiayaan	3.486.000.000,00	499.643.000,00
Pembiayaan Netto	148.237.566.637,81	37.795.404.966,24
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	98.825.363.076,86	151.720.339.420,01
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	3.329.007,00	(101.789,20)
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	98.828.692.083,86	151.720.237.630,81

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan Pos-Pos Neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening Neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan Pos-Pos Neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1. ASET	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
	2.227.797.223.982,27	2.247.506.897.336,15

Aset dapat diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Nilai Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.227.797.223.982,27 jika dibandingkan dengan nilai Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.247.506.897.336,15 turun sebesar Rp19.709.673.353,88 Aset per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.40 berikut.

Tabel 5.40
Aset Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	ASET	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK / (TURUN)
1	Aset Lancar	154.564.120.471,16	186.825.226.594,70	(32.261.106.123,54)
2	Investasi Jangka Panjang	50.000.000.000,00	46.514.000.000,00	3.486.000.000,00
3	Aset Tetap	1.915.131.434.619,89	1.921.351.603.726,23	(6.220.169.106,34)
4	Aset Lainnya	108.101.668.891,22	92.816.067.015,22	15.285.601.876,00
	JUMLAH	2.227.797.223.982,27	2.247.506.897.336,15	(19.709.673.353,88)



Grafik 5.3
Perbandingan Komposisi Aset Tahun 2022 dan 2021



Berdasarkan rincian pada Tabel 5.38 dan Grafik 5.3 di atas terdapat penurunan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2022 sebesar Rp19.709.673.353,88 Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh :

1. Berkurangnya nilai Aset Lancar, baik berupa kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Dana BOS dan Kas di BLUD dampak dari tidak optimalnya realisasi anggaran dan efektivitas kegiatan;
2. Peningkatan nilai Penyisihan Piutang akibat naiknya Jumlah piutang TA 2022 dan piutang tahun sebelumnya yang belum tertagih sehingga sesuai usia piutang maka nilai penyisihannya/perkiraan tidak tertagihnya ikut meningkat. Khususnya untuk piutang PBB-P2 dan Piutang dari Penjualan Air pada UPTD SPAM;

Penjelasan Aset Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

5.3.1.1. Aset Lancar	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
	154.564.120.471,16	186.825.226.594,70

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas serta Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp154.564.120.471,16. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp186.825.226.594,70 turun sebesar Rp32.261.106.123,54. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.41 berikut.

Tabel 5.41
Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK/ (TURUN)
1	Kas dan Setara Kas	98.828.692.083,86	151.814.150.625,81	(52.985.458.541,95)
2	Piutang Pendapatan	39.292.344.065,72	22.778.862.718,72	16.513.481.347,00
3	Piutang Lainnya	953.309.599,00	981.069.599,00	(27.760.000,00)
4	Penyisihan Piutang	(3.317.040.380,92)	(2.509.030.754,38)	(808.009.626,54)
5	Beban Dibayar Dimuka	240.420.211,81	280.034.296,33	(39.614.084,52)
6	Persediaan	18.566.394.891,69	13.480.140.109,22	5.086.254.782,47
	Jumlah	154.564.120.471,16	186.825.226.594,70	(32.261.106.123,54)



5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas	<u>31-12-2022 (Rp)</u>	<u>31-12-2021 (Rp)</u>
	98.828.692.083,86	151.814.150.625,81

Kas dan Setara Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, dan Kas di BLUD. Nilai Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp98.828.692.083,86, jika dibandingkan dengan nilai Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp151.814.150.625,81 turun sebesar Rp52.985.458.541,95. Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.42 berikut.

Tabel 5.42
Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK/ (TURUN)
1	Kas di Kas Daerah	85.856.744.907,42	118.887.935.575,20	(33.031.190.667,78)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	902.094.167,00	(902.094.167,00)
3	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	93.912.995,00	(93.912.995,00)
4	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.075.000,00	(4.075.000,00)
5	Kas di Kas FKTP-JKN	751.839.503,64	446.342.210,64	305.497.293,00
6	Kas di Bendahara BOS	172.632,00	9.352.394,00	(9.179.762,00)
7	Kas di BLUD	12.219.935.040,80	31.470.438.283,97	(19.250.503.243,17)
8	Setara Kas (Deposito On Call)	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	98.828.692.083,86	151.814.150.625,81	(52.985.458.541,95)

5.3.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah	<u>31-12-2022 (Rp)</u>	<u>31-12-2021 (Rp)</u>
	85.856.744.907,42	118.887.935.575,20

Nilai Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp85.856.744.907,42 jika dibandingkan dengan nilai Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp118.887.935.575,20 turun sebesar Rp33.031.190.667,78.

Nilai Kas di Kas Daerah tersebut ditempatkan pada Bank Jambi Cabang Muara Sabak yang ditunjuk sebagai bank tempat menyimpan uang Kas Daerah. Kas di Saldo kas daerah per 31 Desember 2022 yang tersimpan pada rekening giro BUD pada Bank Jambi Nomor Rekening 611500025 sebesar Rp85.856.744.907,42 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.43 berikut.

Tabel 5.43
Rincian Kas Daerah pada Bank Jambi Nomor Rekening 611500025

(dalam rupiah)

No	Rincian SiLPA	Nilai (Rp)
I	Dana Mengikat di BUD	
	a. Sisa Dana DAK	7.303.593.929,00
	b. Sisa Dana Perimbangan Lainnya (DID)	94.867.979,00
	c. Dana BOS (Sisa Dana BOS sekolah yang regrouping)	1.423.600,00
	d. Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/Kel (2017 s/d 2022)	2.025.367.000,00
	e. UYHD Dana Desa Tahun 2020 (salah setor)	5.945.587,50
	f. Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi	0,00
	Jumlah Dana Mengikat	9.431.198.095,50
II	Dana Tidak Mengikat	
	a. Sisa Dana DAU	21.311.389.485,83
	b. Over Target Pendapatan	55.114.157.326,09



(dalam rupiah)

No	Rincian SiLPA	Nilai (Rp)
	c. Pencairan Deposito	0,00
	d. Dana Tidak Mengikat di Bendahara Penerimaan	0,00
	e. Dana Tidak Mengikat di Bendahara Pengeluaran	0,00
	Jumlah Dana Tidak Mengikat	76.425.546.811,92
	Jumlah Kas Rekening Giro 611500025	85.856.744.907,42

Kas di Bendahara BOS yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.423.600,00 ini merupakan sisa saldo di Sekolah Dasar Negeri yang mengalami *Regrouping* yang terdiri dari SDN 067 senilai Rp51.500,00, SDN 159 senilai Rp33.100,00 dan dari SDN 161 senilai Rp1.339.000,00.

Pada *printout* Rekening Koran per 31 Desember 2022 Jumlah Kas Rekening Giro 611500025 sebesar Rp 85.857.393.601,92 terdapat selisih sebesar Rp 648.694,50 yang merupakan jumlah komponen *Reconciling Items* terkait kurang bayar dan lebih bayar SP2D oleh Bank Jambi selaku pengelola rekening Giro 611500025, dan kesalahan Pencatatan Transaksi Bank dikarenakan terjadi debet dari Kas Daerah Rekening 611500025 sebesar Rp51.500,00 pada Tanggal 1 april 2022 dikarenakan kesalahan Pencatatan Transaksi oleh Bank Jambi selaku Bank Pengelola Rekening Kas Daerah. Namun per Tanggal 13 Maret 2023 Setoran SDN 067 senilai Rp51.500,00 tersebut telah di kredit Kembali ke rekening Kas Daerah. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan dalam Tabel 5.44 berikut.

Tabel 5.44
Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK / TURUN
I	Kas di Bendahara Umum Daerah			
1.	Rekening Bank			
	RKUD Nomor Rekening: 611500025	85.857.393.601,92	118.888.687.269,20	(33.031.293.667,28)
	Jumlah Rekening Bank	85.857.393.601,92	118.888.687.269,20	(33.031.293.667,28)
2.	Reconciling Items			
a	Bank kurang bayar SP2D			
1)	Samisake Beasiswa Kec.	(750.000,00)	(750.000,00)	0,00
2)	Dinas Ketahanan Pangan CV Rahmat Jaya Mandiri	(1.000,00)	(1.000,00)	0,00
3)	BPPD TKD (SP2D No.700/LS/2017)	(450,00)	(450,00)	0,00
4)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang CV Intisari Teknik Pratama	(270,00)	(270,00)	0,00
5)	Dinas Pekerjaan Umum Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Paket OP Bidang SDA Berdasarkan SPK No. 050/87/SPK/PWS/SDA/DPUPR-TJT/2022 Tgl. 02-11-2022 An. CV. PRATAMA KONSULTAN SP2D No 4311/LS/2022 Tanggal 27 Desember 2022	(0,50)	0,00	(0,50)
b	Bank lebih bayar SP2D			
1)	PPKD lebih posting dana ADD	4,00	4,00	0,00
2)	Kec. Mendahara (gaji)	13,00	13,00	0,00
3)	RSU (PT Trimitra Pratama Mulia Mandiri)	9,00	9,00	0,00
c	Kesalahan Pencatatan Transaksi Bank			



(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK / TURUN
1)	Penyetoran Kas BOS SDN 67 /X/ Lambur Tanggal 1 april 2022	51.500,00	0,00	51.500,00
2)	Bank Mendebet Rek Kasda 611500025 Tanggal 1 april 2022	51.500,00	0,00	51.500,00
	Jumlah Reconciling Items	(648.694,50)	(751.694,00)	102.999,50
3.	Setara Kas (Deposito On Call)	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KAS DI KAS DAERAH (I+II+III+IV)	85.856.744.907,42	118.887.935.575,20	(33.031.190.667,78)

5.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara 31-12-2022 (Rp) 31-12-2021 (Rp)
Pengeluaran **0,00** **902.094.167,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa Uang Persediaan (UP) SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp902.094.167,00 turun sebesar Rp902.094.167,00. Hal ini dikarenakan tertibnya pengelolaan kas akhir Tahun pada SKPD sehingga per 31 Desember 2022 tidak lagi terdapat sisa kas di Rekening Bank maupun kas tunai di Bendahara pengeluaran OPD.

5.3.1.1.1.3. Kas Lainnya di Bendahara 31-12-2022 (Rp) 31-12-2021 (Rp)
Pengeluaran **0,00** **93.912.995,00**

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran adalah Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD berupa pajak yang belum disetorkan/dipindahbukukan pihak Bank ke Kas Negara maupun Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, dibandingkan dengan nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp93.912.995,00 atau turun Rp93.912.995,00. Hal ini dikarenakan tertibnya pengelolaan kas akhir Tahun pada SKPD sehingga per 31 Desember 2022 tidak lagi terdapat sisa kas lainnya di Rekening Bank maupun kas lainnya tunai di Bendahara pengeluaran OPD.

5.3.1.1.1.4. Kas di Bendahara 31-12-2021 (Rp) 31-12-2021 (Rp)
Penerimaan **0,00** **4.075.000,00**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pada SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2022. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.075.000,00 jika dibandingkan dengan nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.075.000,00. Hal ini dikarenakan tertibnya pengelolaan kas akhir Tahun pada SKPD sehingga per 31 Desember 2022 tidak lagi terdapat sisa kas di Rekening Bank maupun kas tunai di Bendahara Penerimaan OPD.

5.3.1.1.1.5. Kas di Kas FKTP-JKN 31-12-2022 (Rp) 31-12-2021 (Rp)
751.839.503,64 **446.342.210,64**

Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo kas yang terdapat pada bendahara dana Kapitasi JKN dan dana kegiatan PROLANIS di Rekening Giro bank yang dikelola oleh masing-masing Puskesmas, Terdapat 17 Puskesmas dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saldo kas di Bendahara



FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp751.839.503,64 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp446.342.210,64, mengalami Kenaikan sebesar Rp305.497.293,00 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.45 berikut

Tabel 5.45
Saldo Kas di Bendahara FKTP

(dalam rupiah)

NO	NAMA PUSKESMAS	SILPA 2021		PENERIMAAN 2022		PENGELUARAN 2022		SALDO AKHIR		
		JKN	PROLANIS	JKN	PROLANIS	PROLANIS	JKN	PROLANIS	JKN	JUMLAH
1	MUARA SABAK BARAT	77.877.510,00	216.393,00	521.703.947,00	0,00	0,00	498.395.461,00	216.393,00	101.185.996,00	101.402.389,00
2	SIMPANG PANDAN	55.237.717,12	13.395,00	771.721.888,00	918.100,00	0,00	660.160.091,00	931.495,00	166.799.514,12	167.731.009,12
3	SIMPANG TUAN	24.750.574,00	1.183.500,00	549.113.951,00	0,00	0,00	527.969.801,00	1.183.500,00	45.894.724,00	47.078.224,00
4	MUARA SABAK TIMUR	43.425.314,00	49.385,00	402.426.726,00	11.017.400,00	5.794.300,00	379.111.641,00	5.272.485,00	66.740.399,00	72.012.884,00
5	SIMBUR NAIK	576.965,00	0,00	164.775.235,00	0,00	0,00	157.881.004,00	0,00	7.471.196,00	7.471.196,00
6	LAMBUR	9.466.999,52	0,00	239.292.201,00	0,00	0,00	230.988.600,00	0,00	17.770.600,52	17.770.600,52
7	KAMPUNG LAUT	16.215.360,00	0,00	419.110.665,00	0,00	0,00	403.568.919,00	0,00	31.757.106,00	31.757.106,00
8	DENDANG	30.937.298,00	18.687,00	445.883.059,00	392.100,00	392.100,00	435.493.079,00	18.687,00	41.327.278,00	41.345.965,00
9	RANTAU RASAU	63.050.830,00	28.473,00	681.186.855,00	5.358.200,00	5.357.000,00	676.504.091,00	29.673,00	67.733.594,00	67.763.267,00
10	SUNGAI TERING	8.073.895,00	620.805,00	112.317.500,00	0,00	0,00	115.656.174,00	620.805,00	4.735.221,00	5.356.026,00
11	NIPAH PANJANG	38.791.877,00	76.853,00	609.166.670,00	9.614.500,00	9.614.500,00	559.190.955,00	76.853,00	88.767.592,00	88.844.445,00
12	MENDAHARA	1.383.400,00	0,00	668.127.400,00	6.992.400,00	6.992.400,00	661.145.291,00	0,00	8.365.509,00	8.365.509,00
13	PANGKAL DURI	1.794.495,00	0,00	138.711.705,00	0,00	0,00	104.943.251,00	0,00	35.562.949,00	35.562.949,00
14	SIMPANG BERBAK	28.034.655,00	0,00	322.128.220,00	0,00	0,00	349.649.346,00	0,00	513.529,00	513.529,00
15	SUNGAI LOKAN	1.181.350,00	0,00	82.717.850,00	0,00	0,00	78.548.000,00	0,00	5.351.200,00	5.351.200,00
16	SUNGAI JAMBAT	39.342.525,00	0,00	84.100.834,00	0,00	0,00	94.881.254,00	0,00	28.562.105,00	28.562.105,00
17	AIR HITAM LAUT	6.203.504,00	1.119.458,00	119.684.738,00	0,00	0,00	102.056.600,00	1.119.458,00	23.831.642,00	24.951.100,00
TOTAL		446.344.268,64	3.326.949,00	6.332.169.444,00	34.292.700,00	28.150.300,00	6.036.143.558,00	9.469.349,00	742.370.154,64	751.839.503,64

5.3.1.1.1.5. Kas di Bendahara BOS

31-12-2022 (Rp)
172.632,00

31-12-2021 (Rp)
9.352.394,00

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp172.632,00 turun sebesar Rp9.179.762,00 jika dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.352.394,00. Kas di Bendahara BOS ini merupakan Kas di Bendahara BOS satuan Pendidikan Negeri TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.46 berikut.

Tabel 5.46
Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo per 31 Des 2021	Pendapatan BOS 2022	Belanja BOS 2022	Belanja Silpa 2021	Setor Kasda	Saldo per 31 Des 2022
1	Sekolah Dasar Negeri	2.979.598,00	21.390.087.974,00	21.389.915.374,00	1.555.998,00	1.423.600,00	172.600,00
2	Sekolah Menengah Pertama Negeri	6.372.796,00	7.756.302.448,00	7.756.302.416,00	6.372.796,00	0,00	32,00
Jumlah		9.352.394,00	29.146.390.422,00	29.146.217.790,00	7.928.794,00	1.423.600,00	172.632,00

Saldo Kas Dibendahara BOS Per 31 Desember 2022 Terdapat Pada SD Negeri 085x Sungai Jambat Senilai Rp75.600,00, SD Negeri 141x Rantau Makmur Senilai Rp96.976,00, SD Negeri 179x Nipah Panjang II Senilai Rp24,00 Dan Smp Negeri 30 Senilai Rp32,00, berupa Saldo Kas Tunai Di Bendahara BOS.



5.3.1.1.1.5. Kas di BLUD 31-12-2022 (Rp)
12.219.935.040,80 31-12-2021 (Rp)
31.470.438.283,97

Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.219.935.040,80 turun sebesar Rp19.250.503.243,17 jika dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.470.438.283,97. Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.47 berikut.

Tabel 5.47
Rincian Mutasi Kas di BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Saldo per 31 Des 2021	31.470.438.283,97
2	Pendapatan BLUD	10.905.463.007,83
3	Belanja BLUD	30.155.966.251,00
A	Belanja Pegawai BLUD	157.200.000,00
B	Belanja Barang BLUD	27.025.938.450,00
C	Belanja Modal BLUD	2.972.827.801,00
4	Saldo per 31 Des 2022 (1+2-3)	12.219.935.040,80

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 tersebut terdapat di rekening BLUD pada Bank Jambi Cabang Muara Sabak Nomor 3001568913.

5.3.1.1.1.7. Setara Kas 31-12-2022 (Rp)
0,00 31-12-2021 (Rp)
0,00

Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan nilai Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.2. Piutang Pendapatan 31-12-2022 (Rp)
39.292.344.065,72 31-12-2021 (Rp)
22.778.862.718,72

Piutang Pendapatan adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menerima pembayaran atau manfaat dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Nilai Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.292.344.065,72 jika dibandingkan dengan Nilai Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.778.862.718,72 naik sebesar Rp16.513.481.347,00. Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.48 berikut.

Tabel 5.48
Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	PIUTANG PENDAPATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK / (TURUN)
1.	Piutang Pajak	5.156.602.744,00	4.211.897.439,00	944.705.305,00
2.	Piutang Retribusi	18.316.188,00	18.316.188,00	0,00
3.	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	8.343.002.417,00	8.078.242.319,72	264.760.097,28
4.	Piutang Dana Bagi Hasil	24.165.647.810,00	9.645.344.331,00	14.520.303.479,00
5.	Piutang Lain-lain	1.608.774.906,72	825.062.441,00	783.712.465,72
	Jumlah	39.292.344.065,72	22.778.862.718,72	16.513.481.347,00



5.3.1.1.2.1. Piutang Pajak 31-12-2022 (Rp)
5.156.602.744,00 31-12-2021 (Rp)
4.211.897.439,00

Piutang Pajak merupakan Pajak Daerah yang telah ditetapkan yang belum dibayar/disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2022. Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.156.602.744,00 jika dibandingkan dengan Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.211.897.439,00 naik sebesar Rp944.705.305,00. Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.49 berikut.

Tabel 5.49
Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	PIUTANG PAJAK	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK / (TURUN)
1.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ PLN)	962.003.842,00	1.036.466.689,00	(74.462.847,00)
2.	Pajak PBB	4.194.598.902,00	3.175.430.750,00	1.019.168.152,00
	JUMLAH	5.156.602.744,00	4.211.897.439,00	944.705.305,00

Mutasi Piutang Pajak Tahun 2021 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.50 berikut.

Tabel 5.50
Mutasi Piutang Pajak Tahun 2021 s.d. 2022

(dalam rupiah)

No	JENIS PIUTANG PAJAK	SALDO PER 2021	PELUNASAN DI TA 2022	SISA PIUTANG 2021	PENAMBAHAN DI TA 2022	SALDO PER 31-12-2022
1.	Pajak Penerangan Jalan	1.036.466.689,00	1.036.466.689,00	0,00	962.003.842,00	962.003.842,00
2.	Pajak PBB	3.175.430.750,00	80.618.902,00	3.094.811.848,00	1.099.787.054,00	4.194.598.902,00
	JUMLAH	4.211.897.439,00	1.117.085.591,00	3.094.811.848,00	2.061.790.896,00	5.156.602.744,00

5.3.1.1.2.2. Piutang Retribusi 31-12-2022 (Rp)
18.316.188,00 31-12-2021 (Rp)
18.316.188,00

Piutang Retribusi merupakan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan tetapi belum dibayar/disetor ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2022. Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.316.188,00 sama jika dibandingkan dengan Nilai Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.316.188,00 Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.51 berikut.

Tabel 5.51
Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	PIUTANG RETRIBUSI	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK / (TURUN)
1.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.316.188,00	18.316.188,00	0,00
	JUMLAH	18.316.188,00	18.316.188,00	0,00

Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.316.188,00 pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan ketetapan penerimaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2



Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Piutang Retribusi sebesar Rp18.316.188,00 tersebut merupakan piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang kewenangannya masih pada Dinas Perhubungan sejak tahun 2012. Terkait dengan piutang yang tercatat terus menerus pada laporan keuangan tersebut sesuai dengan Pasal 137 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 berbunyi “hak melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi. Berkaitan dengan ketentuan di atas, maka akan segera ditindaklanjuti dengan penghapusan piutang sesuai mekanisme yang berlaku.

5.3.1.1.2.3. Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
	8.343.002.417,00	8.078.242.319,72

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD merupakan pembagian Dividen atas Penyertaan Modal pada Bank Jambi. Nilai Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.343.002.417,00, jika dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.078.242.319,72, naik sebesar Rp264.760.097,28.

5.3.1.1.2.4. Piutang Dana Bagi Hasil	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
	24.165.647.810,00	9.645.344.331,00

Nilai Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.165.647.810,00, jika dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.645.344.331,00, naik sebesar Rp14.520.303.479,00. Nilai Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.52 berikut.

Tabel 5.52
Rincian Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Dana Bagi Hasil	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	NAIK/ (TURUN)
	Piutang DBH Pemerintah Provinsi			
1	DBH dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.501.493.752,00	1.755.445.875,00	1.746.047.877,00
2	DBH dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.836.986.825,00	1.885.238.932,00	951.747.893,00
3	DBH dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.032.428.544,00	6.001.816.908,00	9.030.611.636,00
4	DBH dari Pengembangan dan Pemanfaatan Air Permukaan	6.962.351,00	2.842.616,00	4.119.735,00
5	DBH dari Pajak Rokok	2.787.776.338,00	0,00	2.787.776.338,00
	Jumlah Piutang DBH	24.165.647.810,00	9.645.344.331,00	14.520.303.479,00

5.3.1.1.2.5. Piutang Lain-Lain	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
	1.608.774.906,72	825.062.441,00

Nilai Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.608.774.906,72, jika dibandingkan dengan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp825.062.441,00, naik sebesar Rp783.712.465,72. Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2022 merupakan Piutang Klaim BPJS, Inhealth, dan pelayanan pasien Covid-19 pada RSUD Nurdin Hamzah periode Agustus 2021 sampai dengan Desember 2022 yang telah diverifikasi namun belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022 serta piutang penjualan air pada UPTD SPAM Dinas Perumahan dan Kawasan



sebesar Rp113.629.000,00. Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.54 berikut.

Tabel 5.54
Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	PIUTANG LAINNYA	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK / (TURUN)
1	Dana Bapera	102.029.999,00	102.029.999,00	0,00
2	Dana Koperasi Pegawai Negeri	737.650.600,00	740.910.600,00	(3.260.000,00)
3	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	113.629.000,00	138.129.000,00	(24.500.000,00)
	JUMLAH	953.309.599,00	981.069.599,00	(27.760.000,00)

5.3.1.3.1.	Pinjaman Dana Bapera	<u>31-12-2022 (Rp)</u>	<u>31-12-2021 (Rp)</u>
		102.029.999,00	102.029.999,00

Nilai Piutang Lainnya dari Pinjaman Dana Bapera per 31 Desember 2022 sebesar Rp102.029.999,00, sama jika dibandingkan dengan Pinjaman Dana Bapera per 31 Desember 2021 sebesar Rp102.029.999,00.

Piutang Lainnya dari Pinjaman Dana Bapera per 31 Desember 2022 merupakan penyaluran kredit pinjaman yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Bapera Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Piutang Lainnya dari Dana Bapera per 31 Desember 2022 sebesar Rp102.029.999,00 (Pokok Rp94.080.699,00 + Bunga Rp7.949.300,00) dengan jumlah nasabah sebanyak sembilan orang. Piutang tersebut telah jatuh tempo namun sampai dengan 31 Desember 2022 para debitur belum melunasi piutangnya. Rincian piutang lainnya dari pinjaman dana Bapera rincian sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.55 berikut.

Tabel 5.55
Rincian Piutang Dana Bapera per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Nama Debitur	Tahun Akad Kredit	Nilai Kredit	Bunga	Jumlah	Angsuran s.d 31 Des 2022	Sisa Tunggalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8) = (6) - (7)
1	ZT	2007	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	466.667,00	10.733.333,00
2	M AR	2007	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
3	Par	2007	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	4.900.001,00	6.299.999,00
4	Har	2007	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	2.933.334,00	8.266.666,00
5	F. MS	2007	8.000.000,00	960.000,00	8.960.000,00	2.119.999,00	6.840.001,00
6	AR	2007	7.500.000,00	900.000,00	8.400.000,00	1.050.000,00	7.350.000,00
7	Sop	2009	7.000.000,00	840.000,00	7.840.000,00	1.000.000,00	6.840.000,00
8	RD	2010	40.000.000,00	4.800.000,00	44.800.000,00	6.000.000,00	38.800.000,00
9	MU	2009	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	5.500.000,00	5.700.000,00
	Jumlah		112.500.000,00	13.500.000,00	126.000.000,00	23.970.001,00	102.029.999,00

5.3.1.3.2.	Pinjaman Dana Koperasi Pegawai Negeri	<u>31-12-2022 (Rp)</u>	<u>31-12-2021 (Rp)</u>
		737.650.600,00	740.910.600,00

Nilai Piutang Lainnya dari Pinjaman Dana KPN per 31 Desember 2022 sebesar Rp737.650.600,00 merupakan pinjaman yang diberikan kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) untuk pembangunan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil



yang dikelola oleh koperasi. Angsuran perumahan pegawai Pemda tersebut terjadi karena adanya pemberian pinjaman kepada KPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp1.300.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2002. Pinjaman tersebut digunakan oleh KPN untuk membangun perumahan bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemberian pinjaman tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 178 Tahun 2002 tentang Penetapan Pemberian Pinjaman Dana Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil kepada KPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan didukung dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan KPN. Data per 31 Desember 2022 total angsuran yang telah disetor KPN ke Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp562.349.400,00, dengan rincian angsuran Pinjaman Tahun 2008 sebesar Rp150.000.000,00, Tahun 2010 sebesar Rp100.000.000,00, Tahun 2012 sebesar Rp30.000.000,00, Tahun 2014 sebesar Rp20.000.000,00, Tahun 2017 sebesar Rp70.061.000,00, Tahun 2018 sebesar Rp93.517.250,00, Tahun 2019 sebesar Rp50.685.000,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp26.261.150,00, Tahun 2021 sebesar Rp18.565.000,00 serta Tahun 2022 sebesar Rp3.260.000,00. Hasil koordinasi dengan pengurus KPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pelunasan utang kepada Pemerintah Daerah masih terkendala dengan verifikasi debitur yang masih ada (ada debitur yang mengundurkan diri, ada yang belum lunas) sehingga solusi yang akan dilakukan kepada debitur yang mengundurkan diri, untuk tanah dan bangunannya akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat, dan pada Tahun 2022 program penjualan aset berupa tanah dan bangunan yang ditawarkan kepada masyarakat belum memuaskan dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat yang belum pulih dari akibat pandemi.

5.3.1.3.3.	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		113.629.000,00	138.129.000,00

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2022 sebesar Rp113.629.000,00, turun sebesar Rp24.500.000,00 jika dibandingkan dengan Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 sebesar Rp138.129.000,00.

Piutang TGR berasal dari kekurangan kas di bendahara penerimaan pada UPTD SPAM yang menjadi tanggung jawab Kepala UPTD SPAM. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa per 31 Desember 2019 seharusnya terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada UPTD SPAM sebesar Rp300.129.000,00. Dari jumlah tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 3 Mei 2020, pada Tahun 2021 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp12.000.000,00 sedangkan Tahun 2022 telah disetor Kembali sebesar Rp24.500.000,00. Dengan demikian masih terdapat sisa pada 31 Desember 2022 sebesar Rp113.629.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pada tanggal 5 Mei 2022 atas nama AF (Kepala UPTD SPAM) selaku pihak yang bertanggung jawab dengan jaminan berupa satu bidang tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 592 seluas 1.000 m² yang berlokasi di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

5.3.1.4.	Penyisihan Piutang	31-12-2022(Rp)	31-12-2021 (Rp)
		(3.317.040.380,92)	(2.509.030.754,38)

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau



Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.57 berikut.

Tabel 5.57
Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK / (TURUN)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	139.658.471,14	156.154.967,00	(16.496.495,86)
2	Premi Asuransi	97.428.407,67	119.712.662,33	(22.284.254,66)
3	Sewa Gedung	3.333.333,00	4.166.667,00	(833.334,00)
	JUMLAH	240.420.211,81	280.034.296,33	(39.614.084,52)

Rincian Beban Dibayar Dimuka per SKPD sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 19*.

5.3.1.6. Persediaan	<u>31-12-2022 (Rp)</u>	<u>31-12-2021 (Rp)</u>
	18.566.394.891,69	13.480.140.109,22

Persediaan merupakan pengadaan barang habis pakai, obat-obatan, Belanja Barang Jasa lainnya yang masih tersisa sampai dengan 31 Desember 2022. Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.566.394.891,69 jika dibandingkan dengan Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.480.140.109,22 terjadi kenaikan sebesar Rp5.086.254.782,47. Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.58 berikut.

Tabel 5.58
Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK / TURUN
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.338.076.141,00	1.726.499.687,00	1.611.576.454,00
2	Bahan Kimia	169.318.462,00	140.822.159,00	28.496.303,00
3	Bahan Bakar dan Pelumas	97.350,00	56.150,00	41.200,00
4	Bahan Lainnya	1.252.560.981,00	265.882.335,00	986.678.646,00
5	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	196.671.073,00	194.288.245,00	2.382.828,00
6	Alat Tulis Kantor	130.295.366,00	137.144.055,00	(6.848.689,00)
7	Bahan Cetak	227.125.788,00	308.828.328,00	(81.702.540,00)
8	Benda Pos	2.012.000,00	2.594.000,00	(582.000,00)
9	Perabot Kantor	6.955.699,00	4.702.292,00	2.253.407,00
10	Alat Listrik	14.577.930,00	64.457.330,00	(49.879.400,00)
11	Obat	2.037.971.211,05	4.098.659.483,22	(2.060.688.272,17)
12	Obat-obatan Lainnya	3.539.186.990,64	1.187.491.145,00	2.351.695.845,64
13	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	3.206.818.000,00	3.206.818.000,00	0,00
14	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.444.727.900,00	2.141.896.900,00	2.302.831.000,00
	JUMLAH	18.566.394.891,69	13.480.140.109,22	5.086.254.782,47

Rincian Persediaan per SKPD sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 20* dan *21*.

Pada persediaan obat senilai Rp 2.037.971.211,05 terdapat persediaan obat yang kadaluarsa pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah senilai Rp302.265.175,00. Daftar obat kadaluarsa ini masih terdapat dalam persediaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikarenakan belum adanya proses pemusnahan obat, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah Pasal 4 Dalam penyelenggaraan



Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut belum terlaksana pada TA 2022. Rincian persediaan kadaluarsa disajikan dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.59 berikut.

Tabel 5.59
Rincian Persediaan Kadaluarsa per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
A	Gudang Obat	125.572.936,00
1	Obat (Gudang Obat)	115.842.336,00
2	Bhp (Gudang Obat)	9.730.600,00
B	Apotek Obat	2.018.339,00
1	Obat Generik (Apotek)	416.449,00
2	Obat Paten (Apotek)	1.601.890,00
C	Obat Dan BHP Bantuan	174.673.900,00
1	Obat Bantuan	155.273.900,00
2	Bhp Bantuan	19.400.000,00
	JUMLAH	302.265.175,00

Terdapat persediaan yang tidak dicatat dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dikarenakan barang yang diterima Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Pihak Ketiga yang merupakan alat Kesehatan untuk penanggulangan wabah pandemi *Covid-19*, dimana tidak mencantumkan nilai satuan harga dalam Berita Acara Serah Terima Barang. Berikut rincian hibah barang persediaan yang tidak memiliki satuan harga dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.60 berikut.

Tabel 5.60
Rincian Hibah Persediaan Barang yang Tidak Memiliki Satuan Harga per 31 Desember 2022

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH MASUK	JUMLAH KELUAR	SISA STOK 31-Des-22	KETERANGAN
I	RSU Nurdin Hamzah					
1	Masker KN95	Pcs	500	500	0	BHP / Dinas Kesehatan Provinsi
2	Regulator O2	Unit	26	10	16	Alkes/Petrocina TJT
3	Tabung Oksigen Besar	Unit	26	26	0	Alkes/Petrocina TJT
4	Oxygen Concentrator	Unit	1	0	1	Alkes / Dinas Kesehatan Provinsi
5	Tabung Oksigen Besar	Unit	25	25	0	Alkes/ Kementerian Perindustrian
6	Tabung Oksigen Kecil	Unit	10	10	0	Alkes/ Kementerian Perindustrian
7	Regulator O2	Unit	35	0	35	Alkes/Kementerian Perindustrian
II	Dinas Kesehatan					
2	Hazmat	Pcs	1686	1472	214	BHP/ Dinas Kesehatan Provinsi
3	Masker KN95	Kotak	110	70	40	BHP/Dinas Kesehatan Provinsi

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

31-12-2022 (Rp)

31-12-2021 (Rp)

50.000.000.000,00

46.514.000.000,00

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp46.514.000.000,00 naik sebesar Rp3.486.000.000,00. Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 terdiri dari Investasi Non permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.61 berikut.



Tabel 5.61
Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	INVESTASI JANGKA PANJANG	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK / (TURUN)
1	Investasi Non permanen	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	50.000.000.000,00	46.514.000.000,00	3.486.000.000,00
	JUMLAH	50.000.000.000,00	46.514.000.000,00	3.486.000.000,00

5.3.1.2.1. Investasi Non permanen	<u>31-12-2022 (Rp)</u>	<u>31-12-2021 (Rp)</u>
	0,00	0,00

Nilai Investasi Non permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan Nilai Investasi Non permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.1.2.2. Investasi Permanen	<u>31-12-2022 (Rp)</u>	<u>31-12-2021 (Rp)</u>
	50.000.000.000,00	46.514.000.000,00

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp46.514.000.000,00 naik sebesar Rp3.486.000.000,00. Investasi Permanen tersebut terdiri dari Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah dan Penyertaan Modal pada PT Bumi Samudra Perkasa, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.62 berikut.

Tabel 5.62
Investasi Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	INVESTASI PERMANEN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK / (TURUN)
1	Penyertaan Modal pada PT BPD Jambi	50.000.000.000,00	46.514.000.000,00	3.486.000.000,00
2	PT Bumi Samudra Perkasa	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	50.000.000.000,00	46.514.000.000,00	3.486.000.000,00

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (PT BPD Jambi)

Penyertaan Modal pada PT BPD Jambi berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 404 Tahun 2013 tanggal 26 September 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT BPD Jambi. Perkembangan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT BPD Jambi Tahun 2013 s.d. 2022 adalah sebagaimana tabel 5.63 berikut.

Tabel 5.63
Perkembangan Penyertaan Modal pada PT BPD Jambi

(dalam rupiah)

No	Tahun	Uraian	Penambahan Penyertaan Modal	Akumulasi Penyertaan Modal
1	2013	Keputusan Bupati No 404 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT BPD Jambi	0,00	30.133.000.000,00
2	2014	Penambahan modal sebanyak 4.000 lembar saham @Rp1.000.000,00	4.000.000.000,00	34.133.000.000,00
3	2015	Penambahan modal berupa Tanah dan Bangunan	2.381.357.000,00	36.514.357.000,00
4	2016	Penambahan Modal	2.000.000.000,00	38.514.357.000,00
5	2017	Penambahan Modal	2.000.000.000,00	40.514.357.000,00



(dalam rupiah)

No	Tahun	Uraian	Penambahan Penyertaan Modal	Akumulasi Penyertaan Modal
6	2018	Penambahan Modal	1.500.000.000,00	42.014.357.000,00
7	2019	Penambahan Modal	2.000.000.000,00	44.014.357.000,00
8	2020	Penambahan Modal	2.000.000.000,00	46.014.357.000,00
9	2021	Penambahan Modal	499.643.000,00	46.514.000.000,00
10	2022	Penambahan Modal	3.486.000.000,00	50.000.000.000,00

2. PT Bumi Samudra Perkasa (PT BSP)

PT BSP adalah kelanjutan dari Perusahaan Daerah CV *Sabak Holding Company* yang telah berubah nama dan status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan saham mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 99%. PT BSP dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 07 Maret 2014 oleh Dirham Notaris di Jakarta Timur. PT BSP berkedudukan di Jalan Bhayangkara, Gedung Bersama Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Penyertaan modal PT BSP pertama kali Tahun Anggaran 2013 pada PD *Sabak Holding Company* (PD SHC) yaitu sebesar Rp1.250.000.000,00. PD SHC bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa; perindustrian; angkutan/transportasi niaga; properti perumahan; ekspor dan impor; perbankan; pertambangan, energi, dan sumber daya mineral; SPBU dan SPBG, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan; *general supplier*; dan usaha lain yang layak dan menguntungkan atas persetujuan Badan Pengawas.

Berdasarkan laporan auditor atas laporan keuangan PT BSP Tahun 2014 oleh kantor Akuntan Publik Terdaftar ARMANDIAS diketahui bahwa saham PT BSP terdiri dari 99% modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Rp1.250.000.000,00) dan 1% modal perorangan dengan total modal PT BSP menjadi Rp1.262.500.000,00. PT BSP belum menghasilkan pendapatan operasional karena belum melakukan kegiatan usaha, sementara itu rencana kegiatan usaha jual beli gas belum terlaksana karena jual beli antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan *PT Petrochina International Jabung Limited* masih dalam tahap perundingan. Belum adanya kegiatan usaha tersebut mengakibatkan PT BSP selalu mengalami kerugian. Sampai dengan 31 Desember 2022, akumulasi kerugian PT BSP telah mencapai Rp2.591.720.502,00 sehingga untuk menutupi kegiatan operasional PT BSP berutang kepada pihak ketiga sebesar Rp1.623.000.000,00.

Laporan Keuangan PT BSP *Unaudited* Tahun Buku 2022 menunjukkan bahwa PT BSP mengalami kerugian sebesar Rp282.656.424,18 dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar minus Rp1.773.316.956,13. Dengan menggunakan metode ekuitas, maka penyertaan modal pada PT BSP disajikan di Neraca sebesar Rp0,00.

5.3.1.3. Aset Tetap	<u>31-12-2022 (Rp)</u>	<u>31-12-2021 (Rp)</u>
	1.915.131.434.619,89	1.921.351.603.726,23

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.915.131.434.619,89, jika dibandingkan dengan nilai Aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.921.351.603.726,23 naik sebesar Rp6.220.169.106,34. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2021 dalam rangka penyusutan barang milik daerah berupa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka penyusutan



dilaksanakan setelah satu tahun perolehan aset. Saldo per jenis Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.64 berikut.

Tabel 5.64
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	ASET TETAP	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK / (TURUN)
1	Aset Tetap Tanah	36.317.904.971,11	33.749.633.091,11	2.568.271.880,00
2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	484.113.851.142,24	454.529.592.665,39	29.584.258.476,85
3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	823.716.048.054,86	760.746.879.483,26	62.969.168.571,60
4	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.482.447.047.409,52	3.255.254.520.870,27	227.192.526.539,25
5	Aset Tetap Lainnya	14.526.878.242,00	14.439.964.017,00	86.914.225,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	27.999.826.165,40	23.174.411.233,73	4.825.414.931,67
7	Akumulasi Penyusutan	(2.953.990.121.365,24)	(2.620.543.397.634,53)	(333.446.723.730,71)
	JUMLAH	1.915.131.434.619,89	1.921.351.603.726,23	(6.220.169.106,34)

5.3.1.3.1. Aset Tetap Tanah**31-12-2022 (Rp)****31-12-2021 (Rp)****36.317.904.971,11****33.749.633.091,11**

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.317.904.971,11 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.749.633.091,11 naik sebesar Rp2.568.271.880,00. Nilai Aset Tetap Tanah berasal dari Nilai per 31 Desember 2021, mutasi tambah dan kurang Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.65 berikut.

Tabel 5.65
Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2021	:	33.749.633.091,11
Mutasi Tambah		
- Belanja Modal	:	636.221.000,00
- Tanah Pemerintah yang telah di Nilai (+)	:	168.980.000,00
- Mutasi dari Akun Lain (+)	:	2.039.651.000,00
Jumlah Mutasi Tambah 2022	:	2.844.852.000,00
Mutasi Kurang		
- Hibah Aset Tetap Tanah (-)	:	(276.580.120,00)
Jumlah Mutasi Kurang 2022	:	(276.580.120,00)
Jumlah Mutasi 2022		2.568.271.880,00
Saldo Per 31 Desember 2022		36.317.904.971,11

Sebagaimana yang tertera pada Tabel, diketahui bahwa pada Tahun 2022 jumlah Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertambah sebesar Rp2.568.271.880,00 dari tahun sebelumnya, Rincian Mutasi Aset tetap Tanah terdapat pada *Lampiran 22*.

Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.66 berikut.



Tabel 5.66
Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap Tanah	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.351.885.220,00	1.627.129.340,00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.911.496.320,00	1.702.700.320,00
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	11.446.278.830,78	11.258.571.955,78
4	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	371.843.684,00	371.843.684,00
5	Tanah Persil Lainnya	6.000.000,00	0,00
6	Tanah Basah	29.990.000,00	29.990.000,00
7	Tanah Hutan	1.800.921.473,00	2.917.806.633,00
	Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	1.116.885.160,00	0,00
8	Tanah Pertanian	25.000.000,00	25.000.000,00
9	Tanah Lapangan Olahraga	649.717.541,50	369.002.541,50
10	Tanah Lapangan Parkir	2.202.840.305,00	202.837.180,00
11	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	206.800.000,00	206.800.000,00
12	Tanah untuk Jalan	12.384.459.469,83	12.168.404.469,83
13	Tanah untuk Bangunan Instalasi	448.652.467,00	448.652.467,00
14	Tanah untuk Bangunan Jaringan	1.193.001.580,00	1.193.001.580,00
15	Tanah untuk Makam	409.200.000,00	409.200.000,00
16	Tanah Kampung	762.932.920,00	818.692.920,00
	JUMLAH	36.317.904.971,11	33.749.633.091,11

Per 31 Desember 2022, Aset Tetap Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi sebanyak 785 bidang yang terdiri dari 521 bidang tanah sudah bersertifikat hak pakai, dan 264 bidang yang belum bersertifikat hak pakai. Kertas Kerja Mutasi Aset Tanah Organisasi Perangkat Daerah per 31 Desember 2022 terdapat pada *Lampiran 23*.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meminjamkaikan Tanah kepada beberapa lembaga/Instansi Pemerintah lainnya. Hal ini dimaksud untuk membantu instansi/lembaga bersangkutan menjalankan kegiatan pelayanan guna kepentingan umum. Adapun tanah yang dipinjamkaikan kepada instansi/lembaga Pemerintah lainnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.67 berikut.

Tabel 5.67
Aset Tanah yang Dipinjamkaikan

No	Lembaga/Instansi/Lokasi	Luas	Nilai (Rp)	Batas Waktu
1	Tanah dan Bangunan Kantor Perwira Penghubung	5.000 m ²	65.000.000,00	29 Januari 2024
2	Tanah Lokasi Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjab Timur	2.970 m ²	326.700.000,00	28 Januari 2024
3	Tanah Kantor Samsat Tanjab Timur	3.000 m ²	66.000.000,00	28 Januari 2024
4	Tanah Lokasi Rumah Dinas Kapolres	1.200 m ²	99.224.000,00	21 Februari 2027
	JUMLAH		556.924.000,00	

b.	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	<u>31-12-2022 (Rp)</u> 484.113.851.142,24	<u>31-12-2021 (Rp)</u> 454.529.592.665,39
-----------	---------------------------------------	--	--

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp484.113.851.142,24 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Peralatan



dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp454.529.592.665,39 naik sebesar Rp29.584.258.476,85. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari nilai per 31 Desember 2021 serta mutasi tambah dan kurang Tahun 2022, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.68 berikut.

Tabel 5.68
Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2021	:	454.529.592.665,39
Mutasi Tahun 2022		
Mutasi Tambah		
- Belanja Modal	:	31.447.159.821,00
- Hibah dari Pemerintah	:	846.750.000,00
- Reklase dari Barang dan Jasa	:	372.777.712,85
- Reklase dari Akun Lain	:	146.820.000,00
- Utang Aset Belanja Modal RSUD		4.400.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		32.817.907.533,85
Mutasi Kurang		
- Belanja Modal yang tidak memenuhi kapitalisasi	:	(1.642.035.857,00)
- Hibah Aset Peralatan dan Mesin ke Lembaga lain	:	(768.672.200,00)
- Reklasifikasi ke Akun Lain	:	(817.591.000,00)
- Pembayaran Utang Aset Tahun 2021		(5.350.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang		(3.233.649.057,00)
Jumlah Mutasi 2022		29.584.258.476,85
Saldo Per 31 Desember 2022	:	484.113.851.142,24

Sebagaimana yang tertera pada Tabel, diketahui bahwa pada Tahun 2022 mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertambah sebesar Rp29.584.258.476,85. dari tahun sebelumnya. Rincian Mutasi Aset tetap Peralatan Mesin terdapat pada **Lampiran 24**.

Kertas Kerja Mutasi Peralatan dan Mesin Organisasi Perangkat Daerah Per 31 Desember 2022 diuraikan pada **Lampiran 25**.

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.69 berikut.

Tabel 5.69
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
1	Alat Besar	49.500.908.741,00	44.298.489.241,00
2	Alat Angkutan	109.162.690.541,00	106.573.372.941,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.106.918.160,00	6.744.872.660,00
4	Alat Pertanian	5.200.829.356,00	5.182.829.356,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.782.790.971,10	105.325.382.706,25
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18.741.707.844,01	17.150.909.444,01
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	93.260.848.706,60	89.074.293.796,60
8	Alat Laboratorium	15.748.050.663,53	12.055.712.798,53
9	Komputer	71.385.965.409,00	65.661.031.222,00
10	Alat Keselamatan Kerja	1.864.519.500,00	2.232.719.500,00
11	Alat Peraga	237.829.000,00	225.979.000,00
12	Peralatan Olahraga	120.792.250,00	4.000.000,00
	Jumlah	484.113.851.142,24	454.529.592.665,39



Sebagai informasi penting yang perlu diungkapkan terkait dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meminjamkaikan sejumlah aset berupa kendaraan dinas kepada instansi/lembaga Pemerintah lainnya. Hal ini dimaksud untuk membantu instansi/lembaga bersangkutan menjalankan kegiatan pelayanan guna kepentingan umum. Adapun kendaraan dinas yang dipinjamkaikan kepada instansi/lembaga Pemerintah lainnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.70 berikut.

Tabel 5.70
Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Dipinjamkaikan

No	Uraian	Nomor Polisi	Pihak Peminjam	Nilai (Rp)	Batas Waktu
1	Hilux Double Cabin	BH 9342 TZ	Polres Tanjung Jabung Timur	304.650.000,00	4 Februari 2025
2	Innova G	BH 75 TZ	Bakeuda Provinsi Jambi	154.700.000,00	15 Januari 2025
3.	Avanza	BH 1002 T	Bakeuda Provinsi Jambi	200.600.000,00	15 Januari 2025
4.	Avanza G	BH 1080 TZ	MUI Tanjung Jabung Timur	149.000.000,00	4 Februari 2025
5.	Avanza G	Bh 1051 T	Lembaga Adat Melayu	149.000.000,00	4 Februari 2025
6.	Avanza G	BH 72 TZ	Polres Tanjung Jabung Timur	149.000.000,00	28 Januari 2023
7.	Kijang standar KF 80 Long	BH 89 TZ	BNN Kab. Tanjab Timur	123.350.114,00	13 Januari 2025
8.	Innova G	BH 39 TZ	BNN Kab. Tanjab Timur	187.500.000,00	13 Januari 2025
	JUMLAH			1.417.800.114,00	

b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan **31-12-2022 (Rp)** **31-12-2021 (Rp)**
823.716.048.054,86 **760.746.879.483,26**

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp823.716.048.054,86 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp760.746.879.483,26 naik sebesar Rp62.969.168.571,60. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari nilai per 31 Desember 2021 serta mutasi tambah dan kurang Tahun 2022, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.71 berikut.

Tabel 5.71
Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021

<i>(dalam rupiah)</i>		
Saldo Per 31 Desember 2021	:	760.746.879.483,26
Mutasi Tahun 2022		
Mutasi Tambah		
- Belanja Modal	:	50.297.667.167,60
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (+)	:	2.184.382.367,00
- Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Pusat (+)	:	15.438.845.867,00
- Reklasifikasi dari Akun Lain (+)	:	197.653.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	:	68.118.548.401,60
Mutasi Kurang		
- Reklasifikasi ke Akun Lain (-)	:	(4.622.896.000,00)
- Pembayaran Utang Aset Tahun 2021 (-)	:	(259.479.960,00)
- Belanja Modal yang tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap (-)	:	(267.003.870,00)
Jumlah Mutasi Kurang	:	(5.149.379.830,00)
Jumlah Mutasi 2022		62.969.168.571,60
Saldo Per 31 Desember 2022	:	823.716.048.054,86



Sebagaimana yang tertera pada Tabel, diketahui bahwa pada Tahun 2022 jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik sebesar Rp62.969.168.571,60 dari tahun sebelumnya. Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung Bangunan terdapat pada **Lampiran 26**.

Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Organisasi Perangkat Daerah Per 31 Desember 2022 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Organisasi Perangkat Daerah per 31 Desember 2022 terdapat pada **Lampiran 27**.

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.72 berikut.

Tabel 5.72
Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
1	Bangunan Gedung	804.458.355.398,86	754.158.241.565,26
2	Monumen	1.864.824.718,00	4.781.611.718,00
3	Bangunan Menara	577.368.200,00	299.868.200,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	16.815.499.738,00	1.507.158.000,00
Jumlah		823.716.048.054,86	760.746.879.483,26

Sebagai informasi penting yang perlu diungkapkan terkait dengan Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Adapun Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang sedang dipakai kepada instansi/lembaga Pemerintah lainnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.73 berikut.

Tabel 5.73
Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dipinjampakaikan

(No)	Uraian	Pihak Peminjam	Nilai (Rp)	Batas Waktu
1.	Gedung Samsat	Dispenda Provinsi Jambi	1.646.245.600,00	28 Januari 2024
2	Bangunan Kantor Perwira Penghubung	Dandim 0419/Tanjab	68.510.295,00	29 Januari 2024
3.	Bangunan Rumah Dinas Kapolres	Polres Tanjung Jabung Timur	588.467.375,00	21 Februari 2027
JUMLAH			2.303.223.270,00	

d. **Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan**, $\frac{31-12-2022 \text{ (Rp)} \quad 31-12-2021 \text{ (Rp)}}{3.482.447.047.409,52 \quad 3.255.254.520.870,27}$

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.482.447.047.409,52 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.255.254.520.870,27 naik sebesar Rp227.192.526.539,25. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari nilai per 31 Desember 2021, Belanja modal TA 2022 dan mutasi tambah TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.74 berikut.



Tabel 5.74
Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2021	:	3.255.254.520.870,27
Mutasi Tahun 2022		
Mutasi Tambah		
- Belanja Modal	:	204.369.092.804,42
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa Konstruksi	:	11.941.394.997,50
- Hibah dari Pemerintah Pusat	:	11.157.460.519,00
- Reklasifikasi dari Akun Lain	:	1.423.066.218,33
Jumlah Mutasi Tambah		228.891.014.539,25
Mutasi Kurang		
- Pembayaran Utang Aset Tahun Lalu	:	(1.408.336.000,00)
- Reklasifikasi ke Akun Lain	:	(290.152.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	:	(1.698.488.000,00)
Jumlah Mutasi 2022	:	227.192.526.539,25
Saldo Per 31 Desember 2022	:	3.482.447.047.409,52

Sebagaimana yang tertera pada Tabel, diketahui bahwa pada Tahun 2022 jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik sebesar Rp227.192.526.539,25 dari tahun sebelumnya. Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat pada *Lampiran 28*.

Kertas Kerja Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Organisasi Perangkat Daerah Per 31 Desember 2022 diuraikan pada *Lampiran 29*.

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.75 berikut.

Tabel 5.75
Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
1	Jalan dan Jembatan	2.855.646.286.003,82	2.685.410.865.334,08
2	Bangunan Air	525.368.400.713,70	484.688.748.139,19
3	Instalasi	54.624.499.753,00	52.401.287.780,00
4	Jaringan	46.807.860.939,00	32.753.619.617,00
	Jumlah	3.482.447.047.409,52	3.255.254.520.870,27

e.	Aset Tetap Lainnya	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		14.526.878.242,00	14.439.964.017,00

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.526.878.242,00 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.439.964.017,00 naik sebesar Rp86.914.225,00. Nilai Aset Tetap Lainnya berasal dari nilai per 31 Desember 2021 dan mutasi tambah serta kurang Tahun 2022, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.76 berikut.



Tabel 5.76
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2021	:	14.439.964.017,00
Mutasi Tahun 2022		
Mutasi Tambah		
- Belanja Modal	:	3.811.262.582,00
- Reklasifikasi dari Akun Lain	:	38.500.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	:	3.849.762.582,00
Mutasi Kurang		
- Belanja Modal yang tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	:	(3.758.098.357,00)
- Reklasifikasi ke Akun Lain	:	(4.750.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	:	(3.762.848.357,00)
Jumlah Mutasi 2022	:	86.914.225,00
Saldo Per 31 Desember 2022	:	14.526.878.242,00

Sebagaimana yang tertera pada tabel, diketahui bahwa pada per 31 Desember 2021 jumlah Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik sebesar Rp86.914.225,00 dari tahun sebelumnya. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya terdapat pada *Lampiran 30*.

Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Lainnya Organisasi Perangkat Daerah Per 31 Desember 2022 diuraikan pada *Lampiran 31*.

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.77 berikut.

Tabel 5.77
Rincian Aset Tetap Lainnya per 31
Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap Lainnya	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
1	Bahan Perpustakaan	1.777.356.371,00	1.776.431.371,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.993.599.685,00	3.907.610.460,00
3	Hewan	175.232.000,00	175.232.000,00
4	Tanaman	7.160.163.950,00	7.160.163.950,00
5	Barang Koleksi Non Budaya	218.946.000,00	218.946.000,00
6	Aset Tetap Dalam Renovasi	1.201.580.236,00	1.201.580.236,00
	Jumlah	14.526.878.242,00	14.439.964.017,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
	27.999.826.165,40	23.174.411.233,73

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.999.826.165,40 jika dibandingkan dengan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.174.411.233,73 naik sebesar Rp4.825.414.931,67. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 berasal dari nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.78 berikut.



Tabel 5.78
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2021	:	23.174.411.233,73
Mutasi Tahun 2022		
Mutasi Tambah		
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa Konstruksi (+)	:	3.017.150.150,00
- Reklasifikasi dari Akun Lain (+)	:	2.690.060.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	:	5.707.210.150,00
Mutasi Kurang		
- Reklasifikasi ke Akun Gedung dan Bangunan (-)	:	(881.795.218,33)
Jumlah Mutasi Kurang	:	(881.795.218,33)
Jumlah Mutasi 2022		4.825.414.931,67
Saldo Per 31 Desember 2022	:	27.999.826.165,40

Sebagaimana yang tertera pada tabel, diketahui bahwa pada per 31 Desember 2022 jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik sebesar Rp4.825.414.931,67 dari tahun sebelumnya. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada *Lampiran 32*.

Kertas Kerja Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Organisasi Perangkat Daerah Per 31 Desember 2022 diuraikan pada *Lampiran 33*.

g. Akumulasi	<u>31-12-2022 (Rp)</u>	<u>31-12-2021 (Rp)</u>
Penyusutan	(2.953.990.121.365,24)	(2.620.543.397.634,53)

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.953.990.121.365,24, dibandingkan dengan Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.620.543.397.634,53 naik sebesar Rp333.446.723.730,71. Rincian Akumulasi Penyusutan Per SKPD diuraikan pada *Lampiran 34*. Sedangkan Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan per SKPD terdapat pada *Lampiran 35 s.d 39*. Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari masa manfaat ekonomis tiap kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.79 berikut.

Tabel 5.79
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	AKUMULASI PENYUSUTAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK / (TURUN)
1	Peralatan dan Mesin	(368.458.462.964,57)	(328.252.615.589,40)	(40.205.847.375,17)
2	Gedung dan Bangunan	(296.393.720.747,87)	(256.122.741.703,09)	(40.270.979.044,78)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.285.106.418.297,06)	(2.032.405.151.776,04)	(252.701.266.521,02)
4	Aset Tetap Lainnya	(4.031.519.355,74)	(3.762.888.566,00)	(268.630.789,74)
	JUMLAH	(2.953.990.121.365,24)	(2.620.543.397.634,53)	(333.446.723.730,71)

5.3.1.4. Aset Lainnya	<u>31-12-2022 (Rp)</u>	<u>31-12-2021 (Rp)</u>
	108.101.668.891,22	92.816.067.015,22

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp108.101.668.891,22 jika dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp92.816.067.015,22 naik sebesar Rp15.285.601.876,00. Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.80 berikut.



Tabel 5.80
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	ASET LAINNYA	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK/ (TURUN)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tak Berwujud	2.782.342.500,00	2.782.342.500,00	0,00
5	Aset Lain – lain	171.018.200.762,89	155.550.678.886,89	15.467.521.876,00
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(63.111.871.871,67)	(63.111.871.871,67)	0,00
7	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.587.002.500,00)	(2.405.082.500,00)	(181.920.000,00)
	JUMLAH	108.101.668.891,22	92.816.067.015,22	15.285.601.876,00

5.3.1.4.1. Tuntutan Ganti Rugi 31-12-2022 (Rp) 31-12-2021 (Rp)
0,00 **0,00**

Nilai Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 31-12-2022 (Rp) 31-12-2021 (Rp)
0,00 **0,00**

Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.1.4.3. Aset Tak Berwujud 31-12-2022 (Rp) 31-12-2021 (Rp)
2.782.342.500,00 **2.782.342.500,00**

Aset Tak Berwujud merupakan aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.782.342.500,00 sama jika dibandingkan dengan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.782.342.500,00. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.782.342.500,00 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.81 berikut.

Tabel 5.81
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	NILAI
1	Software Aplikasi Data pada Dinas Pendidikan	49.302.000,00
2	Software Aplikasi SIM RS pada Rumah Sakit Umum Daerah	128.700.000,00
3	Kajian Tentang Peta Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.786.000,00
4	Aplikasi Sistem pengelolaan Air Minum	196.900.000,00
5	Aplikasi Inventarisasi dan Digitalisasi Sarana Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	148.580.000,00
6	Aplikasi Sistem Informasi dan Digitalisasi Pembangunan Daerah Sektor Pendidikan	105.930.000,00
7	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	83.900.000,00
8	Aplikasi <i>e-planning</i> pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	198.000.000,00
9	Aplikasi SIMBADA	84.040.000,00
10	Aplikasi Anggaran	196.000.000,00



(dalam rupiah)

No	URAIAN	NILAI
11	Aplikasi Barcode	94.902.000,00
12	Aplikasi Simbada	73.892.000,00
13	Aplikasi Jasa Administrasi Keuangan	490.000.000,00
14	Aplikasi Simpadda	193.600.000,00
15	Software Aplikasi SIG Bidang Pendapatan	188.000.000,00
16	Aplikasi PBB Kolektor dan PBB Tools	25.000.000,00
17	Software Aplikasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah	49.142.500,00
18	Aplikasi Sinjab dan Evaluasi Jabatan pada Sekretariat Daerah	198.000.000,00
19	Software Aplikasi SIKD, SIM SPPD pada Sekretariat DPRD	209.621.500,00
20	Software Aplikasi Manajemen Perpustakaan (e-library) pada Dinas Pendidikan	19.046.500,00
	Jumlah	2.782.342.500,00

5.3.1.4.4. Aset Lain-lain**31-12-2022 (Rp)****171.018.200.762,89****31-12-2021 (Rp)****155.550.678.886,89**

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar 171.018.200.762,89 jika dibandingkan dengan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp155.550.678.886,89 naik sebesar Rp 15.467.521.876,00. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.82 berikut.

Tabel 5.82
Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	ASET LAIN LAIN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK/ (TURUN)
1	Aset Lain – lain	171.018.200.762,89	155.550.678.886,89	15.467.521.876,00
	JUMLAH	171.018.200.762,89	155.550.678.886,89	15.467.521.876,00

Rincian Mutasi Aset Lain lain sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.83 berikut.

Tabel 5.83
Rincian Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2022

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2021	:	155.550.678.886,89
Mutasi Tambah		
Dana TDF di Bank Indonesia	:	15.715.021.876,00
Perbesaran anakan sapi Gaduhan	:	150.000.000,00
Kelahiran Sapi Gaduhan	:	91.500.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	:	15.956.521.876,00
Mutasi Kurang		
Kematian Sapi Gaduhan	:	(347.500.000,00)
Penjualan Sapi Gaduhan	:	(88.500.000,00)
Koreksi Nilai NRV Sapi Tahun 2021	:	(53.000.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	:	(489.000.000,00)
Jumlah Mutasi Tahun 2022	:	15.467.521.876,00
Saldo Per 31 Desember 2022	:	171.018.200.762,89

Rincian Aset Lain-lain sebesar Rp171.018.200.762,89 diuraikan pada **Lampiran 40**.



Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2022 sebesar Rp15.467.521.876,00 terdiri dari Perolehan Dana Treasury Deposit Facility-TKD yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tersimpan pada Kantor Pusat Bank Indonesia dengan Nomor Rekening 519000255980 dan Pergerakan Saldo NRV Perguliran Sapi Gaduhan. Rincian Mutasi Aset Lain-lain dimuat pada **Lampiran 41**.

Nilai NRV perguliran ternak Sapi Gaduhan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp36.675.000.000,00. Kegiatan Perguliran ternak Sapi Gaduhan kepada masyarakat yang pengelolaannya berada pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran Ternak Sapi. Pada awal kegiatan Tahun 2006 diatur ketentuan bahwa untuk setiap induk sapi yang digaduhkan tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun peternak harus menyerahkan 2 (dua) ekor anak sapi ke Pemerintah. Pada Tahun 2011 diterbitkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyebaran Sapi Gaduhan pengembangan ternak dimana dari kewajiban peternak tadi menyerahkan hasil gaduhan sebanyak 2 (dua) ekor sapi selama lima tahun kepada Pemerintah sedangkan induknya menjadi hak peternak. Dengan demikian dalam arti kata induk sapi bukan merupakan aset pemerintah.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Penilaian Kembali Perkembangan Sapi Gaduhan Masyarakat, maka didapat data perkembangan perguliran ternak Sapi Gaduhan per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai perkembangan ternak Sapi Gaduhan pada peternak pengaduh di 11 Kecamatan Tahun 2022 sebesar Rp36.675.000.000,00. Dibandingkan Tahun 2021 nilai *net realizable value* untuk Ternak Gaduhan sebesar Rp36.869.500.000,00 turun sebesar Rp194.500.000,00, Angka ini merupakan selisih antara penambahan nilai NRV sapi Gaduhan akibat Kelahiran sebesar Rp91.500.000,00 dan Perbesaran anakan sapi menjadi indukan sapi sebesar Rp150.000.000,00 dengan Nilai NRV Kematian sapi senilai Rp347.500.000,00, Penjualan Sapi Rp88.500.000,00 dan adanya Koreksi terhadap Nilai NRV Tahun 2021 Akibat kesalahan pencatatan Nilai NRV Sapi senilai Rp53.000.000,00.

Keadaan Akhir per 31 Desember 2022 nilai *net realizable value* untuk Ternak Gaduhan sebesar Rp36.675.000.000,00 terdiri dari ternak jantan dewasa sebanyak 322 ekor senilai Rp4.311.000.000,00, ternak betina dewasa sebanyak 2.088 ekor senilai Rp25.638.500.000,00, ternak jantan anak sebanyak 415 ekor senilai Rp3.103.000.000,00 dan ternak betina anak sebanyak 542 ekor senilai Rp3.622.500.000,00, jumlah total keseluruhan ternak per 31 Desember 2022 sebanyak 3.367 ekor dengan rincian diuraikan pada **Lampiran 42**.

5.3.1.4.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	31-12-2022 (Rp) (63.111.871.871,67)	31-12-2021 (Rp) (63.111.871.871,67)
---	--	--

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.111.871.871,67, sama jika dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.111.871.871,67.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per SKPD diuraikan pada **Lampiran 43**.



5.3.1.4.7. Amortisasi Aset Tak Berwujud 31-12-2022(Rp)
(2.587.002.500,00) 31-12-2021 (Rp)
(2.405.082.500,00)

Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.587.002.500,00 jika dibandingkan dengan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.405.082.500,00 naik sebesar Rp181.920.000,00. Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp2.587.002.500,00 merupakan nilai akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud terdiri dari *software* yang bukan bagian tak terpisahkan dari *hardware* Komputer tertentu pada Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.84 berikut.

Tabel 5.84
Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	NILAI	AMORTISASI 2021	BEBAN AMORTISASI	AMORTISASI 2022
A	Dinas Pendidikan	68.348.500,00	68.348.500,00	0,00	68.348.500,00
1	Aplikasi Data Pendidikan	49.302.000,00	49.302.000,00	0,00	49.302.000,00
2	Aplikasi Manajemen Perpustakaan	19.046.500,00	19.046.500,00	0,00	19.046.500,00
B	RSUD	128.700.000,00	102.960.000,00	25.740.000,00	128.700.000,00
1	<i>Software</i> Aplikasi SIM RS	128.700.000,00	102.960.000,00	25.740.000,00	128.700.000,00
C	Dinas PUPR	49.786.000,00	49.786.000,00	0,00	49.786.000,00
1	Review Dokumen RPIJM Kab. Tanjung Timur	49.786.000,00	49.786.000,00	0,00	49.786.000,00
D	Dinas Perkim	196.900.000,00	39.380.000,00	39.380.000,00	78.760.000,00
1	Aplikasi Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)	196.900.000,00	39.380.000,00	39.380.000,00	78.760.000,00
E	BAPPEDA	536.410.000,00	496.810.000,00	39.600.000,00	536.410.000,00
1	Aplikasi Inventarisasi dan Digitalisasi Sarana Infrastruktur Wilayah (Jalan Jembatan dan Dermaga) di 6 Kec.	148.580.000,00	148.580.000,00	0,00	148.580.000,00
2	Aplikasi <i>E-Planning</i>	198.000.000,00	158.400.000,00	39.600.000,00	198.000.000,00
3	Aplikasi Sistem Informasi dan Digitalisasi Pembangunan Daerah Sektor Pendidikan	105.930.000,00	105.930.000,00	0,00	105.930.000,00
4	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	83.900.000,00	83.900.000,00	0,00	83.900.000,00
F	Badan Keuangan Daerah	1.345.434.000,00	1.270.234.000,00	37.600.000,00	1.307.834.000,00
1	Aplikasi SIMBADA	84.040.000,00	84.040.000,00	0,00	84.040.000,00
2	Aplikasi Anggaran	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	196.000.000,00
3	Aplikasi Barcode	94.902.000,00	94.902.000,00	0,00	94.902.000,00
4	Aplikasi Simbada	73.892.000,00	73.892.000,00	0,00	73.892.000,00
5	Aplikasi Jasa Administrasi Keuangan	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00	490.000.000,00
6	Aplikasi Simpaddinga	193.600.000,00	193.600.000,00	0,00	193.600.000,00
7	<i>Software</i> Aplikasi SIG Bidang Pendapatan	188.000.000,00	112.800.000,00	37.600.000,00	150.400.000,00
8	Aplikasi PBB Kolektor dan PBB <i>Tools</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
G	Sekretariat Daerah	247.142.500,00	167.942.500,00	39.600.000,00	207.542.500,00
1	<i>Software</i> Aplikasi System Informasi Perjalanan Dinas Pada Sekretariat Daerah	49.142.500,00	49.142.500,00	0,00	49.142.500,00
2	Aplikasi Sinjab dan Evaluasi Jabatan Pada Sekretariat Daerah	198.000.000,00	118.800.000,00	39.600.000,00	158.400.000,00
H	Sekretariat DPRD	209.621.500,00	209.621.500,00	0,00	209.621.500,00
1	<i>Software</i> Aplikasi SIKD SIM SPPD Pada Sekretariat DPRD	209.621.500,00	209.621.500,00	0,00	209.621.500,00
JUMLAH		2.782.342.500,00	2.405.082.500,00	181.920.000,00	2.587.002.500,00

5.3.2. KEWAJIBAN DAN EKUITAS 31-12-2022 (Rp)
2.227.797.223.982,27 31-12-2021 (Rp)
2.247.506.897.336,15

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.227.797.223.982,27 jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar



Rp2.247.506.897.336,15 turun sebesar Rp19.709.673.353,88. Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.85 berikut.

Tabel 5.85
Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK / (TURUN)
1	Kewajiban	1.685.538.355,34	18.399.832.255,12	(16.714.293.899,78)
2	Ekuitas	2.226.111.685.626,93	2.229.107.065.081,03	(2.995.379.454,10)
	Jumlah	2.227.797.223.982,27	2.247.506.897.336,15	(19.709.673.353,88)

5.3.2.1. KEWAJIBAN	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
	1.685.538.355,34	18.399.832.255,12

Kewajiban terbagi atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek diantaranya meliputi: Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Belanja, Utang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal Neraca, yang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.685.538.355,34 jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.399.832.255,12 turun sebesar Rp16.714.293.899,78. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.86 berikut.

Tabel 5.86
Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	KEWAJIBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK / (TURUN)
1	Kewajiban Jangka Pendek	1.685.538.355,34	18.399.832.255,12	(16.714.293.899,78)
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.685.538.355,34	18.399.832.255,12	(16.714.293.899,78)

5.3.2.1.1. Kewajiban Jangka Pendek	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
	1.685.538.355,34	18.399.832.255,12

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.685.538.355,34 jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.399.832.255,12 turun sebesar Rp16.714.293.899,78. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.87 berikut.

Tabel 5.87
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK/ (TURUN)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	0,00	93.912.995,00	(93.912.995,00)
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	26.741.562,67	0,00	26.741.562,67
4	Utang Belanja	1.658.796.792,67	18.305.919.260,12	(16.647.122.467,45)
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.685.538.355,34	18.399.832.255,12	(16.714.293.899,78)



5.3.2.1.1.1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		0,00	93.912.995,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2022 sebesar Rp0,00 merupakan pajak yang menjadi kewajiban bendahara SKPD per 31 Desember 2022 belum disetor ke kas Negara, turun sebesar Rp93.912.995,00 jika dibandingkan dengan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 sebesar Rp93.912.995,00.

5.3.2.1.1.2.	Utang Bunga	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		0,00	0,00

Nilai Utang Bunga per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Utang Bunga per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.1.3.	Pendapatan Diterima Dimuka	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		26.741.562,67	0,00

Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 merupakan Pendapatan yang diterima di Tahun 2022 namun berlaku setelah tahun 2022 berupa Pendapatan Pajak reklame papan/Bilboard/Videotron/Megatron di Badan Keuangan Daerah. Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 sebesar Rp26.741.562,67. Jika dibandingkan dengan nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp26.741.562,67.

5.3.2.1.1.4.	Utang Belanja	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
		1.658.796.792,67	18.305.919.260,12

Utang Belanja Tahun 2022 sebesar Rp1.658.796.792,67 timbul karena Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut. Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.88 berikut.

Tabel 5.88
Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Utang Belanja Pegawai	342.639.539,67	307.220.114,00
2	Utang Belanja Barang	284.262.552,00	2.566.752.453,00
3	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.400.000,00	5.350.000,00
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.972.000,00	266.451.960,00
5	Utang Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	0,00	1.408.336.000,00
6	Utang Barang dan Jasa BLUD	1.020.522.701,00	13.751.808.733,12
7	Utang Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00
	Jumlah	1.658.796.792,67	18.305.919.260,12

Rincian Utang Belanja per SKPD diuraikan pada *Lampiran 44* dan rincian Utang Belanja Jasa per SKPD diuraikan pada *Lampiran 45*.



5.3.2.1.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya	31-12-2022 (Rp) 0,00	31-12-2021 (Rp) 786.075.948,00
---	---------------------------------------	---

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp786.075.948,00, turun sebesar Rp Rp786.075.948,00.

5.3.2.1.2. Kewajiban Jangka Panjang	31-12-2022 (Rp) 0,00	31-12-2021 (Rp) 0,00
--	---------------------------------------	---------------------------------------

Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.2.2. EKUITAS	31-12-2022 (Rp) 2.226.111.685.626,93	31-12-2021(Rp) 2.229.107.065.081,03
-------------------------	---	--

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.226.111.685.626,93 jika dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.229.107.065.081,03 turun sebesar Rp2.995.379.454,10.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.4.1. PENDAPATAN – LO	Tahun 2022 (Rp) 1.124.540.344.278,40	Tahun 2021 (Rp) 1.090.395.157.683,12
-------------------------------	---	---

Pendapatan-LO Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.124.540.344.278,40 jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.090.395.157.683,12 naik sebesar Rp34.145.186.595,28. Pendapatan-LO Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.89 berikut.

Tabel 5.89
Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	URAIAN	2022	2021	NAIK/ (TURUN)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	60.908.045.327,40	82.815.407.414,62	(21.907.362.087,22)	(26,45)
2.	Pendapatan Transfer	1.037.210.712.125,00	964.939.771.194,00	72.270.940.931,00	7,49
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	26.421.586.826,00	42.639.979.074,50	(16.218.392.248,50)	(38,04)
	Jumlah	1.124.540.344.278,40	1.090.395.157.683,12	34.145.186.595,28	3,13

Adapun masing-masing akun pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LO	Tahun 2022 (Rp) 60.908.045.327,40	Tahun 2021 (Rp) 82.815.407.414,62
---	--	--

Pendapatan Asli Daerah-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp60.908.045.327,40 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp82.815.407.414,62 turun sebesar Rp21.907.362.087,22 atau 26,45%. Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.90 berikut.



Tabel 5.90
Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	24.070.287.079,13	20.811.676.873,05	3.258.610.206,08	15,66
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	1.331.496.540,00	1.873.785.141,76	(542.288.601,76)	(28,94)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	8.343.002.417,00	8.078.242.319,72	264.760.097,28	3,28
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	27.163.259.291,27	52.051.703.080,09	(24.888.443.788,82)	(47,81)
	Jumlah	60.908.045.327,40	82.815.407.414,62	(21.907.362.087,22)	(26,45)

Masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO	Tahun 2022 (Rp) 24.070.287.079,13	Tahun 2021 (Rp) 20.811.676.873,05
--	--	--

Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2022 sebesar Rp24.070.287.079,13 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp20.811.676.873,05, naik sebesar Rp3.258.610.206,08 atau 15,66%. Dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.91 berikut.

Tabel 5.91
Pendapatan Asli Daerah per Objek Rekening Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	PAJAK DAERAH - LO	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK/ (TURUN)	%
1	Pajak Hotel – LO	10.500.000,00	4.296.000,00	6.204.000,00	144,41
2	Pajak Restoran – LO	3.771.315.169,80	3.004.177.830,50	767.137.339,30	25,54
3	Pajak Hiburan – LO	10.373.500,00	1.300.000,00	9.073.500,00	697,96
4	Pajak Reklame – LO	130.433.565,33	283.958.689,00	(153.525.123,67)	(54,07)
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	11.098.994.302,00	10.622.664.859,55	476.329.442,45	4,48
6	Pajak Air Bawah Tanah – LO	6.266.350,00	37.882.700,00	(31.616.350,00)	(83,46)
7	Pajak Sarang Burung Walet – LO	71.485.000,00	93.333.000,00	(21.848.000,00)	(23,41)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	268.652.466,00	625.517.017,00	(356.864.551,00)	(57,05)
9	PBB Perdesaan dan Perkotaan – LO	3.010.602.453,00	2.972.000.798,00	38.601.655,00	1,30
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – LO	5.691.664.273,00	3.166.545.979,00	2.525.118.294,00	79,74
	Jumlah	24.070.287.079,13	20.811.676.873,05	3.258.610.206,08	15,66

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp24.070.287.079,13 berbeda sebesar Rp917.963.742,33 dengan pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp23.152.323.336,80 (Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LRA) dengan penjelasan sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.92 berikut.

Tabel 5.92
Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah- LO dan Pajak Daerah LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Memorial Pendapatan di terima di muka atas Pajak Reklame	(26.741.562,67)
2	Memorial Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain tahun 2022	962.003.842,00
3	Memorial Penerimaan Pembayaran Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumbner Lain Tahun 2021	(892.066.788,00)
4	Memorial Penerimaan Pembayaran Piutang Pajak Penerangan Jalan Yang Diahasilkan Sendiri Tahun 2021	(144.399.901,00)
5	Memorial Piutang PBBP2 Tahun 2022	1.099.787.054,00
6	Memorial Penerimaan Pembayaran Piutang Piutang PBBP2 Tahun 2021	(80.618.902,00)
	Jumlah	917.963.742,33



Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan basis akrual yaitu pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2022, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2022 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya.

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO diuraikan pada *Lampiran 46*.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1.331.496.540,00	1.873.785.141,76

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp1.331.496.540,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp1.873.785.141,76, turun sebesar Rp542.288.601,76 atau 28,94%. Pendapatan Retribusi Daerah per Objek Rekening Tahun 2022 diuraikan pada Tabel 5.93 berikut.

Tabel 5.93
Pendapatan Retribusi Daerah per Objek Rekening
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	RETRIBUSI DAERAH – LO	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	288.667.900,00	465.100.600,00	(176.432.700,00)	(37,93)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	89.643.000,00	118.543.000,00	(28.900.000,00)	(24,38)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	7.775.000,00	7.600.000,00	175.000,00	2,30
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	88.800.000,00	74.900.000,00	13.900.000,00	18,56
5	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LO	1.050.000,00	2.400.000,00	(1.350.000,00)	(56,25)
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	23.121.000,00	25.695.500,00	(2.574.500,00)	(10,02)
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	319.433.400,00	292.377.800,00	27.055.600,00	9,25
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	245.486.622,00	450.001.333,33	(204.514.711,33)	(45,45)
9	Retribusi Tempat Pelelangan – LO	900.000,00	5.030.000,00	(4.130.000,00)	(82,11)
10	Retribusi Terminal – LO	5.150.000,00	4.975.000,00	175.000,00	3,52
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	31.200.000,00	28.855.000,00	2.345.000,00	8,13
12	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	0,00	10.108.000,00	(10.108.000,00)	(100,00)
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO	35.187.998,00	32.712.948,00	2.475.050,00	7,57
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	39.675.000,00	20.805.000,00	18.870.000,00	90,70
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	155.406.620,00	334.680.960,43	(179.274.340,43)	(53,57)
	Jumlah	1.331.496.540,00	1.873.785.141,76	(542.288.601,76)	(28,94)

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.331.496.540,00, sama dengan pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp1.331.496.540,00 Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 13 SKPD Pengelola yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemungutan Retribusi Daerah didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO diuraikan pada *Lampiran 47*.



5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	8.343.002.417,00	8.078.242.319,72

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan dividen dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Badan Usaha Milik Daerah (PT Bank Pembangunan Daerah Jambi). Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2022 sebesar Rp8.343.002.417,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp8.078.242.319,72, naik sebesar Rp 264.760.097,28 atau 3,28%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2022 sebesar Rp8.343.002.417,00, berbeda sebesar Rp 264.760.097,28 dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA sebesar Rp8.078.242.319,72 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan*). Perbedaan tersebut dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.94 berikut:

Tabel 5.94
Penjelasan Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LO dengan LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pendapatan atas Pembayaran Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021	(8.078.242.319,72)
2	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022	8.343.002.417,00
	Jumlah	264.760.097,28

5.4.1.1.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	27.163.259.291,27	52.051.703.080,09

Penerimaan PAD Lainnya-LO untuk periode Tahun 2022 sebesar Rp27.163.259.291,27 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp52.051.703.080,09, turun sebesar Rp24.888.443.788,82 atau 47,81%. Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO per Objek Rekening Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.95 berikut.

Tabel 5.95
Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO per Objek Rekening Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA – LO	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO	2.302.358.500,00	2.295.569.081,00	6.789.419,00	0,30
2	Penerimaan Jasa Giro – LO	3.042.720.573,09	1.768.232.423,95	1.274.488.149,14	72,08
3	Pendapatan Bunga – LO	1.916.923.801,79	2.977.375.552,41	(1.060.451.750,62)	(35,62)
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.740.862.320,60	1.630.128.927,21	110.733.393,39	6,79
5	Pendapatan Denda Pajak – LO	50.818.767,00	53.998.885,00	(3.180.118,00)	(5,89)
6	Pendapatan dari Pengembalian –LO	694.393.331,96	417.021.912,00	277.371.419,96	66,51
7	Pendapatan BLUD – LO	11.048.719.852,83	36.654.913.053,52	(25.606.193.200,69)	(69,86)
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP – LO	6.366.462.144,00	6.254.463.245,00	111.998.899,00	1,79
	Jumlah	27.163.259.291,27	52.051.703.080,09	(24.888.443.788,82)	(47,81)

PAD Lainnya-LO Tahun 2022 sebesar Rp27.163.259.291,27 berbeda sebesar Rp516.958.865,72 dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah LRA



sebesar Rp26.646.300.425,55 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*) dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.96 berikut.

Tabel 5.96
Penjelasan Selisih PAD Lainnya-LO dan Lain-lain PAD yang sah LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Penerimaan pembayaran piutang KPN	(3.260.000,00)
2	Penerimaan pembayaran piutang TPTGR	(24.500.000,00)
3	Penerimaan Pembayaran piutang BLUD Tahun 2021	(355.550.700,00)
4	Piutang BLUD Tahun 2022	498.807.545,00
5	Penerimaan pembayaran SPAM 2021	(206.061.750,00)
6	Piutang SPAM 2022	640.075.000,00
7	Pendapatan atas Penjualan Sapi Gaduhan	(36.362.600,00)
8	Pendapatan Bunga Remunerasi TDF	3.811.370,72
	Jumlah	516.958.865,72

PAD Lainnya-LO merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Rincian PAD Lainnya-LO diuraikan pada *Lampiran 48*.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO **Tahun 2022 (Rp)** **Tahun 2021 (Rp)**
1.037.210.712.125,00 **964.939.771.194,00**

Pendapatan Transfer-LO adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, adapun Pendapatan Transfer-LO untuk periode Tahun 2022 sebesar Rp1.037.210.712.125,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp964.939.771.194,00, naik sebesar Rp72.270.940.931,00 atau 7,49%. Pendapatan Transfer Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.97 berikut.

Tabel 5.97
Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	942.857.807.899,00	878.302.478.230,00	64.555.329.669,00	7,35
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	16.457.861.000,00	29.915.703.000,00	(13.457.842.000,00)	(44,99)
3.	Transfer Pemerintah Provinsi - LO	77.895.043.226,00	56.721.589.964,00	21.173.453.262,00	37,33
	Jumlah	1.037.210.712.125,00	964.939.771.194,00	72.270.940.931,00	7,49

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pusat-Dana Perimbangan-LO **Tahun 2022 (Rp)** **Tahun 2021 (Rp)**
942.857.807.899,00 **878.302.478.230,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode Tahun 2022 sebesar Rp942.857.807.899,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp878.302.478.230,00, naik sebesar Rp64.555.329.669,00 atau 7,35%. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO per Objek Rekening Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.98 berikut.



Tabel 5.98
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan per Objek Rekening
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN – LO	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Bagi Hasil Pajak – LO	70.936.285.232,00	93.034.089.299,00	(22.097.804.067,00)	(23,75)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	140.646.900.680,00	71.285.919.208,00	69.360.981.472,00	97,30
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	514.065.298.501,00	514.767.343.000,00	(702.044.499,00)	(0,14)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	217.209.323.486,00	199.215.126.723,00	17.994.196.763,00	9,03
	Jumlah	942.857.807.899,00	878.302.478.230,00	64.555.329.669,00	7,35

Rincian Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan diuraikan pada **Lampiran 49**.

Atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak–LO Tahun 2022 sebesar Rp70.936.285.232,00 jika dibandingkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak–LO Tahun 2021 sebesar Rp93.034.089.299,00, turun sebesar Rp22.097.804.067,00 atau 23,75%. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak–LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.99 berikut.

Tabel 5.99
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	DBH Pajak-LO	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOP-LO	321.187.296,00	290.871.030,00	30.316.266,00	10,42
2	DBH Cukai Tembakau-LO	36.425.537,00	20.280.826,00	16.144.711,00	79,61
3	DBH PBB-LO	62.582.162.390,00	85.255.043.170,00	(22.672.880.780,00)	(26,59)
5	DBH PPh Pasal 21-LO	7.996.510.009,00	7.467.894.273,00	528.615.736,00	7,08
	Jumlah	70.936.285.232,00	93.034.089.299,00	(22.097.804.067,00)	(23,75)

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2022 sebesar Rp70.936.285.232,00 berbeda sebesar Rp7.229.786.089,00 jika dibandingkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2022 sebesar Rp63.706.499.143,00. (Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.1. Bagian 1) *Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA*). dengan rincian sebagaimana Tabel 5.100 berikut.

Tabel 5.100
Penjelasan Selisih Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO dengan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	TDF DBH PPh Pasal 21-LO	725.445.594,00
2	TDF DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	18.432.401,00
3	TDF DBH PBB-LO	6.479.138.245,00
4	TDF DBH CHT-LO	6.769.849,00
	Jumlah	7.229.786.089,00



- 2) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2022 sebesar Rp140.646.900.680,00 jika dibandingkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2021 sebesar Rp71.285.919.208,00, naik sebesar Rp69.360.981.472,00 atau 97,30%. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.101 berikut.

Tabel 5.101
Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	DBH Pajak-LO	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	DBH dari Provisi Sumber Daya Kehutanan-LO	5.481.232.812,00	5.992.510.113,00	(511.277.301,00)	(8,53)
2	DBH dari Pertambangan Mineral dan Batubara-Royalty-LO	20.575.734.634,00	8.147.161.450,00	12.428.573.184,00	152,55
3	DBH dari Pungutan Hasil Perikanan-LO	2.170.064.211,00	1.448.877.289,00	721.186.922,00	49,78
4	DBH dari Pertambangan Minyak Bumi-LO	40.252.923.160,00	26.630.788.700,00	13.622.134.460,00	51,15
5	DBH dari Pertambangan Gas Bumi-LO	72.166.434.276,00	29.066.581.656,00	43.099.852.620,00	148,28
6	DBH dari Pertambangan Mineral dan Batubara-- Landrent-LO	511.587,00	0,00	511.587,00	0,00
Jumlah		140.646.900.680,00	71.285.919.208,00	69.360.981.472,00	97,30

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2022 sebesar Rp140.646.900.680,00 berbeda sebesar Rp8.485.235.787,00 jika dibandingkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA TA 2022 sebesar Rp132.161.664.893,00. (Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.1. Bagian 2) *Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA*). dengan rincian sebagaimana Tabel 5.102 berikut.

Tabel 5.102
Penjelasan Selisih Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	TDF DBH SDA Minyak Bumi-LO	2.985.551.364,00
2	TDF DBH SDA Gas Bumi-LO	3.554.219.133,00
3	TDF DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	1.263.499.323,00
4	TDF DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	83.044,00
5	TDF DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	470.129.712,00
6	TDF DBH SDA Perikanan-LO	211.753.211,00
Jumlah		8.485.235.787,00

- 3) Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2022 sebesar Rp514.065.298.501,00 jika dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp514.767.343.000,00, turun sebesar Rp702.044.499,00 atau 0,14%. Nilai Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2022 sama dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA TA 2022 (Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.1. Bagian 3) *Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA*).
- 4) Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2022 sebesar Rp217.209.323.486,00 jika dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp199.215.126.723,00 naik sebesar Rp17.994.196.763,00 atau 9,03%.



Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.103 berikut terdiri dari:

Tabel 5.103
Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	DANA ALOKASI KHUSUS	REALISASI 2022	REALISASI 2021	NAIK / TURUN	%
1	DAK Fisik Reguler	72.586.818.587,00	65.810.938.034,00	6.775.880.553,00	10,30
2	DAK Fisik Penugasan	41.472.418.118,00	43.289.645.118,00	(1.817.227.000,00)	(4,20)
3	DAK Non Fisik	103.150.086.781,00	90.114.543.571,00	13.035.543.210,00	14,47
	JUMLAH	217.209.323.486,00	199.215.126.723,00	17.994.196.763,00	9,03

Nilai Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2022 sama dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA TA 2022 (Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.1. Bagian 4) Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA).

**5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pusat-
Lainnya-LO** Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
16.457.861.000,00 **29.915.703.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO untuk Tahun 2022 sebesar Rp16.457.861.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp29.915.703.000,00, turun sebesar Rp13.457.842.000,00 atau 44,99%. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.104 berikut.

Tabel 5.104
Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
a	Dana Penyesuaian - LO				
1	Dana Insentif Daerah - LO	16.457.861.000,00	29.915.703.000,00	(13.457.842.000,00)	44,99
	JUMLAH	16.457.861.000,00	29.915.703.000,00	(13.457.842.000,00)	44,99

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2022 sebesar Rp16.457.861.000,00 berbeda sebesar Rp 64.480.357.000,00 jika dibandingkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA TA 2022 sebesar Rp80.938.218.000,00 (Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA). Perbedaan tersebut adalah penerimaan dari Dana Desa TA 2022 yang dicatat di LRA namun tidak dapat dicatat pada LO. Hal ini merujuk pada Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa Dana Desa merupakan salah satu jenis contoh penerimaan transfer yang bukan bagian dari pendapatan transfer-LO.

**5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer
Provinsi-LO** Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
77.895.043.226,00 **56.721.589.964,00**

Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode Tahun 2022 sebesar Rp77.895.043.226,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp56.721.589.964,00, naik sebesar Rp21.173.453.262,00 atau 37,33%. Transfer Pemerintah Provinsi-LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.105 berikut.



Tabel 5.105
Rincian Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
I	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	68.595.043.226,00	51.141.589.964,00	17.453.453.262,00	34,13
1	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Provinsi Kendaraan Bermotor (DBH-PKB) – LO	11.440.434.139,00	9.393.470.831,00	2.046.963.308,00	21,79
2	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kend.Bermotor (DBH-BBNKB) – LO	10.835.645.014,00	7.514.306.315,00	3.321.338.699,00	44,20
3	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kend.Bermotor (DBH-PBBNKB) – LO	28.648.724.598,00	20.887.020.010,00	7.761.704.588,00	37,16
4	Pendapatan Bagi Hasil dari Pengemb & Pemanfaatan Air Permukaan – LO	14.361.363,00	12.324.856,00	2.036.507,00	16,52
5	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok – LO	17.655.878.112,00	13.334.467.952,00	4.321.410.160,00	32,41
II	Bantuan Keuangan Desa – LO	9.300.000.000,00	5.580.000.000,00	3.720.000.000,00	66,67
1	Bantuan Keuangan ke Desa – LO	9.300.000.000,00	5.580.000.000,00	3.720.000.000,00	66,67
	JUMLAH	77.895.043.226,00	56.721.589.964,00	21.173.453.262,00	37,33

Transfer Pemerintah Provinsi-LO sebesar Rp77.895.043.226,00 berbeda sebesar Rp14.520.303.479,00 dibandingkan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA sebesar Rp63.374.739.747,00 (Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA) dengan dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.106 berikut.

Tabel 5.106
Penjelasan Selisih Transfer Pemerintah Provinsi-LO dan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Pelunasan Piutang DBH dari Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Des 2021	(1.755.445.875,00)
2	Pelunasan Piutang DBH dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor per 31 Des 2021	(1.885.238.932,00)
3	Pelunasan Piutang DBH dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor per 31 Des 2021	(6.001.816.908,00)
4	Pelunasan Piutang DBH dari Pengembangan dan Pemanfaatan Air Permukaan per 31 Des 2021	(2.842.616,00)
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 2022	3.501.493.752,00
6	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2022	2.836.986.825,00
7	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2022	15.032.428.544,00
8	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 2022	6.962.351,00
9	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok 2022	2.787.776.338,00
	Jumlah	14.520.303.479,00

Pembayaran Piutang DBH sebagaimana tabel di atas merupakan penyesuaian Piutang DBH-PKB, DBH-BBNKB, DBH-PBBNKB dan Air Permukaan per 31 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 275/KEPGUB/BPKPB-2.1/2022 tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun Anggaran 2021



tanggal 29 Maret 2022 dan Keputusan Gubernur Nomor 1048/KEPGUB/BPKPB-2.1/2021 tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Triwulan IV Bulan Oktober Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021.

Pencatatan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi berdasarkan KEPGUB.1075/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Triwulan III Tahun 2022.

KEPGUB.140/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023

KEPGUB.157/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023 tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2022.

5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO **Tahun 2022 (Rp)** **Tahun 2021 (Rp)**
26.421.586.826,00 **42.639.979.074,50**

Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk Tahun 2022 sebesar Rp26.421.586.826,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp42.639.979.074,50, turun sebesar Rp16.218.392.248,50 atau 38,04%. Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.107 berikut.

Tabel 5.107
Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	Pendapatan Hibah	26.421.586.826,00	42.639.979.074,50	(16.218.392.248,50)	(38,04)
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	26.421.586.826,00	42.639.979.074,50	(16.218.392.248,50)	(38,04)

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp26.421.586.826,00 terdiri dari Pendapatan Hibah Aset dari Pemerintah Pusat sebesar Rp25.099.995.386,00, dan Pendapatan Hibah Persediaan dari Pemerintah Daerah sebesar Rp1.321.591.440,00. dengan penjelasan sebagaimana Tabel 5.108 berikut.



Tabel 5.108
Rincian Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

Hibah Pemerintah Pusat		Uraian	No BAST	Jumlah
No	SKPD			
1	Dinas Perkim	Hibah Rusunawa 2022	258/PKS/Dr/2022/192/380/DISPERKIM/JT/2022	13.583.394.867,00
2	Dinas Peternakan	Penerimaan Eartag dan Aflicator dari Kementan 2022	3294/PL.010/F2.2/8/2022, 3294/PL.010/F2.2/8/2022,	359.140.000,00
3	Dinas Perkim	Hibah dari Kementrian PUPR Dirjen Sumber Daya Air	1217.1/BA/DC/2022/032/12/Bakeuda/2022	11.157.460.519,00
Total Hibah Pemerintah Pusat				25.099.995.386,00
Hibah Pemerintah Daerah		Uraian	No BAST	Jumlah
No	SKPD			
1	DPPKB	Hibah Persediaan	006/KU.03.06/J.I/2022, 053/KU.03.06/J.I/2022, 107/KU.03.06/J.I/2022, 134/KU.03.06/J.I/2022, 173/KU.03.06/J.I/2022, 233/KU.03.06/J.I/2022, 260/KU.03.06/J.I/2022	502.941.550,00
2	DSPPA	Hibah Persediaan	07.b/LINJAMSOS/I/2022, 18/BASTB/SOSDUKCAPIL - 2.1/III/2022, 27/PSKBA/2022	131.281.747,00
3	BPBD	Hibah Persediaan	BA.052/BPBD.LOG-3.2/X/2022, BA.053/BPBD.-3.2/X/2022	38.403.596,00
4	RSUD	Hibah Persediaan	182/Covid-19/IFP/SDK/Diskes/2022	648.964.547,00
Total Hibah Pemerintah Daerah				1.321.591.440,00
Total Hibah				26.421.586.826,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp26.421.586.826,00 berbeda sebesar Rp26.421.586.826,00 dibandingkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA sebesar Rp0,00 (Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.4. Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA) Hal ini karena Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2022 merupakan pendapatan Hibah yang seluruhnya berupa Aset Tetap dan Persediaan yang nilai pencatatannya berdasarkan nilai yang terdapat dalam Berita Acara Serah terima Aset/ Persediaan sehingga tidak dicatat di LRA.

5.4.2. BEBAN – LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1.085.495.073.564,46	970.502.869.635,59

Jumlah Beban - LO untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.085.495.073.564,46 dibandingkan Beban - LO Tahun 2021 sebesar Rp970.502.869.635,59, naik sebesar Rp114.992.203.928,87 atau 11,85%. Rincian Beban per SKPD diuraikan pada *Lampiran 50*. Beban – LO Tahun 2022 menurut jenis beban dan komposisinya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.109 berikut.

Tabel 5.109
Beban-LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK/TURUN	%
1	Beban Pegawai	394.123.693.958,67	407.786.345.844,00	(13.662.651.885,33)	(3,35)
2	Beban Persediaan	95.359.785.571,53	77.762.861.372,57	17.596.924.198,96	22,63
3	Beban Jasa	143.904.750.813,56	138.416.333.523,17	5.488.417.290,39	3,97
4	Beban Pemeliharaan	20.102.457.204,49	18.328.860.251,00	1.773.596.953,49	9,68
5	Beban Perjalanan Dinas	38.385.024.221,00	17.938.249.622,00	20.446.774.599,00	113,98
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah	25.231.320.398,00	25.354.930.410,68	(123.610.012,68)	(0,49)
9	Beban Bantuan Sosial	336.360.000,00	1.129.445.000,00	(793.085.000,00)	(70,22)
10	Beban Penyusutan	292.697.588.406,07	214.111.736.809,00	78.585.851.597,07	36,70
11	Beban Transfer	74.627.061.196,00	68.698.270.336,00	5.928.790.860,00	8,63
12	Beban Lain-Lain	0,00	280.866.511,00	(280.866.511,00)	(100,00)
13	Beban Penyisihan Piutang	727.031.795,14	694.969.956,17	32.061.838,97	4,61
14	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.085.495.073.564,46	970.502.869.635,59	114.992.203.928,87	11,85



5.4.2.1. Beban Pegawai	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	394.123.693.958,67	407.786.345.844,00

Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp394.123.693.958,67 jika dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp407.786.345.844,00, turun sebesar Rp(13.662.651.885,33) atau 3,35%. Rincian Beban Pegawai per SKPD diuraikan pada **Lampiran 51**. Beban Pegawai Tahun 2022 menurut jenisnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.110 berikut.

Tabel 5.110
Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	BEBAN PEGAWAI	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	239.866.081.826,67	251.128.840.156,00	(11.262.758.329,33)	(4,48)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	68.969.512.040,00	66.732.076.988,00	2.237.435.052,00	3,35
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	70.508.068.291,00	75.155.776.911,00	(4.647.708.620,00)	(6,18)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.769.409.881,00	13.818.183.827,00	(48.773.946,00)	(0,35)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDHWKDH	409.021.920,00	449.867.962,00	(40.846.042,00)	(9,08)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDHWKDH	601.600.000,00	501.600.000,00	100.000.000,00	19,94
	JUMLAH	394.123.693.958,67	407.786.345.844,00	(13.662.651.885,33)	(3,35)

Beban Pegawai-LO Tahun 2022 sebesar Rp394.123.693.958,67 berbeda sebesar Rp35.419.425,67 dengan Belanja Pegawai-LRA Tahun 2022 sebesar Rp394.088.274.533,00. (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai*). Penjelasan atas perbedaan tersebut diuraikan pada Tabel 5.111 berikut.

Tabel 5.111
Penjelasan Perbedaan Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI
1	Pembayaran Utang Belanja Pegawai 2021	(307.220.114,00)
2	Pencatatan Utang Belanja Pegawai 2022	342.639.539,67
	JUMLAH	35.419.425,67

5.4.2.2. Beban Persediaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	95.359.785.571,53	77.762.861.372,57

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp95.359.785.571,53 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp77.762.861.372,57, naik sebesar Rp17.596.924.198,96 atau 22,63%. Rincian Beban Persediaan per SKPD diuraikan pada **Lampiran 52**. Beban Persediaan Tahun 2022 menurut jenisnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.112 berikut.

Tabel 5.112
Rincian Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	BEBAN PERSEDIAAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Beban Barang Pakai Habis	91.432.923.605,53	77.762.861.372,57	13.670.062.232,96	17,58
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	3.926.861.966,00	0,00	3.926.861.966,00	0,00
	JUMLAH	95.359.785.571,53	77.762.861.372,57	17.596.924.198,96	22,63



Beban Persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama.

Beban Persediaan-LO Tahun 2022 sebesar Rp95.359.785.571,53 berbeda sebesar Rp 21.011.730.423,53 dari Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Barang tak Habis Pakai LRA TA 2022 sebesar Rp74.348.055.148,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.2. Belanja Barang pada Tabel 5.19*). Penjelasan atas perbedaan tersebut diuraikan pada Tabel 5.113 berikut.

Tabel 5.113
Penjelasan Perbedaan Beban Persediaan-LO dan
Belanja Barang Persediaan-LRA

(dalam rupiah)

No	URAIAN	NILAI
1	Persediaan per 31 Desember 2022	(8.281.500.788,64)
2	Hibah persediaan 2022 terpakai di 2022	827.414.463,17
3	Persediaan 2021 yang menjadi beban persediaan 2022	6.351.393.983,00
4	Belanja Modal yang tidak memenuhi Kriteria Aset	5.667.138.084,00
5	Belanja Barang Persediaan pada BLUD	8.450.854.950,00
6	Belanja Barang Persediaan dari Dana BOS	10.230.758.754,00
7	Utang Belanja Barang Persediaan Tahun 2022 pada BLUD	23.928.080,00
8	Pelunasan Utang Belanja Barang Persediaan Tahun 2021 pada BLUD	(2.099.495.260,00)
9	Belanja Persediaan yang memenuhi Kriteria aset	(161.603.042,00)
10	Utang Belanja Barang Persediaan Tahun 2022 Kegiatan Prolanis FKTP	2.841.200,00
	Jumlah	21.011.730.423,53

5.4.2.3. Beban Jasa

Tahun 2022 (Rp)
143.904.750.813,56

Tahun 2021 (Rp)
138.416.333.523,17

Beban Jasa meliputi antara lain jasa kantor, iuran jaminan asuransi, jasa sewa, dll. Beban Jasa Tahun 2022 sebesar Rp143.904.750.813,56 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp138.416.333.523,17, naik sebesar Rp5.488.417.290,39 atau 3,97%. Rincian Beban Jasa per SKPD diuraikan pada *Lampiran 53*. Beban Jasa Tahun 2022 menurut jenisnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.114 berikut.

Tabel 5.114
Rincian Beban Jasa Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	BEBAN JASA	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Beban Jasa Kantor	119.437.860.379,40	122.355.406.291,81	(2.917.545.912,41)	(2,38)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	6.993.670.675,66	6.636.397.463,33	357.273.212,33	5,38
3	Beban Sewa Tanah	28.500.000,00	7.000.000,00	21.500.000,00	307,14
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.617.874.367,00	2.188.526.000,00	429.348.367,00	19,62
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	987.543.734,00	797.846.666,33	189.697.067,67	23,78
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.250.824.917,50	2.620.343.587,70	630.481.329,80	24,06
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	702.704.780,00	1.179.247.000,00	(476.542.220,00)	(40,41)
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.365.746.838,00	1.326.307.000,00	3.039.439.838,00	229,17
9	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.520.025.122,00	1.305.259.514,00	4.214.765.608,00	322,91
	JUMLAH	143.904.750.813,56	138.416.333.523,17	5.488.417.290,39	3,97



Beban Jasa-LO Tahun 2022 sebesar Rp143.904.750.813,56 berbeda sebesar Rp - Rp49.868.908.694,44 dari Belanja Jasa di LRA TA 2022 sebesar Rp193.773.659.508 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.2. Belanja Barang per objek rekening pada Tabel 5.19*). Penjelasan atas perbedaan tersebut diuraikan pada Tabel 5.115 sebagai berikut.

Tabel 5.115
Penjelasan Perbedaan Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa-LRA

(dalam rupiah)

No	URAIAN	NILAI
1	Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021	280.034.296,33
2	Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022	(234.728.745,15)
3	Pelunasan Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2021	(14.201.727.556,12)
4	Pencatatan Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2022	1.270.219.098,00
7	Belanja Barang Jasa BLUD yang tidak termasuk beban jasa	(9.340.132.676,00)
8	Belanja Barang Jasa BOS yang tidak termasuk beban jasa	(11.558.424.997,00)
9	Belanja Barang Jasa yang Dikapitalisasi Menjadi Aset	(16.087.148.114,50)
10	Utang Belanja Jasa Tahun 2022 Kegiatan Prolanis FKTP	3.000.000,00
	JUMLAH	(49.868.908.694,44)

5.4.2.4. Beban Pemeliharaan**Tahun 2022 (Rp)****20.102.457.204,49****Tahun 2021 (Rp)****18.328.860.251,00**

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 sebesar Rp20.102.457.204,49 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp18.328.860.251,00, naik sebesar Rp1.773.596.953,49 atau 9,68%. Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD diuraikan pada **Lampiran 54**. Beban Pemeliharaan Tahun 2022 menurut jenisnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.116 berikut.

Tabel 5.116
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	BEBAN PEMELIHARAAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.642.064.999,34	7.207.612.876,00	2.434.452.123,34	33,78
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.438.173.428,15	7.599.078.818,00	(1.160.905.389,85)	(15,28)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.764.415.960,00	3.521.168.557,00	243.247.403,00	6,91
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	257.802.817,00	1.000.000,00	256.802.817,00	25.680,28
	JUMLAH	20.102.457.204,49	18.328.860.251,00	1.773.596.953,49	9,68

Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2022 sebesar Rp20.102.457.204,49 berbeda sebesar Rp437.946.935,49 dari Belanja Pemeliharaan di LRA TA 2022 sebesar Rp19.664.510.269,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.2. Belanja Barang per objek rekening pada Tabel 5.19*) Penjelasan atas perbedaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.117 berikut.



Rp123.610.012,68 atau 0,49%. Beban Hibah Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.119 berikut.

Tabel 5.119
Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	BEBAN HIBAH	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	276.580.120,00	0,00	276.580.120,00	0,00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	3.349.500,00	(3.349.500,00)	(100)
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	24.153.265.078,00	24.550.105.710,68	(396.840.632,68)	(1,62)
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	801.475.200,00	801.475.200,00	0,00	0,00
	JUMLAH	25.231.320.398,00	25.354.930.410,68	(123.610.012,68)	(0,49)

Beban Hibah Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022 dan 2021 diuraikan pada **Lampiran 56** sedangkan Rincian Beban Hibah Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022 terdapat pada **Lampiran 57**.

Nilai Beban Hibah-LO Tahun 2022 sebesar Rp25.231.320.398,00 berbeda sebesar Rp1.997.250.880,00 dari realisasi Belanja Hibah-LRA TA 2022 sebesar Rp27.228.571.278,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.05. Belanja Hibah*). Penjelasan atas perbedaan tersebut diuraikan pada Tabel 5.120 berikut.

Tabel 5.120
Penjelasan Perbedaan Beban Hibah - LO dan Belanja Hibah -LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Beban Hibah yang menjadi Persediaan	(2.302.831.000,00)
2	Beban Hibah Atas Aset Tanah dari Setda	1.156.000,00
3	Beban Hibah Atas Kendaraan dari Setda ke Polres	29.000.000,00
4	Beban Hibah atas Aset (Tanah yang di Hibahkan dari Bakeuda ke Kejaksaan)	275.424.120,00
	JUMLAH	(1.997.250.880,00)

5.4.2.9. Beban Bantuan Sosial **Tahun 2022 (Rp)**
336.360.000,00 **Tahun 2021 (Rp)**
1.129.445.000,00

Nilai Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2022 sebesar Rp336.360.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp1.129.445.000,00, turun sebesar Rp793.085.000,00 atau 70,22%.

Nilai Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2022 sebesar Rp336.360.000,00 tidak terdapat perbedaan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial-LRA TA 2022 sebesar Rp336.360.000,00.

5.4.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi **Tahun 2022 (Rp)**
292.697.588.406,07 **Tahun 2021 (Rp)**
214.111.736.809,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah Beban Penyusutan atas Aset Tetap dan Beban Amortisasi atas Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari Belanja Modal sebelum Tahun 2022 sedangkan atas Aset Tetap yang diperoleh dari Belanja Modal Tahun 2022 baru akan dilakukan penyusutan pada Tahun 2022. Hal ini diatur dalam Kebijakan Akuntansi dimana perhitungan penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud dimulai satu tahun setelah perolehan aset tetap tersebut.



Rincian Beban Penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp292.697.588.406,07 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp214.111.736.809,00, naik sebesar Rp78.585.851.597,07 atau 36,70%. Rincian Beban Penyusutan per SKPD diuraikan pada **Lampiran 58**.

Rincian Beban Penyusutan Tahun 2022 dan 2021 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.121 berikut.

Tabel 5.121
Beban Penyusutan Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	BEBAN PENYUSUTAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	40.776.169.575,17	37.783.160.299,59	2.993.009.275,58	7,92
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.863.448.197,88	22.262.280.187,67	7.601.168.010,21	34,14
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	221.607.419.843,28	153.384.926.907,88	68.222.492.935,40	44,48
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	268.630.789,74	450.772.213,86	(182.141.424,12)	(40,41)
5	Beban Amortisasi	181.920.000,00	230.597.200,00	(48.677.200,00)	(21,11)
	JUMLAH	292.697.588.406,07	214.111.736.809,00	78.585.851.597,07	36,70

5.4.2.11. Beban Transfer Tahun 2022 (Rp)
74.627.061.196,00 Tahun 2021 (Rp)
68.698.270.336,00

Nilai Beban Transfer Tahun 2022 sebesar Rp74.627.061.196,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp68.698.270.336,00, turun sebesar Rp5.928.790.860,00 atau 8,63%. Rincian Beban Transfer Tahun 2022 dapat dirincikan sebagaimana pada Tabel 5.122 berikut.

Tabel 5.122
Rincian Beban Transfer Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.331.937.048,00	1.930.294.681,00	401.642.367,00	20,81
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	72.295.124.148,00	66.767.975.655,00	5.527.148.493,00	8,28
3	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	74.627.061.196,00	68.698.270.336,00	5.928.790.860,00	8,63

Nilai Beban Transfer Tahun 2022 sebesar Rp74.627.061.196,00 berbeda sebesar Rp64.480.357.000,00 dari Realisasi Transfer-LRA TA 2022 sebesar Rp139.107.418.196,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.2.4. Belanja Transfer*). Perbedaan sebesar Rp64.480.357.000,00 tersebut adalah realisasi Transfer Dana Desa TA 2022. Mengacu pada Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa penerimaan Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten bukan bagian dari Pendapatan-LO sehingga penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa juga tidak dicatat sebagai Beban-LO.

5.4.2.12. Beban Lain-Lain Tahun 2022 (Rp)
0,00 Tahun 2021 (Rp)
280.866.511,00

Saldo Beban Lain-lain Tahun 2022 sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan Beban lain-lain Tahun 2021 sebesar Rp280.866.511,00 turun sebesar Rp280.866.511,00 atau 100,00%.



5.4.2.13. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
727.031.795,14 Tahun 2021 (Rp)
694.969.956,17

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp727.031.795,14 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp694.969.956,17, turun sebesar Rp 32.061.838,97 atau 4,61%. Rincian Beban Penyisihan Piutang diuraikan pada Tabel 5.123 berikut.

Tabel 5.123
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Beban Penyisihan Piutang	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	408.807.482,30	428.815.211,77	(20.007.729,47)	(4,67)
2	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.715.012,09	40.391.211,60	1.323.800,49	3,28
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	276.509.300,75	225.763.532,80	50.745.767,95	22,48
	Jumlah	727.031.795,14	694.969.956,17	32.061.838,97	4,61

5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI Tahun 2022 (Rp)
39.045.270.713,94 Tahun 2021 (Rp)
119.892.288.047,53

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus dari operasi Tahun 2022 sebesar Rp39.045.270.713,94, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang mengalami surplus sebesar Rp119.892.288.047,53 turun sebesar Rp80.847.017.333,59 atau 67,43%.

5.4.4. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Tahun 2022 (Rp)
(52.137.400,00) Tahun 2021 (Rp)
0,00

Surplus Defisit dari Kegiatan Non operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan Non operasional.

Defisit dari Kegiatan Non operasional Tahun 2022 sebesar Rp52.137.400,00 merupakan Kerugian dari Penjualan Sapi Gaduhan sebanyak 7 ekor pada Dinas Peternakan dimana nilai NRV 7 ekor sapi yang terjual senilai Rp88.500.000,00 dan hasil Penjualan senilai Rp36.362.600. Hal ini dikarekan Sapi yang di jual dalam kondisi sakit sehingga dijual tidak sesuai dengan harga pasar.

5.4.5. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA Tahun 2022 (Rp)
38.993.133.313,94 Tahun 2021 (Rp)
119.892.288.047,53

Selisih lebih/kurang antara Surplus/Defisit Dari Operasi dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non operasional merupakan Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2022 mengalami surplus sebesar Rp38.993.133.313,94, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang mengalami surplus sebesar Rp119.892.288.047,53 turun sebesar Rp80.889.154.733,59 atau 67,48%.

5.4.6. POS LUAR BIASA Tahun 2022 (Rp)
(3.151.839.914,00) Tahun 2021 (Rp)
0,00

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pos Luar Biasa Tahun 2022 sebesar Rp3.151.839.914,00 berbeda sebesar



Rp3.151.839.914,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Hal ini merupakan pos dari Belanja Tidak terduga dengan rincian yang telah di jelaskan pada bagian belanja tidak terduga pada Laporan Realisasi Anggaran.

5.4.6.1. Pendapatan Luar Biasa	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
	0,00	0,00

Pendapatan Luar Biasa Tahun 2022 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp0,00.

5.4.6.2. Beban Luar Biasa	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
	3.151.839.914,00	0,00

Beban Luar Biasa Tahun 2022 sebesar Rp3.151.839.914,00 berbeda sebesar Rp3.151.839.914,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Beban Luar Biasa Merupakan Pengeluaran Tidak Terduga yang diharapkan tidak terjadi Berulang. Hal ini merupakan Beban dari Belanja Tidak terduga dengan rincian yang telah di jelaskan pada bagian belanja tidak terduga pada Laporan Realisasi Anggaran.

5.4.7. SURPLUS/DEFISIT- LO	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
	35.841.293.399,94	119.892.288.047,53

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional Tahun 2022 mengalami surplus sebesar Rp35.841.293.399,94 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp119.892.288.047,53 turun sebesar Rp84.050.994.647,59 atau 70,11%.

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2022 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran. Arus Kas Bersih Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut.

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
	239.247.820.971,07	341.639.517.295,70

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar Rp239.247.820.971,07 jika dibandingkan dengan nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 sebesar Rp341.639.517.295,70, turun sebesar Rp102.391.696.324,63. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi terdiri dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.124 berikut.

Tabel 5.124
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.128.759.398.542,07	1.160.897.246.707,75
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	889.511.577.571,00	819.257.729.412,05
	JUMLAH	239.247.820.971,07	341.639.517.295,70



5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi **Tahun 2022 (Rp)** **Tahun 2021 (Rp)**
1.128.759.398.542,07 **1.160.897.246.707,75**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi merupakan arus kas masuk yang berasal dari penerimaan kas Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2022 yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi sebesar Rp1.128.759.398.542,07 jika dibandingkan dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 sebesar Rp1.160.897.246.707,75, turun sebesar Rp32.137.848.165,68. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.125 berikut.

Tabel 5.125
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Pendapatan Pajak Daerah	23.152.323.336,80	19.776.698.793,50
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.331.496.540,00	1.836.406.808,43
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.078.242.319,72	7.088.808.214,73
4	Lain-lain PAD yang Sah	24.741.592.575,55	50.666.867.754,09
5	Dana Bagi Hasil Pajak	63.706.499.143,00	100.966.517.510,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	132.161.664.893,00	72.615.219.679,00
7	Dana Alokasi Umum	514.065.298.501,00	514.767.343.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	217.209.323.486,00	199.215.126.723,00
9	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
10	Dana Penyesuaian	80.938.218.000,00	106.563.874.980,00
11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.074.739.747,00	50.381.278.245,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
13	Bantuan Keuangan Desa	9.300.000.000,00	5.580.000.000,00
14	Pendapatan Hibah	0,00	31.439.105.000,00
15	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	1.128.759.398.542,07	1.160.897.246.707,75

5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi **Tahun 2022 (Rp)** **Tahun 2021 (Rp)**
889.511.577.571,00 **819.257.729.412,05**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi merupakan arus keluar kas yang berasal dari Pengeluaran Kas Aktivitas Operasional Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2022 yang ditujukan untuk kegiatan Operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi sebesar Rp889.511.577.571,00 jika dibandingkan dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 sebesar Rp819.257.729.412,05, naik sebesar Rp70.253.848.158,95. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.126 berikut.



Tabel 5.126
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi
Tahun 2022 dan 2021

No	ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Belanja Pegawai	394.088.274.533,00	407.563.061.948,00
2	Belanja Barang	325.599.113.650,00	242.128.766.226,37
3	Bunga	0,00	0,00
4	Subsidi	0,00	0,00
5	Hibah	27.228.571.278,00	22.809.147.410,68
6	Bantuan Sosial	336.360.000,00	1.129.445.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
8	Belanja Tak Terduga	3.151.839.914,00	280.866.511,00
9	Bagi Hasil Pajak	2.331.937.048,00	1.930.294.681,00
11	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	136.775.481.148,00	143.416.147.635,00
	JUMLAH	889.511.577.571,00	819.257.729.412,05

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi **Tahun 2022 (Rp)** **Tahun 2021 (Rp)**
(292.142.695.525,02) **(228.214.327.631,13)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi terdiri atas Arus Masuk Kas dari penerimaan Aktivitas Investasi Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2022 yang ditujukan untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Non Keuangan Lainnya sebesar Rp292.142.695.525,02, jika dibandingkan dengan Arus Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 sebesar Rp228.214.327.631,13, turun sebesar Rp63.928.367.893,89. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.127 berikut.

Tabel 5.127
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	1.904.707.850,00	2.232.690.331,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	294.047.403.375,02	230.447.017.962,13
	JUMLAH	(292.142.695.525,02)	(228.214.327.631,13)

5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi **Tahun 2022 (Rp)** **Tahun 2021 (Rp)**
1.904.707.850,00 **2.232.690.331,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.904.707.850,00, jika dibandingkan dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 sebesar Rp2.232.690.331,00, turun sebesar Rp327.982.481,00. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.128 berikut.



Tabel 5.128
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
2	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
3	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	140.225.200,00	247.536.399,00
6	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	1.764.482.650,00	1.985.153.932,00
7	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
	JUMLAH	1.904.707.850,00	2.232.690.331,00

5.5.2.2.	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2022 (Rp) 294.047.403.375,02	Tahun 2021 (Rp) 230.447.017.962,13
-----------------	---	---	---

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 merupakan kas keluar yang berasal dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar Rp294.047.403.375,02, jika dibandingkan dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 sebesar Rp230.447.017.962,13, naik sebesar Rp63.600.385.412,89. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.129 berikut.

Tabel 5.129
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Belanja Tanah	636.221.000,00	433.812.965,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	31.447.159.821,00	51.406.129.983,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	50.297.667.167,60	47.749.272.485,93
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	204.369.092.804,42	126.096.460.538,20
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.811.262.582,00	4.261.698.990,00
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.486.000.000,00	499.643.000,00
	JUMLAH	294.047.403.375,02	230.447.017.962,13

5.5.3.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2022 (Rp) 0,00	Tahun 2021 (Rp) 0,00
---------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.5.3.1.	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2022 (Rp) 0,00	Tahun 2021 (Rp) 0,00
-----------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------

Nilai Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.



5.5.3.2.	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2022 (Rp) 0,00	Tahun 2021 (Rp) 0,00
-----------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------

Nilai Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.5.4.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2022 (Rp) 0,00	Tahun 2021 (Rp) 0,00
---------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.130 berikut.

Tabel 5.130
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	78.485.066.395,00	70.687.092.016,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	78.485.066.395,00	70.687.092.016,00
	JUMLAH	0,00	0,00

5.5.4.1.	Arus masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2022 (Rp) 78.485.066.395,00	Tahun 2021 (Rp) 70.687.092.016,00
-----------------	--	--	--

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 sebesar Rp78.485.066.395,00 jika dibandingkan dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 sebesar Rp70.687.092.016,00, naik sebesar Rp7.797.974.379,00. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.131 berikut.

Tabel 5.131
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	78.485.066.395,00	70.687.092.016,00
2	Transfer dari OPD	0,00	0,00
	JUMLAH	78.485.066.395,00	70.687.092.016,00

5.5.4.1.1.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	Tahun 2022 (Rp) 78.485.066.395,00	Tahun 2021 (Rp) 70.687.092.016,00
-------------------	--	--	--

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2022 merupakan potongan pihak ketiga yang berasal dari potongan SP2D Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp78.485.066.395,00. Jika dibandingkan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2021 sebesar Rp70.687.092.016,00, naik sebesar Rp7.797.974.379,00. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.132 berikut.



Tabel 5.132
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	RINCIAN PERHITUNGAN Fihak KETIGA	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	PPN	31.056.209.262,00	21.875.226.606,00
2	PPh Pasal 21	11.728.356.004,00	12.810.774.289,00
3	PPh Pasal 22	669.818.724,00	836.992.021,00
4	PPh Pasal 23	289.627.256,00	183.126.469,00
5	PPh Pasal 4 Ayat (2)	4.381.749.950,00	3.737.863.282,00
6	Iuran Asuransi Kesehatan	1.820.426.506,00	1.922.906.336,00
7	Jaminan Kematian (JKM)	1.112.058.184,00	1.148.620.753,00
8	Jaminan Kesehatan Kerja (JKK)	370.687.279,00	382.873.448,00
9	Iuran Wajib Pegawai 2%	1.853.519.675,00	1.917.621.610,00
10	Iuran Wajib Pegawai 8%	13.445.250.637,00	13.890.577.317,00
11	Taperum	0,00	0,00
12	BPJS 1%	1.232.740.123,00	1.221.271.849,00
13	BPJS 4%	10.524.622.795,00	10.759.238.036,00
	JUMLAH	78.485.066.395,00	70.687.092.016,00

5.5.4.1.2. Transfer dari SKPD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	0,00	0,00

Nilai Transfer dari SKPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan Transfer dari SKPD per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	78.485.066.395,00	70.687.092.016,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris selama Tahun 2022 merupakan aktivitas pengeluaran kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2022 yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Pemerintah sebesar Rp78.485.066.395,00 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.133 berikut.

Tabel 5.133
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	78.485.066.395,00	70.687.092.016,00
2	Transfer ke SKPD	0,00	0,00
	JUMLAH	78.485.066.395,00	70.687.092.016,00

5.5.4.2.1 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	78.485.066.395,00	70.687.092.016,00

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga selama Tahun 2022 merupakan potongan pihak ketiga yang berasal dari potongan SP2D Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2022 sebesar Rp78.485.066.395,00 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.134 berikut.



Tabel 5.134
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	RINCIAN PERHITUNGAN Fihak KETIGA	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	PPN	31.056.209.262,00	21.875.226.606,00
2	PPH Pasal 21	11.728.356.004,00	12.810.774.289,00
3	PPH Pasal 22	669.818.724,00	836.992.021,00
4	PPH Pasal 23	289.627.256,00	183.126.469,00
5	PPH Pasal 4 Ayat (2)	4.381.749.950,00	3.737.863.282,00
6	Iuran Asuransi Kesehatan	1.820.426.506,00	1.922.906.336,00
7	Jaminan Kematian (JKM)	1.112.058.184,00	1.148.620.753,00
8	Jaminan Kesehatan Kerja (JKK)	370.687.279,00	382.873.448,00
9	Iuran Wajib Pegawai 2%	1.853.519.675,00	1.917.621.610,00
10	Iuran Wajib Pegawai 8%	13.445.250.637,00	13.890.577.317,00
11	Taperum	0,00	0,00
12	BPJS 1%	1.232.740.123,00	1.221.271.849,00
13	BPJS 4%	10.524.622.795,00	10.759.238.036,00
	JUMLAH	78.485.066.395,00	70.687.092.016,00

5.5.4.2.2. Transfer ke SKPD

Tahun 2022 (Rp)
0,00

Tahun 2021 (Rp)
0,00

0,00

Nilai Transfer ke SKPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan Transfer ke SKPD per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Tahun 2022 (Rp)
98.828.692.083,86

Tahun 2021 (Rp)
151.814.150.625,81

Saldo Akhir Kas Tahun 2022 sebesar Rp98.828.692.083,86 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.135 berikut.

Tabel 5.135
Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	SALDO AKHIR KAS	2022	2021
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	239.247.820.971,07	341.639.517.295,70
2	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(292.142.695.525,02)	(228.214.327.631,13)
3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
5	Jumlah Kenaikan / Penurunan Kas Bersih	(52.894.874.553,95)	113.425.189.664,57
6	Saldo Awal Kas (SiLPA)	151.720.237.630,81	38.295.047.966,24
7	Koreksi Saldo Awal	3.329.007,00	0,00
8	Saldo Akhir Kas (SiLPA)	98.828.692.083,86	151.720.237.630,81
9	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	93.912.995,00
	JUMLAH SALDO AKHIR KAS	98.828.692.083,86	151.814.150.625,81

5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan dan pengurangan Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.



5.6.1. EKUITAS AWAL	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
	2.229.107.065.081,03	2.101.151.030.419,42

Jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp2.229.107.065.081,03 merupakan saldo Ekuitas Tahun 2022. Rincian Ekuitas awal per SKPD diuraikan pada *Lampiran 59*.

5.6.2. SURPLUS/DEFISIT-LO	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
	35.841.293.399,94	119.892.288.047,53

Penambahan/pengurangan Ekuitas yang bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan Tahun 2022 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca sebesar Rp35.841.293.399,94. Rincian Surplus/Defisit-LO pada SKPD diuraikan pada *Lampiran 60*.

5.6.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
	(38.836.672.854,04)	8.063.746.614,08

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.136 berikut.

Tabel 5.136
Rincian Kesalahan Pencatatan yang Mempengaruhi Ekuitas Tahun 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Koreksi Pencatatan Aset Tetap	2.871.181.000,00	7.217.683.029,09
2	Koreksi Akumulasi Penyusutan	(41.670.727.524,64)	0,00
3	Koreksi Pencatatan Piutang	202.631.000,00	0,00
4	Koreksi Pencatatan Penyisihan Piutang	(80.977.831,40)	242.589.426,19
5	Koreksi Pencatatan Utang	(3.108.505,00)	786.075.948,00
6	Koreksi Pencatatan Aset Lainnya	(159.000.000,00)	(182.500.000,00)
7	Koreksi Pencatatan Pendapatan-LO	0,00	0,00
8	Koreksi Pencatatan Persediaan	0,00	0,00
9	Koreksi Pencatatan Kas	3.329.007,00	(101.789,20)
	Jumlah	(38.836.672.854,04)	8.063.746.614,08

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp38.836.672.854,04 pada Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.137 berikut:

Tabel 5.137
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penilaian Kembali Aset Tetap Tanah Dinas Pendidikan	74.260.000,00
2	Penilaian Kembali Aset Tetap Tanah Dinas Perkim	91.930.000,00
3	Penilaian Kembali Aset Tetap Tanah Dinas Kesehatan	2.790.000,00
4	Penghapusan penyisihan piutang	322.889.918,60
5	NRV Sapi pada Disbunnak	(159.000.000,00)
6	Koreksi Utang Prolanis	(3.108.505,00)
7	Pengkakuan Penyisihan Piutang SPAM	(403.867.750,00)
8	Koreksi Saldo Piutang 2021	(201.236.750,00)



(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
9	Koreksi Saldo Piutang 2021	403.867.750,00
10	Koreksi Kas Prolanis	3.329.007,00
11	Koreksi Akm Penyusutan Gedung Bangunan	(10.407.530.846,92)
12	Koreksi Akm Penyusutan JJJ	(31.093.846.677,72)
13	Koreksi Akm Penyusutan Peralatan Mesin	(169.350.000,00)
14	Pendapatan Hibah Aset Tetap Gedung Bangunan	1.855.451.000,00
15	Pendapatan Hibah Aset Tetap Peralatan Mesin	846.750.000,00
	Jumlah	(38.836.672.854,04)

5.6.4. EKUITAS AKHIR**31-12-2022 (Rp)**
2.226.111.685.626,93**31-12-2021 (Rp)**
2.229.107.065.081,03

Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp2.226.111.685.626,93 merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2022. Rincian Ekuitas Akhir per SKPD diuraikan pada *Lampiran 61*.



BAB VI PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab di muka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan Kebijakan Pendapatan Daerah diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan.
 - b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.
2. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka perlu diambil kebijakan Belanja Daerah. Adapun kebijakan Belanja Daerah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah. Kewenangan urusan ini diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan.
 - b. Banyaknya kebutuhan pembangunan maka belanja daerah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2022 dalam rangka pencapaian target sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2022, capaian *Millenium Development Goals* (MDG's) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dijabarkan dalam RKPD 2022.
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah:
 - a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2022 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) yang digunakan untuk pembiayaan anggaran dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
 - b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2022 berasal dari penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyajikan Laporan Keuangan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan yang dihasilkan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan sebesar	Rp1.112.594.730.184,19
Realisasi Pendapatan sebesar	Rp1.130.664.106.392,07
Selisih lebih Pendapatan sebesar	Rp18.069.376.207,88



6. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| Anggaran Belanja sebesar | Rp1.120.982.062.418,00 |
| Realisasi Belanja sebesar | Rp1.040.965.562.750,02 |
| Selisih kurang Belanja sebesar | Rp80.016.499.667,98 |
7. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Belanja Pegawai | Rp394.088.274.533,00 |
| 2. Belanja Barang | Rp325.599.113.650,00 |
| 3. Belanja Bunga | Rp0,00 |
| 4. Belanja Hibah | Rp27.228.571.278,00 |
| 5. Belanja Bantuan Sosial | Rp336.360.000,00 |
| 6. Belanja Bantuan Keuangan | Rp0,00 |
| 7. Belanja Modal | Rp290.561.403.375,02 |
| 8. Belanja Tidak Terduga | Rp3.151.839.914,00 |
8. Target dan Realisasi Transfer Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Target Transfer sebesar | Rp139.332.905.397,00 |
| Realisasi Transfer sebesar | Rp139.107.418.196,00 |
| Selisih kurang Transfer | Rp225.487.201,00 |
9. Realisasi Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 terdiri atas:
- | | |
|------------------------|----------------------|
| Penerimaan Pembiayaan | Rp151.723.566.637,81 |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp3.486.000.000,00 |
| Pembiayaan Netto | Rp148.237.566.637,81 |
10. Saldo Anggaran Lebih Awal untuk Tahun 2022 sebesar Rp151.720.237.630,81 dan Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp98.828.692.083,86.
11. Nilai Pendapatan - LO TA 2022 mencapai sebesar Rp1.124.540.344.278,40
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| Nilai Beban - LO Tahun 2022 | Rp1.085.495.073.564,46 |
| Surplus dari Operasi (LO) | Rp39.045.270.713,04 |
| Defisit dari Non operasi (LO) | Rp52.137.400,00 |
| Pos Luar Biasa (LO) | Rp3.151.839.914,00 |
| Total Surplus (LO) | Rp35.841.293.399,94 |
12. Total Aset pada Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 sebesar Rp2.227.797.223.982,27 terdiri dari:
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| a. Aset Lancar | Rp154.564.120.471,16 |
| b. Investasi Jangka Panjang | Rp50.000.000.000,00 |



c. Aset Tetap	Rp1.915.131.434.619,89
d. Dana Cadangan	Rp 0,00
e. Aset Lainnya	Rp108.101.668.891,22
13. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp2.953.990.121.365,24	
14. Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Rp1.685.538.355,34, terdiri atas:	
a. Kewajiban Jangka Pendek	Rp1.685.538.355,34
b. Kewajiban Jangka Panjang	Rp0,00
15. Saldo Ekuitas Akhir untuk Tahun 2022 sebesar Rp2.226.111.685.626,93.	
16. Arus Kas Tahun 2022 terdiri dari:	
a. Arus masuk kas dari aktivitas operasi	Rp1.128.759.398.542,07
b. Arus keluar kas dari aktivitas operasi	Rp889.511.577.571,00
c. Arus masuk kas dari aktivitas investasi	Rp1.904.707.850,00
d. Arus keluar kas dari aktivitas investasi	Rp294.047.403.375,02
e. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
f. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
g. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris	Rp78.485.066.395,00
h. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris	Rp78.485.066.395,00
i. Saldo Akhir Kas Tahun 2022 sebesar	Rp98.828.692.083,86

Dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan serta Kemasyarakatan yang dibiayai APBD tidak mungkin tercapai secara optimal tanpa adanya dukungan, dorongan serta partisipasi aktif dari seluruh komponen lapisan masyarakat. Oleh karenanya pencapaian kinerja Pemerintah pada Tahun 2022 ini pada hakikatnya adalah keberhasilan masyarakat selaku pelaku pembangunan secara keseluruhan. Berbagai keberhasilan yang telah diraih selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyampaian Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi fondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.



Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan maksud dan tujuan yang termuat pada Bab sebelumnya.

Akhirnya dengan senantiasa berserah diri kepada-Nya semoga diberikan petunjuk dan ridho dari Allah SWT, dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita bersama.

Muara Sabak, 19 Mei 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



H. ROMI HARIYANTO, SE

LAMPIRAN

Lampiran 1
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	PAJAK DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
I	Pajak Hotel	6.240.000,00	10.500.000,00	168,27	4.296.000,00	6.204.000,00
1	Pajak Hotel	4.160.000,00	10.200.000,00	245,19	3.600.000,00	6.600.000,00
2	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	2.080.000,00	300.000,00	14,42	696.000,00	(396.000,00)
II	Pajak Restoran	3.710.933.984,00	3.771.315.169,80	101,63	3.004.177.830,50	767.137.339,30
1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.150.933.984,00	1.638.271.775,80	76,17	1.295.701.230,50	342.570.545,30
2	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.560.000.000,00	2.133.043.394,00	136,73	1.708.476.600,00	424.566.794,00
III	Pajak Hiburan	5.200.000,00	10.373.500,00	199,49	1.300.000,00	9.073.500,00
1	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	3.120.000,00	3.886.000,00	124,55	1.300.000,00	2.586.000,00
2	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.080.000,00	6.487.500,00	311,90	0,00	6.487.500,00
IV	Pajak Reklame	162.320.000,00	157.175.128,00	96,83	243.951.864,00	(86.776.736,00)
1	Pajak Reklame Papan / Billboard/ Videotron/ Megatron	154.000.000,00	157.175.128,00	102,06	243.914.364,00	(86.739.236,00)
2	Pajak Reklame Kain	6.500.000,00	0,00	0,00	37.500,00	(37.500,00)
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame Selebaran	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Pajak Penerangan Jalan	10.692.920.000,00	11.173.457.149,00	104,49	10.544.927.678,00	628.529.471,00
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	240.000.000,00	145.589.917,00	60,66	429.199.764,00	(283.609.847,00)
2	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.452.920.000,00	11.027.867.232,00	105,50	10.115.727.914,00	912.139.318,00
VI	Pajak Air Tanah	46.800.000,00	6.266.350,00	13,39	37.882.700,00	(31.616.350,00)
1	Pajak Air Tanah	46.800.000,00	6.266.350,00	13,39	37.882.700,00	(31.616.350,00)
VII	Pajak Sarang Burung Walet	114.400.000,00	71.485.000,00	62,49	93.333.000,00	(21.848.000,00)
1	Pajak Sarang Burung Walet	114.400.000,00	71.485.000,00	62,49	93.333.000,00	(21.848.000,00)
VIII	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	618.000.000,00	268.652.466,00	43,47	625.517.017,00	(356.864.551,00)
1	Pajak Pasir dan Kerikil	417.600.000,00	247.122.952,00	59,18	98.920.139,00	148.202.813,00
2	Tanah Liat	200.400.000,00	21.529.514,00	10,74	526.596.878,00	(505.067.364,00)
IX	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.670.000.000,00	1.991.434.301,00	74,59	2.054.766.725,00	(63.332.424,00)
1	PBB Perdesaan dan Perkotaan	2.670.000.000,00	1.991.434.301,00	74,59	2.054.766.725,00	(63.332.424,00)
X	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.288.000.000,00	5.691.664.273,00	107,63	3.166.545.979,00	2.525.118.294,00
1	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000,00	5.498.672.575,00	109,97	2.810.406.800,00	2.688.265.775,00
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru	288.000.000,00	192.991.698,00	67,01	356.139.179,00	(163.147.481,00)
	JUMLAH	23.314.813.984,00	23.152.323.336,80	99,30	19.776.698.793,50	3.375.624.543,30

Lampiran 2
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
I	Retribusi Jasa Umum	1.266.893.840,00	818.490.300,00	64,61	985.416.900,00	(166.926.600,00)
A	Retribusi Pelayanan Kesehatan	425.880.000,00	288.667.900,00	67,78	465.100.600,00	(176.432.700,00)
1	Pelayanan kesehatan di Puskesmas	425.880.000,00	288.667.900,00	67,78	465.100.600,00	(176.432.700,00)
B	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.000.000,00	89.643.000,00	112,05	117.343.000,00	(27.700.000,00)
1	Retribusi Pelayanan Kebersihan	80.000.000,00	89.643.000,00	112,05	117.343.000,00	(27.700.000,00)
C	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.460.000,00	7.775.000,00	142,40	7.600.000,00	175.000,00
1	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.460.000,00	7.775.000,00	142,40	7.600.000,00	175.000,00
D	Retribusi Pelayanan Pasar	92.440.000,00	88.800.000,00	96,06	74.900.000,00	13.900.000,00
1	Retribusi Los	41.600.000,00	41.600.000,00	100,00	40.700.000,00	900.000,00
2	Retribusi Kios	50.840.000,00	47.200.000,00	92,84	34.200.000,00	13.000.000,00
E	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	312.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pengujian Kendaraan Bermotor	312.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.113.840,00	1.050.000,00	94,27	2.400.000,00	(1.350.000,00)
1	Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	1.113.840,00	1.050.000,00	94,27	2.400.000,00	(1.350.000,00)
G	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	40.000.000,00	23.121.000,00	57,80	25.695.500,00	(2.574.500,00)
1	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya	40.000.000,00	23.121.000,00	57,80	25.695.500,00	(2.574.500,00)
H	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	310.000.000,00	319.433.400,00	103,04	292.377.800,00	27.055.600,00
1	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	310.000.000,00	319.433.400,00	103,04	292.377.800,00	27.055.600,00
II	Retribusi Jasa Usaha	469.412.000,00	357.599.620,00	76,18	516.308.948,00	(158.709.328,00)
A	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	326.360.000,00	245.486.622,00	75,22	413.823.000,00	(168.336.378,00)
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	115.960.000,00	132.804.922,00	114,53	276.758.000,00	(143.953.078,00)
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	70.000.000,00	70.521.700,00	100,75	58.315.000,00	12.206.700,00
3	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	140.400.000,00	42.160.000,00	30,03	78.750.000,00	(36.590.000,00)
B	Retribusi Tempat Pelelangan	4.368.000,00	900.000,00	20,60	5.030.000,00	(4.130.000,00)
1	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	4.368.000,00	900.000,00	20,60	5.030.000,00	(4.130.000,00)
C	Retribusi Terminal	43.680.000,00	5.150.000,00	11,79	4.975.000,00	175.000,00
1	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	43.680.000,00	5.150.000,00	11,79	4.975.000,00	175.000,00
D	Retribusi Tempat Khusus Parkir	43.680.000,00	31.200.000,00	71,43	28.855.000,00	2.345.000,00
1	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	43.680.000,00	31.200.000,00	71,43	28.855.000,00	2.345.000,00
E	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	0,00	0,00	0,00	10.108.000,00	(10.108.000,00)
1	Pelayanan Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Vila	0,00	0,00	0,00	10.108.000,00	(10.108.000,00)
F	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	27.300.000,00	35.187.998,00	128,89	32.712.948,00	2.475.050,00
1	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	27.300.000,00	35.187.998,00	128,89	32.712.948,00	2.475.050,00
G	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	24.024.000,00	39.675.000,00	165,15	20.805.000,00	18.870.000,00
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	24.024.000,00	39.675.000,00	165,15	20.805.000,00	18.870.000,00
III	Retribusi Perizinan Tertentu	218.400.000,00	155.406.620,00	71,16	334.680.960,43	(179.274.340,43)
A	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	218.400.000,00	155.406.620,00	71,16	334.680.960,43	(179.274.340,43)
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	218.400.000,00	155.406.620,00	71,16	334.680.960,43	(179.274.340,43)
	JUMLAH	1.954.705.840,00	1.331.496.540,00	68,12	1.836.406.808,43	(504.910.268,43)

Lampiran 3
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
I	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.345.760.000,00	1.904.707.850,00	81,20	2.232.690.331,00	(327.982.481,00)
1	Penjualan Hewan	130.000.000,00	41.362.600,00	31,82	194.126.399,00	(152.763.799,00)
2	Penjualan Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)
3	Penjualan Tanaman	45.760.000,00	62.500.000,00	136,58	50.910.000,00	11.590.000,00
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.940.000.000,00	1.795.845.250,00	92,57	1.800.853.750,00	(5.008.500,00)
5	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	230.000.000,00	5.000.000,00	2,17	184.300.182,00	(179.300.182,00)
II	Jasa Giro	4.462.507.851,00	3.042.720.573,09	68,18	1.768.232.423,95	1.274.488.149,14
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.420.000.000,00	2.911.373.846,68	65,87	1.670.526.893,57	1.240.846.953,11
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	42.507.851,00	131.346.726,41	308,99	97.705.530,38	33.641.196,03
III	Pendapatan Bunga	4.004.000.000,00	1.913.112.431,07	47,78	2.977.375.552,41	(1.064.263.121,34)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.004.000.000,00	1.913.112.431,07	47,78	2.977.375.552,41	(1.064.263.121,34)
IV	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.120.000.000,00	1.768.622.320,60	56,69	1.660.693.927,21	107.928.393,39
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.120.000.000,00	1.768.622.320,60	56,69	1.660.693.927,21	107.928.393,39
V	Pendapatan Denda Pajak	0,00	50.818.767,00	0,00	53.998.885,00	(3.180.118,00)
1	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	50.818.767,00	0,00	53.998.885,00	(3.180.118,00)
VI	Pendapatan dari Pengembalian	212.160.000,00	694.393.331,96	327,30	417.021.912,00	277.371.419,96
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	212.160.000,00	694.393.331,96	327,30	417.021.912,00	277.371.419,96
VII	Pendapatan BLUD	12.000.000.000,00	10.905.463.007,83	90,88	37.535.081.808,52	(26.629.618.800,69)
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	12.000.000.000,00	10.905.463.007,83	90,88	37.535.081.808,52	(26.629.618.800,69)
VIII	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	6.666.822.655,19	6.366.462.144,00	95,49	6.254.463.245,00	111.998.899,00
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.666.822.655,19	6.366.462.144,00	95,49	6.254.463.245,00	111.998.899,00
	JUMLAH	32.811.250.506,19	26.646.300.425,55	81,21	52.899.558.085,09	(26.253.257.659,54)

Lampiran 4
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
I	Bagi Hasil Pajak	66.446.167.000,00	63.706.499.143,00	95,88	100.966.517.510,00	(37.260.018.367,00)
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	60.377.870.000,00	56.103.024.145,00	92,92	93.179.742.009,00	(37.076.717.864,00)
b	DBH PPh Pasal 21	149.009.000,00	7.271.064.415,00	4,879,61	7.467.894.273,00	(196.829.858,00)
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	5.864.560.000,00	302.754.895,00	5,16	290.871.030,00	11.883.865,00
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	54.728.000,00	29.655.688,00	54,19	28.010.198,00	1.645.490,00
II	Bagi Hasil bukan Pajak / Sumber Daya Alam	84.958.231.325,00	132.161.664.893,00	155,56	72.615.219.679,00	59.546.445.214,00
a	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.610.623.000,00	37.267.371.796,00	134,97	26.630.788.700,00	10.636.583.096,00
b	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	39.355.786.325,00	68.612.215.143,00	174,34	29.066.581.656,00	39.545.633.487,00
c	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	768.000,00	428.543,00	55,80	0,00	428.543,00
d	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	11.684.945.000,00	19.312.235.311,00	165,27	8.147.161.450,00	11.165.073.861,00
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.347.798.000,00	5.011.103.100,00	115,26	7.096.187.723,00	(2.085.084.623,00)
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00	283.810.850,00
III	Dana Alokasi umum	514.988.353.000,00	514.065.298.501,00	99,82	514.767.343.000,00	(702.044.499,00)
a	Dana Alokasi Umum	514.988.353.000,00	514.065.298.501,00	99,82	514.767.343.000,00	(702.044.499,00)
IV	Dana Alokasi Khusus	238.155.827.080,00	217.209.323.486,00	91,20	199.215.126.723,00	17.994.196.763,00
a	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	117.286.740.080,00	114.059.236.705,00	97,25	109.100.583.152,00	4.958.653.553,00
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	400.421.000,00	399.200.000,00	99,70	3.129.055.600,00	(2.729.855.600,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.947.140.000,00	13.753.907.890,00	98,61	18.714.418.212,00	(4.960.510.322,00)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	19.920.711.000,00	19.661.766.355,00	98,70	21.945.525.450,00	(2.283.759.095,00)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	296.615.000,00	(296.615.000,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	6.963.630.580,00	8.016.019.241,00	115,11	7.242.674.252,00	773.344.989,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.457.264.000,00	2.104.900.000,00	85,66	2.081.311.020,00	23.588.980,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	1.213.853.000,00	0,00	7.929.596.022,00	(6.715.743.022,00)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	7.887.532.334,00	(7.887.532.334,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	802.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan	402.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.265.435.500,00	428.321.000,00	33,85	933.003.500,00	(504.682.500,00)
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	494.156.000,00	(494.156.000,00)
13	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	1.007.575.393,00	(1.007.575.393,00)
14	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	10.052.894.000,00	10.827.981.264,00	107,71	2.189.600.900,00	8.638.380.364,00
15	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.521.000.000,00	2.498.677.060,00	99,11	1.707.050.900,00	791.626.160,00
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	27.874.110.260,00	0,00	11.468.335.000,00	16.405.775.260,00
17	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	34.512.811.000,00	3.189.815.170,00	9,24	0,00	3.189.815.170,00

(dalam rupiah)

NO	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
18	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.532.244.000,00	5.532.244.000,00	100,00	3.936.025.000,00	1.596.219.000,00
19	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	4.004.520.000,00	348.593.841,00	8,71	0,00	348.593.841,00
20	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	6.763.731.000,00	0,00	8.576.843.700,00	(1.813.112.700,00)
21	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	12.718.134.000,00	11.446.116.624,00	90,00	9.561.264.869,00	1.884.851.755,00
22	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	486.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	120.869.087.000,00	103.150.086.781,00	85,34	90.114.543.571,00	13.035.543.210,00
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	31.045.830.000,00	29.146.390.422,00	93,88	0,00	29.146.390.422,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	56.213.284.000,00	50.052.162.440,00	89,04	60.862.874.000,00	(10.810.711.560,00)
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	918.000.000,00	681.500.000,00	74,24	989.000.000,00	(307.500.000,00)
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.585.257.000,00	1.347.852.400,00	85,02	1.365.154.800,00	(17.302.400,00)
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.722.010.000,00	4.716.969.000,00	99,89	4.739.100.000,00	(22.131.000,00)
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	272.400.000,00	272.400.000,00	100,00	321.150.000,00	(48.750.000,00)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	20.653.517.000,00	13.704.948.819,00	66,36	18.310.317.291,00	(4.605.368.472,00)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	192.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.043.998.000,00	2.285.926.900,00	75,10	1.526.221.000,00	759.705.900,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	995.258.000,00	(995.258.000,00)
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.005.468.480,00	(1.005.468.480,00)
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	374.435.000,00	254.829.800,00	68,06	0,00	254.829.800,00
14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	688.100.000,00	687.107.000,00	99,86	0,00	687.107.000,00
	JUMLAH	904.548.578.405,00	927.142.786.023,00	102,50	887.564.206.912,00	39.578.579.111,00

Lampiran 5
Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	281.452.347.179,00	270.207.539.659,60	96,00	293.548.153.472,82	(23.340.613.813,22)
2	Dinas Kesehatan	107.711.162.038,00	99.348.802.150,00	92,24	103.740.362.381,00	(4.391.560.231,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	66.788.540.151,00	52.500.805.912,00	78,61	43.285.208.571,00	9.215.597.341,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	229.334.549.136,00	214.853.464.088,42	93,69	143.323.239.974,90	71.530.224.113,52
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	77.437.360.736,00	73.334.331.707,00	94,70	53.533.188.575,00	19.801.143.132,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.878.016.709,00	5.435.007.564,00	92,46	5.319.836.813,00	115.170.751,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.546.701.139,00	4.783.558.652,00	86,24	5.788.929.129,00	(1.005.370.477,00)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.045.952.522,00	5.516.082.814,00	91,24	4.963.816.741,00	552.266.073,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.915.349.232,00	4.738.577.396,00	96,40	4.766.103.573,00	(27.526.177,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan	8.706.890.876,00	8.540.633.968,00	98,09	4.482.385.097,00	4.058.248.871,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	8.471.879.642,00	8.251.275.233,00	97,40	5.696.754.397,00	2.554.520.836,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.897.011.953,00	5.584.323.763,00	94,70	5.168.755.006,00	415.568.757,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.072.886.175,00	6.606.123.226,00	93,40	4.205.559.646,00	2.400.563.580,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	7.850.348.430,00	7.173.097.431,00	91,37	7.960.906.047,00	(787.808.616,00)
15	Dinas Perhubungan	7.867.647.780,00	7.241.998.015,00	92,05	4.754.416.417,00	2.487.581.598,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.274.393.493,00	7.196.693.815,00	98,93	4.510.366.716,00	2.686.327.099,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.777.290.427,00	3.685.523.597,00	97,57	4.225.225.459,00	(539.701.862,00)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.728.681.583,00	4.613.818.488,00	97,57	3.515.685.923,00	1.098.132.565,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	13.520.864.074,00	13.082.524.949,00	96,76	9.655.176.253,68	3.427.348.695,32
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.035.110.338,00	3.868.189.637,00	95,86	3.643.553.213,00	224.636.424,00
21	Dinas Perikanan	8.431.989.167,00	8.056.929.348,00	95,55	6.728.130.375,00	1.328.798.973,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	23.511.288.410,00	21.611.963.852,00	91,92	13.437.091.735,00	8.174.872.117,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	10.866.326.123,00	10.198.043.166,00	93,85	7.009.553.505,00	3.188.489.661,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.175.954.621,00	6.857.280.054,00	95,56	5.980.907.291,78	876.372.762,22
25	Sekretariat Daerah	40.032.309.666,00	38.280.138.127,00	95,62	31.038.323.682,00	7.241.814.445,00
26	Sekretariat DPRD	45.360.752.989,00	43.549.425.128,00	96,01	32.847.026.622,00	10.702.398.506,00
27	BAPPEDA	8.222.417.600,00	7.314.060.467,00	88,95	5.545.056.456,00	1.769.004.011,00
28	Badan Keuangan Daerah	32.856.446.075,00	23.486.937.409,00	71,48	15.875.790.987,00	7.611.146.422,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	9.954.370.538,00	9.311.108.755,00	93,54	8.306.636.277,00	1.004.472.478,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.324.981.670,00	4.219.376.045,00	97,56	3.613.695.094,00	605.680.951,00
31	Inspektorat	10.007.000.000,00	9.778.868.059,00	97,72	8.649.911.107,00	1.128.956.952,00
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	11.019.276.513,00	10.163.589.731,00	92,23	9.996.164.686,00	167.425.045,00
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	6.012.749.632,00	5.998.415.423,00	99,76	5.684.646.197,00	313.769.226,00
34	Kantor Camat Mendahara	3.468.339.274,00	3.338.968.209,00	96,27	3.148.131.195,00	190.837.014,00
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	3.307.081.795,00	2.965.480.098,00	89,67	2.514.583.956,00	450.896.142,00
36	Kantor Camat Geragai	3.793.778.737,00	3.346.303.240,00	88,21	3.093.672.891,00	252.630.349,00
37	Kantor Camat Kuala Jambi	3.748.067.741,00	3.336.023.615,00	89,01	3.140.903.974,00	195.119.641,00
38	Kantor Camat Dendang	3.242.667.222,00	2.984.695.711,00	92,04	2.629.169.266,00	355.526.445,00
39	Kantor Camat Berbak	3.150.072.815,00	2.498.547.475,00	79,32	2.650.588.271,00	(152.040.796,00)
40	Kantor Camat Rantau Rasau	3.611.689.544,00	3.404.617.658,00	94,27	3.168.021.980,00	236.595.678,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	6.177.726.866,00	5.742.748.940,00	92,96	5.574.120.074,00	168.628.866,00
42	Kantor Camat Sadu	3.183.393.746,00	3.023.248.168,00	94,97	2.875.763.271,00	147.484.897,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.210.398.061,00	4.936.422.007,00	94,74	4.263.149.760,00	673.272.247,00
	JUMLAH	1.120.982.062.418,00	1.040.965.562.750,02	92,86	903.858.662.058,18	137.106.900.691,84

Lampiran 6
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	191.909.919.357,00	184.489.163.086,00	96,13	199.205.346.598,00	(14.716.183.512,00)
2	Dinas Kesehatan	51.929.715.077,00	50.924.015.091,00	98,06	50.047.947.026,00	876.068.065,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	14.590.639.794,00	14.217.325.213,00	97,44	13.858.646.839,00	358.678.374,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.474.699.585,00	6.774.490.343,00	90,63	6.937.668.452,00	(163.178.109,00)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.832.649.869,00	3.624.717.999,00	94,57	3.623.532.178,00	1.185.821,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.511.400.200,00	2.354.154.638,00	93,74	2.425.522.626,00	(71.367.988,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.899.440.300,00	2.667.267.002,00	91,99	2.789.383.370,00	(122.116.368,00)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.318.080.100,00	3.141.682.462,00	94,68	3.215.886.036,00	(74.203.574,00)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.409.242.938,00	2.252.864.545,00	93,51	2.455.666.313,00	(202.801.768,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan	2.410.920.299,00	2.304.279.236,00	95,58	2.464.078.232,00	(159.798.996,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.384.577.105,00	2.313.713.980,00	97,03	2.170.478.041,00	143.235.939,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.258.088.800,00	3.030.508.692,00	93,01	3.030.700.312,00	(191.620,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.562.305.385,00	2.470.824.372,00	96,43	2.425.486.278,00	45.338.094,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3.052.000.233,00	2.918.392.781,00	95,62	2.729.693.668,00	188.699.113,00
15	Dinas Perhubungan	2.735.292.436,00	2.514.613.693,00	91,93	2.289.194.477,00	225.419.216,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.129.850.200,00	2.097.338.227,00	98,47	2.016.148.726,00	81.189.501,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.571.074.530,00	2.502.068.245,00	97,32	2.397.496.629,00	104.571.616,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.444.341.073,00	2.349.727.141,00	96,13	2.343.812.230,00	5.914.911,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4.011.836.562,00	3.821.787.191,00	95,26	3.715.211.580,00	106.575.611,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.667.030.000,00	2.518.387.706,00	94,43	2.466.721.194,00	51.666.512,00
21	Dinas Perikanan	3.196.756.188,00	2.986.961.330,00	93,44	2.880.352.669,00	106.608.661,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.348.840.334,00	6.536.411.742,00	88,94	6.830.820.374,00	(294.408.632,00)
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.880.480.663,00	3.777.193.855,00	97,34	3.802.885.343,00	(25.691.488,00)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.809.480.000,00	2.601.261.689,00	92,59	2.784.815.782,00	(183.554.093,00)
25	Sekretariat Daerah	12.769.435.179,00	12.163.736.755,00	95,26	11.970.242.780,00	193.493.975,00
26	Sekretariat DPRD	18.210.377.138,00	17.338.208.749,00	95,21	17.280.759.079,00	57.449.670,00
27	BAPPEDA	3.480.760.275,00	3.335.827.439,00	95,84	3.054.880.150,00	280.947.289,00
28	Badan Keuangan Daerah	7.920.300.949,00	7.276.429.589,00	91,87	6.881.671.977,00	394.757.612,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	5.210.449.201,00	4.858.252.013,00	93,24	5.212.483.978,00	(354.231.965,00)
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.935.084.038,00	2.850.263.514,00	97,11	2.909.573.084,00	(59.309.570,00)
31	Inspektorat	3.849.680.662,00	3.810.249.316,00	98,98	3.679.958.314,00	130.291.002,00
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	5.074.030.000,00	5.003.948.887,00	98,62	5.104.247.613,00	(100.298.726,00)
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	3.542.194.500,00	3.530.587.566,00	99,67	3.476.304.899,00	54.282.667,00
34	Kantor Camat Mendahara	1.718.958.750,00	1.693.328.015,00	98,51	1.765.322.347,00	(71.994.332,00)
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	1.582.233.514,00	1.377.813.134,00	87,08	1.425.266.473,00	(47.453.339,00)
36	Kantor Camat Geragai	2.278.869.682,00	2.073.820.754,00	91,00	2.131.164.531,00	(57.343.777,00)
37	Kantor Camat Kuala Jambi	1.369.220.000,00	1.213.617.418,00	88,64	1.418.483.133,00	(204.865.715,00)
38	Kantor Camat Dendang	1.586.753.023,00	1.498.424.254,00	94,43	1.555.303.451,00	(56.879.197,00)
39	Kantor Camat Berbak	1.597.495.150,00	1.392.106.225,00	87,14	1.507.373.321,00	(115.267.096,00)
40	Kantor Camat Rantau Rasau	2.085.385.490,00	1.984.637.158,00	95,17	2.072.019.630,00	(87.382.472,00)
41	Kantor Camat Nipah Panjang	3.837.703.430,00	3.623.129.332,00	94,41	3.707.599.365,00	(84.470.033,00)
42	Kantor Camat Sadu	1.597.788.944,00	1.586.530.703,00	99,30	1.715.528.501,00	(128.997.798,00)
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.496.310.000,00	2.288.213.453,00	91,66	1.787.384.349,00	500.829.104,00
	JUMLAH	411.481.690.953,00	394.088.274.533,00	95,77	407.563.061.948,00	(13.474.787.415,00)

Lampiran 7
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	42.000.715.291,00	40.574.450.455,00	96,60	37.584.858.615,67	2.989.591.839,33
2	Dinas Kesehatan	46.264.300.469,00	39.149.244.138,00	84,62	38.990.049.092,00	159.195.046,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	47.422.846.736,00	34.585.287.898,00	72,93	16.384.778.170,00	18.200.509.728,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.925.107.480,00	28.157.924.042,00	94,09	20.559.768.177,70	7.598.155.864,30
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.908.539.590,00	21.332.910.779,00	97,37	16.242.917.404,00	5.089.993.375,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.341.896.509,00	3.057.112.926,00	91,48	2.894.314.187,00	162.798.739,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.550.060.839,00	2.023.891.650,00	79,37	2.789.174.319,00	(765.282.669,00)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.622.613.690,00	2.269.250.981,00	86,53	1.379.640.705,00	889.610.276,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.273.043.136,00	2.255.379.343,00	99,22	2.264.437.260,00	(9.057.917,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan	6.121.113.077,00	6.063.088.482,00	99,05	1.976.306.865,00	4.086.781.617,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.006.898.620,00	3.868.250.253,00	96,54	3.504.312.856,00	363.937.397,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.274.645.453,00	2.190.420.236,00	96,30	1.941.265.694,00	249.154.542,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.394.580.105,00	4.022.633.854,00	91,54	1.754.473.368,00	2.268.160.486,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	4.744.087.574,00	4.205.095.550,00	88,64	4.611.565.879,00	(406.470.329,00)
15	Dinas Perhubungan	2.857.870.344,00	2.552.575.347,00	89,32	2.374.439.308,00	178.136.039,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.124.068.293,00	4.083.102.588,00	99,01	2.320.067.990,00	1.763.034.598,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.116.753.158,00	1.094.150.352,00	97,98	817.778.830,00	276.371.522,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.109.652.838,00	2.090.134.691,00	99,07	1.105.403.593,00	984.731.098,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	6.751.516.403,00	6.678.728.461,00	98,92	4.564.820.985,00	2.113.907.476,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.154.238.928,00	1.137.160.931,00	98,52	837.831.519,00	299.329.412,00
21	Dinas Perikanan	2.904.877.957,00	2.827.916.975,00	97,35	2.007.947.806,00	819.969.169,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	13.314.067.726,00	12.325.798.818,00	92,58	6.135.867.761,00	6.189.931.057,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	5.250.813.218,00	4.743.679.695,00	90,34	2.890.131.162,00	1.853.548.533,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.851.468.071,00	3.746.624.765,00	97,28	1.520.463.636,00	2.226.161.129,00
25	Sekretariat Daerah	24.304.907.471,00	23.205.228.834,00	95,48	15.418.825.902,00	7.786.402.932,00
26	Sekretariat DPRD	24.003.630.063,00	23.122.210.529,00	96,33	14.650.568.371,00	8.471.642.158,00
27	BAPPEDA	4.527.519.075,00	3.766.412.528,00	83,19	2.324.421.306,00	1.441.991.222,00
28	Badan Keuangan Daerah	12.628.579.491,00	11.194.932.906,00	88,65	7.919.816.659,00	3.275.116.247,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	4.239.856.537,00	3.956.920.742,00	93,33	2.795.960.449,00	1.160.960.293,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.311.875.132,00	1.294.063.531,00	98,64	704.122.010,00	589.941.521,00
31	Inspektorat	5.192.967.976,00	5.006.468.306,00	96,41	3.744.172.756,00	1.262.295.550,00
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	5.010.172.280,00	4.299.220.774,00	85,81	3.953.521.173,00	345.699.601,00
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	1.800.016.062,00	1.797.347.857,00	99,85	1.838.136.298,00	(40.788.441,00)
34	Kantor Camat Mendahara	1.454.660.524,00	1.351.489.194,00	92,91	1.145.322.823,00	206.166.371,00
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	1.408.613.281,00	1.273.666.964,00	90,42	975.287.483,00	298.379.481,00
36	Kantor Camat Geragai	1.179.459.055,00	1.028.532.486,00	87,20	876.648.360,00	151.884.126,00
37	Kantor Camat Kuala Jambi	1.682.671.819,00	1.426.726.497,00	84,79	1.167.647.841,00	259.078.656,00
38	Kantor Camat Dendang	1.265.198.328,00	1.110.083.257,00	87,74	1.004.445.815,00	105.637.442,00
39	Kantor Camat Berbak	1.203.325.072,00	1.042.866.250,00	86,67	960.645.950,00	82.220.300,00
40	Kantor Camat Rantau Rasau	1.295.522.264,00	1.192.551.500,00	92,05	1.023.497.350,00	169.054.150,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	1.836.041.973,00	1.617.790.955,00	88,11	1.558.246.395,00	59.544.560,00
42	Kantor Camat Sadu	1.253.955.801,00	1.107.425.465,00	88,31	976.114.770,00	131.310.695,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.816.241.372,00	1.770.361.865,00	97,47	1.638.749.333,00	131.612.532,00
	JUMLAH	360.700.989.081,00	325.599.113.650,00	90,27	242.128.766.226,37	83.470.347.423,63

Lampiran 8
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Habis Pakai Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	4.351.656.599,00	4.307.622.078,00	98,99	1.655.072.227,00	2.652.549.851,00
2	Dinas Kesehatan	9.069.702.962,00	7.984.687.755,00	88,04	9.143.474.065,00	(1.158.786.310,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.761.416.436,00	1.518.626.764,00	86,22	2.304.931.147,00	(786.304.383,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.944.226.680,00	6.729.836.801,00	96,91	5.792.342.732,00	937.494.069,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.405.805.082,00	8.357.936.062,00	99,43	3.903.318.370,00	4.454.617.692,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	349.467.509,00	257.226.600,00	73,61	282.546.627,00	(25.320.027,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	629.268.839,00	427.062.809,00	67,87	785.100.538,00	(358.037.729,00)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	934.972.690,00	759.995.760,00	81,29	416.430.818,00	343.564.942,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	835.431.136,00	828.314.438,00	99,15	846.793.647,00	(18.479.209,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan	1.733.131.077,00	1.723.514.215,00	99,45	287.042.756,00	1.436.471.459,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.242.448.620,00	1.199.687.100,00	96,56	1.325.387.659,00	(125.700.559,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	694.775.637,00	692.605.499,00	99,69	816.974.816,00	(124.369.317,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.075.861.105,00	893.501.780,00	83,05	666.829.861,00	226.671.919,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.055.610.574,00	990.085.477,00	93,79	1.111.817.846,00	(121.732.369,00)
15	Dinas Perhubungan	958.999.844,00	803.688.570,00	83,80	493.869.501,00	309.819.069,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	350.552.293,00	341.371.200,00	97,38	255.554.550,00	85.816.650,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	374.071.158,00	359.925.610,00	96,22	336.451.444,00	23.474.166,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	468.522.838,00	464.156.619,00	99,07	271.495.766,00	192.660.853,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.351.914.403,00	1.332.661.183,00	98,58	1.012.244.561,00	320.416.622,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	223.518.928,00	223.421.460,00	99,96	274.761.764,00	(51.340.304,00)
21	Dinas Perikanan	583.884.335,00	582.477.340,00	99,76	439.988.729,00	142.488.611,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.626.875.516,00	6.996.244.028,00	91,73	1.946.155.317,00	5.050.088.711,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.949.511.218,00	1.789.310.579,00	91,78	885.254.478,00	904.056.101,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	790.167.115,00	770.134.017,00	97,46	391.903.659,00	378.230.358,00
25	Sekretariat Daerah	8.783.165.621,00	8.528.528.001,00	97,10	5.291.390.069,00	3.237.137.932,00
26	Sekretariat DPRD	4.794.771.985,00	4.680.000.094,00	97,61	4.522.273.966,00	157.726.128,00
27	BAPPEDA	1.138.199.075,00	1.005.727.675,00	88,36	883.612.268,00	122.115.407,00
28	Badan Keuangan Daerah	3.422.604.989,00	3.074.992.748,00	89,84	1.816.736.315,00	1.258.256.433,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	641.940.188,00	601.862.163,00	93,76	720.237.034,00	(118.374.871,00)
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	403.347.532,00	395.601.824,00	98,08	226.907.300,00	168.694.524,00
31	Inspektorat	655.207.976,00	613.508.480,00	93,64	555.253.730,00	82.254.750,00
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	1.086.189.336,00	1.042.877.621,00	96,01	930.440.886,00	112.436.735,00
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	549.816.062,00	549.500.000,00	99,94	702.108.000,00	(152.608.000,00)
34	Kantor Camat Mendahara	194.140.524,00	193.605.300,00	99,72	218.092.800,00	(24.487.500,00)
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	515.133.281,00	503.719.405,00	97,78	302.421.874,00	201.297.531,00
36	Kantor Camat Geragai	240.442.108,00	201.474.742,00	83,79	178.887.976,00	22.586.766,00
37	Kantor Camat Kuala Jambi	350.261.319,00	347.736.100,00	99,28	241.538.064,00	106.198.036,00
38	Kantor Camat Dendang	393.424.728,00	372.549.750,00	94,69	304.616.247,00	67.933.503,00
39	Kantor Camat Berbak	382.342.072,00	360.317.350,00	94,24	278.145.150,00	82.172.200,00
40	Kantor Camat Rantau Rasau	415.860.592,00	415.850.500,00	100,00	276.160.600,00	139.689.900,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	269.641.973,00	265.341.936,00	98,41	299.379.897,00	(34.037.961,00)
42	Kantor Camat Sadu	366.955.801,00	355.693.575,00	96,93	249.781.770,00	105.911.805,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	505.137.372,00	505.074.140,00	99,99	432.789.370,00	72.284.770,00
	JUMLAH	78.870.375.128,00	74.348.055.148,00	94,27	54.076.516.194,00	20.271.538.954,00

Lampiran 9
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	13.369.070.107,00	13.171.342.329,00	98,52	12.902.726.913,00	268.615.416,00
2	Dinas Kesehatan	34.596.928.011,00	29.025.961.763,00	83,90	28.292.246.545,00	733.715.218,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	5.817.735.837,00	5.513.040.862,00	94,76	4.966.858.885,00	546.181.977,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.251.705.800,00	16.676.167.284,00	96,66	11.497.052.654,70	5.179.114.629,30
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.906.034.908,00	9.454.766.495,00	95,44	8.141.590.681,00	1.313.175.814,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.395.354.000,00	2.313.220.646,00	96,57	2.188.478.060,00	124.742.586,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.237.310.000,00	954.062.337,00	77,11	1.597.952.873,00	(643.890.536,00)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	958.250.000,00	847.416.554,00	88,43	623.300.487,00	224.116.067,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	846.612.000,00	838.265.309,00	99,01	896.965.235,00	(58.699.926,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan	1.103.490.000,00	1.076.919.140,00	97,59	865.995.109,00	210.924.031,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.805.250.000,00	1.751.205.961,00	97,01	1.764.551.318,00	(13.345.357,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	984.050.000,00	974.065.575,00	98,99	882.138.449,00	91.927.126,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.295.174.000,00	2.198.266.964,00	95,78	567.317.303,00	1.630.949.661,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	2.850.970.000,00	2.570.379.420,00	90,16	2.988.994.158,00	(418.614.738,00)
15	Dinas Perhubungan	1.244.200.000,00	1.101.723.838,00	88,55	1.241.436.725,00	(139.712.887,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.185.360.000,00	3.160.576.550,00	99,22	1.676.632.050,00	1.483.944.500,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	294.862.000,00	288.264.800,00	97,76	282.885.986,00	5.378.814,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	593.150.000,00	580.530.608,00	97,87	354.517.674,00	226.012.934,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.808.667.000,00	3.768.725.742,00	98,95	2.493.508.053,00	1.275.217.689,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	380.550.000,00	364.247.786,00	95,72	328.965.684,00	35.282.102,00
21	Dinas Perikanan	1.265.170.000,00	1.198.037.365,00	94,69	1.113.098.609,00	84.938.756,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.795.172.810,00	2.616.970.449,00	93,62	2.357.429.144,00	259.541.305,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.637.668.000,00	1.510.518.522,00	92,24	1.426.835.585,00	83.682.937,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.439.090.000,00	1.367.547.089,00	95,03	720.081.877,00	647.465.212,00
25	Sekretariat Daerah	7.521.671.750,00	7.008.945.876,00	93,18	6.871.990.921,00	136.954.955,00
26	Sekretariat DPRD	4.287.426.400,00	4.125.171.786,00	96,22	3.620.975.693,00	504.196.093,00
27	BAPPEDA	1.108.700.000,00	985.475.861,00	88,89	695.536.736,00	289.939.125,00
28	Badan Keuangan Daerah	7.218.254.502,00	6.480.678.574,00	89,78	5.499.632.912,00	981.045.662,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	2.315.926.611,00	2.112.379.483,00	91,21	1.456.661.657,00	655.717.826,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	412.643.600,00	403.417.000,00	97,76	227.276.760,00	176.140.240,00
31	Inspektorat	3.882.620.000,00	3.742.126.199,00	96,38	2.822.698.979,00	919.427.220,00
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	3.353.445.000,00	2.703.159.967,00	80,61	2.637.904.837,00	65.255.130,00
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	1.070.100.000,00	1.068.126.937,00	99,82	945.558.298,00	122.568.639,00
34	Kantor Camat Mendahara	911.100.000,00	808.485.730,00	88,74	767.111.023,00	41.374.707,00
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	663.250.000,00	539.820.509,00	81,39	484.324.809,00	55.495.700,00
36	Kantor Camat Geragai	772.350.000,00	739.345.524,00	95,73	653.970.384,00	85.375.140,00
37	Kantor Camat Kuala Jambi	1.124.008.000,00	871.025.437,00	77,49	882.549.777,00	(11.524.340,00)
38	Kantor Camat Dendang	723.393.600,00	614.128.807,00	84,90	597.548.971,00	16.579.836,00
39	Kantor Camat Berbak	637.665.000,00	506.195.900,00	79,38	501.210.800,00	4.985.100,00
40	Kantor Camat Rantau Rasau	719.857.000,00	617.182.000,00	85,74	527.164.750,00	90.017.250,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	1.400.120.000,00	1.191.182.703,00	85,08	1.113.160.998,00	78.021.705,00
42	Kantor Camat Sadu	830.100.000,00	695.050.000,00	83,73	648.150.000,00	46.900.000,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	822.454.000,00	821.013.200,00	99,82	816.283.120,00	4.730.080,00
	JUMLAH	151.836.909.936,00	139.355.134.881,00	91,78	121.941.271.482,70	17.413.863.398,30

Lampiran 10
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	35.000.000,00	34.900.000,00	99,71	13.693.000,00	21.207.000,00
2	Dinas Kesehatan	669.882.496,00	612.032.246,00	91,36	360.296.789,00	251.735.457,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	385.940.994,00	382.776.080,00	99,18	1.174.627.384,00	(791.851.304,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.766.864.000,00	3.028.802.932,00	80,41	2.424.188.163,00	604.614.769,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.045.089.600,00	3.036.576.525,00	99,72	4.056.948.750,00	(1.020.372.225,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	361.075.000,00	296.147.500,00	82,02	299.189.500,00	(3.042.000,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	244.550.000,00	226.479.000,00	92,61	200.590.165,00	25.888.835,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	63.230.000,00	63.230.000,00	100,00	84.600.000,00	(21.370.000,00)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	96.250.000,00	95.553.000,00	99,28	127.995.950,00	(32.442.950,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan	156.530.000,00	156.530.000,00	100,00	64.660.000,00	91.870.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	587.200.000,00	556.869.534,00	94,83	82.679.923,00	474.189.611,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	158.890.500,00	158.649.345,00	99,85	24.382.545,00	134.266.800,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	228.790.000,00	228.226.000,00	99,75	56.943.500,00	171.282.500,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	285.247.000,00	284.065.609,00	99,59	346.196.875,00	(62.131.266,00)
15	Dinas Perhubungan	243.737.500,00	236.673.760,00	97,10	360.233.200,00	(123.559.440,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	194.156.000,00	191.786.900,00	98,78	244.102.050,00	(52.315.150,00)
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	49.370.000,00	48.560.000,00	98,36	26.033.800,00	22.526.200,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	432.980.000,00	432.770.780,00	99,95	174.063.800,00	258.706.980,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	533.820.000,00	533.518.020,00	99,94	183.890.000,00	349.628.020,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	200.170.000,00	200.170.000,00	100,00	6.350.000,00	193.820.000,00
21	Dinas Perikanan	430.763.000,00	429.697.135,00	99,75	80.051.500,00	349.645.635,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	689.719.400,00	678.992.502,00	98,44	945.423.300,00	(266.430.798,00)
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	568.434.000,00	552.513.100,00	97,20	114.602.000,00	437.911.100,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	819.420.000,00	812.722.000,00	99,18	110.065.700,00	702.656.300,00
25	Sekretariat Daerah	3.095.490.100,00	2.962.546.050,00	95,71	1.810.480.022,00	1.152.066.028,00
26	Sekretariat DPRD	1.008.356.678,00	950.892.400,00	94,30	1.598.652.700,00	(647.760.300,00)
27	BAPPEDA	421.120.000,00	235.743.300,00	55,98	98.732.000,00	137.011.300,00
28	Badan Keuangan Daerah	403.850.000,00	385.592.360,00	95,48	132.662.932,00	252.929.428,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	141.489.738,00	140.499.000,00	99,30	191.206.000,00	(50.707.000,00)
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	71.270.000,00	71.164.000,00	99,85	42.655.000,00	28.509.000,00
31	Inspektorat	116.500.000,00	116.500.000,00	100,00	246.608.500,00	(130.108.500,00)
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	434.736.944,00	430.038.480,00	98,92	267.145.850,00	162.892.630,00
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	120.600.000,00	120.300.000,00	99,75	73.980.000,00	46.320.000,00
34	Kantor Camat Mendahara	264.195.000,00	264.195.000,00	100,00	136.074.000,00	128.121.000,00
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	158.830.000,00	158.805.000,00	99,98	150.095.800,00	8.709.200,00
36	Kantor Camat Geragai	114.821.947,00	44.066.011,00	38,38	41.570.000,00	2.496.011,00
37	Kantor Camat Kuala Jambi	114.150.000,00	113.946.900,00	99,82	25.825.000,00	88.121.900,00
38	Kantor Camat Dendang	52.380.000,00	52.319.700,00	99,88	43.790.000,00	8.529.700,00
39	Kantor Camat Berbak	120.318.000,00	120.318.000,00	100,00	159.865.000,00	(39.547.000,00)
40	Kantor Camat Rantau Rasau	82.114.672,00	82.033.000,00	99,90	172.642.000,00	(90.609.000,00)
41	Kantor Camat Nipah Panjang	90.780.000,00	90.759.100,00	99,98	86.625.500,00	4.133.600,00
42	Kantor Camat Sadu	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00	68.128.000,00	(58.728.000,00)
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.150.000,00	37.150.000,00	100,00	16.950.000,00	20.200.000,00
	JUMLAH	21.104.662.569,00	19.664.510.269,00	93,18	16.925.496.198,00	2.739.014.071,00

Lampiran 11
Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	984.661.340,00	928.324.993,00	94,28	290.985.000,00	637.339.993,00
2	Dinas Kesehatan	1.892.397.000,00	1.523.412.374,00	80,50	1.194.031.693,00	329.380.681,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	151.830.000,00	144.905.742,00	95,44	65.828.721,00	79.077.021,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.962.311.000,00	1.723.117.025,00	87,81	846.184.628,00	876.932.397,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	551.610.000,00	483.631.697,00	87,68	141.059.603,00	342.572.094,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	234.000.000,00	190.518.180,00	81,42	124.100.000,00	66.418.180,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	438.932.000,00	416.287.504,00	94,84	205.530.743,00	210.756.761,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	654.161.000,00	598.608.667,00	91,51	255.309.400,00	343.299.267,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	494.750.000,00	493.246.596,00	99,70	392.682.428,00	100.564.168,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	529.000.000,00	507.163.127,00	95,87	250.419.000,00	256.744.127,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	372.000.000,00	360.487.658,00	96,91	331.693.956,00	28.793.702,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	436.929.316,00	365.099.817,00	83,56	217.769.884,00	147.329.933,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	740.320.000,00	650.099.110,00	87,81	422.747.704,00	227.351.406,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	552.260.000,00	360.565.044,00	65,29	162.157.000,00	198.408.044,00
15	Dinas Perhubungan	410.933.000,00	410.489.179,00	99,89	278.899.882,00	131.589.297,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	394.000.000,00	389.367.938,00	98,82	143.779.340,00	245.588.598,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	387.200.000,00	386.149.942,00	99,73	172.407.600,00	213.742.342,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	615.000.000,00	612.676.684,00	99,62	305.326.353,00	307.350.331,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	982.965.000,00	969.673.516,00	98,65	828.598.371,00	141.075.145,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	350.000.000,00	349.321.685,00	99,81	222.654.071,00	126.667.614,00
21	Dinas Perikanan	610.000.000,00	602.644.513,00	98,79	351.204.454,00	251.440.059,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	952.200.000,00	859.736.839,00	90,29	381.910.000,00	477.826.839,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.095.200.000,00	891.337.494,00	81,39	463.439.099,00	427.898.395,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	760.855.956,00	754.286.659,00	99,14	298.412.400,00	455.874.259,00
25	Sekretariat Daerah	3.773.580.000,00	3.574.208.907,00	94,72	1.444.964.890,00	2.129.244.017,00
26	Sekretariat DPRD	13.913.075.000,00	13.366.146.249,00	96,07	4.908.666.012,00	8.457.480.237,00
27	BAPPEDA	1.859.500.000,00	1.539.465.692,00	82,79	646.540.302,00	892.925.390,00
28	Badan Keuangan Daerah	1.526.870.000,00	1.196.669.224,00	78,37	413.784.500,00	782.884.724,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.140.500.000,00	1.102.180.096,00	96,64	427.855.758,00	674.324.338,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	412.384.000,00	411.650.707,00	99,82	207.282.950,00	204.367.757,00
31	Inspektorat	538.640.000,00	534.333.627,00	99,20	119.611.547,00	414.722.080,00
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	135.801.000,00	123.144.706,00	90,68	113.229.600,00	9.915.106,00
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	44.000.000,00	43.920.920,00	99,82	86.490.000,00	(42.569.080,00)
34	Kantor Camat Mendahara	67.500.000,00	67.498.164,00	100,00	24.045.000,00	43.453.164,00
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	57.500.000,00	57.422.050,00	99,86	38.445.000,00	18.977.050,00
36	Kantor Camat Geragai	47.000.000,00	38.801.209,00	82,56	2.220.000,00	36.581.209,00
37	Kantor Camat Kuala Jambi	67.500.000,00	67.265.560,00	99,65	17.735.000,00	49.530.560,00
38	Kantor Camat Dendang	91.000.000,00	71.085.000,00	78,12	58.490.597,00	12.594.403,00
39	Kantor Camat Berbak	63.000.000,00	56.035.000,00	88,94	21.425.000,00	34.610.000,00
40	Kantor Camat Rantau Rasau	67.500.000,00	67.296.000,00	99,70	47.530.000,00	19.766.000,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	71.000.000,00	70.507.216,00	99,31	59.080.000,00	11.427.216,00
42	Kantor Camat Sadu	47.500.000,00	47.281.890,00	99,54	10.055.000,00	37.226.890,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	451.500.000,00	407.124.525,00	90,17	372.726.843,00	34.397.682,00
	JUMLAH	40.928.865.612,00	37.813.188.725,00	92,39	17.367.309.329,00	20.445.879.396,00

Lampiran 12
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	5.295.720.000,00	5.290.304.000,00	99,90	5.030.700.000,00	259.604.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.596.944.000,00	13.543.331.000,00	99,61	12.618.542.000,00	924.789.000,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	315.000.000,00	(315.000.000,00)
4	Dinas Ketahanan Pangan	55.750.000,00	55.750.000,00	100,00	35.000.000,00	20.750.000,00
5	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.448.585.000,00	2.298.305.227,00	93,86	907.356.310,68	1.390.948.916,32
6	Dinas Perikanan	2.083.650.000,00	2.062.412.383,00	98,98	1.810.029.900,00	252.382.483,00
7	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	802.820.000,00	801.395.468,00	99,82	0,00	801.395.468,00
8	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.313.700.000,00	1.305.598.000,00	99,38	246.044.000,00	1.059.554.000,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	320.000.000,00	(320.000.000,00)
10	Sekretariat Daerah	1.100.000.000,00	1.070.000.000,00	97,27	725.000.000,00	345.000.000,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	821.475.200,00	801.475.200,00	97,57	801.475.200,00	0,00
	JUMLAH	27.518.644.200,00	27.228.571.278,00	98,95	22.809.147.410,68	4.419.423.867,32

Lampiran 13
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00	0,00	21.400.000,00
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	156.000.000,00	155.280.000,00	99,54	129.445.000,00	25.835.000,00
4	Kantor Camat Muara Sabak Barat	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kantor Camat Muara Sabak Timur	159.680.000,00	159.680.000,00	100,00	0,00	159.680.000,00
6	Kantor Camat Geragai	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	492.580.000,00	336.360.000,00	68,29	1.129.445.000,00	(793.085.000,00)

Lampiran 14
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	42.245.992.531,00	39.853.622.118,60	94,34	51.727.248.259,15	(11.873.626.140,55)
2	Dinas Kesehatan	9.517.146.492,00	9.275.542.921,00	97,46	14.702.366.263,00	(5.426.823.342,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	4.775.053.621,00	3.698.192.801,00	77,45	13.041.783.562,00	(9.343.590.761,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	191.934.742.071,00	179.921.049.703,42	93,74	115.825.803.345,20	64.095.246.358,22
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	38.099.227.277,00	34.833.371.929,00	91,43	21.048.196.993,00	13.785.174.936,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.720.000,00	23.740.000,00	96,04	0,00	23.740.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	97.200.000,00	92.400.000,00	95,06	210.371.440,00	(117.971.440,00)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	83.858.732,00	83.749.371,00	99,87	53.290.000,00	30.459.371,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	233.063.158,00	230.333.508,00	98,83	46.000.000,00	184.333.508,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	119.107.500,00	117.516.250,00	98,66	7.000.000,00	110.516.250,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.080.403.917,00	2.069.311.000,00	99,47	21.963.500,00	2.047.347.500,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	364.277.700,00	363.394.835,00	99,76	196.789.000,00	166.605.835,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	116.000.685,00	112.665.000,00	97,12	25.600.000,00	87.065.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	54.260.623,00	49.609.100,00	91,43	619.646.500,00	(570.037.400,00)
15	Dinas Perhubungan	2.274.485.000,00	2.174.808.975,00	95,62	90.782.632,00	2.084.026.343,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.020.475.000,00	1.016.253.000,00	99,59	174.150.000,00	842.103.000,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	89.462.739,00	89.305.000,00	99,82	9.950.000,00	79.355.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	174.687.672,00	173.956.656,00	99,58	66.470.100,00	107.486.556,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	308.926.109,00	283.704.070,00	91,84	467.787.378,00	(184.083.308,00)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	213.841.410,00	212.641.000,00	99,44	339.000.500,00	(126.359.500,00)
21	Dinas Perikanan	246.705.022,00	179.638.660,00	72,82	29.800.000,00	149.838.660,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.045.560.350,00	1.948.357.824,00	95,25	470.403.600,00	1.477.954.224,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	421.332.242,00	371.571.616,00	88,19	70.493.000,00	301.078.616,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	359.006.550,00	354.113.600,00	98,64	1.226.182.873,78	(872.069.273,78)
25	Sekretariat Daerah	1.857.967.016,00	1.841.172.538,00	99,10	2.924.255.000,00	(1.083.082.462,00)
26	Sekretariat DPRD	3.146.745.788,00	3.089.005.850,00	98,17	915.699.172,00	2.173.306.678,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	214.138.250,00	211.820.500,00	98,92	165.755.000,00	46.065.500,00
28	Badan Keuangan Daerah	2.005.172.640,00	1.863.735.000,00	92,95	793.435.840,00	1.070.299.160,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	504.064.800,00	495.936.000,00	98,39	298.191.850,00	197.744.150,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	78.022.500,00	75.049.000,00	96,19	0,00	75.049.000,00
31	Inspektorat	964.351.362,00	962.150.437,00	99,77	1.225.780.037,00	(263.629.600,00)
32	Kecamatan Muara Sabak Barat	867.074.233,00	860.420.070,00	99,23	938.395.900,00	(77.975.830,00)
33	Kecamatan Muara Sabak Timur	510.859.070,00	510.800.000,00	99,99	370.205.000,00	140.595.000,00
34	Kecamatan Mendahara	294.720.000,00	294.151.000,00	99,81	237.486.025,00	56.664.975,00
35	Kecamatan Mendahara Ulu	316.235.000,00	314.000.000,00	99,29	114.030.000,00	199.970.000,00
36	Kecamatan Geragai	247.950.000,00	243.950.000,00	98,39	85.860.000,00	158.090.000,00
37	Kecamatan Kuala Jambi	696.175.922,00	695.679.700,00	99,93	554.773.000,00	140.906.700,00
38	Kecamatan Dendang	390.715.871,00	376.188.200,00	96,28	69.420.000,00	306.768.200,00
39	Kecamatan Berbak	349.252.593,00	63.575.000,00	18,20	182.569.000,00	(118.994.000,00)
40	Kecamatan Rantau Rasau	230.781.790,00	227.429.000,00	98,55	72.505.000,00	154.924.000,00
41	Kecamatan Nipah Panjang	503.981.463,00	501.828.653,00	99,57	308.274.314,00	193.554.339,00
42	Kecamatan Sadu	331.649.001,00	329.292.000,00	99,29	184.120.000,00	145.172.000,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	76.371.489,00	76.371.489,00	100,00	35.540.878,00	40.830.611,00
	JUMLAH	310.485.765.189,00	290.561.403.375,02	93,58	229.947.374.962,13	60.614.028.412,89

Lampiran 15
Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	8.537.284.559,00	7.036.726.172,00	82,42	13.636.542.390,00	(6.599.816.218,00)
2	Dinas Kesehatan	8.788.997.892,00	8.548.198.321,00	97,26	8.806.306.670,00	(258.108.349,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	4.036.070.631,00	2.976.086.801,00	73,74	13.041.783.562,00	(10.065.696.761,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	486.058.425,00	477.169.000,00	98,17	6.764.394.500,00	(6.287.225.500,00)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.457.298.568,00	1.422.281.500,00	97,60	237.100.000,00	1.185.181.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	24.720.000,00	23.740.000,00	96,04	0,00	23.740.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	97.200.000,00	92.400.000,00	95,06	101.800.000,00	(9.400.000,00)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	83.858.732,00	83.749.371,00	99,87	53.290.000,00	30.459.371,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	233.063.158,00	230.333.508,00	98,83	0,00	230.333.508,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	119.107.500,00	117.516.250,00	98,66	7.000.000,00	110.516.250,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.839.203.917,00	1.828.658.000,00	99,43	21.963.500,00	1.806.694.500,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	364.277.700,00	363.394.835,00	99,76	196.789.000,00	166.605.835,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	116.000.685,00	112.665.000,00	97,12	25.600.000,00	87.065.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	54.260.623,00	49.609.100,00	91,43	619.646.500,00	(570.037.400,00)
15	Dinas Perhubungan	16.095.000,00	16.095.000,00	100,00	90.782.632,00	(74.687.632,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.020.475.000,00	1.016.253.000,00	99,59	174.150.000,00	842.103.000,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	89.462.739,00	89.305.000,00	99,82	9.950.000,00	79.355.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	158.687.672,00	158.654.656,00	99,98	64.970.100,00	93.684.556,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	153.894.552,00	153.882.070,00	99,99	83.929.878,00	69.952.192,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	94.841.410,00	94.241.000,00	99,37	339.000.500,00	(244.759.500,00)
21	Dinas Perikanan	246.705.022,00	179.638.660,00	72,82	29.800.000,00	149.838.660,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	156.560.350,00	146.331.280,00	93,47	470.403.600,00	(324.072.320,00)
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	158.917.300,00	151.601.190,00	95,40	70.493.000,00	81.108.190,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	166.206.550,00	162.226.600,00	97,61	111.790.000,00	50.436.600,00
25	Sekretariat Daerah	1.503.377.016,00	1.488.886.238,00	99,04	2.918.520.000,00	(1.429.633.762,00)
26	Sekretariat DPRD	863.881.200,00	851.167.400,00	98,53	915.699.172,00	(64.531.772,00)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	214.138.250,00	211.820.500,00	98,92	27.095.000,00	184.725.500,00
28	Badan Keuangan Daerah	1.192.172.640,00	1.165.785.000,00	97,79	355.800.000,00	809.985.000,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	131.064.800,00	131.062.000,00	100,00	243.312.850,00	(112.250.850,00)
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	78.022.500,00	75.049.000,00	96,19	0,00	75.049.000,00
31	Inspektorat	642.441.362,00	640.806.027,00	99,75	1.011.415.537,00	(370.609.510,00)
32	Kecamatan Muara Sabak Barat	255.557.431,00	251.574.000,00	98,44	347.257.400,00	(95.683.400,00)
33	Kecamatan Muara Sabak Timur	60.859.070,00	60.800.000,00	99,90	62.705.000,00	(1.905.000,00)
34	Kecamatan Mendahara	71.920.000,00	71.920.000,00	100,00	52.790.000,00	19.130.000,00
35	Kecamatan Mendahara Ulu	130.589.000,00	129.800.000,00	99,40	39.330.000,00	90.470.000,00
36	Kecamatan Geragai	126.950.000,00	122.950.000,00	96,85	85.860.000,00	37.090.000,00
37	Kecamatan Kuala Jambi	130.720.853,00	130.568.000,00	99,88	13.430.000,00	117.138.000,00
38	Kecamatan Dendang	243.835.871,00	230.631.200,00	94,58	69.420.000,00	161.211.200,00
39	Kecamatan Berbak	64.045.243,00	63.575.000,00	99,27	60.569.000,00	3.006.000,00
40	Kecamatan Rantau Rasau	50.781.790,00	47.429.000,00	93,40	72.505.000,00	(25.076.000,00)
41	Kecamatan Nipah Panjang	121.481.463,00	119.328.653,00	98,23	98.274.314,00	21.054.339,00
42	Kecamatan Sadu	49.000.000,00	46.880.000,00	95,67	39.120.000,00	7.760.000,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	76.371.489,00	76.371.489,00	100,00	35.540.878,00	40.830.611,00
	JUMLAH	34.506.457.963,00	31.447.159.821,00	91,13	51.406.129.983,00	(19.958.970.162,00)

Lampiran 16
Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	29.511.893.560,00	29.045.208.364,60	98,42	33.772.565.879,15	(4.727.357.514,55)
2	Dinas Kesehatan	723.323.600,00	722.519.600,00	99,89	4.420.787.400,00	(3.698.267.800,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	738.982.990,00	722.106.000,00	97,72	0,00	722.106.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	1.300.636.000,00	(1.300.636.000,00)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.428.650.000,00	11.488.850.929,00	92,44	5.496.204.993,00	5.992.645.936,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	103.746.440,00	(103.746.440,00)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	(46.000.000,00)
8	Dinas Lingkungan Hidup	241.200.000,00	240.653.000,00	99,77	0,00	240.653.000,00
9	Dinas Perhubungan	1.978.390.000,00	1.880.876.000,00	95,07	0,00	1.880.876.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	125.031.557,00	99.822.000,00	79,84	339.225.000,00	(239.403.000,00)
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	119.000.000,00	118.400.000,00	99,50	0,00	118.400.000,00
13	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.889.000.000,00	1.802.026.544,00	95,40	0,00	1.802.026.544,00
14	Dinas Perkebunan dan Peternakan	242.414.942,00	199.972.000,00	82,49	0,00	199.972.000,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	82.800.000,00	82.616.000,00	99,78	1.049.713.873,78	(967.097.873,78)
16	Sekretariat Daerah	138.000.000,00	137.018.800,00	99,29	5.735.000,00	131.283.800,00
17	Sekretariat DPRD	2.282.864.588,00	2.237.838.450,00	98,03	0,00	2.237.838.450,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	138.660.000,00	(138.660.000,00)
19	Badan Keuangan Daerah	192.000.000,00	171.000.000,00	89,06	146.000.000,00	25.000.000,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	373.000.000,00	364.874.000,00	97,82	54.879.000,00	309.995.000,00
21	Inspektorat	321.910.000,00	321.344.410,00	99,82	214.364.500,00	106.979.910,00
22	Kecamatan Muara Sabak Barat	302.313.417,00	300.570.070,00	99,42	193.592.500,00	106.977.570,00
23	Kecamatan Muara Sabak Timur	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	67.500.000,00	52.500.000,00
24	Kecamatan Mendahara	49.800.000,00	49.800.000,00	100,00	124.818.900,00	(75.018.900,00)
25	Kecamatan Geragai	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00	21.000.000,00
26	Kecamatan Kuala Jambi	31.250.000,00	31.250.000,00	100,00	78.343.000,00	(47.093.000,00)
27	Kecamatan Dendang	118.530.000,00	117.421.000,00	99,06	0,00	117.421.000,00
28	Kecamatan Berbak	158.423.350,00	0,00	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)
29	Kecamatan Nipah Panjang	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00	22.500.000,00
30	Kecamatan Sadu	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	(145.000.000,00)
	JUMLAH	52.212.278.004,00	50.297.667.167,60	96,33	47.749.272.485,93	2.548.394.681,67

Lampiran 17
Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan
Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.475.272.193,00	(1.475.272.193,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	191.448.683.646,00	179.443.880.703,42	93,73	107.756.772.845,20	71.687.107.858,22
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.213.278.709,00	21.922.239.500,00	90,54	15.314.892.000,00	6.607.347.500,00
4	Dinas Perhubungan	280.000.000,00	277.837.975,00	99,23	0,00	277.837.975,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.000.000,00	15.302.000,00	95,64	0,00	15.302.000,00
6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	44.632.500,00	(44.632.500,00)
7	Dinas Perkebunan dan Peternakan	20.000.000,00	19.998.426,00	99,99	0,00	19.998.426,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	64.679.000,00	(64.679.000,00)
9	Sekretariat Daerah	216.590.000,00	215.267.500,00	99,39	0,00	215.267.500,00
10	Kecamatan Muara Sabak Barat	304.378.385,00	303.526.000,00	99,72	380.512.000,00	(76.986.000,00)
11	Kecamatan Muara Sabak Timur	330.000.000,00	330.000.000,00	100,00	240.000.000,00	90.000.000,00
12	Kecamatan Mendahara	173.000.000,00	172.431.000,00	99,67	0,00	172.431.000,00
13	Kecamatan Mendahara Ulu	185.646.000,00	184.200.000,00	99,22	74.700.000,00	109.500.000,00
14	Kecamatan Geragai	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	100.000.000,00
15	Kecamatan Kuala Jambi	534.205.069,00	533.861.700,00	99,94	463.000.000,00	70.861.700,00
16	Kecamatan Dendang	28.350.000,00	28.136.000,00	99,25	0,00	28.136.000,00
17	Kecamatan Berbak	126.784.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	(72.000.000,00)
18	Kecamatan Rantau Rasau	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00	180.000.000,00
19	Kecamatan Nipah Panjang	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	210.000.000,00	150.000.000,00
20	Kecamatan Sadu	282.649.001,00	282.412.000,00	99,92	0,00	282.412.000,00
	JUMLAH	218.799.564.810,00	204.369.092.804,42	93,40	126.096.460.538,20	78.272.632.266,22

Lampiran 18
Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya
Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	4.196.814.412,00	3.771.687.582,00	89,87	4.235.839.990,00	(464.152.408,00)
2	Dinas Kesehatan	4.825.000,00	4.825.000,00	100,00	0,00	4.825.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	4.825.000,00	(4.825.000,00)
5	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	30.000.000,00
6	Kecamatan Muara Sabak Barat	4.825.000,00	4.750.000,00	98,45	17.034.000,00	(12.284.000,00)
	JUMLAH	4.236.464.412,00	3.811.262.582,00	89,96	4.261.698.990,00	(450.436.408,00)

Lampiran 19
Rincian Beban dibayar di Muka Organisasi Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	STNK	PREMI ASURANSI	SEWA	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	2.946.550,00	0,00	0,00	2.946.550,00
2	Dinas Kesehatan	4.779.042,00	0,00	0,00	4.779.042,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	6.987.291,67	0,00	0,00	6.987.291,67
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.386.750,00	0,00	0,00	5.386.750,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.419.416,67	0,00	0,00	7.419.416,67
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.161.391,67	0,00	0,00	2.161.391,67
7	Dinas Ketahanan Pangan	654.841,66	0,00	0,00	654.841,66
8	Dinas Lingkungan Hidup	7.492.350,00	0,00	0,00	7.492.350,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.295.458,33	0,00	0,00	1.295.458,33
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.081.800,00	0,00	0,00	4.081.800,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	8.548.516,67	0,00	0,00	8.548.516,67
12	Dinas Perhubungan	1.757.366,66	0,00	0,00	1.757.366,66
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.601.154,16	0,00	0,00	3.601.154,16
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.816.950,00	0,00	0,00	1.816.950,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.379.550,00	0,00	0,00	2.379.550,00
16	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.393.283,33	0,00	0,00	1.393.283,33
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.688.708,33	0,00	0,00	3.688.708,33
18	Dinas Perikanan	1.067.416,67	0,00	0,00	1.067.416,67
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.173.075,00	0,00	0,00	6.173.075,00
20	Dinas Perkebunan dan Peternakan	5.691.466,66	0,00	0,00	5.691.466,66
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.005.541,67	0,00	3.333.333,00	5.338.874,67
22	Inspektorat	1.227.550,00	0,00	0,00	1.227.550,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.552.841,67	0,00	0,00	5.552.841,67
24	Badan Keuangan Daerah	2.931.708,33	0,00	0,00	2.931.708,33
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	3.004.733,33	0,00	0,00	3.004.733,33
26	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	516.058,33	0,00	0,00	516.058,33
27	Sekretariat Daerah	17.537.150,00	56.043.491,00	0,00	73.580.641,00
28	Sekretariat DPRD	12.370.516,67	41.384.916,67	0,00	53.755.433,34
29	Kecamatan Muara Sabak Barat	755.975,00	0,00	0,00	755.975,00
30	Kecamatan Muara Sabak Timur	1.230.708,33	0,00	0,00	1.230.708,33
31	Kecamatan Mendahara	557.866,67	0,00	0,00	557.866,67
32	Kecamatan Mendahara Ulu	1.679.325,00	0,00	0,00	1.679.325,00
33	Kecamatan Geragai	397.950,00	0,00	0,00	397.950,00
34	Kecamatan Kuala Jambi	1.043.858,33	0,00	0,00	1.043.858,33
35	Kecamatan Dendang	699.074,99	0,00	0,00	699.074,99
36	Kecamatan Berbak	637.141,67	0,00	0,00	637.141,67
37	Kecamatan Rantau Rasau	724.650,00	0,00	0,00	724.650,00
38	Kecamatan Nipah Panjang	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.408.966,67	0,00	0,00	1.408.966,67
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.945.975,00	0,00	0,00	5.945.975,00
	JUMLAH	139.658.471,14	97.428.407,67	3.333.333,00	240.420.211,81

Lampiran 20
Persediaan Organisasi Perangkat Daerah
per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	1.547.000,00	310.000,00	1.237.000,00
2	Dinas Kesehatan	3.448.405.243,69	2.924.018.782,22	524.386.461,47
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.898.362.379,00	2.632.700.728,00	265.661.651,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.339.266.741,00	1.716.406.177,00	1.622.860.564,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.677.063.200,00	5.443.866.876,00	2.233.196.324,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.946.800,00	200.000,00	1.746.800,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	197.484.986,00	195.184.513,00	2.300.473,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	705.042,00	723.702,00	(18.660,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan	618.400,00	1.715.350,00	(1.096.950,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	557.433,00	859.867,00	(302.434,00)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	204.911.996,00	291.544.016,00	(86.632.020,00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.066.000,00	1.165.408,00	(99.408,00)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	103.574.609,00	27.433.755,00	76.140.854,00
14	Dinas Perhubungan	3.139.625,00	2.440.404,00	699.221,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	832.800,00	977.200,00	(144.400,00)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.610.500,00	1.773.500,00	(163.000,00)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.331.882,00	1.373.414,00	(41.532,00)
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.330.890,00	552.100,00	778.790,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	305.000,00	314.600,00	(9.600,00)
20	Dinas Perikanan	450.654,00	425.930,00	24.724,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	158.089.192,00	74.190.292,00	83.898.900,00
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	384.246.882,00	25.299.487,00	358.947.395,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.478.778,00	1.185.869,00	292.909,00
24	Inspektorat	1.740.411,00	7.987.274,00	(6.246.863,00)
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	757.557,00	972.213,00	(214.656,00)
26	Badan Keuangan Daerah	59.295.877,00	58.929.420,00	366.457,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	6.022.800,00	1.894.805,00	4.127.995,00
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	244.300,00	258.000,00	(13.700,00)
29	Sekretariat Daerah	16.826.315,00	14.703.850,00	2.122.465,00
30	Sekretariat DPRD	5.703.850,00	7.094.600,00	(1.390.750,00)
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	18.431.610,00	19.170.610,00	(739.000,00)
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	526.400,00	857.550,00	(331.150,00)
33	Kecamatan Mendahara	823.600,00	321.000,00	502.600,00
34	Kecamatan Mendahara Ulu	6.811.702,00	4.646.498,00	2.165.204,00
35	Kecamatan Geragai	3.093.000,00	942.700,00	2.150.300,00
36	Kecamatan Kuala Jambi	1.051.891,00	1.141.750,00	(89.859,00)
37	Kecamatan Dendang	2.105.085,00	1.133.012,00	972.073,00
38	Kecamatan Berbak	1.074.500,00	1.450.000,00	(375.500,00)
39	Kecamatan Rantau Rasau	1.815.475,00	1.225.972,00	589.503,00
40	Kecamatan Nipah Panjang	1.041.040,00	3.903.359,00	(2.862.319,00)
41	Kecamatan Sadu	908.261,00	1.778.813,00	(870.552,00)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.412.432,00	1.315.082,00	97.350,00
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.382.753,00	5.751.631,00	2.631.122,00
	JUMLAH	18.566.394.891,69	13.480.140.109,22	5.086.254.782,47

Lampiran 22
Rincian Mutasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
I	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022	636.221.000,00
2	Penambahan dari tanah pemerintah yang telah dinilai dan sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	168.980.000,00
3	Reklas dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan berupa Pembangunan Prasarana Lahan Parkir dan Rest Area Kuala Jambi	1.880.876.000,00
4	Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perhubungan berupa Perencanaan Pembangunan Prasarana Lahan Parkir dan Rest Area Kuala Jambi (belanja tahun 2018).	59.250.000,00
5	Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Pematangan Lahan Pasar Muara Sabak Timur (belanja tahun 2021).	99.525.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah (I)	2.844.852.000,00
II	Mutasi Kurang	
1	Hibah Aset Tetap Tanah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 222 Tahun 2022 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada Badan Keuangan Daerah	275.424.120,00
2	Hibah Aset Tetap Tanah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 278 Tahun 2022 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi Pada Sekretariat Daerah	1.156.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang (II)	276.580.120,00
	JUMLAH MUTASI ASET TANAH	2.568.271.880,00

Lampiran 23
Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Tanah Organisasi Perangkat Daerah
per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 31 Desember 2021	Mutasi Aset Tahun 2022								Saldo Awal Per 31 Desember 2022
			Mutasi Tambah				Mutasi Kurang				
			Belanja Modal	Mutasi dari OPD	Mutasi Dari Akun Lain	Sertifikasi Tanah	JUMLAH	Hibah	Mutasi ke OPD	JUMLAH	
1	Dinas Pendidikan	4.521.471.827,78	0,00	6.000.000,00	0,00	74.260.000,00	80.260.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.595.731.827,78
2	Dinas Kesehatan	214.368.573,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	217.158.573,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.968.047.611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968.047.611,83
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	93.220.600,00	0,00	24.000.000,00	0,00	91.930.000,00	115.930.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	185.150.600,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.617.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617.600,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.116.885.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.885.160,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	94.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.616.000,00
8	Dinas Perhubungan	1.628.476.720,00	0,00	0,00	1.940.126.000,00	0,00	1.940.126.000,00	0,00	0,00	0,00	3.568.602.720,00
9	Dinas Perikanan	31.048.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.048.060,00
10	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	188.171.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.171.750,00
11	Dinas Perkebunan dan Peternakan	221.958.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.958.640,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.335.838.820,00	109.271.000,00	0,00	99.525.000,00	0,00	208.796.000,00	0,00	0,00	0,00	1.544.634.820,00
13	Badan Keuangan Daerah	1.632.659.727,00	526.950.000,00	0,00	0,00	0,00	526.950.000,00	275.424.120,00	0,00	275.424.120,00	1.884.185.607,00
14	Sekretariat Daerah	9.564.236.996,50	0,00	280.715.000,00	0,00	0,00	280.715.000,00	1.156.000,00	280.715.000,00	281.871.000,00	9.563.080.996,50
15	Kecamatan Muara Sabak Barat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
16	Kecamatan Muara Sabak Timur	265.148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.148.600,00
17	Kecamatan Mendahara	233.157.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.157.125,00
18	Kecamatan Geragai	49.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.326.000,00
19	Kecamatan Kuala Jambi	171.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.690.000,00
20	Kecamatan Dendang	104.164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.164.800,00
21	Kecamatan Berbak	81.157.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.157.120,00
22	Kecamatan Rantau Rasau	117.000.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000.600,00
23	Kecamatan Nipah Panjang	101.870.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870.760,00
24	Kecamatan Sadu	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	JUMLAH	33.749.633.091,11	636.221.000,00	310.715.000,00	2.039.651.000,00	168.980.000,00	3.155.567.000,00	276.580.120,00	310.715.000,00	587.295.120,00	36.317.904.971,11

Lampiran 24

Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
I	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022	31.447.159.821,00
2	Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa Kendaraan Dinas Roda Empat Ambulance 3 (Tiga) unit pembelian tahun 2013 yang tercatat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tentang Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP-04) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor KN.02.07/1.3/7657/2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : KN.02.07/1.3/7658/2020	846.750.000,00
3	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Lemari Arsip dan Printer	31.085.000,00
4	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Perkebunan dan Peternakan berupa 2 unit Kendaraan Dinas Roda Dua, 2 Unit Kulkas (Alat Pendingin), Lemari Besi 2 Pintu (Alat Kantor Lainnya), dan 5 Unit Laptop (Personal Komputer).	130.518.042,00
5	Kapitalisasi aset tetap pada Sekretariat Daerah berupa Mebel	211.174.670,85
6	Reklas dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berupa Sarana Pendukung Keinformasian Renovasi BPP di Kec. Dendang	45.600.000,00
7	Reklas dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berupa Sarana Pendukung Keinformasian Renovasi BPP di Kec. Rantau Rasau	47.920.000,00
8	Reklas dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berupa Sarana Pendukung Keinformasian Renovasi BPP di Kec. Berbak	48.550.000,00
9	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya Pada Kecamatan Muara Sabak Barat berupa Speaker Aktif	4.750.000,00
10	Utang Aset Belanja Modal pada RSUD berupa Alat Kedokteran Mata	4.400.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah (I)	32.817.907.533,85
II	Mutasi Kurang	
1	Aset Tetap (Extracomptable) pada Dinas Pendidikan berupa Alat Studio, Meubelair, Alat Labor SD dan SMP, Alat Peraga, Alat Permainan Edukatif, Alat Praktik Keterampilan, Alat Praktik IPA Menengah dan Alat Kantor Lainnya	1.067.821.872,00
2	Aset Tetap (Extracomptable) pada Dinas Kesehatan Bahan Set Alat Kesehatan Umum Lainnya, Bahan Set Alat Kedokteran Umum, Bahan Set Alat Laboratorium Umum, dan Bahan Peralatan Kegawat Daruratan.	31.575.500,00
3	Aset Tetap (Extracomptable) pada Rumah Sakit Umum Daerah Alat Kedokteran dan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga (Alas Kasur dan Selimut, Timbangan Badan, Nierbekken, SPO2 Portable, dan Ambu (Laryngeal Mask).	246.637.732,00
4	Aset Tetap (Extracomptable) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kursi Rapat (Mebel) sebanyak 30 buah, Toolkit Elektrik (Perkakas Standard Tool) sebanyak 5 Set, dan Garpu Sendok sebanyak 3 Lusin (Alat Rumah Tangga Lainnya).	16.286.000,00
5	Aset Tetap (Extracomptable) pada Dinas Lingkungan Hidup Tempat Sampah 2 Pilah sebanyak 50 unit.	87.000.000,00
6	Aset Tetap (Extracomptable) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kursi Rapat (Mebel) sebanyak 40 unit, Alat Kesehatan Kerja (Bak Instrument Bag Tutup, dan Morplant Kit)	18.200.000,00
7	Aset Tetap (Extracomptable) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa Tabung Gas (Home Use) dan Rice Cooker (Alat Dapur).	1.195.600,00
8	Aset Tetap (Extracomptable) pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahragaberupa Kursi Rapat (Mebel) sebanyak 15 unit.	6.000.000,00
9	Aset Tetap (Extracomptable) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Kursi Kerja sebanyak 5 unit, Hardisk Eksternal, Alat Pencetak Kartu (Toner), dan Kunci Brankas	19.650.000,00
10	Aset Tetap (Extracomptable) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Alat Peralatan Pelatihan dan Alat Ukur Universal (Timbangan Kemetrolagian) sebanyak 10 unit.	10.100.000,00
11	Aset Tetap (Extracomptable) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Alat Pendingin (Eksospen) sebanyak 2 unit dan Peralatan Mini Komputer (Hardisk Eksternal) sebanyak 6 unit.	7.155.000,00
12	Aset Tetap (Extracomptable) pada Badan Keuangan Daerah berupa Alat kantor lainnya (Aki Mesin Genset) dan Meja Tamu (Mebel)	8.475.000,00
13	Aset Tetap (Extracomptable) pada Sekretariat Daerah berupa Alat Studio dan Alat kantor lainnya (Stabilizer)	23.705.000,00
14	Aset Tetap (Extracomptable) pada Sekretariat DPRD berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Cangkul, Gunting Taman, Kapak, Linggis, Lori, Parang, Tajak, Tang Press, Tangki Semprot Hama, Alas Meja Bulat Merah Putih, dan Gorden).	93.000.000,00
15	Aset Tetap (Extracomptable) pada Kecamatan Muara Sabak Barat berupa Alat Penyemprot Hama (Alat Rumah Tangga Lainnya)	695.000,00
16	Aset Tetap (Extracomptable) pada Kecamatan Dendang berupa Bad Cover (Alat Rumah Tangga Lainnya).	1.990.000,00
17	Aset Tetap (Extracomptable) pada Kecamatan Rantau Rasau berupa Pisau Mesin Rumput sebanyak 5 buah (Alat Rumah Tangga Lainnya).	629.000,00
18	Aset Tetap (Extracomptable) pada Kecamatan Nipah Panjang berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Dispenser) sebanyak 5 unit.	1.920.153,00
19	Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat yang berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 028/01/Bakeuda/2022 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : 034/04/Bakeuda/2022 antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur.	149.007.700,00
20	Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah berupa 11 unit Kendaraan Roda 2 dan 1 Unit Kendaraan Roda 4 yang berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 028/01/Bakeuda/2022 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : 034/04/Bakeuda/2022 antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur	619.664.500,00
21	Reklas ke Gedung dan Bangunan pada Sekretariat DPRD berupa Papan Reklame	147.900.000,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
22	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada RSUD berupa Jaringan Oksigen/Gas.	556.293.150,00
23	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Sekretariat Daerah berupa Sumur Bor	29.897.850,00
24	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kecamatan Mendahara berupa Sumur Bor	20.000.000,00
25	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Sumur Bor	25.000.000,00
26	Reklas ke Aset Tetap Lainnya pada Sekretariat DPRD berupa Lukisan	3.500.000,00
27	Reklas ke Aset Tetap Lainnya Pada Kecamatan Muara Sabak Barat berupa Alat Permainan Edukatif (APE) Luar Ruangan	35.000.000,00
28	Pembayaran Utang Aset Tahun 2021 pada RSUD berupa Scanner	5.350.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang (II)	3.233.649.057,00
	JUMLAH MUTASI PERALATAN DAN MESIN	29.584.258.476,85

Lampiran 26

Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
I	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022	50.297.667.167,60
2	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan berupa Perencanaan Gedung Sekolah	254.400.000,00
3	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan berupa Pengawasan Gedung Sekolah	318.320.000,00
4	Reklas dari Barang dan Jasa pada RSUD berupa Perencanaan Kantin dan Gudang	18.898.000,00
5	Reklas dari Barang dan Jasa pada RSUD berupa Pengawasan Kantin dan Gudang	25.124.850,00
6	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa -Perencanaan Pekerjaan Ikon Swafoto RTH Sabak Timur	69.850.000,00
7	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengadaan Gazebo + Kontruksi Pemasangan	45.000.000,00
8	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pagar RTH Sabak Timur	35.892.000,00
9	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pekerjaan Ikon Swafoto RTH Sabak Timur	39.960.000,00
10	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Rehab Taman Kantor, Gedung Kantor dan Renovasi Ruang Aula dan Bidang	15.730.000,00
11	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Camat Sadu (Tahap III)	54.279.000,00
12	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan (Lanjutan)	56.426.000,00
13	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Peningkatan Kantor Pewira Penhubung (Pabung) Kab Tanjung Jabung Timur	35.542.000,00
14	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Peningkatan Kantor Pewira Penhubung (Pabung) Kab Tanjung Jabung Timur	41.620.000,00
15	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Rehab Bangunan Kantor Gedung Perkim	179.830.000,00
16	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Rehab Kantor Dinas Perkim Kab Tanjung Jabung Timur	11.904.000,00
17	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Rehab Ruang Aula dan Bidang	79.837.000,00
18	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pendampingan JPN kegiatan Rehabilitasi Masjid Nur Ad Darajat	48.649.267,00
19	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Pagar dan Gerbang sirkuit (Lanjutan)	75.180.000,00
20	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Perencanaan Bangunan Gedung Kantor dan Pengawasan Bangunan Gedung Kantor	11.988.000,00
21	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berupa Perencanaan Rehab Lapangan Tennis B Rumah Dinas Bupati dan Pengawasan Rehab Lapangan Tennis B Rumah Dinas Bupati	10.873.970,00
22	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Pembuatan Canopy Kantor	10.000.000,00
23	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Perencanaan Rehab Pasar Rantau Indah dan Pengawasan Rehab Pasar Rantau Indah, Rehab Pasar Blok D dan Pengawasan Rehab Pasar Blok D, Perencanaan Rehab Pasar Nipah Panjang, Rehab Pasar Nipah Panjang dan Pengawasan Rehab Pasar Nipah Panjang	374.404.000,00
24	Reklas dari Barang dan Jasa pada Badan Keuangan Daerah berupa Perencanaan Rehab Ruang dan Toilet Kantor dan Pengawasan Rehab Ruang dan Toilet Kantor	27.500.000,00
25	Reklas dari Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berupa Perencanaan Rehab Gedung Kantor dan Pengawasan Rehab Gedung Kantor	37.128.880,00
26	Reklas dari Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD berupa Perencanaan dan Pengawasan Bangunan WC dan Ruang Tamu Rumah Dinas Ketua, Bangunan Lapangan Bulu Tangkis Rumah Dinas Wakil Ketua	63.045.400,00
27	Reklas dari Barang dan Jasa pada Kecamatan Mendahara berupa Bangunan Aula Gedung Kantor Lurah Mendahara dan Bangunan Gedung Kantor Camat Mendahara	243.000.000,00
28	Hibah Perumahan Rusunawa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Lokasi Kelurahan Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat terletak di Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1217/BA/DC/2022 dan Nomor 032/12/Bakeuda/2022, dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 258/BA/Dr/2022 dan Nomor 192/379/DISPERKIM/TJT/2022	13.583.394.867,00
29	Hibah Bangunan Gedung Kantor Permanen (Finishing Pusat Bisnis) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3092/DPDPTT/DPKTrans/09/2017 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor BA.3091/DPDPTT/DPKTrans/09/2017	1.441.770.000,00
30	Hibah Bangunan Tempat Parkir (Conblok Taman Halaman) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3092/DPDPTT/DPKTrans/09/2017 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Dirjen	413.681.000,00

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor BA.3091/DPDTT/DPKTrans/09/2017	
31	Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Perencanaan Revitalisasi Pasar Blok D (Tahun 2019)	49.753.000,00
32	Reklas dari Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD berupa Papan Reklame	147.900.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah (I)	68.118.548.401,60
II	Mutasi Kurang	
1	Reklas ke Aset Tetap Tanah pada Dinas Perhubungan berupa Pembangunan Prasarana Lahan Parkir dan Rest Area Kuala Jambi	1.880.876.000,00
2	Reklas ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendidikan berupa Pemasangan Conblok SMPN. 6 Tanjab Timur Kecamatan Sadu	118.608.000,00
3	Reklas ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan berupa Perencanaan Pembangunan Gedung Sekolah dan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas SDN No.140/X Harapan Makmur Kec. Rantau Rasau	165.400.000,00
4	Reklas ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan pada pada Dinas Kesehatan berupa Penyusunan Dokumen UKL, UPL RS Pratama Kec. Rantau Rasau	173.271.000,00
5	Reklas ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Perluasan Gedung Kantor Kominfo	69.400.000,00
6	Reklas ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Perencanaan Perluasan Gedung Kantor	94.400.000,00
7	Reklas ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Sekretariat DPRD berupa Bangunan Gedung Kantor DPRD	1.978.871.000,00
8	Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berupa Sarana Pendukung Keinformasian Renovasi BPP di Kec. Dendang	45.600.000,00
9	Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berupa Sarana Pendukung Keinformasian Renovasi BPP di Kec. Rantau Rasau	47.920.000,00
10	Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berupa Sarana Pendukung Keinformasian Renovasi BPP di Kec. Berbak	48.550.000,00
11	Pembayaran Utang Aset Tahun 2021 pada Dinas Pendidikan berupa Rehabilitasi Ruang Kelas SDN No.114/X Pandan Jaya Kecamatan Geragai	259.479.960,00
12	Aset Tetap Extracomptable pada Dinas Kesehatan berupa Pembangunan Ruang Limbah B3 Puskesmas Dendang	8.500.000,00
13	Aset Tetap Extracomptable pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berupa Partisi Ruangan	104.891.000,00
14	Aset Tetap Extracomptable pada Sekretariat Daerah berupa Partisi Ruangan Kantor Bupati	39.890.800,00
15	Aset Tetap Extracomptable pada Kecamatan Muara Sabak Barat berupa Partisi Ruang Paten Kantor Lurah Singkep, Rehab PAU Harapan Kita Lurah Parit Culum II, dan Partisi dan Altar Aula Kantor Lurah Teluk Dawan	107.472.070,00
16	Aset Tetap Extracomptable pada Kecamatan Kuala Jambi berupa Pintu Pagar Teralis Kantor	6.250.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang (II)	5.149.379.830,00
	JUMLAH MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN	62.969.168.571,60

Lampiran 28

Rincian Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
I	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2022	204.369.092.804,42
2	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Box Culvert Dusun Sidodadi Desa Kota Baru Kec. Geragai (Double Box) (Lokasi 1)	12.732.751,77
3	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Box Culvert RT 010 Desa Suka Maju Kec. Geragai (Lokasi 2)	4.969.411,34
4	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Box Culvert RT 11 Dusun Suko Sari Desa Pandan Sejahtera Kec. Geragai (Lokasi 3)	4.966.494,51
5	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Box Culvert Depan Kantor Desa Pandan Lagan Kec. Geragai (Lokasi 4)	7.724.697,25
6	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Box Culvert RT.4 Margo Dadi Desa Pandan Lagan (Lokasi 10)	7.734.645,12
7	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Box Culvert Menuju BPT Parit Culum 1 Kec. Muara Sabak Barat (Lokasi 5)	12.707.259,65
8	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Box Culvert RT.07 Desa Catur Rahayu (Lokasi 12)	12.717.753,73
9	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Box Culvert RT 14 RW 04 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat (Lokasi 13)	12.713.986,62
10	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Box Culvert RT 17 RW 4 SK 11 Kel. Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau (Lokasi 6)	12.791.834,63
11	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Box Culvert RT 17 Desa Bangun Karya Kec. Rantau Rasau (Lokasi 7)	12.795.351,32
12	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Box Culvert Parit 2 Kiri Desa Remau Bako Tuo (Lokasi 11)	13.127.814,05
13	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Box Culvert RT 001/RW001 Kel Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau Paket 1 (Lokasi 8)	25.549.955,03
14	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Box Culvert RT 001/RW001 Kel Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau Paket 2 (Lokasi 9)	12.456.044,97
15	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Saluran Drainase 2 Lokasi (Lokasi 14)	19.044.955,48
16	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Saluran Drainase 2 Lokasi (Lokasi 15)	19.028.044,52
17	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Saluran Drainase 2 Lokasi (Lokasi 16)	16.854.881,57
18	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Saluran Drainase 2 Lokasi (Lokasi 17)	21.790.118,43
19	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Saluran Drainase 4 Lokasi (Lokasi 18)	19.317.267,19
20	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb. Saluran Drainase 4 Lokasi (Lokasi 19)	19.310.732,81
21	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul Parit 5 RT. 15 RW. 02 Kelurahan Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat	49.934.500,00
22	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul Sungai 3/Sungai Bom Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	49.934.500,00
23	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul Parit Cengge RT 03 Dusun Harapan Desa Sungai Tawar Kec. Mendahara	31.568.780,34
24	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul Parit Selamat Dusun Hidayah Desa Merbau Kecamatan Mendahara	45.712.869,22
25	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul Sungai Sawah Besar Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	22.565.350,44
26	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul Parit Senong Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara	47.314.404,42
27	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul Parit 2 Sungai Tembikar Kel. Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	24.037.078,03
28	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul Parit 4 kiri Sungai Tembikar Kel Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	28.341.517,55
29	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul Parit 5 kiri Desa Alang - Alang Kecamatan Muara Sabak Timur	39.009.076,86
30	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul Parit 6 kiri Desa Alang - Alang Kecamatan Muara Sabak Timur	60.683.923,14
31	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul Parit Tanjung Kel Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	46.028.908,17
32	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul Parit Desa Kuala Lagan Kec. Kuala Jambi (Lanjutan)	53.697.091,83
33	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Dinding Pengaman Bangunan Pintu Air Desa Marga Mulya Kecamatan Rantau Rasau	10.030.370,48
34	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul Parit 1 Kiri Dusun Mandiri Desa Kota Harapan Kec. Muara Sabak Timur	41.108.615,31
35	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul Parit 10 Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur	48.719.014,21
36	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Dusun Sungai Palas RT 4 lapis 1 Ds. Rantau Rasau Desa Kec. Berbak	52.033.560,49
37	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul SK.26 Dusun Mulia Sari Desa Sungai Tering Kec. Nipah Panjang	32.357.535,71
38	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Parit lapis RT 06 Desa Sungai Jambak Kec. Sadu	15.433.903,79

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
39	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul D.I.R Lambur I - II	99.858.000,00
40	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul D.I.R Penganyut	99.891.000,00
41	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul D.I.R Pamusiran Luar	99.792.000,00
42	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul DIR Siau Dalam	99.789.000,00
43	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan jalan parit panacuk - Ponpes Sungai Daun 2 KM	89.577.000,00
44	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan SK.4 - SK.8 Desa Suka Maju Kec. Geragai	89.577.000,00
45	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan menuju SD IT Talang Babat	89.521.000,00
46	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Parit 4 - Kuala Parit 1 Desa Sungai Sayang Kec. Sadu	97.513.000,00
47	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Parit 7 ke Parit 8 Desa Beringin Jaya, Simpang Kacang dan Desa Simpang datuk Kec. Sadu	96.747.000,00
48	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Parit Antara Ebon RT 04 Dusun Karya Desa Sungai Tereng Kec. Nipah Panjang	89.466.000,00
49	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Parit Antara Lani RT 01 RW 10 Kelurahan Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang	89.577.000,00
50	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Parit Jawa Timur Desa Sungai Beras Kec. Mendahara	96.792.000,00
51	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Pemuda Dusun Tengah SK. 3 Desa Catur Rahayu Kec. Dendang	89.606.000,00
52	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan RT. 01 - RT.05 Kel Teluk Dawan	89.521.000,00
53	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan SK 21 Menuju Arah Pesantren Kec. Rantau Rasau	88.356.000,00
54	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan SK 25 Dusun sri Rejeki Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau	89.355.000,00
55	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Sungai Palas Ke Simpang Datuk Kec. Nipah panjang	96.225.000,00
56	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Sungai Tembikar - Sungai Tawar Kec. Mendahara	89.599.000,00
57	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Teluk Perancis - Sungai Beras Kec. Mendahara Ulu	96.814.000,00
58	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Rantau Rasau - Nipah Panjang	89.366.000,00
59	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jembatan Parit 0 RT 05-RT 06 Desa Kuala Simbur Kec. Muara Sabak Timur	75.091.000,00
60	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan jembatan RT.01 RW.01 Kel Bandar Jaya	70.263.000,00
61	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Tegal Rantau Makmur Menuju Desa Telago Limo Kec. Berbak	99.550.000,00
62	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Rigid Beton Mendahara Kec. Mendahara	99.516.000,00
63	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Menuju Oprit Barat Jembatan Muara Sabak Kec. Muara Sabak Barat	99.710.000,00
64	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Sungai Palas Ke Simpang Datuk Kec. Nipah panjang	99.788.000,00
65	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Teluk Kijing Ke Kuala Simbur Kec. Muara Sabak Timur	99.511.000,00
66	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan SK 21 Menuju Arah Pesantren Kec. Rantau Rasau	99.777.000,00
67	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan SK 25 Dusun sri Rejeki Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau	99.344.000,00
68	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Dewi Sartika Desa Rantau Rasau II Kec. Rantau Rasau	99.860.000,00
69	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jl. Parit 7 ke 8 Ds. Beringin Jaya, Spg. Kacang dan Ds. Spg. datuk Kec. Sadu	99.771.000,00
70	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Pandan - Kantor Desa Lagan Ulu	99.650.000,00
71	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan SK 7 - SK 8 Kanan Desa Sido Mukti Kec. Dendang	99.527.000,00
72	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Lagan Ilir Kec. Mendahara	99.611.000,00
73	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Teluk Perancis - Sungai Beras Kec. Mendahara Ulu	98.762.000,00
74	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Kalimantan RT.3 RW.2 Kelurahan Muara Sabak Ulu	99.583.000,00
75	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan jalan Sungai Jambat Parit 6 - 10 Kec. Sadu	99.732.000,00
76	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Dusun Sepakat Indah Desa Lagan Ulu	99.737.000,00
77	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Asoi - Kotaraja Kec. Ma.Sabak Timur	99.692.000,00
78	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Bunga Tanjung Kec. Nipah Panjang	99.849.000,00
79	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Parit Antara Lani RT 01 RW 10 Kelurahan Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang	99.650.000,00
80	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Sungai Tembikar - Sungai Tawar Kec. Mendahara	99.622.000,00

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
81	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Jalan Rantau Rasau - Nipah Panjang	99.677.000,00
82	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Parit Culum II RT 1, 2 dan 11 (Lanjutan) Kec. Ma. Sabak Barat	99.682.000,00
83	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Jalan SK.4 - SK.8 Desa Suka Maju Kec. Geragai	99.701.000,00
84	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan menuju (SD IT) Talang Babat Kec.Ma. Sabak Barat	99.710.000,00
85	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Parit Jawa Timur Desa Sungai Beras Kec. Mendahara Ulu	99.150.000,00
86	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert Dusun Sidodadi Desa Kota Baru Kec. Geragai (Double Box) (Lokasi 1)	22.266.240,74
87	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert RT 010 Desa Suka Maju Kec. Geragai (Lokasi 2)	8.690.196,06
88	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert RT 11 Dusun Suko Sari Desa Pandan Sejahtera Kec. Geragai (Lokasi 3)	8.685.095,29
89	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert Menuju BPT Parit Culum 1 Kec. Muara Sabak Barat (Lokasi 5)	11.614.098,14
90	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert RT 17 RW 4 SK 11 Kel. Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau (Lokasi 6)	17.923.106,54
91	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert RT 17 Desa Bangun Karya Kec. Rantau Rasau (Lokasi 7)	17.928.033,90
92	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert RT 001/RW001 Kel Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau Paket 2 (Lokasi 9)	17.355.413,92
93	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert RT.4 Margo Dadi Desa Pandan Lagan (Lokasi 10)	18.096.965,99
94	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert Parit 2 Kiri Desa Remau Bako Tuo (Lokasi 11)	18.393.859,56
95	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert RT.07 Desa Catur Rahayu (Lokasi 12)	11.623.689,45
96	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert RT 14 RW 04 Kel. Parit Culum I Kec. Ma. Sabak Barat (Lokasi 13)	11.620.246,42
97	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Parit Antara Ebon RT 04 Dusun Karya Desa Sungai Tering Kec. Nipah Panjang	99.650.000,00
98	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Jalan Karya Bhakti TNI Pengawasan Pemb. Jalan KTM-Tanjung Batu (Swakelola)	50.000.000,00
99	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Sirkuit Kec. Muara Sabak Barat (Lanjutan)	199.075.000,00
100	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Blok A Dusun 1 Trimulyo - Sei- Pemusiran/Teluk Jering DS.Harapan Makmur	99.844.000,00
101	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Menuju Desa Lambur Luar Kec. M.Sabak Timur	99.800.000,00
102	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jl. Poros Sungai Lokan - Jl. Poros Sungai Jambat - Jl. Poros Sungai Sayang (Lanjutan)	99.881.000,00
103	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Blok A Pandan Jaya - Kuala Mendahara (Lanjutan)	99.714.000,00
104	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Tanah Merah Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat	99.825.000,00
105	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert RT 001/RW001 Kel Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau Paket 1 (Lokasi 8)	35.599.586,08
106	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert Jalan Kihajar Dewantara Komp. Perkantoran Kel. Rano (Lokasi 17)	20.897.606,00
107	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Parit 4 - Kuala Parit 1 Desa Sungai Sayang Kec. Sadu	98.856.000,00
108	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Simp. Gelis - Jalan Provinsi (DAK Penugasan)	144.218.970,00
109	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jln Tugu PMD Jln Poros Ka. Jambi Menuju Jln Jeramb Beton KP. Laut (DAK Reguler)	140.177.460,00
110	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Lambur II - Simbur Naik (DAK Reguler)	140.700.000,00
111	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Jalan Karya Bakti TNI Pemb. JL. Palatuang Desa Sei- Tawar Kec. Mendahara (Swakelola)	50.000.000,00
112	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Jalan Koto Kandis - Trimulyo (DAK Reguler)	118.548.000,00
113	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert Depan Kantor Desa Pandan Lagan Kec. Geragai (Lokasi 4)	13.508.467,90
114	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert Parit Syukur Lagan tengah Kec. Geragai (Lokasi 14)	16.178.880,01
115	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert Sk 4 - 5 RT 02 Dusun Karang Harjo Desa Rantau Karya (Lokasi 15)	16.164.513,99
116	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert RT 09 Dsn. Tengah Ds. Catur Rahayu Kec. Dendang (Lokasi 16)	17.738.491,97
117	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert SK 12 RT 18 RW 04 Desa Bandar Jaya (Lokasi 18)	17.754.256,85
118	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Box Culvert RT 19 SK 13 Kel. Bandar Jaya Kec Rantau Rasau (Lokasi 19)	17.748.251,18
119	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Peningkatan Jalan Pemuda Dusun Tengah SK. 3 Desa Catur Rahayu Kec. Dendang	76.911.000,00
120	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Jemb. Kanal WKS Ds. Pangkal Duri Kec. Mendahara (DAK Reguler)	99.681.000,00
121	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Jembatan Parit 0 RT 05-RT 06 Ds. Ka. Simbur Kec. M. Sabak Timur (Lokasi 1)	99.845.000,00
122	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Pemb. Jembatan RT.01 RW.01 Kel. Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau	144.272.250,00

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
123	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Sekunder Dusun Jati Moro Desa Jati Mulyo Kec. Dendang	59.075.117,28
124	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Parit Solong Dusun Mario Desa Lagan Ulu Kec. Geragai	40.546.272,72
125	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Parit Selamat Dusun Hidayah Desa Merbau Kec. Mendahara	44.265.209,54
126	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Parit Senong Desa Pangkal Duri Ilir Kec. Mendahara	55.547.100,46
127	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul D.I.R. Muara Sabak	99.599.190,00
128	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Sungai Sawah Besar Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara	41.542.983,25
129	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran Tanggul Parit Cengge RT 03 Dusun Harapan Desa Sungai Tawar Kec. Mendahara	58.118.366,75
130	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran Tanggul Parit Sungai Putat RT.19 Dusun Sungai Putat Ds. Sinar Wajo Kec.Mendahara Ulu	58.320.755,34
131	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Sungai 3/Sungai Bom Kelurahan Mendahara Ilir Kec. Mendahara	41.594.784,66
132	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Parit 7 Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi	26.693.720,49
133	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Parit Senang Dalam Desa Kota Raja Kecamatan Muara Sabak Timur	34.107.918,87
134	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Parit 5 RT. 15 RW. 02 Kel. Kampung Singkep Kec. Ma. Sabak Barat	38.908.550,64
135	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Dinding Pengaman Bang. Pintu Air Desa Marga Mulya Kec. Rantau Rasau	50.658.373,97
136	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Parit lapis RT 06 Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	48.980.776,03
137	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran Tanggul Parit Dusun Sungai Palas RT 4 lapis 1 Desa Rantau Rasau Desa Kec. Berbak	61.448.154,60
138	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul SK.26 Dusun Mulia Sari Desa Sungai Tering Kec. Nipah Panjang	38.212.085,40
139	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Parit 1 Kiri Dusun Mandiri Desa Kota Harapan Kec. Muara Sabak Timur	17.596.948,65
140	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Parit 10 Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur	82.075.501,35
141	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Parit Tanjung Kel Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	46.003.679,64
142	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Parit Desa Kuala Lagan (Lanjutan) Kecamatan Kuala Jambi	53.667.660,36
143	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran Tanggul Parit 5 Kiri Desa Alang-alang Kecamatan Muara Sabak Timur	38.990.177,45
144	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Parit 6 kiri Desa Alang - Alang Kecamatan Muara Sabak Timur	60.654.522,55
145	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Parit 4 kiri Sungai Tembikar Kel Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	49.831.230,00
146	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Parit 2 Sungai Tembikar Kel. Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	49.831.230,00
147	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Saluran dan Tanggul Parit 4 Dusun Durian Sebatang Desa Sei. Itik Kecamatan Sadu	53.678.969,69
148	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehab Sal. dan Tanggul Parit Manado RT. 06 RW. 03 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur	45.975.720,32
149	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Saluran dan Tanggul D.I.R Siau Dalam	36.039.828,55
150	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Saluran dan Tanggul Parit 3 Selayar Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara	27.072.598,21
151	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Saluran dan Tanggul Parit 4 Kiri Desa Alang-alang Kecamatan Muara Sabak Timur	36.353.840,76
152	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Penganyut	99.733.500,00
153	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Pamusiran Luar	99.883.350,00
154	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Lambur I-II	198.233.200,00
155	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Sumber Bor Dalam Desa Sungai Cemara, Pembangunan Sumur Bor Dangkal Desa Sungai Jambat	10.156.000,00
156	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa perencanaan sumur bor di 6 Lokasi Kegiatan	37.000.000,00
157	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Sumur Bor RT.01 RW.01 Kel.Parit Culum 1,Sumur Bor RT.08 Grohol Kel.Tlk Dawan,Sumur Bor jln Veteran Kel.Mendahara Ilir,Sumur Bor Kp Baru Kel. Mendahara Ilir, Sumur Bor RT.02 RW.01 Kel. Tik Dawan,Sumur Bor Desa Siau Dalam	14.319.000,00
158	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Masjid Nurul Islam jln Delta Kec. Nipah Panjang, Sumur Bor Jln Bahagia Kampung Laut , sumur Bor Jln KH Muktar K Laut,Sumur Bor Jln Semoga Kel Kampung Laut , sumur bor Nurul Hikmah Ds Lgn Tengah	11.821.000,00
159	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Sumber Bor Dalam Desa Sungai Cemara, Pembangunan Sumur Bor Dangkal Desa Sungai Jambat	18.150.000,00
160	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan sumur bor di 6 Lokasi Kegiatan	33.500.000,00
161	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor Masjid Nurul Islam jln Delta Kec. Nipah Panjang, Sumur Bor Jln Bahagia	20.800.000,00

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	Kampung Laut , sumur Bor Jln KH Muktar K Laut,Sumur Bor Jln Semoga Kel Kampung Laut, sumur bor Musholla Sabilah Muhtadin Ds Lgn Tengah	
162	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor RT.01 RW.01 Kel.Parit Culum 1,Sumur Bor RT.08 Grohol Kel.Tlk Dawan,Sumur Bor jln Veteran Kel.Mendahara Ilir,Sumur Bor Kp Baru Kel. Mendahara Ilir, Sumur Bor RT.02 RW.01 Kel. Tlk Dawan,Sumur Bor Desa Siau Dalam	25.150.000,00
163	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Jerambah RT.10.11.12 dusun nelayan Desa Air Hitam Laut(Lanjutan), Pembangunan Rabat Beton Jalan Puskesmas Sungai Jambat	21.312.000,00
164	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Jln Rabat Beton Jln Melati, RT.03/RW.02 Kel Sabak Ilir, Jln Rabat Beton SK 05 s/d SK 10 Ds.Harapan Makmur Kec.Rantau Rasau, Peningkatan jln Rabat beton Dsn Karya baru Penghubung RT.01 ke RT.02 Kec.Muara Sabak Timur	45.021.000,00
165	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan jln Rabat Beton RT.01 Dsn Indah Ds Kuala Dendang, jln Rabat Beton Lrg Belambangan RT.03 Menuju RT.12 Kel.Tlg Babat, jln rabat beton lrg. Muhajirin Kel. Parit Culum, jln Rabat Beton Lorong Kapuk RT.03 RW.02 Kelurahan Nibung Putih	59.251.000,00
166	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 06 hujan mas sampai ke RT 01 parit pokko Ds Sinar wajo, Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.3 Ke RT.02 Dsn Sepakat Indah Ds Lagan Ulu, Pembangunan Jalan Rabat Beton Parit Ibas	44.644.000,00
167	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan jln Rabat Beton RT.10 Dsn Durian Sebatang, Ds Sei Itik, Pembangunan Jln Rabat Beton Dsn Bakti Utama dan RT.04 Ds Karya Bakti, Peningkatan jln Lingkungan Ds Telago 5 Berbak, Peningkatan Jln Lingk Rang Kayo Hitam berbak	68.542.000,00
168	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Jalan Jerambah Beton Jalan Dusun Siau Desa Lambur	9.046.000,00
169	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Jembatan RT.15 RW.6 Sungai Akar Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang	20.313.000,00
170	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Turap Jln Wijaya Kusuma Kel N. Panjang II ,Rabat Jln Cendana 2 Ujung RT.03 Kel. Nipah Panjang 1, Rabat jln Menuju Puskesmas Berbak	21.767.000,00
171	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pemb Jerambah Irg Langgar RT.03 Kel. M Sabak Ilir, Jerambah RT.06 Dsn Suka Negara Ds Lambur, Rabat Jalan RT.11-RT.12 dsn Karya Simbur Naik, Rabat Jln Samping SD 143 (Lanjutan), Rabat jln H.Busro menuju RTH, Rabat jln RT.01 menuju RTH	40.703.000,00
172	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat beton Lorong Citra RT.12 Kelurahan Talang Babat, Pembangunan Rabat Beton Jalan Penghubung RT.01 Kel. Parit Culum 1, Pembangunan Drainase Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat (lanjutan)	26.451.000,00
173	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Jerambah RT.10.11.12 dusun nelayan Desa Air Hitam Laut(Lanjutan), Pembangunan Rabat Beton Jalan Puskesmas Sungai Jambat	20.646.000,00
174	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Jln Rabat Beton Jln Melati, RT.03, RW,02 Kel.Muara Sabak Ilir, Pembangunan Jln Rabat Beton SK 05 s/d SK 10 Ds Harapan Makmur, Peningkatan Jln Rabat beton Dsn Karya baru Penghubung RT.01 ke RT.02 Kec. Muara Sabak Timur	48.000.000,00
175	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pemb jln Rabat Beton RT 06 Hujan Mas sampai ke RT 01 parit pokko Ds Sinar wajo,Pemb jln Rabat Beton RT.3 Ke RT.02 Dsn Sepakat Indah Ds Lagan Ulu, Pemb Jln Rabat Beton Parit Ibas, pemb jln rabat beton RT.01 Kel. Sabak Ilir (Lanjutan)	56.500.000,00
176	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan jln Rabat Beton RT.10 Dsn Durian Sebatang, Ds Sei Itik, Pembangunan Jln Rabat Beton Dsn Bakti Utama dan RT.04 Ds Karya Bakti, Peningkatan jln Lingkungan Ds Telago 5 Berbak, Peningkatan Jln Lingk Rang Kayo Hitam berbak	78.000.000,00
177	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Jalan Jerambah Beton Dusun Mandiri RT 10 Desa Kota Harapan Kec. Ma Sabak Timur(Felling)	42.457.000,00
178	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Jalan Jerambah Beton Jl. Pemuda RT. 01/1 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	18.148.000,00
179	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pemb Jln Rabat Beton RT.01 Dsn.Indah Ds ka.Dendang, , Pemb Jln Rabat Beton Lrg Kapuk RT.03 RW.02 Kel.Nibung Putih	70.500.000,00
180	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pemb Jerambah Irg Langgar RT.03 Kel. M Sabak Ilir, Jerambah RT.06 Dsn Suka Negara Ds Lambur , Rabat Jalan RT.11 - RT.12 dsn Karya Simbur Naik, Rabat Jln Samping SD 143 (Lanjutan) , Rabat jln H.Busro menuju RTH, Rabat jln RT.01 menuju RTH	63.386.000,00
181	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Jerambah jln Hj. Bunga Kel. Mendahara Ilir, jln jerambah jln sentosa Mendahara Ilir (Lanjutan), Jerambah Jalan Swadaya Mendahara Ilir (Lanjutan), rabat RT.18 Pandan Jaya (Lanjutan), Rabat jln RT.09 Kel Pandan Jaya	51.143.000,00
182	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Jalan Rabat beton Lorong Citra RT.12 Kelurahan Talang Babat, Pembangunan Rabat Beton Jalan Penghubung RT.01 Kel. Parit Culum 1, Pembangunan Drainase Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat (lanjutan)	48.285.000,00
183	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pemb. Turap Jln Wijaya Kusuma Nipah Panjang II, Jerambah Jln Nelayan Nipah Panjang I (Lanjutan),jerambah Jln Cendana 2 Ujung RT.03 Nipah Panjang 1, Jerambah Jln Cendana I RT.12 RW.03 Nipah Panjang I (lanjutan), Rabat jln Menuju Puskesmas Berbak	64.213.000,00
184	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Lokasi 3, Lokasi 4 dan Lokasi 5 (Pengawasan Jembatan)	6.290.000,00
185	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Jln Jerambah Beton Pulau Burung Parit 11 RT.26 RW.09 Kelurahan Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang, Pembangunan Jembatan RT 8 Dusun Mario Desa TI Kijing, Pembangunan Jembatan Beton SK.6 RT.11 Ds. Rantau Rasau II	47.341.000,00

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
186	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Jalan Jerambah Beton RT.05 Desa Pematang Mayan Kec. Rantau Rasau	48.074.000,00
187	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Jalan Jerambah Beton RT.002 RW.001 Kel.Rantau Indah Kec.Dendang, Perencanaan Pembangunan Jembatan SK 6 patork 40 ds. Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau	58.463.000,00
188	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Jalan Jerambah Beton RT.03 Dusun Gaya Baru Desa Alang-Alang Kec Muara Sabak Timur	45.942.000,00
189	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Jembatan Penyeberangan RT.30, RT.32 Blok E Kelurahan Pandan Jaya Kec. Geragai	58.419.000,00
190	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Jalan Jerambah Beton Jl.Bengkong Desa Pangkal Duri Ilir Kec. Mendahara Ilir	31.823.000,00
191	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Jembatan Desa Kuala Dendang	66.278.000,00
192	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Jembatan RT.01 Dusun Bina Karya Desa Simpang Datuk Nipah Panjang	34.731.000,00
193	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan jembatan samping kantor Camat Kuala Jambi	23.376.000,00
194	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Jembatan Penyeberangan RT.30, RT.32 Blok E Kelurahan Pandan Jaya Kec. Geragai	68.000.000,00
195	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa pengawasan Perencanaan Pembangunan Jalan Jerambah Beton RT.002 RW.001 Kel.Rantau Indah Kec.Dendang, Perencanaan Pembangunan Jembatan SK 6 patork 40 ds. Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau	68.209.000,00
196	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Jalan Jerambah Beton Jl.Bengkong Desa Pangkal Duri Ilir Kec. Mendahara Ilir	37.237.000,00
197	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Jalan Jerambah Beton RT.05 Desa Pematang Mayan Kec. Rantau Rasau	56.000.000,00
198	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Jalan Jerambah Beton RT.03 Dusun Gaya Baru Desa Alang-Alang Kec Muara Sabak Timur	53.513.000,00
199	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Jembatan Desa Kuala Dendang	99.567.000,00
200	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan pembangunan jembatan penyeberangan teluk majelis Kec. Kuala Jambi	38.794.000,00
201	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Jembatan RT.01 Dusun Bina Karya Desa Simpang Datuk Nipah Panjang	60.705.000,00
202	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pembangunan Jembatan RT.15 RW.6 Sungai Akar Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang	30.591.000,00
203	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa pengawasan Pembangunan jembatan samping kantor Camat Kuala Jambi	35.098.000,00
204	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Paket 10: Perencanaan Pembangunan Jln Jerambah Beton Pulau Burung Parit 11 RT.26 RW.09 Kelurahan Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang, Pembangunan Jembatan RT 8 Dusun Mario Desa TI Kijing, Pembangunan Jembatan Beton SK.6 RT.11 Ds. Rantau Rasau II	55.161.000,00
205	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Jasa Konsultan Perencanaan Teknis PJU	97.240.000,00
206	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Jasa Konsultan Perencanaan Teknis PJU Kecamatan	31.405.000,00
207	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Instalasi PJU, Teluk Kijing, Pemusiran dan Nipah	4.910.000,00
208	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pemasangan PJU Jl. Wijaya Kusuma RT.01 RW.01 Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang, Pemasangan PJU Dusun Beringin Jaya Sei Jambat Kec. Sadu, Pemasangan PJU Dusun 4 Sei Jambat Kec. Sadu, Pemasangan PJU RT 04 Sei Sayang	19.869.000,00
209	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Jasa Konsultan Pengawasan Teknis PJU Kecamatan	26.040.000,00
210	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Jasa Konsultan Pengawasan Teknis PJU	77.533.000,00
211	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Instalasi PJU, Teluk Kijing, Pemusiran, dan Nipah	6.221.000,00
212	Reklas dari Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pengawasan Pemasangan PJU Jl. Wijaya Kusuma RT.01 RW.01 Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang, Pemasangan PJU Dusun Beringin Jaya Sei Jambat Kec. Sadu, Pemasangan PJU Dusun 4 Sei Jambat Kec. Sadu, Pemasangan PJU RT 04 Sei Sayang	22.011.000,00
213	Hibah Pengadaan/Pemasangan Pipa Optimalisasi IKK Puding Kec. Rantau Rasau dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1217/BA/DC/2022 dan Nomor:032/12/Bakeuda/2022 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:1217.1/BA/DC/2022 dan Nomor:032/13/Bakeuda/2022	1.611.000.528,00
214	Hibah Pengadaan/Pemasangan Pipa HDPE Lengkap dengan Accesoris dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1217/BA/DC/2022 dan Nomor:032/12/Bakeuda/2022 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:1217.1/BA/DC/2022 dan Nomor:032/13/Bakeuda/2022	4.859.279.000,00
215	Hibah SPAM Kawasan Nelayan PPI Teluk Majelis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1217/BA/DC/2022 dan Nomor:032/12/Bakeuda/2022 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:1217.1/BA/DC/2022 dan Nomor:032/13/Bakeuda/2022	1.464.282.140,00
216	Hibah Pembangunan SPAM Perdesaan Kawasan Nelayan PPI Nipah Panjang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan Naskah	1.450.025.399,00

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1217/BA/DC/2022 dan Nomor:032/12/Bakeuda/2022 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:1217.1/BA/DC/2022 dan Nomor:032/13/Bakeuda/2022	
217	Hibah Pengadaan/Pemasangan Pipa PVC Lengkap dengan Accesories Nipah Panjang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1217/BA/DC/2022 dan Nomor:032/12/Bakeuda/2022 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:1217.1/BA/DC/2022 dan Nomor:032/13/Bakeuda/2022	1.522.873.452,00
218	Hibah Bangunan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSABH) Lokasi Kantor Lurah Talang Babat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Provinsi Jambi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:PS.0403-BWS6/427 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:028/10/Bakeuda/2022.	250.000.000,00
219	Reklas dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan berupa Pemasangan Conblok SMPN. 6 Tanjab Timur Kecamatan Sadu	118.608.000,00
220	Reklas dari Peralatan dan Mesin pada RSUD berupa Jaringan Oksigen/Gas	556.293.150,00
221	Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan SK 7 - SK 8 Kanan Desa Sido Mukti Kec. Dendang	53.663.885,00
222	Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Menuju Oprit Barat Jembatan Muara Sabak Kec. Muara Sabak Barat	99.099.000,00
223	Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Simp. Gelis - Jalan Provinsi (DAK Penugasan)	99.552.000,00
224	Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Dewi SaRTika Desa Rantau Rasau II Kec. Rantau Rasau	59.966.500,00
225	Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul D.I.R. Muara Sabak Kec. Ma. Sabak Timur	16.549.333,33
226	Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb.Jembatan Kanal WKS Ds. Pangkal Duri Kec. Mendahara	149.138.000,00
227	Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Sal. dan Tanggul Parit Sungai Putat RT.19 Dsn. Sei- Putat Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara Ulu	23.000.000,00
228	Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Sal. dan Tanggul Parit Solong Parit Mario dan pRT Gembira Dsn Mario Desa Iagan (Paket 3)	49.522.000,00
229	Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Sal. dan Tanggul Parit Sei-Akar RT 15 RW 09 Kel. Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang	33.275.000,00
230	Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Sal. dan Tanggul Parit Manado RT. 06 RW. 03 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur	49.846.500,00
231	Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Jembatan Teluk Majelis	39.655.000,00
232	Reklas dari Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah berupa Sumur Bor	29.897.850,00
233	Reklas dari Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Mendahara berupa Sumur Bor	20.000.000,00
234	Reklas dari Peralatan dan Mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Sumur Bor	25.000.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah (I)	228.891.014.539,25
II	Mutasi Kurang	
1	Pembayaran Utang Aset Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan Tahun 2020 - Pembangunan Box Culvert Parit Melintang Dusun 1 RT 21 Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	70.965.000,00
2	Pembayaran Utang Aset Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan Tahun 2020 - Peningkatan Jalan Sungai Rambut Kec. Berbak (Lanjutan)	1.337.371.000,00
3	Reklas ke Kontruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Jalan Rabat Beton lorong Pematang Sago RT.04 RW.01 Kel. Perit Culum Kec. Muara Sabak Barat	15.290.000,00
4	Reklas ke Kontruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Rabat Beton Jalan Nungcik RT.04 Sungai Lokan Sadu	15.290.000,00
5	Reklas ke Kontruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan jembatan dan jalan lingkungan kantor camat sadu	50.172.000,00
6	Reklas ke Kontruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Jalan jerambah beton Kp.Baru Kec. Ma.Sabak Timur	34.900.000,00
7	Reklas ke Kontruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Rabat Beton RT. 07 Parit Dog Kec. Sabak Timur	25.500.000,00
8	Reklas ke Kontruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Perhubungan berupa Perencanaan Halte Sungai Pangkal Duri Iilir, Perencanaan Halte Desa Sungai Tawar Dusun Harapan, Perencanaan Halte Desa Kota Kandis Dendang	149.000.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang (II)	1.698.488.000,00
	JUMLAH MUTASI JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN	227.192.526.539,25

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 31 Desember 2021	Mutasi Aset Tahun 2022								Saldo Awal Per 31 Desember 2022
			Mutasi Tambah					Mutasi Kurang			
			Belanja Modal	Kapitalisasi Belanja Jasa	Hibah	Reklas dari Akun Lain	JUMLAH	Utang Aset Belanja Modal	Reklas dari Akun Lain	JUMLAH	
25	Sekretariat Daerah	3.666.544.500,00	215.267.500,00	0,00	0,00	29.897.850,00	245.165.350,00	0,00	0,00	0,00	3.911.709.850,00
26	Sekretariat DPRD	2.584.835.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.835.150,00
27	Kecamatan Muara Sabak Barat	10.443.262.499,00	303.526.000,00	0,00	0,00	0,00	303.526.000,00	0,00	0,00	0,00	10.746.788.499,00
28	Kecamatan Muara Sabak Timur	2.802.432.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.132.432.000,00
29	Kecamatan Mendahara	1.699.222.610,00	172.431.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	192.431.000,00	0,00	0,00	0,00	1.891.653.610,00
30	Kecamatan Mendahara Ulu	1.289.006.000,00	184.200.000,00	0,00	0,00	0,00	184.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.473.206.000,00
31	Kecamatan Geragai	1.040.024.975,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.024.975,00
32	Kecamatan Kuala Jambi	4.418.498.365,00	533.861.700,00	0,00	0,00	0,00	533.861.700,00	0,00	0,00	0,00	4.952.360.065,00
33	Kecamatan Dendang	1.341.241.700,00	28.136.000,00	0,00	0,00	0,00	28.136.000,00	0,00	0,00	0,00	1.369.377.700,00
34	Kecamatan Berbak	1.535.684.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.684.550,00
35	Kecamatan Rantau Rasau	1.439.901.125,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.619.901.125,00
36	Kecamatan Nipah Panjang	2.986.074.225,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.346.074.225,00
37	Kecamatan Sadu	1.912.157.525,00	282.412.000,00	0,00	0,00	0,00	282.412.000,00	0,00	0,00	0,00	2.194.569.525,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	182.723.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.723.250,00
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	152.836.309,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	177.836.309,00
	JUMLAH	3.255.254.520.870,27	204.369.092.804,42	11.941.394.997,50	11.157.460.519,00	1.423.066.218,33	228.891.014.539,25	1.408.336.000,00	290.152.000,00	1.698.488.000,00	3.482.447.047.409,52

Lampiran 30
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
I	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022	3.811.262.582,00
2	Reklas dari dari Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD berupa Lukisan	3.500.000,00
3	Reklas dari Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Muara Sabak Barat berupa Alat Permainan Edukatif (APE) Luar Ruangan	35.000.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah (I)	3.849.762.582,00
II	Mutasi Kurang	
1	Aset Tetap (Extracomptable) pada Dinas Pendidikan berupa alat olahraga, buku kepustakaan, alat kesenian, alat olahraga, alat kesenian	3.758.098.357,00
2	Reklas ke Akun Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Muara Sabak Barat berupa Speaker Aktif	4.750.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang (II)	3.762.848.357,00
	JUMLAH MUTASI ASET TETAP LAINNYA	86.914.225,00

(dalam rupiah)

NO	OPD	Saldo Awal Per 31 Desember 2021	Mutasi Aset Tahun 2022						Saldo Awal Per 31 Desember 2022
			Mutasi Tambah			Mutasi Kurang			
			Belanja Modal	Reklas dari Akun Lain	JUMLAH	Reklase ke Akun Lain	Extracountable	JUMLAH	
24	Sekretariat Daerah	996.844.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.844.110,00
25	Sekretariat DPRD	1.191.857.850,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.357.850,00
26	Kecamatan Muara Sabak Barat	248.972.000,00	4.750.000,00	35.000.000,00	39.750.000,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	283.972.000,00
27	Kecamatan Geragai	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
28	Kecamatan Rantau Rasau	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.000,00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.982.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.982.981,00
	JUMLAH	14.439.964.017,00	3.811.262.582,00	38.500.000,00	3.849.762.582,00	4.750.000,00	3.758.098.357,00	3.762.848.357,00	14.526.878.242,00

Lampiran 32

Rincian Mutasi Kontruksi Dalam Pengejaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
I	Mutasi Tambah	
1	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Kesehatan berupa Perencanaan Arsitektur Puskesmas Simbur Naik	82.140.000,00
2	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Kesehatan berupa Perencanaan Arsitektur Puskesmas Kampung Laut	52.225.500,00
3	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Kesehatan berupa Perencanaan Arsitektur Puskesmas Muara Sabak Timur	52.170.000,00
4	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Kesehatan berupa Perencanaan UKP UKL Rumah Sakit Rantau Rasau	97.957.500,00
5	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan parit panacuk - Ponpes Sungai Daun 2 KM	89.577.000,00
6	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jembatan Parit 0 RT 05-RT 06 Desa Kuala Simbur Kec. Muara Sabak Timur	75.091.000,00
7	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jembatan Parit 6 Jalan Produksi RT.06 Kel Muara Sabak Timur Ilir	71.317.000,00
8	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jembatan Rano Kec. Ma. Sabak Barat	71.262.000,00
9	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jembatan RT.01 RW.01 Kel Bandar Jaya	70.263.000,00
10	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jembatan Penghubung RT. 02 Dsn Karya Baru Desa Lambur - RT.12 Dsn Harapan Baru Ds. Kota Harapan Kec. MST	71.262.000,00
11	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan BPT Parit Culum 1 Kec. Muara Sabak Barat	89.577.000,00
12	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Dusun Simpang Pandan Dalam RT.10 Desa Lagan Ulu	88.522.000,00
13	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Lingkar Luar RT 09 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur	89.540.000,00
14	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Parit Bengkok Kec. Muara Sabak Barat	89.466.000,00
15	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Pematang Losong Dusun 3 SK 6 dan SK 4 Kelurahan Simpang	96.570.000,00
16	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Penghubung Teluk Kijing - Pemusiran	96.653.000,00
17	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan RT. 01 - RT.05 Kel Teluk Dawan	89.521.000,00
18	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan RT 13 - RT 14 Kel. Parit Culum 1	89.466.000,00
19	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Peningkatan Jalan Sei Jambat Parit 6 - 10 Kec Sadu	96.681.000,00
20	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Sidodadi Kel. Talang Babat	89.540.000,00
21	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Teluk Kijing Ke Kuala Simbur Kec. Muara Sabak Timur	96.503.000,00
22	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Utama Desa Pangkal duri Kec. Mendahara	96.736.000,00
23	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Parit 3 RT. 13 RW. 02 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat	49.934.500,00
24	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Parit Dusun Indah I Desa Pangkal Duri Ilir Kec. Mendahara	49.934.500,00
25	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Normalisasi Sungai RT. 01 - RT. 15 Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai	49.945.500,00
26	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul FC. 1 s/d FC. 2 SK. 7 Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau	49.896.000,00
27	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul RT. 01 - RT. 13 Desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai	49.945.500,00
28	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Parit Dusun I dan II Desa Sungai Dusun Kec. Rantau Rasau	49.896.000,00
29	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Parit Pulau Kelurahan Mendahara Ilir Kec. Mendahara	66.522.300,00
30	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Parit 7 Kel. N. Panjang II Kec. Nipah Panjang	49.891.725,00
31	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Parit. 7 Ds. Beringin Jaya Ds. Spg. Datuk Kec. N.Panjang	49.891.725,00
32	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Parit H. Asri Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur	33.263.000,00
33	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Parit Ibas Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur	33.263.000,00
34	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Parit Kotaraja Kec. Muara Sabak Timur	33.263.000,00
35	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Sungai Lembu Sinar Kalimantan Kec. Mendahara	33.281.500,00
36	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Parit Macolok Mendahara Tengah Kec. Mendahara	33.281.500,00

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
37	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Parit 1 Sungai Tembikar Mendahara Ilir Kec. Mendahara	33.281.500,00
38	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Parit Lapis Kota Kandis Kec. Dendang	49.894.500,00
39	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Parit 6 Sungai Ular Kec. Muara Sabak Timur	49.894.500,00
40	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Parit Mannuk RT. 07 Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara	49.911.150,00
41	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul Sungai Primer Sialang Simpang Jelita Kec. Sadu	49.911.150,00
42	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul DIR Sungai Raya Dalam	99.855.600,00
43	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Jalan Rabat Beton lorong Pematang Sago RT.04 RW.01 Kel. Perit Culum Kec. Muara Sabak Barat	15.290.000,00
44	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Rabat Beton Jalan Nungcik RT.04 Sungai Lokan Sadu	15.290.000,00
45	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Jembatan dan Jalan lingkungan Kantor Camat Sadu	50.172.000,00
46	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Jalan jerambah beton Kp.Baru Kec. Ma.Sabak Timur	34.900.000,00
47	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Rabat Beton RT. 07 Parit Dog Kec. Sabak Timur	25.500.000,00
48	Kapitalisasi aset tetap pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Pembangunan Rumah Adat Tanjung Jabung Timur di Arena MTQ Provinsi Jambi	69.000.000,00
49	Reklas dari Akun Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan berupa Perencanaan Pembangunan Gedung Sekolah dan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas SDn. 140/X Harapan Makmur Kec. Rantau Rasau	165.400.000,00
50	Reklas dari Akun Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan berupa Penyusunan Dokumen UKL, UPL RS Pratama Kec. Rantau Rasau	173.271.000,00
51	Reklas dari Akun Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Perluasan Gedung Kantor Kominfo	69.400.000,00
52	Reklas dari Akun Gedung dan Bangunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Perencanaan Perluasan Gedung Kantor	94.400.000,00
53	Reklas dari Akun Gedung dan Bangunan pada Sekretariat DPRD berupa Bangunan Gedung Kantor DPRD	1.978.871.000,00
54	Reklas dari Akun Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan pembangunan Jembatan Tembikar 1 dan Tembikar 2	59.718.000,00
55	Reklasifikasi dari Akun Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan berupa Perencanaan Halte Sungai Pangkal Duri Ilir, Perencanaan Halte Desa Sungai Tawar Dusun Harapan, Perencanaan Halte Desa Kota Kandis Dendang	149.000.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah (I)	5.707.210.150,00
II	Mutasi Kurang	
1	Reklas ke Aset Tetap Tanah pada Dinas Perhubungan berupa Perencanaan Pembangunan Prasarana Lahan Parkir dan Rest Area Kuala Jambi	59.250.000,00
2	Reklas ke Aset Tetap Tanah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Pematangan Lahan Pasar Muara Sabak Timur	99.525.000,00
3	Reklas ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Perencanaan Revitalisasi Pasar Blok D	49.753.000,00
4	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan SK 7 - SK 8 Kanan Desa Sido Mukti Kec. Dendang	53.663.885,00
5	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Menuju Oprit Barat Jembatan Muara Sabak Kec. Muara Sabak Barat	99.099.000,00
6	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Jalan Simp. Gelis - Jalan Provinsi (DAK Penugasan)	99.552.000,00
7	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Jalan Dewi Sartika Desa Rantau Rasau II Kec. Rantau Rasau	59.966.500,00
8	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Saluran dan Tanggul D.I.R. Muara Sabak Kec. Ma. Sabak Timur	16.549.333,33
9	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pemb.Jembatan Kanal WKS Ds. Pangkal Duri Kec. Mendahara	149.138.000,00
10	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Sal. dan Tanggul Parit Sungai Putat RT.19 Dsn. Sei- Putat Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara Ulu	23.000.000,00
11	Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Sal. dan Tanggul Parit Solong Parit Mario dan prt Gembira Dsn Mario Desa lagan (Paket 3)	49.522.000,00
12	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Sal. dan Tanggul Parit Sei-Akar RT 15 RW 09 Kel. N.Panjang I Kec.Nipah Panjang	33.275.000,00
13	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Rehab Sal. dan Tanggul Parit Manado RT. 06 RW. 03 Kel. Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur	49.846.500,00
14	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Perencanaan Pembangunan Jembatan Teluk Majelis	39.655.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang (II)	881.795.218,33
	JUMLAH MUTASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	4.825.414.931,67

Lampiran 33
Kertas Kerja Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Organisasi Perangkat Daerah
per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang		Saldo Akhir 31 Desember 2022
			Kapitalisasi Belanja Jasa	Reklas dari Akun Lain	Jumlah	Reklas ke Akun Lain	JUMLAH	
1	Dinas Pendidikan	649.861.000,00	0,00	165.400.000,00	165.400.000,00	0,00	0,00	815.261.000,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	284.493.000,00	173.271.000,00	457.764.000,00	0,00	0,00	457.764.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.077.895.957,31	2.522.505.150,00	0,00	2.522.505.150,00	633.612.218,33	633.612.218,33	13.966.788.888,98
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.351.148.276,42	210.152.000,00	129.118.000,00	339.270.000,00	39.655.000,00	39.655.000,00	2.650.763.276,42
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.154.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.647.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	183.709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.709.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935.000,00
8	Dinas Perhubungan	1.543.829.000,00	0,00	149.000.000,00	149.000.000,00	59.250.000,00	59.250.000,00	1.633.579.000,00
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.291.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.985.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37.150.000,00	0,00	94.400.000,00	94.400.000,00	0,00	0,00	131.550.000,00
11	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	270.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.247.500,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	289.685.500,00	0,00	0,00	0,00	149.278.000,00	149.278.000,00	140.407.500,00
13	Badan Keuangan Daerah	38.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.577.000,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
15	Sekretariat DPRD	1.276.341.000,00	0,00	1.978.871.000,00	1.978.871.000,00	0,00	0,00	3.255.212.000,00
	JUMLAH	23.174.411.233,73	3.017.150.150,00	2.690.060.000,00	5.707.210.150,00	881.795.218,33	881.795.218,33	27.999.826.165,40

Lampiran 34
Rincian Akumulasi Penyusutan per Organisasi Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	177.480.916.807,34	144.345.857.597,79	33.135.059.209,55
2	Dinas Kesehatan	92.092.123.996,05	82.465.353.841,72	9.626.770.154,33
3	Rumah Sakit Umum Daerah	36.040.196.526,96	27.829.636.787,72	8.210.559.739,24
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.060.561.447.492,56	1.830.475.968.337,66	230.085.479.154,90
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	207.254.888.622,44	185.016.520.033,65	22.238.368.588,79
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.800.595.015,27	9.011.560.715,15	(210.965.699,88)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.054.022.089,96	1.934.847.925,34	119.174.164,62
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.140.076.377,90	5.347.471.788,29	792.604.589,61
9	Dinas Ketahanan Pangan	3.572.556.266,16	3.424.442.655,54	148.113.610,62
10	Dinas Lingkungan Hidup	11.935.002.320,82	10.473.561.099,70	1.461.441.221,12
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.626.264.105,45	4.218.323.077,41	407.941.028,04
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.435.672.595,13	4.758.789.139,14	676.883.455,99
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	7.059.940.434,51	6.318.000.496,94	741.939.937,57
14	Dinas Perhubungan	29.637.249.620,50	27.487.240.499,68	2.150.009.120,82
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.984.305.381,00	3.464.248.901,35	520.056.479,65
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.526.019.792,57	1.488.438.623,07	37.581.169,50
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.066.616.995,20	2.641.576.712,14	425.040.283,06
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	22.845.443.810,11	21.016.706.243,00	1.828.737.567,11
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.437.207.744,11	3.938.013.508,29	499.194.235,82
20	Dinas Perikanan	31.521.151.497,66	30.107.918.269,91	1.413.233.227,75
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	16.975.081.375,36	16.295.626.616,80	679.454.758,56
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	13.183.872.315,64	12.173.750.741,83	1.010.121.573,81
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.114.985.240,65	8.591.295.732,13	1.523.689.508,52
24	Inspektorat	3.173.374.714,00	2.778.044.721,09	395.329.992,91
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.214.578.144,49	11.550.707.405,28	663.870.739,21
26	Badan Keuangan Daerah	14.887.065.242,72	13.324.326.828,41	1.562.738.414,31
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	7.440.239.504,34	6.799.409.321,35	640.830.182,99
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.240.981.525,38	1.187.456.211,74	53.525.313,64
29	Sekretariat Daerah	49.466.969.385,99	47.312.289.623,50	2.154.679.762,49
30	Sekretariat DPRD	31.714.159.387,89	29.685.249.029,19	2.028.910.358,70
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	12.601.354.088,31	10.407.768.647,36	2.193.585.440,95
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	5.178.725.449,32	4.461.048.934,33	717.676.514,99
33	Kecamatan Mendahara	5.244.202.616,96	4.867.674.477,95	376.528.139,01
34	Kecamatan Mendahara Ulu	4.666.828.175,88	4.279.004.271,71	387.823.904,17
35	Kecamatan Geragai	3.968.476.371,87	3.582.638.432,41	385.837.939,46
36	Kecamatan Kuala Jambi	6.332.445.444,22	5.692.745.385,94	639.700.058,28
37	Kecamatan Dendang	4.776.388.726,15	4.241.399.990,37	534.988.735,78
38	Kecamatan Berbak	4.635.212.209,33	4.116.477.437,33	518.734.772,00
39	Kecamatan Rantau Rasau	4.936.965.857,14	4.520.090.311,08	416.875.546,06
40	Kecamatan Nipah Panjang	6.686.543.191,33	5.863.182.345,89	823.360.845,44
41	Kecamatan Sadu	4.638.642.572,75	4.006.211.377,76	632.431.194,99
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.328.372.541,04	3.205.102.684,20	123.269.856,84
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.512.959.792,78	5.837.420.853,39	675.538.939,39
	JUMLAH	2.953.990.121.365,24	2.620.543.397.634,53	333.446.723.730,71

Lampiran 35

Kertas Kerja Saldo Akhir Penyusutan per Organisasi Perangkat Daerah Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Saldo Akhir 31 Desember 2022				
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	JUMLAH PENYUSUTAN
1	Dinas Pendidikan	31.984.492.334,97	141.887.529.546,35	2.931.136.559,35	677.758.366,67	177.480.916.807,34
2	Dinas Kesehatan	65.844.927.536,03	21.692.584.341,88	4.554.612.118,14	0,00	92.092.123.996,05
3	Rumah Sakit Umum Daerah	29.941.649.398,03	5.175.726.995,43	922.820.133,50	0,00	36.040.196.526,96
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.153.576.784,53	1.841.998.721,69	2.041.434.302.532,33	131.569.454,00	2.060.561.447.492,55
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.025.365.918,67	22.878.321.516,78	174.389.014.078,59	962.187.108,40	207.254.888.622,44
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.878.608.487,50	827.475.194,44	5.133.333,33	89.378.000,00	8.800.595.015,27
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.661.519.050,00	392.503.039,96	0,00	0,00	2.054.022.089,96
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.719.611.911,00	1.904.397.651,69	516.066.815,23	0,00	6.140.076.377,92
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.227.342.950,00	690.452.326,16	654.760.990,00	0,00	3.572.556.266,16
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.266.764.538,63	2.472.015.002,99	196.222.779,20	0,00	11.935.002.320,82
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.424.147.853,33	1.180.572.688,92	21.543.563,20	0,00	4.626.264.105,45
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.665.955.780,00	1.680.891.668,46	27.825.146,67	61.000.000,00	5.435.672.595,13
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	5.953.570.194,67	1.106.370.239,84	0,00	0,00	7.059.940.434,51
14	Dinas Perhubungan	12.641.385.990,01	11.714.176.278,72	5.281.687.351,77	0,00	29.637.249.620,50
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.408.695.212,00	540.125.269,00	35.484.900,00	0,00	3.984.305.381,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.517.267.750,00	8.752.042,57	0,00	0,00	1.526.019.792,57
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.846.550.540,00	150.636.315,20	69.430.140,00	0,00	3.066.616.995,20
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.666.148.733,31	16.762.716.254,85	987.673.821,93	1.428.905.000,00	22.845.443.810,09
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.107.511.665,50	1.299.024.129,97	28.671.948,63	2.000.000,00	4.437.207.744,10
20	Dinas Perikanan	5.465.820.443,00	5.808.244.968,07	20.243.086.086,59	4.000.000,00	31.521.151.497,66
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	9.144.348.345,00	3.108.012.693,48	4.722.720.336,88	0,00	16.975.081.375,36
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	6.785.643.949,80	2.453.387.580,07	3.944.840.785,77	0,00	13.183.872.315,64
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.773.531.119,00	5.567.973.067,53	773.481.054,13	0,00	10.114.985.240,66
24	Inspektorat	2.684.982.160,32	469.480.138,28	18.912.415,40	0,00	3.173.374.714,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.991.472.178,33	896.577.031,29	5.326.528.934,87	0,00	12.214.578.144,49
26	Badan Keuangan Daerah	11.441.417.241,67	3.252.818.477,15	192.829.523,90	0,00	14.887.065.242,72
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	4.911.264.649,33	2.382.437.939,01	146.536.916,00	0,00	7.440.239.504,34
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.171.286.167,60	69.695.357,78	0,00	0,00	1.240.981.525,38
29	Sekretariat Daerah	35.185.512.475,13	10.906.053.490,72	2.756.006.660,14	619.396.760,00	49.466.969.385,99
30	Sekretariat DPRD	19.636.131.127,16	10.786.696.552,40	1.286.341.708,33	4.990.000,00	31.714.159.387,89
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	4.908.031.252,00	2.016.687.656,04	5.650.290.513,60	26.344.666,67	12.601.354.088,31
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	3.010.407.067,67	693.190.861,65	1.475.127.520,00	0,00	5.178.725.449,32
33	Kecamatan Mendahara	2.775.752.231,67	1.805.923.263,30	662.527.122,00	0,00	5.244.202.616,97
34	Kecamatan Mendahara Ulu	3.464.605.473,33	931.519.835,88	270.702.866,67	0,00	4.666.828.175,88
35	Kecamatan Geragai	2.821.101.533,33	795.128.469,87	329.746.368,67	22.500.000,00	3.968.476.371,87
36	Kecamatan Kuala Jambi	3.035.101.600,00	1.803.164.439,23	1.494.179.404,99	0,00	6.332.445.444,22
37	Kecamatan Dendang	2.660.497.945,60	1.686.469.853,88	429.420.926,67	0,00	4.776.388.726,15
38	Kecamatan Berbak	3.157.617.233,33	998.583.683,33	479.011.292,66	0,00	4.635.212.209,32
39	Kecamatan Rantau Rasau	2.865.612.366,67	1.646.291.373,81	425.062.116,67	0,00	4.936.965.857,15
40	Kecamatan Nipah Panjang	3.399.056.486,13	2.011.889.720,21	1.275.596.984,99	0,00	6.686.543.191,33
41	Kecamatan Sadu	2.891.516.610,00	790.294.133,33	956.831.829,42	0,00	4.638.642.572,75
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.165.102.592,27	1.064.487.279,44	97.292.669,33	1.490.000,00	3.328.372.541,04
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.177.558.088,05	242.443.657,24	92.958.047,49	0,00	6.512.959.792,78
	JUMLAH	368.458.462.964,57	296.393.720.747,89	2.285.106.418.297,04	4.031.519.355,74	2.953.990.121.365,24

Lampiran 36
Kertas Kerja Penyusutan Peralatan dan Mesin Organisasi Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	OPD	Saldo Awal per 31 Januari 2022	Mutasi Penyusutan Tahun 2022							Saldo Akhir per 31 Desember 2022
			Mutasi Tambah				Mutasi Kurang			
			Beban Penyusutan	Penyusutan Hibah	Reklas dari Akun Lain	JUMLAH	Penyusutan Hibah	Reklas ke Akun Lain	JUMLAH	
1	Dinas Pendidikan	24.488.576.569,75	7.495.915.765,22	0,00	0,00	7.495.915.765,22	0,00	0,00	0,00	31.984.492.334,97
2	Dinas Kesehatan	58.938.980.309,69	6.736.597.226,34	169.350.000,00	0,00	6.905.947.226,34	0,00	0,00	0,00	65.844.927.536,03
3	Rumah Sakit Umum Daerah	22.509.787.704,42	7.431.861.693,61	0,00	0,00	7.431.861.693,61	0,00	0,00	0,00	29.941.649.398,03
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.101.654.730,70	3.419.272.053,83	0,00	0,00	3.419.272.053,83	0,00	367.350.000,00	367.350.000,00	17.153.576.784,53
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.815.457.517,00	1.209.908.401,67	0,00	0,00	1.209.908.401,67	0,00	0,00	0,00	9.025.365.918,67
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.183.058.439,00	126.557.748,50	0,00	0,00	126.557.748,50	149.007.700,00	282.000.000,00	431.007.700,00	7.878.608.487,50
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.578.364.750,00	83.154.300,00	0,00	0,00	83.154.300,00	0,00	0,00	0,00	1.661.519.050,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.429.405.144,87	290.206.766,13	0,00	0,00	290.206.766,13	0,00	0,00	0,00	3.719.611.911,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.163.275.265,00	64.067.685,00	0,00	0,00	64.067.685,00	0,00	0,00	0,00	2.227.342.950,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	8.389.670.585,57	877.093.953,06	0,00	0,00	877.093.953,06	0,00	0,00	0,00	9.266.764.538,63
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.141.493.686,67	282.654.166,66	0,00	0,00	282.654.166,66	0,00	0,00	0,00	3.424.147.853,33
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.545.417.830,00	109.720.950,00	0,00	10.817.000,00	120.537.950,00	0,00	0,00	0,00	3.665.955.780,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	5.327.296.296,33	626.273.898,34	0,00	0,00	626.273.898,34	0,00	0,00	0,00	5.953.570.194,67
14	Dinas Perhubungan	11.711.823.251,91	929.562.738,10	0,00	0,00	929.562.738,10	0,00	0,00	0,00	12.641.385.990,01
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.962.136.549,60	446.558.662,40	0,00	0,00	446.558.662,40	0,00	0,00	0,00	3.408.695.212,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.480.270.050,00	36.997.700,00	0,00	0,00	36.997.700,00	0,00	0,00	0,00	1.517.267.750,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.433.465.403,33	184.822.636,67	0,00	399.612.500,00	584.435.136,67	0,00	171.350.000,00	171.350.000,00	2.846.550.540,00
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.483.088.984,67	183.059.748,64	0,00	0,00	183.059.748,64	0,00	0,00	0,00	3.666.148.733,31
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.714.376.248,00	393.135.417,50	0,00	0,00	393.135.417,50	0,00	0,00	0,00	3.107.511.665,50
20	Dinas Perikanan	5.391.792.843,00	74.027.600,00	0,00	0,00	74.027.600,00	0,00	0,00	0,00	5.465.820.443,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	8.952.832.626,67	202.332.718,33	0,00	0,00	202.332.718,33	0,00	10.817.000,00	10.817.000,00	9.144.348.345,00

(dalam rupiah)

NO	OPD	Saldo Awal per 31 Januari 2022	Mutasi Penyusutan Tahun 2022							Saldo Akhir per 31 Desember 2022
			Mutasi Tambah				Mutasi Kurang			
			Beban Penyusutan	Penyusutan Hibah	Reklas dari Akun Lain	JUMLAH	Penyusutan Hibah	Reklas ke Akun Lain	JUMLAH	
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	6.334.605.858,40	451.038.091,40	0,00	0,00	451.038.091,40	0,00	0,00	0,00	6.785.643.949,80
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.364.557.163,67	408.973.955,33	0,00	0,00	408.973.955,33	0,00	0,00	0,00	3.773.531.119,00
24	Inspektorat	2.449.048.621,20	235.933.539,12	0,00	0,00	235.933.539,12	0,00	0,00	0,00	2.684.982.160,32
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.741.529.931,67	249.942.246,66	0,00	0,00	249.942.246,66	0,00	0,00	0,00	5.991.472.178,33
26	Badan Keuangan Daerah	10.233.041.898,33	831.475.343,34	0,00	376.900.000,00	1.208.375.343,34	0,00	0,00	0,00	11.441.417.241,67
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	4.531.939.127,42	217.525.521,91	0,00	367.350.000,00	584.875.521,91	0,00	205.550.000,00	205.550.000,00	4.911.264.649,33
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.121.730.063,20	49.556.104,40	0,00	0,00	49.556.104,40	0,00	0,00	0,00	1.171.286.167,60
29	Sekretariat Daerah	33.170.924.845,72	2.722.864.629,41	0,00	282.000.000,00	3.004.864.629,41	590.664.500,00	399.612.500,00	990.277.000,00	35.185.512.475,13
30	Sekretariat DPRD	18.567.540.640,39	1.068.590.486,77	0,00	0,00	1.068.590.486,77	0,00	0,00	0,00	19.636.131.127,16
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	4.334.829.050,33	573.202.201,67	0,00	0,00	573.202.201,67	0,00	0,00	0,00	4.908.031.252,00
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	2.810.899.401,00	199.507.666,67	0,00	0,00	199.507.666,67	0,00	0,00	0,00	3.010.407.067,67
33	Kecamatan Mendahara	2.688.951.648,33	86.800.583,34	0,00	0,00	86.800.583,34	0,00	0,00	0,00	2.775.752.231,67
34	Kecamatan Mendahara Ulu	3.315.187.080,00	149.418.393,33	0,00	0,00	149.418.393,33	0,00	0,00	0,00	3.464.605.473,33
35	Kecamatan Geragai	2.572.827.670,00	248.273.863,33	0,00	0,00	248.273.863,33	0,00	0,00	0,00	2.821.101.533,33
36	Kecamatan Kuala Jambi	2.894.837.950,00	140.263.650,00	0,00	0,00	140.263.650,00	0,00	0,00	0,00	3.035.101.600,00
37	Kecamatan Dendang	2.414.483.411,70	246.014.533,90	0,00	0,00	246.014.533,90	0,00	0,00	0,00	2.660.497.945,60
38	Kecamatan Berbak	2.866.169.440,00	291.447.793,33	0,00	0,00	291.447.793,33	0,00	0,00	0,00	3.157.617.233,33
39	Kecamatan Rantau Rasau	2.593.655.023,34	271.957.343,33	0,00	0,00	271.957.343,33	0,00	0,00	0,00	2.865.612.366,67
40	Kecamatan Nipah Panjang	3.034.328.990,00	364.727.496,13	0,00	0,00	364.727.496,13	0,00	0,00	0,00	3.399.056.486,13
41	Kecamatan Sadu	2.771.147.653,33	120.368.956,67	0,00	0,00	120.368.956,67	0,00	0,00	0,00	2.891.516.610,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.123.757.650,00	41.344.942,27	0,00	0,00	41.344.942,27	0,00	0,00	0,00	2.165.102.592,27
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.574.397.685,19	603.160.402,86	0,00	0,00	603.160.402,86	0,00	0,00	0,00	6.177.558.088,05
	JUMLAH	328.252.615.589,40	40.776.169.575,17	169.350.000,00	1.436.679.500,00	42.382.199.075,17	739.672.200,00	1.436.679.500,00	2.176.351.700,00	368.458.462.964,57

Lampiran 37
Kertas Kerja Penyusutan Gedung dan Bangunan Organisasi Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2022

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal per 31 Januari 2022	Mutasi Penyusutan Tahun 2022							Saldo Akhir per 31 Desember 2022
			Mutasi Tambah				Mutasi Kurang			
			Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi Penyusutan 2021	Reklas Antar SKPD	Jumlah	Reklas Antar SKPD	Koreksi Akumulasi Penyusutan 2021	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	116.988.905.632,06	10.526.138.887,99	14.372.485.026,30	0,00	24.898.623.914,29	0,00	0,00	0,00	141.887.529.546,35
2	Dinas Kesehatan	19.395.681.187,95	2.354.532.858,12	0,00	0,00	2.354.532.858,12	0,00	57.629.704,19	57.629.704,19	21.692.584.341,88
3	Rumah Sakit Umum Daerah	4.520.786.551,30	580.626.269,09	74.314.175,04	0,00	654.940.444,13	0,00	0,00	0,00	5.175.726.995,43
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.634.845.776,20	215.955.340,24	0,00	0,00	215.955.340,24	0,00	8.802.394,75	8.802.394,75	1.841.998.721,69
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	19.865.683.647,73	4.476.821.105,66	0,00	586.332.266,67	5.063.153.372,33	0,00	2.050.515.503,28	2.050.515.503,28	22.878.321.516,78
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	734.724.276,15	92.750.918,29	0,00	0,00	92.750.918,29	0,00	0,00	0,00	827.475.194,44
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	356.483.175,34	16.087.449,93	19.932.414,69	0,00	36.019.864,62	0,00	0,00	0,00	392.503.039,96
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.442.338.934,82	253.590.692,23	247.393.466,66	0,00	500.984.158,89	0,00	38.925.442,02	38.925.442,02	1.904.397.651,69
9	Dinas Ketahanan Pangan	620.421.913,87	70.030.412,29	0,00	0,00	70.030.412,29	0,00	0,00	0,00	690.452.326,16
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.927.655.046,40	544.359.956,59	0,00	0,00	544.359.956,59	0,00	0,00	0,00	2.472.015.002,99
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.060.754.540,18	119.818.148,74	0,00	0,00	119.818.148,74	0,00	0,00	0,00	1.180.572.688,92
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.127.624.945,81	164.471.557,23	0,00	393.414.866,66	557.886.423,89	0,00	4.619.701,24	4.619.701,24	1.680.891.668,46
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	990.704.200,61	115.666.039,23	0,00	0,00	115.666.039,23	0,00	0,00	0,00	1.106.370.239,84
14	Dinas Perhubungan	10.797.471.458,58	971.734.909,66	0,00	0,00	971.734.909,66	0,00	55.030.089,52	55.030.089,52	11.714.176.278,72
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	478.455.751,75	34.529.412,66	27.140.104,59	0,00	61.669.517,25	0,00	0,00	0,00	540.125.269,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	8.168.573,07	583.469,50	0,00	0,00	583.469,50	0,00	0,00	0,00	8.752.042,57
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	141.358.242,14	9.278.073,06	0,00	0,00	9.278.073,06	0,00	0,00	0,00	150.636.315,20
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	15.377.609.604,83	1.415.765.168,75	0,00	0,00	1.415.765.168,75	0,00	30.658.518,73	30.658.518,73	16.762.716.254,85
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.201.111.049,71	134.240.937,84	0,00	0,00	134.240.937,84	0,00	36.327.857,58	36.327.857,58	1.299.024.129,97
20	Dinas Perikanan	5.208.529.940,88	419.044.749,67	180.670.277,52	0,00	599.715.027,19	0,00	0,00	0,00	5.808.244.968,07
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.158.924.849,20	413.997.231,75	0,00	0,00	413.997.231,75	393.414.866,66	71.494.520,81	464.909.387,47	3.108.012.693,48
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.124.835.755,52	351.477.486,52	0,00	0,00	351.477.486,52	0,00	22.925.661,97	22.925.661,97	2.453.387.580,07
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.670.593.661,27	1.119.219.790,75	0,00	0,00	1.119.219.790,75	0,00	221.840.384,49	221.840.384,49	5.567.973.067,53
24	Inspektorat	312.351.128,12	197.526.445,75	0,00	0,00	197.526.445,75	0,00	40.397.435,59	40.397.435,59	469.480.138,28

25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	821.239.605,88	76.119.441,82	0,00	0,00	76.119.441,82	0,00	782.016,41	782.016,41	896.577.031,29
26	Badan Keuangan Daerah	2.915.243.686,61	499.239.318,36	0,00	0,00	499.239.318,36	0,00	161.664.527,82	161.664.527,82	3.252.818.477,15
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	2.126.687.594,60	406.032.447,14	0,00	0,00	406.032.447,14	0,00	150.282.102,73	150.282.102,73	2.382.437.939,01
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	65.726.148,54	3.969.209,24	0,00	0,00	3.969.209,24	0,00	0,00	0,00	69.695.357,78
29	Sekretariat Daerah	10.818.052.129,78	1.001.213.038,01	0,00	0,00	1.001.213.038,01	586.332.266,67	326.879.410,40	913.211.677,07	10.906.053.490,72
30	Sekretariat DPRD	10.000.848.185,47	1.376.263.669,79	0,00	0,00	1.376.263.669,79	0,00	590.415.302,86	590.415.302,86	10.786.696.552,40
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	1.834.220.762,47	237.432.516,72	0,00	0,00	237.432.516,72	0,00	54.965.623,15	54.965.623,15	2.016.687.656,04
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	631.230.773,33	64.903.839,45	0,00	0,00	64.903.839,45	0,00	2.943.751,13	2.943.751,13	693.190.861,65
33	Kecamatan Mendahara	1.710.620.873,69	142.445.801,66	0,00	0,00	142.445.801,66	0,00	47.143.412,05	47.143.412,05	1.805.923.263,30
34	Kecamatan Mendahara Ulu	776.003.231,71	155.516.604,17	0,00	0,00	155.516.604,17	0,00	0,00	0,00	931.519.835,88
35	Kecamatan Geragai	733.840.796,08	129.844.300,45	0,00	0,00	129.844.300,45	0,00	68.556.626,66	68.556.626,66	795.128.469,87
36	Kecamatan Kuala Jambi	1.825.555.567,61	232.231.691,98	0,00	0,00	232.231.691,98	0,00	254.622.820,36	254.622.820,36	1.803.164.439,23
37	Kecamatan Dendang	1.548.196.133,34	138.194.296,09	79.424,45	0,00	138.273.720,54	0,00	0,00	0,00	1.686.469.853,88
38	Kecamatan Berbak	915.429.573,33	83.154.110,00	0,00	0,00	83.154.110,00	0,00	0,00	0,00	998.583.683,33
39	Kecamatan Rantau Rasau	1.609.640.082,74	160.377.847,48	0,00	0,00	160.377.847,48	0,00	123.726.556,41	123.726.556,41	1.646.291.373,81
40	Kecamatan Nipah Panjang	1.935.651.763,06	169.572.635,33	0,00	0,00	169.572.635,33	0,00	93.334.678,18	93.334.678,18	2.011.889.720,21
41	Kecamatan Sadu	527.326.804,76	262.967.328,57	0,00	0,00	262.967.328,57	0,00	0,00	0,00	790.294.133,33
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	988.322.240,20	76.165.039,24	0,00	0,00	76.165.039,24	0,00	0,00	0,00	1.064.487.279,44
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	192.885.906,40	49.557.750,84	0,00	0,00	49.557.750,84	0,00	0,00	0,00	242.443.657,24
	JUMLAH	256.122.741.703,09	29.863.448.197,88	14.922.014.889,25	979.747.133,33	45.765.210.220,46	979.747.133,33	4.514.484.042,33	5.494.231.175,66	296.393.720.747,89

Lampiran 38

Kertas Kerja Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Organisasi Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal per 31 Januari 2022	Mutasi Penyusutan Tahun 2022			Saldo Akhir per 31 Desember 2022
			Mutasi Tambah			
			Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi Penyusutan 2021	JUMLAH	
1	Dinas Pendidikan	2.373.992.029,31	557.144.530,04	0,00	557.144.530,04	2.931.136.559,35
2	Dinas Kesehatan	4.130.692.344,08	423.919.774,06	0,00	423.919.774,06	4.554.612.118,14
3	Rumah Sakit Umum Daerah	799.062.532,00	123.757.601,50	0,00	123.757.601,50	922.820.133,50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.814.607.898.376,76	195.740.760.143,44	31.085.644.012,13	226.826.404.155,57	2.041.434.302.532,33
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	156.437.436.716,92	17.951.577.361,67	0,00	17.951.577.361,67	174.389.014.078,59
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.400.000,00	733.333,33	0,00	733.333,33	5.133.333,33
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	475.727.708,60	40.339.106,63	0,00	40.339.106,63	516.066.815,23
8	Dinas Ketahanan Pangan	640.745.476,67	14.015.513,33	0,00	14.015.513,33	654.760.990,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	156.235.467,73	39.987.311,47	0,00	39.987.311,47	196.222.779,20
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.074.850,56	5.468.712,64	0,00	5.468.712,64	21.543.563,20
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.746.363,33	3.078.783,34	0,00	3.078.783,34	27.825.146,67
12	Dinas Perhubungan	4.977.945.789,19	303.741.562,58	0,00	303.741.562,58	5.281.687.351,77
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.656.600,00	11.828.300,00	0,00	11.828.300,00	35.484.900,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	66.753.066,67	2.677.073,33	0,00	2.677.073,33	69.430.140,00
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	732.102.153,50	255.571.668,43	0,00	255.571.668,43	987.673.821,93
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20.526.210,58	3.605.601,58	4.540.136,47	8.145.738,05	28.671.948,63
17	Dinas Perikanan	19.503.595.486,03	739.490.600,56	0,00	739.490.600,56	20.243.086.086,59
18	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.183.869.140,93	538.851.195,95	0,00	538.851.195,95	4.722.720.336,88
19	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.714.309.127,91	230.531.657,86	0,00	230.531.657,86	3.944.840.785,77
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	556.144.907,19	217.336.146,94	0,00	217.336.146,94	773.481.054,13
21	Inspektorat	16.644.971,77	2.267.443,63	0,00	2.267.443,63	18.912.415,40
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.987.937.867,73	338.591.067,14	0,00	338.591.067,14	5.326.528.934,87
23	Badan Keuangan Daerah	176.041.243,47	16.788.280,43	0,00	16.788.280,43	192.829.523,90
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	140.782.599,33	5.754.316,67	0,00	5.754.316,67	146.536.916,00
25	Sekretariat Daerah	2.703.915.888,00	48.840.703,89	3.250.068,25	52.090.772,14	2.756.006.660,14
26	Sekretariat DPRD	1.111.870.203,33	174.471.505,00	0,00	174.471.505,00	1.286.341.708,33
27	Kecamatan Muara Sabak Barat	4.228.385.501,23	1.421.905.012,37	0,00	1.421.905.012,37	5.650.290.513,60
28	Kecamatan Muara Sabak Timur	1.018.918.760,00	456.208.760,00	0,00	456.208.760,00	1.475.127.520,00
29	Kecamatan Mendahara	468.101.955,93	194.425.166,07	0,00	194.425.166,07	662.527.122,00
30	Kecamatan Mendahara Ulu	187.813.960,00	82.888.906,67	0,00	82.888.906,67	270.702.866,67
31	Kecamatan Geragai	253.469.966,33	76.276.402,34	0,00	76.276.402,34	329.746.368,67
32	Kecamatan Kuala Jambi	972.351.868,33	521.827.536,66	0,00	521.827.536,66	1.494.179.404,99
33	Kecamatan Dendang	278.720.445,33	150.700.481,34	0,00	150.700.481,34	429.420.926,67
34	Kecamatan Berbak	334.878.424,00	144.132.868,66	0,00	144.132.868,66	479.011.292,66
35	Kecamatan Rantau Rasau	316.795.205,00	108.266.911,67	0,00	108.266.911,67	425.062.116,67
36	Kecamatan Nipah Panjang	893.201.592,83	382.395.392,16	0,00	382.395.392,16	1.275.596.984,99
37	Kecamatan Sadu	707.736.919,67	248.682.448,88	412.460,87	249.094.909,75	956.831.829,42
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	91.532.794,00	5.759.875,33	0,00	5.759.875,33	97.292.669,33
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.137.261,80	22.820.785,69	0,00	22.820.785,69	92.958.047,49
	JUMLAH	2.032.405.151.776,04	221.607.419.843,28	31.093.846.677,72	252.701.266.521,00	2.285.106.418.297,04

Lampiran 39
Kertas Kerja Penyusutan Aset Tetap Lainnya Organisasi Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal per 31 Januari 2022	Mutasi Penyusutan Tahun 2022		Saldo Akhir per 31 Desember 2022
			Mutasi Tambah		
			Beban Penyusutan	JUMLAH	
1	Dinas Pendidikan	494.383.366,67	183.375.000,00	183.375.000,00	677.758.366,67
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	131.569.454,00	0,00	0,00	131.569.454,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	897.942.152,00	64.244.956,40	64.244.956,40	962.187.108,40
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	89.378.000,00	0,00	0,00	89.378.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00
6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.423.905.500,00	4.999.500,00	4.999.500,00	1.428.905.000,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
8	Dinas Perikanan	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
9	Sekretariat Daerah	619.396.760,00	0,00	0,00	619.396.760,00
10	Sekretariat DPRD	4.990.000,00	0,00	0,00	4.990.000,00
11	Kecamatan Muara Sabak Barat	10.333.333,33	16.011.333,34	16.011.333,34	26.344.666,67
12	Kecamatan Geragai	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
	JUMLAH	3.762.888.566,00	268.630.789,74	268.630.789,74	4.031.519.355,74

Lampiran 40
Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Nilai
I	Perguliran Sapi	36.675.000.000,00
1	Perguliran Sapi Pada Dinas Peternakan	36.675.000.000,00
II	Aset Rusak Berat	1.282.532.083,00
1	Peralatan dan Mesin	1.191.881.083,00
a	Alat Angkutan Darat Bermotor	91.375.000,00
1	Dinas Perhubungan	41.375.000,00
2	Kecamatan Muara Sabak Timur	50.000.000,00
b	Alat Bengkel Bermesin	7.975.000,00
	Dinas Perhubungan	7.975.000,00
c	Alat Kantor	129.179.000,00
1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.640.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	7.980.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	34.440.000,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	12.250.000,00
5	Dinas Perhubungan	45.119.000,00
6	Kecamatan Muara Sabak Timur	7.770.000,00
7	Kecamatan Kuala Jambi	9.900.000,00
8	Kecamatan Dendang	8.080.000,00
d	Alat Rumah Tangga	282.345.600,00
1	Dinas Pendidikan	2.010.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.680.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.490.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	33.485.900,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.490.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	9.224.000,00
7	Dinas Perhubungan	59.306.700,00
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.490.000,00
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.490.000,00
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.490.000,00
11	Sekretariat DPRD	37.830.000,00
12	Kecamatan Muara Sabak Timur	125.209.000,00
13	Kecamatan Dendang	6.150.000,00
e	Komputer	605.136.483,00
1	Dinas Pendidikan	28.600.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	104.259.000,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	60.725.005,00
4	Dinas Perhubungan	154.336.978,00
5	Sekretariat DPRD	46.850.000,00
6	Kecamatan Muara Sabak Timur	112.560.000,00
7	Kecamatan Dendang	97.805.500,00
f	Alat Studio	61.145.000,00
1	Dinas Pendidikan	2.400.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.430.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	39.375.000,00
4	Dinas Perhubungan	11.440.000,00
5	Kecamatan Muara Sabak Timur	1.500.000,00
g	Alat Komunikasi	10.925.000,00
1	Dinas Lingkungan Hidup	4.450.000,00

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Nilai
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	6.475.000,00
h	Unit-Unit Laboratorium	3.800.000,00
1	Dinas Lingkungan Hidup	3.800.000,00
2	Gedung dan Bangunan	90.651.000,00
a	Gedung Tempat Kerja	90.651.000,00
1	Dinas Perkebunan dan Peternakan	90.651.000,00
III	Barang yang di Hibahkan Kepada Masyarakat	95.040.000,00
1	Biogas yang di Hibahkan Kepada Masyarakat yang Belum Ada Nota Hibahnya tahun 2010 pada Kantor PDL	95.040.000,00
IV	Perencanaan Teknis	6.979.875.401,77
1	Aset yang Tidak Tau Keberadaannya Di Dinas PU	1.032.338.000,00
2	Perencanaan Atap Dermaga Apung Tahun 2011	20.894.500,00
3	Perencanaan Dermaga Besi SK 16 Tahun 2011	11.980.000,00
4	Kajian Lingkungan Pada Dinas Tata Kota	48.950.000,00
5	Perencanaan Tknis diatas 5 Tahun	5.865.712.901,77
V	Aset yang Masuk Kategori Sensus	96.548.731.264,12
1	Peralatan dan Mesin	37.735.590.715,74
2	Bangunan Gedung	34.191.362.758,67
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	4.026.303.281,57
4	Aset Tetap Lainnya	20.595.474.508,14
VI	Jalan dan Jembatan Pada Dinas PU	49.786.000,00
VII	Aset Ex ESDM	13.672.214.138,00
VIII	Saldo Dana Treasury Deposit Facility (TDF) di Bank Indonesia	15.715.021.876,00
	JUMLAH	171.018.200.762,89

Lampiran 41
Rincian Mutasi Aset Lain lain Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Per 31 Desember 2021	Mutasi		Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
I	Perguliran Sapi	36.922.500.000,00	241.500.000,00	489.000.000,00	36.675.000.000,00
1	Perguliran Sapi Pada Dinas Peternakan	36.922.500.000,00	241.500.000,00	489.000.000,00	36.675.000.000,00
II	Aset Rusak Berat	1.282.532.083,00	0,00	0,00	1.282.532.083,00
1	Peralatan dan Mesin	1.191.881.083,00	0,00	0,00	1.191.881.083,00
a	Alat Angkutan Darat Bermotor	91.375.000,00	0,00	0,00	91.375.000,00
1	Dinas Perhubungan	41.375.000,00	0,00	0,00	41.375.000,00
2	Kecamatan Muara Sabak Timur	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
b	Alat Bengkel Bermesin	7.975.000,00	0,00	0,00	7.975.000,00
1	Dinas Perhubungan	7.975.000,00	0,00	0,00	7.975.000,00
c	Alat Kantor	129.179.000,00	0,00	0,00	129.179.000,00
1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	7.980.000,00	0,00	0,00	7.980.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	34.440.000,00	0,00	0,00	34.440.000,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00
5	Dinas Perhubungan	45.119.000,00	0,00	0,00	45.119.000,00
6	Kecamatan Muara Sabak Timur	7.770.000,00	0,00	0,00	7.770.000,00
7	Kecamatan Kuala Jambi	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
8	Kecamatan Dendang	8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00
d	Alat Rumah Tangga	282.345.600,00	0,00	0,00	282.345.600,00
1	Dinas Pendidikan	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	33.485.900,00	0,00	0,00	33.485.900,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	9.224.000,00	0,00	0,00	9.224.000,00
7	Dinas Perhubungan	59.306.700,00	0,00	0,00	59.306.700,00
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
11	Sekretariat DPRD	37.830.000,00	0,00	0,00	37.830.000,00
12	Kecamatan Muara Sabak Timur	125.209.000,00	0,00	0,00	125.209.000,00
13	Kecamatan Dendang	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00
e	Komputer	605.136.483,00	0,00	0,00	605.136.483,00
1	Dinas Pendidikan	28.600.000,00	0,00	0,00	28.600.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	104.259.000,00	0,00	0,00	104.259.000,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	60.725.005,00	0,00	0,00	60.725.005,00
4	Dinas Perhubungan	154.336.978,00	0,00	0,00	154.336.978,00
5	Sekretariat DPRD	46.850.000,00	0,00	0,00	46.850.000,00
6	Kecamatan Muara Sabak Timur	112.560.000,00	0,00	0,00	112.560.000,00
7	Kecamatan Dendang	97.805.500,00	0,00	0,00	97.805.500,00
f	Alat Studio	61.145.000,00	0,00	0,00	61.145.000,00
1	Dinas Pendidikan	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.430.000,00	0,00	0,00	6.430.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	39.375.000,00	0,00	0,00	39.375.000,00
4	Dinas Perhubungan	11.440.000,00	0,00	0,00	11.440.000,00
5	Kecamatan Muara Sabak Timur	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
g	Alat Komunikasi	10.925.000,00	0,00	0,00	10.925.000,00
1	Dinas Lingkungan Hidup	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Per 31 Desember 2021	Mutasi		Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	6.475.000,00	0,00	0,00	6.475.000,00
h	Unit-Unit Laboratorium	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
1	Dinas Lingkungan Hidup	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
2	Gedung dan Bangunan	90.651.000,00	0,00	0,00	90.651.000,00
a	Gedung Tempat Kerja	90.651.000,00	0,00	0,00	90.651.000,00
1	Dinas Perkebunan dan Peternakan	90.651.000,00	0,00	0,00	90.651.000,00
III	Barang yang di Hibahkan Kepada Masyarakat	95.040.000,00	0,00	0,00	95.040.000,00
1	Biogas yang di Hibahkan Kepada Masyarakat yang Belum Ada Nota Hibahnya tahun 2010 pada Kantor PDL	95.040.000,00	0,00	0,00	95.040.000,00
IV	Perencanaan Teknis	6.979.875.401,77	0,00	0,00	6.979.875.401,77
1	Aset yang Tidak Tau Keberadaannya Di Dinas PU	1.032.338.000,00	0,00	0,00	1.032.338.000,00
2	Perencanaan Atap Dermaga Apung Tahun 2011	20.894.500,00	0,00	0,00	20.894.500,00
3	Perencanaan Dermaga Besi SK 16 Tahun 2011	11.980.000,00	0,00	0,00	11.980.000,00
4	Kajian Lingkungan Pada Dinas Tata Kota	48.950.000,00	0,00	0,00	48.950.000,00
5	Perencanaan Tknis diatas 5 Tahun	5.865.712.901,77	0,00	0,00	5.865.712.901,77
V	Aset yang Masuk Kategori Sensus	96.548.731.264,12	0,00	0,00	96.548.731.264,12
1	Peralatan dan Mesin	37.735.590.715,74	0,00	0,00	37.735.590.715,74
2	Bangunan Gedung	34.191.362.758,67	0,00	0,00	34.191.362.758,67
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	4.026.303.281,57	0,00	0,00	4.026.303.281,57
4	Aset Tetap Lainnya	20.595.474.508,14	0,00	0,00	20.595.474.508,14
VI	Jalan dan Jembatan Pada Dinas PU	49.786.000,00	0,00	0,00	49.786.000,00
VII	Aset Ex ESDM	13.672.214.138,00	0,00	0,00	13.672.214.138,00
VIII	Saldo Dana Treasury Deposit Facility (TDF) di Bank Indonesia	0,00	15.715.021.876,00	0,00	15.715.021.876,00
	JUMLAH	155.550.678.886,89	15.956.521.876,00	489.000.000,00	171.018.200.762,89

LAMPIRAN 42
NET REALIZABLE VALUE - INVESTASI NON PERMANEN (DATA GLOBAL TAHUN 2006 S/D 2013)
TERNAK GADUHAN BERGULIR PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
KEADAAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

NO	KECAMATAN	KEADAAN AKHIR TAHUN 31 DESEMBER 2021									KEADAAN AWAL TAHUN 2022									KEADAAN AKHIR 31 DESEMBER 2022								
		JUMLAH TERNAK				NET REALIZABLE VALUE					JUMLAH TERNAK				NET REALIZABLE VALUE					JUMLAH TERNAK				NET REALIZABLE VALUE				
		DEWASA		ANAK		DEWASA		ANAK			JUMLAH		DEWASA		ANAK		JUMLAH		DEWASA		ANAK			JUMLAH				
		JTN	BTN	JTN	BTN	JTN	BTN	JTN	BTN	JUMLAH	JTN	BTN	JTN	BTN	JTN	BTN	JTN	BTN	JTN	BTN	JTN	BTN	JTN	BTN	JTN	BTN	JUMLAH	
1	MENDAHARA ULU	12	98	28	18	162.000.000,00	1.225.000.000,00	210.000.000,00	117.000.000,00	1.714.000.000,00	12	98	28	18	162.000.000,00	1.225.000.000,00	210.000.000,00	117.000.000,00	1.714.000.000,00	23	110	22	12	310.500.000,00	1.375.000.000,00	165.000.000,00	78.000.000,00	1.928.500.000,00
2	KUALA JAMBI	3	28	0	7	40.500.000,00	336.000.000,00	0,00	45.500.000,00	422.000.000,00	3	28	0	7	40.500.000,00	336.000.000,00	0,00	45.500.000,00	422.000.000,00	3	28	0	7	40.500.000,00	336.000.000,00	0,00	45.500.000,00	422.000.000,00
3	MENDAHARA	2	32	11	15	27.000.000,00	400.000.000,00	77.000.000,00	97.500.000,00	601.500.000,00	2	32	11	15	27.000.000,00	400.000.000,00	77.000.000,00	97.500.000,00	601.500.000,00	2	32	11	15	27.000.000,00	400.000.000,00	77.000.000,00	97.500.000,00	601.500.000,00
4	SADU	29	67	22	26	391.500.000,00	837.500.000,00	176.000.000,00	195.000.000,00	1.600.000.000,00	29	67	22	26	391.500.000,00	837.500.000,00	176.000.000,00	195.000.000,00	1.600.000.000,00	29	67	22	26	391.500.000,00	837.500.000,00	176.000.000,00	195.000.000,00	1.600.000.000,00
5	DENDANG	54	333	53	66	729.000.000,00	4.162.500.000,00	397.500.000,00	429.000.000,00	5.718.000.000,00	54	333	53	66	729.000.000,00	4.162.500.000,00	397.500.000,00	429.000.000,00	5.718.000.000,00	54	316	53	66	729.000.000,00	3.950.000.000,00	397.500.000,00	429.000.000,00	5.505.500.000,00
6	MA.SABAK BARAT	63	181	63	72	819.000.000,00	2.172.000.000,00	441.000.000,00	468.000.000,00	3.900.000.000,00	63	181	63	72	819.000.000,00	2.172.000.000,00	441.000.000,00	468.000.000,00	3.900.000.000,00	63	181	63	72	819.000.000,00	2.172.000.000,00	441.000.000,00	468.000.000,00	3.900.000.000,00
7	MA.SABAK TIMUR	9	177	8	33	117.000.000,00	2.124.000.000,00	56.000.000,00	198.000.000,00	2.495.000.000,00	9	177	8	33	117.000.000,00	2.124.000.000,00	56.000.000,00	198.000.000,00	2.495.000.000,00	9	177	8	33	117.000.000,00	2.124.000.000,00	56.000.000,00	198.000.000,00	2.495.000.000,00
8	GERAGAI	17	202	18	33	229.500.000,00	2.525.000.000,00	144.000.000,00	214.500.000,00	3.113.000.000,00	17	202	18	33	229.500.000,00	2.525.000.000,00	144.000.000,00	214.500.000,00	3.113.000.000,00	17	202	18	33	229.500.000,00	2.525.000.000,00	144.000.000,00	214.500.000,00	3.113.000.000,00
9	BERBAK	55	438	47	90	742.500.000,00	5.475.000.000,00	376.000.000,00	675.000.000,00	7.268.500.000,00	55	438	47	90	742.500.000,00	5.475.000.000,00	376.000.000,00	675.000.000,00	7.268.500.000,00	55	438	47	90	742.500.000,00	5.475.000.000,00	376.000.000,00	675.000.000,00	7.268.500.000,00
10	NIPAH PANJANG	19	117	24	26	256.500.000,00	1.404.000.000,00	168.000.000,00	169.000.000,00	1.997.500.000,00	19	117	24	26	256.500.000,00	1.404.000.000,00	168.000.000,00	169.000.000,00	1.997.500.000,00	19	116	24	26	256.500.000,00	1.392.000.000,00	168.000.000,00	169.000.000,00	1.985.500.000,00
11	RANTAU RASAU	51	433	147	162	688.500.000,00	5.196.000.000,00	1.102.500.000,00	1.053.000.000,00	8.040.000.000,00	51	433	147	162	688.500.000,00	5.196.000.000,00	1.102.500.000,00	1.053.000.000,00	8.040.000.000,00	48	421	147	162	648.000.000,00	5.052.000.000,00	1.102.500.000,00	1.053.000.000,00	7.855.500.000,00
	JUMLAH	314	2106	421	548	4.203.000.000,00	25.857.000.000,00	3.148.000.000,00	3.661.500.000,00	36.869.500.000,00	314	2106	421	548	4.203.000.000,00	25.857.000.000,00	3.148.000.000,00	3.661.500.000,00	36.869.500.000,00	322	2088	415	542	4.311.000.000,00	25.638.500.000,00	3.103.000.000,00	3.622.500.000,00	36.675.000.000,00

Lampiran 43
Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain
Organisasi Perangkat Daerah per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SENSUS	PERENCANAAN	HIBAH KE PEMERINTAH PROVINSI	RUSAK BERAT	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	31.801.204.277,97	0,00	0,00	33.010.000,00	31.834.214.277,97
2	Dinas Kesehatan	5.096.450.942,67	0,00	0,00	0,00	5.096.450.942,67
3	Rumah Sakit Umum Daerah	398.417.500,00	0,00	0,00	0,00	398.417.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	66.490.000,00	0,00	0,00	66.490.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	825.632.808,33	0,00	0,00	0,00	825.632.808,33
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	757.363.250,00	0,00	0,00	11.750.000,00	769.113.250,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	176.382.850,00	0,00	0,00	1.490.000,00	177.872.850,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	98.571.600,00	0,00	0,00	7.980.000,00	106.551.600,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	64.820.000,00	0,00	0,00	219.809.900,00	284.629.900,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	311.503.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00	312.993.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	363.800.265,00	0,00	0,00	0,00	363.800.265,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	810.462.059,75	0,00	0,00	88.674.005,00	899.136.064,75
13	Dinas Perhubungan	896.842.082,20	0,00	0,00	319.157.678,00	1.215.999.760,20
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	25.838.800,00	0,00	0,00	1.490.000,00	27.328.800,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43.714.000,00	0,00	0,00	0,00	43.714.000,00
16	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.124.765.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.126.255.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.866.666,67	0,00	0,00	0,00	10.866.666,67
18	Dinas Perikanan	150.290.500,00	0,00	0,00	0,00	150.290.500,00
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.862.912.098,00	0,00	0,00	0,00	1.862.912.098,00
20	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.533.084.516,67	0,00	0,00	27.195.300,00	1.560.279.816,67
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	580.859.251,98	0,00	0,00	0,00	580.859.251,98
22	Inspektorat	185.329.000,00	0,00	0,00	0,00	185.329.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	444.626.937,83	0,00	0,00	0,00	444.626.937,83
24	Badan Keuangan Daerah	234.388.138,20	0,00	3.894.215.102,07	0,00	4.128.603.240,27
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	469.451.999,99	0,00	0,00	0,00	469.451.999,99
26	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.625.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00	19.115.000,00
27	Sekretariat Daerah	5.329.692.248,33	0,00	0,00	0,00	5.329.692.248,33
28	Sekretariat DPRD	2.542.722.443,00	0,00	0,00	78.430.000,00	2.621.152.443,00
29	Kecamatan Muara Sabak Barat	28.580.875,00	0,00	0,00	0,00	28.580.875,00
30	Kecamatan Muara Sabak Timur	39.295.000,00	0,00	0,00	296.519.000,00	335.814.000,00
31	Kecamatan Mendahara	104.085.150,00	0,00	0,00	0,00	104.085.150,00
32	Kecamatan Mendahara Ulu	32.227.666,67	0,00	0,00	0,00	32.227.666,67
33	Kecamatan Geragai	12.342.000,00	0,00	0,00	0,00	12.342.000,00
34	Kecamatan Kuala Jambi	57.143.750,00	0,00	0,00	9.900.000,00	67.043.750,00
35	Kecamatan Dendang	22.930.000,00	0,00	0,00	112.035.500,00	134.965.500,00
36	Kecamatan Berbak	210.084.041,67	0,00	0,00	0,00	210.084.041,67
37	Kecamatan Rantau Rasau	75.481.666,67	0,00	0,00	0,00	75.481.666,67
38	Kecamatan Nipah Panjang	41.909.000,00	0,00	0,00	0,00	41.909.000,00
39	Kecamatan Sadu	354.707.500,00	0,00	0,00	0,00	354.707.500,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	802.851.500,00	0,00	0,00	0,00	802.851.500,00
	JUMLAH	57.939.255.386,60	66.490.000,00	3.894.215.102,07	1.211.911.383,00	63.111.871.871,67

Lampiran 44

Rincian Utang Belanja Organisasi Perangkat Daerah per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA PEGAWAI	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA	UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	UTANG BELANJA MODAL BANGUNAN	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	15.166.557,00	0,00	0,00	6.972.000,00	22.138.557,00
2	Dinas Kesehatan	232.025.254,00	16.323.411,00	0,00	0,00	248.348.665,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	8.822.861,00	1.083.316.781,00	4.400.000,00	0,00	1.096.539.642,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.946.375,00	8.857.604,00	0,00	0,00	13.803.979,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.172.034,00	0,00	0,00	0,00	4.172.034,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	827.195,00	4.844.170,00	0,00	0,00	5.671.365,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.846.050,00	4.094.168,00	0,00	0,00	6.940.218,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	793.284,00	0,00	0,00	0,00	793.284,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.498.608,00	4.707.000,00	0,00	0,00	6.205.608,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	2.670.936,00	0,00	0,00	0,00	2.670.936,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	915.200,00	0,00	0,00	0,00	915.200,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	5.168.740,00	0,00	0,00	5.168.740,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.072.222,00	0,00	0,00	0,00	3.072.222,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	2.159.937,00	2.488.122,00	0,00	0,00	4.648.059,00
15	Dinas Perhubungan	1.478.844,00	0,00	0,00	0,00	1.478.844,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	971.697,00	8.702.024,00	0,00	0,00	9.673.721,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.640.172,00	4.830.599,00	0,00	0,00	6.470.771,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	8.812.743,00	0,00	0,00	8.812.743,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.608.121,00	7.221.451,00	0,00	0,00	8.829.572,00
21	Dinas Perikanan	4.039.570,00	0,00	0,00	0,00	4.039.570,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.048.579,00	372.979,00	0,00	0,00	7.421.558,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	901.626,00	2.367.186,00	0,00	0,00	3.268.812,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.677.902,00	2.678.060,00	0,00	0,00	4.355.962,00
25	Sekretariat Daerah	4.537.907,00	98.168.763,00	0,00	0,00	102.706.670,00
26	Sekretariat DPRD	4.198.691,00	0,00	0,00	0,00	4.198.691,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.794.052,00	9.947.072,00	0,00	0,00	12.741.124,00

(dalam rupiah)

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA PEGAWAI	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA	UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	UTANG BELANJA MODAL BANGUNAN	JUMLAH
28	Badan Keuangan Daerah	5.265.621,00	11.180.971,00	0,00	0,00	16.446.592,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	5.093.460,00	5.497.948,00	0,00	0,00	10.591.408,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.869.454,00	309.800,00	0,00	0,00	3.179.254,00
31	Inspektorat	1.639.299,00	6.678.393,00	0,00	0,00	8.317.692,00
32	Kecamatan Muara Sabak Barat	406.560,00	0,00	0,00	0,00	406.560,00
33	Kecamatan Muara Sabak Timur	914.364,67	376.456,00	0,00	0,00	1.290.820,67
34	Kecamatan Mendahara	2.376.687,00	0,00	0,00	0,00	2.376.687,00
35	Kecamatan Mendahara Ulu	794.124,00	2.318.121,00	0,00	0,00	3.112.245,00
36	Kecamatan Geragai	3.013.200,00	0,00	0,00	0,00	3.013.200,00
37	Kecamatan Kuala Jambi	3.512.171,00	890.640,00	0,00	0,00	4.402.811,00
38	Kecamatan Dendang	1.336.396,00	0,00	0,00	0,00	1.336.396,00
39	Kecamatan Berbak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Rantau Rasau	554.862,00	668.187,00	0,00	0,00	1.223.049,00
41	Kecamatan Nipah Panjang	1.422.015,00	1.885.294,00	0,00	0,00	3.307.309,00
42	Kecamatan Sadu	2.542.303,00	0,00	0,00	0,00	2.542.303,00
43	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	85.349,00	2.078.570,00	0,00	0,00	2.163.919,00
	Jumlah	342.639.539,67	1.304.785.253,00	4.400.000,00	6.972.000,00	1.658.796.792,67

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	LISTRIK	TELEPON	KAWAT / FAXIMILE	TV KABEL	TAGIHAN AIR	MAKAN MINUM LAPANGAN	HONORARIUM NARASUMBER DAN PENYULUH	BELANJA JASA MEDIS BLUD	BARANG HABIS PAKAI BLUD	JUMLAH
24	Kecamatan Dendang	890.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.640,00
25	Kecamatan Rantau Rasau	668.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.187,00
26	Kecamatan Nipah Panjang	1.885.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.294,00
27	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	1.000.000,00	1.078.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.570,00
JUMLAH		236.418.199,00	8.470.249,00	5.871.519,00	309.800,00	15.000,00	4.724.705,00	4.525.000,00	1.020.522.701,00	23.928.080,00	1.304.785.253,00

Lampiran 46

Rincian Pendapatan Pajak Daerah Laporan Operasional Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Pajak Daerah - LO	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
I	Pajak Hotel - LO	10.500.000,00	4.296.000,00	6.204.000,00	144,41
1	Hotel - LO	10.200.000,00	4.296.000,00	5.904.000,00	137,43
2	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
II	Pajak Restoran - LO	3.771.315.169,80	3.004.177.830,50	767.137.339,30	25,54
1	Rumah Makan - LO	1.638.271.775,80	1.295.701.230,50	342.570.545,30	26,44
2	Jasa Boga - LO	2.133.043.394,00	1.708.476.600,00	424.566.794,00	24,85
III	Pajak Hiburan - LO	10.373.500,00	1.300.000,00	9.073.500,00	697,96
1	Pajak Hiburan - LO	3.886.000,00	1.300.000,00	2.586.000,00	198,92
2	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan-LO	6.487.500,00	0,00	6.487.500,00	0,00
IV	Pajak Reklame - LO	130.433.565,33	283.958.689,00	(153.525.123,67)	(54,07)
1	Reklame Papan / BillBoard / Videotron / Megatron - LO	130.433.565,33	283.958.689,00	(153.525.123,67)	(54,07)
V	Pajak Penerangan Jalan - LO	11.098.994.302,00	10.622.664.859,55	476.329.442,45	4,48
1	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri-LO	11.097.804.286,00	573.599.665,00	10.524.204.621,00	1.834,76
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	1.190.016,00	10.049.065.194,55	(10.047.875.178,55)	(99,99)
VI	Pajak Air Tanah - LO	6.266.350,00	37.882.700,00	(31.616.350,00)	(83,46)
1	Pajak Air Tanah - LO	6.266.350,00	37.882.700,00	(31.616.350,00)	(83,46)
VII	Pajak Sarang Burung Walet - LO	71.485.000,00	93.333.000,00	(21.848.000,00)	(23,41)
1	Pajak Sarang Burung Walet - LO	71.485.000,00	93.333.000,00	(21.848.000,00)	(23,41)
VIII	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	268.652.466,00	625.517.017,00	(356.864.551,00)	(57,05)
1	Pasir dan Kerikil - LO	247.122.952,00	98.920.139,00	148.202.813,00	149,82
2	Tanah Liat-LO	21.529.514,00	526.596.878,00	(505.067.364,00)	(95,91)
IX	PBB Perdesaan dan Perkotaan - LO	3.010.602.453,00	2.972.000.798,00	38.601.655,00	1,30
1	PBB Perdesaan dan Perkotaan - LO	3.010.602.453,00	2.972.000.798,00	38.601.655,00	1,30
X	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - LO	5.691.664.273,00	3.166.545.979,00	2.525.118.294,00	79,74
1	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	5.498.672.575,00	3.166.545.979,00	2.332.126.596,00	73,65
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	192.991.698,00	0,00	192.991.698,00	0,00
Jumlah		24.070.287.079,13	20.811.676.873,05	3.258.610.206,08	15,66

Lampiran 47
Rincian Pendapatan Retibusi Daerah Laporan Operasional
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	RETRIBUSI DAERAH - LO	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
I	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	288.667.900,00	465.100.600,00	(176.432.700,00)	(37,93)
1	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO	288.667.900,00	465.100.600,00	(176.432.700,00)	(37,93)
II	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	89.643.000,00	118.543.000,00	(28.900.000,00)	(24,38)
1	Retribusi Pelayanan Kebersihan - LO	89.643.000,00	118.543.000,00	(28.900.000,00)	(24,38)
III	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	7.775.000,00	7.600.000,00	175.000,00	2,30
1	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	7.775.000,00	7.600.000,00	175.000,00	2,30
IV	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	88.800.000,00	74.900.000,00	13.900.000,00	18,56
1	Pelayanan Pasar - LO	88.800.000,00	74.900.000,00	13.900.000,00	18,56
V	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	1.050.000,00	2.400.000,00	(1.350.000,00)	(56,25)
1	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO	1.050.000,00	2.400.000,00	(1.350.000,00)	(56,25)
VI	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	23.121.000,00	25.695.500,00	(2.574.500,00)	(10,02)
1	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LO	23.121.000,00	25.695.500,00	(2.574.500,00)	(10,02)
VII	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	319.433.400,00	292.377.800,00	27.055.600,00	9,25
1	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LO	319.433.400,00	292.377.800,00	27.055.600,00	9,25
VIII	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	245.486.622,00	450.001.333,33	(204.514.711,33)	(45,45)
1	Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	245.486.622,00	450.001.333,33	(204.514.711,33)	(45,45)
IX	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	900.000,00	5.030.000,00	(4.130.000,00)	(82,11)
1	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LO	900.000,00	5.030.000,00	(4.130.000,00)	(82,11)
X	Retribusi Terminal - LO	5.150.000,00	4.975.000,00	175.000,00	3,52
1	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	5.150.000,00	4.975.000,00	175.000,00	3,52
XI	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	31.200.000,00	28.855.000,00	2.345.000,00	8,13
1	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	31.200.000,00	28.855.000,00	2.345.000,00	8,13
XII	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	0,00	10.108.000,00	(10.108.000,00)	(100,00)
1	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO	0,00	10.108.000,00	(10.108.000,00)	(100,00)
XIII	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	35.187.998,00	32.712.948,00	2.475.050,00	7,57
1	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO	35.187.998,00	32.712.948,00	2.475.050,00	7,57
XIV	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	39.675.000,00	20.805.000,00	18.870.000,00	90,70
1	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO	39.675.000,00	20.805.000,00	18.870.000,00	90,70
XV	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	155.406.620,00	334.680.960,43	(179.274.340,43)	(53,57)
1	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO	155.406.620,00	334.680.960,43	(179.274.340,43)	(53,57)
	JUMLAH	1.331.496.540,00	1.873.785.141,76	(542.288.601,76)	(28,94)

Lampiran 48Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya Laporan Operasional
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA - LO	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
I	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	2.302.358.500,00	2.295.569.081,00	6.789.419,00	0,30
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	103.862.600,00	247.536.399,00	(143.673.799,00)	(58,04)
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	2.198.495.900,00	2.048.032.682,00	150.463.218,00	7,35
II	Penerimaan Jasa Giro - LO	3.042.720.573,09	1.768.232.423,95	1.274.488.149,14	72,08
1	Jasa Giro Kas Daerah - LO	2.911.373.846,68	1.670.526.893,57	1.240.846.953,11	74,28
2	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	131.346.726,41	97.705.530,38	33.641.196,03	34,43
IV	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	1.916.923.801,79	2.977.375.552,41	(1.060.451.750,62)	(35,62)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	1.916.923.801,79	2.977.375.552,41	(1.060.451.750,62)	(35,62)
V	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.740.862.320,60	1.630.128.927,21	110.733.393,39	6,79
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.740.862.320,60	1.630.128.927,21	110.733.393,39	6,79
VI	Pendapatan Denda Pajak - LO	50.818.767,00	53.998.885,00	(3.180.118,00)	(5,89)
1	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	50.818.767,00	53.998.885,00	(3.180.118,00)	(5,89)
VII	Pendapatan dari Pengembalian -LO	694.393.331,96	417.021.912,00	277.371.419,96	66,51
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	694.393.331,96	417.021.912,00	277.371.419,96	66,51
VIII	Pendapatan BLUD - LO	11.048.719.852,83	36.654.913.053,52	(25.606.193.200,69)	(69,86)
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	11.048.719.852,83	36.654.913.053,52	(25.606.193.200,69)	(69,86)
IX	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	6.366.462.144,00	6.254.463.245,00	111.998.899,00	1,79
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO	6.366.462.144,00	6.254.463.245,00	111.998.899,00	1,79
	JUMLAH	27.163.259.291,27	52.051.703.080,09	(24.888.443.788,82)	(47,81)

Lampiran 49
Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Laporan Operasional
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
I	Bagi Hasil Pajak - LO	70.936.285.232,00	93.034.089.299,00	(22.097.804.067,00)	(23,75)
1	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	321.187.296,00	290.871.030,00	30.316.266,00	10,42
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	36.425.537,00	20.280.826,00	16.144.711,00	79,61
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - LO	62.582.162.390,00	85.255.043.170,00	(22.672.880.780,00)	(26,59)
4	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 - LO	7.996.510.009,00	7.467.894.273,00	528.615.736,00	7,08
II	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	140.646.900.680,00	71.285.919.208,00	69.360.981.472,00	97,30
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	5.481.232.812,00	5.992.510.113,00	(511.277.301,00)	(8,53)
2	Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara-Royalty-LO	20.575.734.634,00	8.147.161.450,00	12.428.573.184,00	152,55
3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	2.170.064.211,00	1.448.877.289,00	721.186.922,00	49,78
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	40.252.923.160,00	26.630.788.700,00	13.622.134.460,00	51,15
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	72.166.434.276,00	29.066.581.656,00	43.099.852.620,00	148,28
6	Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara-Landrent-LO	511.587,00	0,00	511.587,00	0,00
III	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	514.065.298.501,00	514.767.343.000,00	(702.044.499,00)	(0,14)
1	Dana Alokasi Umum - LO	514.065.298.501,00	514.767.343.000,00	(702.044.499,00)	(0,14)
IV	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	72.238.224.746,00	65.810.938.034,00	6.427.286.712,00	9,77
1	DAK Bidang Pendidikan (SD)- LO	13.753.907.890,00	18.714.418.212,00	(4.960.510.322,00)	(26,51)
2	DAK Bidang Pendidikan (SMP)- LO	19.661.766.355,00	21.945.525.450,00	(2.283.759.095,00)	(10,41)
3	DAK Bidang Kesehatan (Kesehatan Dasar)- LO	8.016.019.241,00	7.242.674.252,00	773.344.989,00	10,68
4	DAK Bidang Kesehatan (Kefarmasian)- LO	2.104.900.000,00	2.081.311.020,00	23.588.980,00	1,13
5	DAK Bidang Kesehatan (Keluarga Berencana)- LO	428.321.000,00	933.003.500,00	(504.682.500,00)	(54,09)
6	DAK Bidang Perpustakaan Daerah	0,00	296.615.000,00	(296.615.000,00)	(100,00)
7	DAK Bidang Jalan	27.874.110.260,00	11.468.335.000,00	16.405.775.260,00	143,05
8	DAK Bidang Pendidikan (PAUD) - LO	399.200.000,00	3.129.055.600,00	(2.729.855.600,00)	(87,24)
V	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan - LO	41.472.418.118,00	43.289.645.118,00	(1.817.227.000,00)	(4,20)
1	DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum - LO	5.532.244.000,00	3.936.025.000,00	1.596.219.000,00	40,55
2	DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi - LO	6.763.731.000,00	8.576.843.700,00	(1.813.112.700,00)	(21,14)
3	DAK Fisik Penugasan Bidang Infrastruktur Irigasi-LO	11.446.116.624,00	9.561.264.869,00	1.884.851.755,00	19,71
4	DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	2.498.677.060,00	1.707.050.900,00	791.626.160,00	46,37
5	DAK Bidang Kesehatan dan KB (Penurunan Stunting)- LO	0,00	494.156.000,00	(494.156.000,00)	(100,00)
6	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB-Penurunan AKI dan AKB-LO	1.213.853.000,00	7.929.596.022,00	(6.715.743.022,00)	(84,69)
7	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	7.887.532.334,00	(7.887.532.334,00)	(100,00)
8	DAK Fisik Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	0,00	1.007.575.393,00	(1.007.575.393,00)	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	10.827.981.264,00	2.189.600.900,00	8.638.380.364,00	394,52
10	DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan-LO	3.189.815.170,00	0,00	3.189.815.170,00	0,00
VI	Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi - LO	348.593.841,00	0,00	348.593.841,00	0,00
1	DAK Fisik Afirmasi Bidang Sanitasi	348.593.841,00	0,00	348.593.841,00	0,00
VII	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LO	103.150.086.781,00	90.114.543.571,00	13.035.543.210,00	14,47
1	DAK Non Fisik BOS Reguler - LO	29.146.390.422,00	0,00	29.146.390.422,00	0,00
2	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - LO	4.716.969.000,00	4.739.100.000,00	(22.131.000,00)	(0,47)
3	DAK Non Fisik TPG PNSD - LO	50.052.162.440,00	60.862.874.000,00	(10.810.711.560,00)	(17,76)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
4	DAK Non Fisik TKG PNSD - LO	1.347.852.400,00	1.365.154.800,00	(17.302.400,00)	(1,27)
5	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan - LO	13.704.948.819,00	18.310.317.291,00	(4.605.368.472,00)	(25,15)
6	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB - LO	2.285.926.900,00	1.526.221.000,00	759.705.900,00	49,78
7	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	0,00	1.005.468.480,00	(1.005.468.480,00)	(100,00)
8	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	681.500.000,00	989.000.000,00	(307.500.000,00)	(31,09)
9	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	272.400.000,00	321.150.000,00	(48.750.000,00)	(15,18)
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA)-LO	0,00	416.386.000,00	(416.386.000,00)	(100,00)
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	254.829.800,00	326.122.000,00	(71.292.200,00)	(21,86)
12	DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	687.107.000,00	252.750.000,00	434.357.000,00	171,85
	Jumlah	942.857.807.899,00	878.302.478.230,00	64.555.329.669,00	7,35

Lampiran 50
Rincian Beban Operasi Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	253.246.972.833,25	262.026.262.205,24	(8.779.289.371,99)	(3,35)
2	Dinas Kesehatan	98.772.899.955,05	99.089.463.112,62	(316.563.157,57)	(0,32)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	42.759.668.275,24	49.536.120.263,50	(6.776.451.988,26)	(13,68)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	220.614.704.445,02	147.166.028.386,91	73.448.676.058,11	49,91
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	56.906.838.795,65	55.326.372.686,46	1.580.466.109,19	2,86
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.633.303.519,12	5.581.645.279,33	51.658.239,79	0,93
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.653.033.501,26	5.269.205.450,69	383.828.050,57	7,28
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.097.308.452,97	5.376.600.581,27	(279.292.128,30)	(5,19)
9	Dinas Ketahanan Pangan	8.573.235.334,96	4.657.789.579,97	3.915.445.754,99	84,06
10	Dinas Lingkungan Hidup	7.715.857.008,79	7.419.365.351,93	296.491.656,86	4,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.714.236.420,71	5.292.435.755,05	421.800.665,66	7,97
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.763.653.055,24	4.512.352.771,24	2.251.300.284,00	49,89
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	8.305.882.377,23	8.668.818.318,84	(362.935.941,61)	(4,19)
14	Dinas Perhubungan	7.270.727.105,01	7.011.774.938,17	258.952.166,84	3,69
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.671.389.778,23	5.030.304.973,35	1.641.084.804,88	32,62
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.629.705.019,83	4.259.211.018,84	(629.505.999,01)	(14,78)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.638.071.537,39	3.655.449.628,08	982.621.909,31	26,88
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	14.651.334.776,51	11.289.991.009,12	3.361.343.767,39	29,77
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.202.304.998,27	3.762.083.954,66	440.221.043,61	11,70
20	Dinas Perikanan	9.116.831.809,56	8.477.288.382,03	639.543.427,53	7,54
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	20.839.141.024,03	14.018.661.211,91	6.820.479.812,12	48,65
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	10.730.192.805,79	8.875.889.083,52	1.854.303.722,27	20,89
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.884.055.608,34	6.276.978.653,20	1.607.076.955,14	25,60
24	Inspektorat	9.258.835.230,17	7.625.808.750,11	1.633.026.480,06	21,41
25	BAPPEDA	7.814.065.313,28	6.217.617.626,87	1.596.447.686,41	25,68
26	Badan Keuangan Daerah	95.193.863.647,86	85.340.812.753,98	9.853.050.893,88	11,55
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	9.408.363.011,72	8.289.842.704,04	1.118.520.307,68	13,49
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.196.866.081,31	3.677.386.938,31	519.479.143,00	14,13
29	Sekretariat Daerah	40.172.727.097,46	31.392.498.546,67	8.780.228.550,79	27,97
30	Sekretariat DPRD	43.151.273.238,55	34.054.426.414,31	9.096.846.824,24	26,71
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	11.655.931.955,77	11.195.189.775,19	460.742.180,58	4,12
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	6.206.282.581,13	6.081.074.207,43	125.208.373,70	2,06
33	Kantor Camat Mendahara	3.225.753.204,39	3.502.484.968,08	(276.731.763,69)	(7,90)
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	3.038.236.965,50	2.857.331.508,98	180.905.456,52	6,33
35	Kantor Camat Geragai	3.551.745.694,12	3.418.453.714,75	133.291.979,37	3,90
36	Kantor Camat Kuala Jambi	3.544.199.223,64	3.553.026.914,91	(8.827.691,27)	(0,25)
37	Kantor Camat Dendang	3.146.072.858,34	3.081.045.441,57	65.027.416,77	2,11
38	Kantor Camat Berbak	2.953.688.461,00	2.987.208.927,66	(33.520.466,66)	(1,12)
39	Kantor Camat Rantau Rasau	3.717.383.954,14	3.587.131.961,48	130.251.992,66	3,63
40	Kantor Camat Nipah Panjang	6.160.759.252,62	6.115.132.219,20	45.627.033,42	0,75
41	Kantor Camat Sadu	3.326.961.318,12	3.277.486.607,25	49.474.710,87	1,51
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.979.396.190,17	4.356.505.046,89	622.891.143,28	14,30
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.401.319.847,72	7.312.312.011,98	(1.910.992.164,26)	(26,13)
	JUMLAH	1.085.495.073.564,46	970.502.869.635,59	114.992.203.928,87	11,85

Lampiran 51
Rincian Beban Pegawai Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	184.374.337.047,00	199.335.339.194,00	(14.961.002.147,00)	(7,51)
2	Dinas Kesehatan	51.105.759.278,00	50.098.228.093,00	1.007.531.185,00	2,01
3	Rumah Sakit Umum Daerah	14.204.592.847,00	13.853.887.877,00	350.704.970,00	2,53
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.771.978.250,00	6.941.513.321,00	(169.535.071,00)	(2,44)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.626.514.236,00	3.623.073.331,00	3.440.905,00	0,09
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.354.387.639,00	2.423.431.399,00	(69.043.760,00)	(2,85)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.140.321.788,00	3.217.618.686,00	(77.296.898,00)	(2,40)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.253.821.635,00	2.455.263.786,00	(201.442.151,00)	(8,20)
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.304.767.459,00	2.466.260.945,00	(161.493.486,00)	(6,55)
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.311.953.934,00	2.171.790.786,00	140.163.148,00	6,45
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.030.012.375,00	3.031.196.629,00	(1.184.254,00)	(0,04)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.470.283.170,00	2.426.804.351,00	43.478.819,00	1,79
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	2.915.881.846,00	2.734.199.553,00	181.682.293,00	6,64
14	Dinas Perhubungan	2.514.365.302,00	2.288.401.037,00	225.964.265,00	9,87
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.096.982.556,00	2.017.371.718,00	79.610.838,00	3,95
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.498.906.290,00	2.399.169.936,00	99.736.354,00	4,16
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.349.444.465,00	2.344.944.242,00	4.500.223,00	0,19
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.818.717.637,00	3.718.281.134,00	100.436.503,00	2,70
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.519.277.000,00	2.466.689.904,00	52.587.096,00	2,13
20	Dinas Perikanan	2.990.599.842,00	2.880.011.803,00	110.588.039,00	3,84
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.537.855.609,00	6.836.425.086,00	(298.569.477,00)	(4,37)
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.776.567.820,00	3.804.413.004,00	(27.845.184,00)	(0,73)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.599.916.568,00	2.786.511.053,00	(186.594.485,00)	(6,70)
24	Inspektorat	3.806.287.062,00	3.683.752.118,00	122.534.944,00	3,33
25	BAPPEDA	3.336.554.776,00	3.054.940.857,00	281.613.919,00	9,22
26	Badan Keuangan Daerah	7.279.868.034,00	6.882.617.396,00	397.250.638,00	5,77
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	4.861.810.663,00	5.211.264.261,00	(349.453.598,00)	(6,71)
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.849.232.620,00	2.912.468.948,00	(63.236.328,00)	(2,17)
29	Sekretariat Daerah	12.154.567.243,00	11.982.052.993,00	172.514.250,00	1,44
30	Sekretariat DPRD	17.340.148.609,00	17.280.706.756,00	59.441.853,00	0,34
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	4.999.072.756,00	5.109.530.304,00	(110.457.548,00)	(2,16)
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	3.529.039.889,67	3.477.274.113,00	51.765.776,67	1,49
33	Kantor Camat Mendahara	1.694.340.251,00	1.766.686.798,00	(72.346.547,00)	(4,10)
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	1.378.607.258,00	1.423.808.012,00	(45.200.754,00)	(3,17)
35	Kantor Camat Geragai	2.071.082.192,00	2.136.916.293,00	(65.834.101,00)	(3,08)
36	Kantor Camat Kuala Jambi	1.217.129.589,00	1.414.501.137,00	(197.371.548,00)	(13,95)
37	Kantor Camat Dendang	1.499.760.650,00	1.553.302.615,00	(53.541.965,00)	(3,45)
38	Kantor Camat Berbak	1.391.927.714,00	1.507.356.847,00	(115.429.133,00)	(7,66)
39	Kantor Camat Rantau Rasau	1.983.957.973,00	2.069.500.446,00	(85.542.473,00)	(4,13)
40	Kantor Camat Nipah Panjang	3.621.322.085,00	3.705.401.756,00	(84.079.671,00)	(2,27)
41	Kantor Camat Sadu	1.586.646.567,00	1.715.586.974,00	(128.940.407,00)	(7,52)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.286.013.355,00	1.787.434.009,00	498.579.346,00	27,89
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.669.080.079,00	2.790.416.343,00	(121.336.264,00)	(4,35)
	JUMLAH	394.123.693.958,67	407.786.345.844,00	(13.662.651.885,33)	(3,35)

Lampiran 52
Rincian Beban Persediaan Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	14.537.143.832,00	12.372.791.407,67	2.164.352.424,33	17,49
2	Dinas Kesehatan	7.503.217.993,53	10.182.608.401,10	(2.679.390.407,57)	(26,31)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	8.277.217.430,00	7.318.997.267,00	958.220.163,00	13,09
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.106.976.237,00	4.076.733.155,00	1.030.243.082,00	25,27
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.396.485.738,00	3.811.179.421,80	4.585.306.316,20	120,31
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	255.479.800,00	284.506.927,00	(29.027.127,00)	(10,20)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	888.977.034,00	633.021.451,00	255.955.583,00	40,43
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	828.333.098,00	846.876.945,00	(18.543.847,00)	(2,19)
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.724.611.165,00	286.454.406,00	1.438.156.759,00	502,05
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.199.989.534,00	1.326.125.792,00	(126.136.258,00)	(9,51)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	779.237.519,00	640.150.300,00	139.087.219,00	21,73
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	893.601.188,00	666.544.253,00	227.056.935,00	34,06
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.416.886.173,00	1.660.771.689,00	(243.885.516,00)	(14,69)
14	Dinas Perhubungan	802.989.349,00	497.895.197,00	305.094.152,00	61,28
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	341.515.600,00	255.086.050,00	86.429.550,00	33,88
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	360.088.610,00	336.843.444,00	23.245.166,00	6,90
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	464.198.151,00	271.359.352,00	192.838.799,00	71,06
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.331.882.393,00	1.012.260.161,00	319.622.232,00	31,58
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	223.431.060,00	274.757.164,00	(51.326.104,00)	(18,68)
20	Dinas Perikanan	582.452.616,00	440.073.849,00	142.378.767,00	32,35
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.912.345.128,00	1.891.268.917,00	5.021.076.211,00	265,49
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.658.985.142,00	900.795.491,00	758.189.651,00	84,17
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	769.841.108,00	391.822.585,00	378.018.523,00	96,48
24	Inspektorat	619.755.343,00	538.196.456,00	81.558.887,00	15,15
25	BAPPEDA	1.005.942.331,00	883.594.055,00	122.348.276,00	13,85
26	Badan Keuangan Daerah	3.083.101.291,00	1.847.636.520,00	1.235.464.771,00	66,87
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	597.734.168,00	721.772.754,00	(124.038.586,00)	(17,19)
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	395.615.524,00	226.944.800,00	168.670.724,00	74,32
29	Sekretariat Daerah	8.526.405.536,00	5.318.770.369,00	3.207.635.167,00	60,31
30	Sekretariat DPRD	4.681.390.844,00	4.526.809.316,00	154.581.528,00	3,41
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	1.043.616.621,00	921.877.706,00	121.738.915,00	13,21
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	549.831.150,00	703.083.740,00	(153.252.590,00)	(21,80)
33	Kantor Camat Mendahara	193.102.700,00	218.429.250,00	(25.326.550,00)	(11,59)
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	501.554.201,00	298.395.276,00	203.158.925,00	68,08
35	Kantor Camat Geragai	199.324.442,00	185.213.276,00	14.111.166,00	7,62
36	Kantor Camat Kuala Jambi	347.825.959,00	242.090.314,00	105.735.645,00	43,68
37	Kantor Camat Dendang	371.577.677,00	305.385.235,00	66.192.442,00	21,68
38	Kantor Camat Berbak	360.692.850,00	278.486.650,00	82.206.200,00	29,52
39	Kantor Camat Rantau Rasau	415.260.997,00	275.956.528,00	139.304.469,00	50,48
40	Kantor Camat Nipah Panjang	268.204.255,00	298.832.538,00	(30.628.283,00)	(10,25)
41	Kantor Camat Sadu	356.564.127,00	249.229.957,00	107.334.170,00	43,07
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	504.976.790,00	432.777.288,00	72.199.502,00	16,68
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	462.835.283,00	1.012.290.463,00	(549.455.180,00)	(54,28)
	Jumlah Beban Persediaan	89.741.197.987,53	69.864.696.116,57	19.876.501.870,96	28,45
	Aset Extracomptable				
1	Dinas Pendidikan	4.825.920.229,00	7.099.014.158,00	(2.273.093.929,00)	(32,02)

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
2	Dinas Kesehatan	0,00	714.064.176,00	(714.064.176,00)	(100,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	246.637.732,00	10.696.922,00	235.940.810,00	2.205,69
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.286.000,00	0,00	16.286.000,00	0,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	9.600.000,00	(9.600.000,00)	(100,00)
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	18.200.000,00	3.890.000,00	14.310.000,00	367,87
9	Dinas Perhubungan	0,00	10.675.000,00	(10.675.000,00)	(100,00)
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.195.600,00	1.500.000,00	(304.400,00)	(20,29)
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.650.000,00	0,00	19.650.000,00	0,00
13	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	104.891.000,00	0,00	104.891.000,00	0,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.100.000,00	16.000.000,00	(5.900.000,00)	(36,88)
15	BAPPEDA	7.155.000,00	0,00	7.155.000,00	0,00
16	Sekretariat Daerah	63.595.800,00	5.735.000,00	57.860.800,00	1.008,91
17	Sekretariat DPRD	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00	0,00
18	Kantor Camat Muara Sabak Barat	108.167.070,00	1.432.000,00	106.735.070,00	7.453,57
19	Kantor Camat Kuala Jambi	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00
20	Kantor Camat Dendang	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	0,00
21	Kantor Camat Rantau Rasau	629.000,00	0,00	629.000,00	0,00
22	Kantor Camat Nipah Panjang	1.920.153,00	0,00	1.920.153,00	0,00
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	23.558.000,00	(23.558.000,00)	(100,00)
	Jumlah Aset Extracomptable	5.618.587.584,00	7.898.165.256,00	(2.279.577.672,00)	(28,86)
	JUMLAH	95.359.785.571,53	77.762.861.372,57	17.596.924.198,96	22,63

Lampiran 53
Rincian Beban Jasa Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	23.165.802.306,00	21.392.070.721,00	1.773.731.585,00	8,29
2	Dinas Kesehatan	28.513.428.205,00	28.326.215.891,67	187.212.313,33	0,66
3	Rumah Sakit Umum Daerah	10.418.344.399,54	21.224.197.785,96	(10.805.853.386,42)	(50,91)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.607.842.463,50	4.932.983.889,20	(325.141.425,70)	(6,59)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.458.681.228,00	5.837.756.181,00	620.925.047,00	10,64
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.316.728.400,00	2.187.142.909,33	129.585.490,67	5,92
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	841.254.262,33	623.226.595,33	218.027.667,00	34,98
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	842.217.559,00	889.772.383,33	(47.554.824,33)	(5,34)
9	Dinas Ketahanan Pangan	3.676.299.973,34	1.350.644.843,33	2.325.655.130,01	172,19
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.738.115.127,67	1.769.555.168,00	(31.440.040,33)	(1,78)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	973.296.336,67	883.217.419,00	90.078.917,67	10,20
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.244.172.296,67	610.537.931,66	1.633.634.365,01	267,57
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	2.568.343.767,66	2.996.187.199,00	(427.843.431,34)	(14,28)
14	Dinas Perhubungan	1.101.170.304,67	1.117.229.683,34	(16.059.378,67)	(1,44)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.158.820.409,17	1.682.307.839,67	1.476.512.569,50	87,77
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	298.419.008,33	282.992.069,34	15.426.938,99	5,45
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	581.008.074,33	354.312.401,34	226.695.672,99	63,98
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.833.841.897,67	2.502.874.299,67	1.330.967.598,00	53,18
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	369.473.296,34	332.364.859,33	37.108.437,01	11,16
20	Dinas Perikanan	1.216.462.370,33	1.096.914.939,67	119.547.430,66	10,90
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.788.743.332,00	2.862.383.307,67	926.360.024,33	32,36
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.517.835.480,67	1.428.096.226,66	89.739.254,01	6,28
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.374.282.380,33	662.390.735,00	711.891.645,33	107,47
24	Inspektorat	3.746.231.769,67	2.796.801.726,00	949.430.043,67	33,95
25	BAPPEDA	984.951.458,66	695.473.270,67	289.478.187,99	41,62
26	Badan Keuangan Daerah	6.510.521.986,34	5.302.728.101,33	1.207.793.885,01	22,78
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	2.076.826.799,00	1.442.204.246,67	634.622.552,33	44,00
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	415.677.916,67	227.263.426,67	188.414.490,00	82,91
29	Sekretariat Daerah	8.189.903.861,00	6.853.881.360,33	1.336.022.500,67	19,49
30	Sekretariat DPRD	4.163.414.874,99	3.543.560.753,67	619.854.121,32	17,49
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	2.703.341.258,67	2.643.924.795,33	59.416.463,34	2,25
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	1.082.890.355,34	976.572.149,66	106.318.205,68	10,89
33	Kantor Camat Mendahara	825.945.538,33	765.927.383,67	60.018.154,66	7,84
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	554.024.552,33	485.673.499,67	68.351.052,66	14,07
35	Kantor Camat Geragai	744.077.274,00	653.960.334,00	90.116.940,00	13,78
36	Kantor Camat Kuala Jambi	897.458.337,00	880.523.237,34	16.935.099,66	1,92
37	Kantor Camat Dendang	614.430.520,01	598.232.762,67	16.197.757,34	2,71
38	Kantor Camat Berbak	505.980.125,00	501.239.125,33	4.740.999,67	0,95
39	Kantor Camat Rantau Rasau	627.604.881,67	526.606.834,00	100.998.047,67	19,18
40	Kantor Camat Nipah Panjang	1.191.350.920,00	1.113.669.469,33	77.681.450,67	6,98
41	Kantor Camat Sadu	695.050.000,00	648.150.000,00	46.900.000,00	7,24
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	819.386.463,33	816.622.092,33	2.764.371,00	0,34
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	951.099.042,33	1.597.943.675,00	(646.844.632,67)	(40,48)
	JUMLAH	143.904.750.813,56	138.416.333.523,17	5.488.417.290,39	3,97

Lampiran 54
Rincian Beban Pemeliharaan Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	958.811.243,00	1.556.473.553,00	(597.662.310,00)	(38,40)
2	Dinas Kesehatan	612.032.246,00	360.296.789,00	251.735.457,00	69,87
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.088.023.310,00	1.203.571.884,00	(115.548.574,00)	(9,60)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.028.802.932,00	2.424.188.163,00	604.614.769,00	24,94
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.716.179.525,00	4.056.948.750,00	(1.340.769.225,00)	(33,05)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	296.147.500,00	299.189.500,00	(3.042.000,00)	(1,02)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	63.230.000,00	84.600.000,00	(21.370.000,00)	(25,26)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	95.553.000,00	127.995.950,00	(32.442.950,00)	(25,35)
9	Dinas Ketahanan Pangan	156.530.000,00	64.660.000,00	91.870.000,00	142,08
10	Dinas Lingkungan Hidup	556.869.534,00	82.679.923,00	474.189.611,00	573,52
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	158.649.345,00	24.382.545,00	134.266.800,00	550,67
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	228.226.000,00	56.943.500,00	171.282.500,00	300,79
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	284.065.609,00	346.196.875,00	(62.131.266,00)	(17,95)
14	Dinas Perhubungan	236.673.760,00	360.233.200,00	(123.559.440,00)	(34,30)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	191.786.900,00	244.102.050,00	(52.315.150,00)	(21,43)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	48.560.000,00	26.033.800,00	22.526.200,00	86,53
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	432.770.780,00	174.063.800,00	258.706.980,00	148,63
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	533.518.020,00	183.890.000,00	349.628.020,00	190,13
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	190.170.000,00	6.350.000,00	183.820.000,00	2.894,80
20	Dinas Perikanan	429.697.135,00	80.051.500,00	349.645.635,00	436,78
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	678.992.502,00	945.423.300,00	(266.430.798,00)	(28,18)
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	546.821.633,34	114.602.000,00	432.219.633,34	377,15
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	474.819.000,00	110.065.700,00	364.753.300,00	331,40
24	Inspektorat	116.500.000,00	246.608.500,00	(130.108.500,00)	(52,76)
25	BAPPEDA	235.743.300,00	98.732.000,00	137.011.300,00	138,77
26	Badan Keuangan Daerah	385.592.360,00	132.662.932,00	252.929.428,00	190,66
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	140.499.000,00	22.845.000,00	117.654.000,00	515,01
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	71.164.000,00	42.655.000,00	28.509.000,00	66,84
29	Sekretariat Daerah	2.751.371.379,15	1.810.480.022,00	940.891.357,15	51,97
30	Sekretariat DPRD	887.847.000,00	1.598.652.700,00	(710.805.700,00)	(44,46)
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	430.038.480,00	267.145.850,00	162.892.630,00	60,98
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	120.300.000,00	73.980.000,00	46.320.000,00	62,61
33	Kantor Camat Mendahara	21.195.000,00	136.074.000,00	(114.879.000,00)	(84,42)
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	158.805.000,00	150.095.800,00	8.709.200,00	5,80
35	Kantor Camat Geragai	44.066.011,00	41.570.000,00	2.496.011,00	6,00
36	Kantor Camat Kuala Jambi	113.946.900,00	25.825.000,00	88.121.900,00	341,23
37	Kantor Camat Dendang	52.319.700,00	43.790.000,00	8.529.700,00	19,48
38	Kantor Camat Berbak	120.318.000,00	159.865.000,00	(39.547.000,00)	(24,74)
39	Kantor Camat Rantau Rasau	82.033.000,00	172.642.000,00	(90.609.000,00)	(52,48)
40	Kantor Camat Nipah Panjang	90.759.100,00	86.625.500,00	4.133.600,00	4,77
41	Kantor Camat Sadu	9.400.000,00	68.128.000,00	(58.728.000,00)	(86,20)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.150.000,00	16.950.000,00	20.200.000,00	119,17
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	226.479.000,00	200.590.165,00	25.888.835,00	12,91
	JUMLAH	20.102.457.204,49	18.328.860.251,00	1.773.596.953,49	9,68

Lampiran 55
Rincian Beban Perjalanan Dinas Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	1.332.079.993,00	839.295.000,00	492.784.993,00	58,71
2	Dinas Kesehatan	1.523.412.374,00	1.194.031.693,00	329.380.681,00	27,59
3	Rumah Sakit Umum Daerah	312.986.238,00	88.459.014,00	224.527.224,00	253,82
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.723.117.025,00	846.184.628,00	876.932.397,00	103,63
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	483.631.697,00	141.059.603,00	342.572.094,00	242,86
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	190.518.180,00	124.100.000,00	66.418.180,00	53,52
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	598.608.667,00	255.309.400,00	343.299.267,00	134,46
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	493.246.596,00	392.682.428,00	100.564.168,00	25,61
9	Dinas Ketahanan Pangan	507.163.127,00	250.419.000,00	256.744.127,00	102,53
10	Dinas Lingkungan Hidup	360.487.658,00	331.693.956,00	28.793.702,00	8,68
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	365.099.817,00	217.769.884,00	147.329.933,00	67,65
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	650.099.110,00	422.747.704,00	227.351.406,00	53,78
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	360.565.044,00	162.157.000,00	198.408.044,00	122,36
14	Dinas Perhubungan	410.489.179,00	278.899.882,00	131.589.297,00	47,18
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	389.367.938,00	143.779.340,00	245.588.598,00	170,81
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	386.149.942,00	172.407.600,00	213.742.342,00	123,98
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	612.676.684,00	305.326.353,00	307.350.331,00	100,66
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	969.673.516,00	828.598.371,00	141.075.145,00	17,03
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	349.321.685,00	222.654.071,00	126.667.614,00	56,89
20	Dinas Perikanan	602.644.513,00	351.204.454,00	251.440.059,00	71,59
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	859.736.839,00	381.910.000,00	477.826.839,00	125,12
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	891.337.494,00	463.439.099,00	427.898.395,00	92,33
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	754.286.659,00	298.412.400,00	455.874.259,00	152,77
24	Inspektorat	534.333.627,00	119.611.547,00	414.722.080,00	346,72
25	BAPPEDA	1.539.465.692,00	646.540.302,00	892.925.390,00	138,11
26	Badan Keuangan Daerah	1.196.669.224,00	413.784.500,00	782.884.724,00	189,20
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.102.180.096,00	427.855.758,00	674.324.338,00	157,61
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	411.650.707,00	207.282.950,00	204.367.757,00	98,59
29	Sekretariat Daerah	3.574.208.907,00	1.444.964.890,00	2.129.244.017,00	147,36
30	Sekretariat DPRD	13.366.146.249,00	4.908.666.012,00	8.457.480.237,00	172,30
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	123.144.706,00	113.229.600,00	9.915.106,00	8,76
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	43.920.920,00	86.490.000,00	(42.569.080,00)	(49,22)
33	Kantor Camat Mendahara	67.498.164,00	24.045.000,00	43.453.164,00	180,72
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	57.422.050,00	38.445.000,00	18.977.050,00	49,36
35	Kantor Camat Geragai	38.801.209,00	2.220.000,00	36.581.209,00	1.647,80
36	Kantor Camat Kuala Jambi	67.265.560,00	17.735.000,00	49.530.560,00	279,28
37	Kantor Camat Dendang	71.085.000,00	58.490.597,00	12.594.403,00	21,53
38	Kantor Camat Berbak	56.035.000,00	21.425.000,00	34.610.000,00	161,54
39	Kantor Camat Rantau Rasau	67.296.000,00	47.530.000,00	19.766.000,00	41,59
40	Kantor Camat Nipah Panjang	70.507.216,00	59.080.000,00	11.427.216,00	19,34
41	Kantor Camat Sadu	47.281.890,00	10.055.000,00	37.226.890,00	370,23
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	407.124.525,00	372.726.843,00	34.397.682,00	9,23
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	416.287.504,00	205.530.743,00	210.756.761,00	102,54
	JUMLAH	38.385.024.221,00	17.938.249.622,00	20.446.774.599,00	113,98

Lampiran 56
Beban Hibah Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	5.290.304.000,00	5.030.700.000,00	259.604.000,00	5,16
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.240.500.000,00	15.160.975.500,00	(3.920.475.500,00)	(25,86)
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	315.000.000,00	(315.000.000,00)	(100,00)
4	Dinas Ketahanan Pangan	55.750.000,00	35.000.000,00	20.750.000,00	59,29
5	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.298.305.227,00	907.356.310,68	1.390.948.916,32	153,30
6	Dinas Perikanan	2.062.412.383,00	1.810.029.900,00	252.382.483,00	13,94
7	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	801.395.468,00	0,00	801.395.468,00	0,00
8	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.305.598.000,00	246.044.000,00	1.059.554.000,00	430,64
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	320.000.000,00	(320.000.000,00)	(100,00)
10	Badan Keuangan Daerah	275.424.120,00	3.349.500,00	272.074.620,00	8.122,84
11	Sekretariat Daerah	1.100.156.000,00	725.000.000,00	375.156.000,00	51,75
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	801.475.200,00	801.475.200,00	0,00	0,00
	JUMLAH	25.231.320.398,00	25.354.930.410,68	(123.610.012,68)	(0,49)

Lampiran 57
Rincian Beban Hibah Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
A	Dinas Pendidikan	5.290.304.000,00
1	Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	250.000.000,00
2	Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika	26.352.500,00
3	Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi	24.582.500,00
4	BOP-PAUD	4.716.969.000,00
5	BOP Kesenjangan	272.400.000,00
B	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.240.500.000,00
1	Pembangunan Hibah Khusus Pamsimas (HKP)	300.000.000,00
2	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	892.500.000,00
3	Pembangunan Tangki Septik Skala individual Desa	980.000.000,00
4	Pembangunan Tangki Septik Skala individual Perkotaan	2.611.000.000,00
5	Pembangunan TPS3R	1.200.000.000,00
6	Pembangunan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan sumur Dalam Terindungi/ Broncaptering	5.257.000.000,00
C	Dinas Ketahanan Pangan	55.750.000,00
1	Hibah Sarana Penjemuran Gabah kepada Kelompok Tani/Gapoktan (terpal)	15.750.000,00
2	Pengisian lumbung pangan masyarakat (beras) kepada Gapoktan Sukamaju Kec Geragai	40.000.000,00
D	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.298.305.227,00
1	REOG	78.399.000,00
2	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	1.999.906.227,00
3	Kwartir Cabang Pramuka Tanjung Jabung Timur	220.000.000,00
E	Dinas Perikanan	2.062.412.383,00
1	Pengadaan Benih Nila Merah dan Pakan	69.500.000,00
2	Pengadaan Benih Bandeng, Pakan Serta Sarana Produksi Pokdakan	669.507.000,00
3	Pembangunan Lantai Jemur	372.732.200,00
4	Pembangunan / Rehab Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) Pembangunan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	580.500.000,00
5	Pembangunan Rumah Produksi	290.269.500,00
6	Pengadaan Jaring Gillnet	79.903.683,00
F	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	801.395.468,00
1	Perencanaan SID Rahab/Perbaikan Pintu Air, Perencanaan SID Pembangunan/Rehab Tanggul Pertanian, SID Perencanaan Pengembangan Pintu Air, Perencanaan Pembangunan Saluran, Perencanaan Gorong-gorong Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.209.449,00
2	Perencanaan DID Pembangunan/Rehab Tanggul Pertanian, DID Loneng Gorong-gorong, DID Pembangunan Pintu Air, DID Pembangunan Saluran, DID Rehab/Perbaikan Pintu Air Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	25.132.119,00
3	Belanja Rehab/ Perbaikan Pintu Air	359.783.200,00
4	Belanja Loneng Gorong-gorong dan Pembangunan Saluran	83.634.800,00
6	Belanja Pembangunan Pintu Air	192.922.900,00
7	Perencanaan Rehab/ Perbaikan Saluran Pertanian	3.280.000,00
8	Pengawasan Rehab/Perbaikan Saluran Pertanian	4.920.000,00
9	Rehab/Perbaikan Saluran Pertanian	81.444.000,00
10	Pengawasan Pembangunan/Rehab Tanggul Pertanian, Pengawasan Rehab/Perbaikan Pintu Air, Pengawasan Loneng Gorong-gorong, Pengawasan Pembangunan Saluran, dan Pengawasan Pembangunan Pintu Air Keg. Pengembangan Prasarana Pertanian	42.069.000,00
G	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.305.598.000,00
1	perencanaan bangunan gudang bank pakan silase kelompok tani Srigati Desa Sidomukti Kec. Dendang	7.600.000,00
2	Pengembangan Bank Pakan Silase	396.670.000,00

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
3	Alat Pasca Panen Pinang	49.905.000,00
4	Atap Rumah Pengeringan Pinang	98.827.000,00
5	Jaring pagar itik	8.000.000,00
6	Pengembangan Tata Air Mikro (TAM)	149.132.000,00
7	Ternak Itik Kerinci	69.300.000,00
8	Pembangunan Gudang Bank Pakan Silase	190.764.000,00
9	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	300.000.000,00
10	Instalasi Listrik Kantor pengembangan bank pakan silase	6.000.000,00
11	Pengawasan Bangunan Gudang Bank Pakan Silase	11.500.000,00
12	Pengawasan Pengembangan Tata Air Mikro	10.400.000,00
13	Perencanaan Pengembangan Tata Air Mikro	7.500.000,00
H	Badan Keuangan Daerah	275.424.120,00
1	Tanah Kejaksaan	275.424.120,00
I	Sekretariat Daerah	1.100.156.000,00
1	Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur	250.000.000,00
2	Lembaga Ibadah/Sarana Ibadah/Ponpes	820.000.000,00
3	Tanah ke Balai Kementerian Pertanian	1.156.000,00
4	11 unit Kendaraan Roda 2 dan 1 Unit Kendaraan Roda 4 ke Polres Tanjung Jabung Timur	29.000.000,00
J	Badan Kesbang	801.475.200,00
1	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	801.475.200,00
	JUMLAH	25.231.320.398,00

Lampiran 58

Rincian Beban Penyusutan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022

(dalam rupiah)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	18.762.574.183,25	14.400.578.171,57	4.361.996.011,68	30,29
2	Dinas Kesehatan	9.515.049.858,52	8.214.018.068,85	1.301.031.789,67	15,84
3	Rumah Sakit Umum Daerah	8.161.985.564,20	5.800.735.944,49	2.361.249.619,71	40,71
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	199.375.987.537,52	127.944.425.230,71	71.431.562.306,81	55,83
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.741.931.825,40	22.505.189.935,91	1.236.741.889,49	5,50
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	220.042.000,12	263.274.544,00	(43.232.543,88)	(16,42)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	99.241.749,93	138.429.318,36	(39.187.568,43)	(28,31)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	584.136.564,97	664.009.088,94	(79.872.523,97)	(12,03)
9	Dinas Ketahanan Pangan	148.113.610,62	204.350.385,64	(56.236.775,02)	(27,52)
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.461.441.221,12	1.737.519.726,93	(276.078.505,81)	(15,89)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	407.941.028,04	495.718.978,05	(87.777.950,01)	(17,71)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	277.271.290,57	319.175.031,58	(41.903.741,01)	(13,13)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	741.939.937,57	765.416.002,84	(23.476.065,27)	(3,07)
14	Dinas Perhubungan	2.205.039.210,34	2.458.440.938,83	(253.401.728,49)	(10,31)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	492.916.375,06	687.657.975,68	(194.741.600,62)	(28,32)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	37.581.169,50	41.764.169,50	(4.183.000,00)	(10,02)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	196.777.783,06	203.943.479,74	(7.165.696,68)	(3,51)
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.859.396.085,84	2.136.730.732,77	(277.334.646,93)	(12,98)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	530.981.956,93	459.267.956,33	71.714.000,60	15,61
20	Dinas Perikanan	1.232.562.950,23	1.819.001.936,36	(586.438.986,13)	(32,24)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.155.181.146,03	1.101.250.601,24	53.930.544,79	4,90
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.033.047.235,78	1.918.499.262,86	(885.452.027,08)	(46,15)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.745.529.893,01	1.562.331.180,20	183.198.712,81	11,73
24	Inspektorat	435.727.428,50	240.838.403,11	194.889.025,39	80,92
25	BAPPEDA	704.252.755,62	838.337.142,20	(134.084.386,58)	(15,99)
26	Badan Keuangan Daerah	1.385.102.942,13	1.309.690.534,28	75.412.407,85	5,76
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	629.312.285,72	463.900.684,37	165.411.601,35	35,66
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	53.525.313,64	60.771.813,64	(7.246.500,00)	(11,92)
29	Sekretariat Daerah	3.812.518.371,31	3.251.613.912,34	560.904.458,97	17,25
30	Sekretariat DPRD	2.619.325.661,56	2.196.030.876,64	423.294.784,92	19,28
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	2.248.551.064,10	2.138.049.519,86	110.501.544,24	5,17
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	720.620.266,12	763.674.204,77	(43.053.938,65)	(5,64)
33	Kantor Camat Mendahara	423.671.551,06	591.322.536,41	(167.650.985,35)	(28,35)
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	387.823.904,17	460.913.921,31	(73.090.017,14)	(15,86)
35	Kantor Camat Geragai	454.394.566,12	398.573.811,75	55.820.754,37	14,01
36	Kantor Camat Kuala Jambi	894.322.878,64	972.352.226,57	(78.029.347,93)	(8,02)
37	Kantor Camat Dendang	534.909.311,33	521.844.231,90	13.065.079,43	2,50
38	Kantor Camat Berbak	518.734.772,00	518.836.305,33	(101.533,33)	(0,02)
39	Kantor Camat Rantau Rasau	540.602.102,47	494.896.153,48	45.705.948,99	9,24
40	Kantor Camat Nipah Panjang	916.695.523,62	851.522.955,87	65.172.567,75	7,65
41	Kantor Camat Sadu	632.018.734,12	586.336.676,25	45.682.057,87	7,79
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	123.269.856,84	128.519.614,56	(5.249.757,72)	(4,08)
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	675.538.939,39	1.481.982.622,98	(806.443.683,59)	(54,42)
	JUMLAH	292.697.588.406,07	214.111.736.809,00	78.585.851.597,07	36,70

Lampiran 59
Rincian Ekuitas Awal Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Dinas Pendidikan	259.630.653.771,24	228.186.351.612,53
2	Dinas Kesehatan	76.869.468.950,20	71.368.445.838,32
3	Rumah Sakit Umum Daerah	56.792.278.092,96	33.593.065.014,75
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.042.411.197.215,26	1.039.074.525.057,44
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	236.140.963.476,74	229.092.691.863,94
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.902.829.108,00	4.164.637.574,33
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.071.087.331,81	1.198.575.430,50
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.868.291.903,53	7.478.788.911,80
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.649.652.800,61	1.825.057.283,58
10	Dinas Lingkungan Hidup	18.283.805.341,12	20.005.216.296,05
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.745.351.999,69	3.869.032.748,74
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.439.099.634,68	4.073.821.393,25
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	4.461.118.360,79	4.687.573.508,63
14	Dinas Perhubungan	31.391.046.999,46	33.648.405.520,63
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.237.873.567,13	2.757.811.824,48
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	108.375.015,41	142.360.575,25
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	516.003.133,19	638.128.338,27
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	34.106.359.352,15	35.851.809.107,59
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.936.188.211,86	5.061.052.286,85
20	Dinas Perikanan	20.696.979.148,24	22.446.137.155,27
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	16.825.843.769,35	17.405.893.646,26
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	54.726.395.323,32	56.706.430.564,84
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.559.101.582,65	27.855.172.944,07
24	Inspektorat	2.337.266.343,73	1.313.163.986,84
25	BAPPEDA	7.823.287.891,37	8.495.849.062,24
26	Badan Keuangan Daerah	84.786.477.293,73	90.671.564.109,84
27	PPKD	118.887.935.575,20	35.068.292.217,48
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	4.855.636.348,98	4.838.842.776,02
29	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	171.338.664,41	241.930.508,72
30	Sekretariat Daerah	29.276.307.150,97	29.502.952.648,98
31	Sekretariat DPRD	18.795.883.150,08	20.003.282.942,39
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	12.436.178.485,31	13.643.403.574,50
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	3.919.295.646,34	4.315.723.656,77
34	Kantor Camat Mendahara	3.808.040.946,05	3.989.114.719,13
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	2.598.823.631,95	2.941.571.184,93
36	Kantor Camat Geragai	2.699.248.880,59	3.024.029.704,34
37	Kantor Camat Kuala Jambi	6.360.260.308,39	6.614.896.349,30
38	Kantor Camat Dendang	3.285.527.901,63	3.732.804.077,20
39	Kantor Camat Berbak	3.346.132.971,67	3.682.313.708,33
40	Kantor Camat Rantau Rasau	3.629.291.976,85	4.048.401.958,33
41	Kantor Camat Nipah Panjang	5.192.989.648,11	5.734.001.793,31
42	Kantor Camat Sadu	2.235.794.421,24	2.637.517.757,49
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.673.267.165,95	1.766.622.452,84
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.618.116.589,09	3.753.766.733,07
	JUMLAH	2.229.107.065.081,03	2.101.151.030.419,42

Lampiran 60
Rincian Surplus Defisit LO Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Dinas Pendidikan	(219.111.213.411,25)	(230.587.157.205,24)
2	Dinas Kesehatan	(92.117.769.911,05)	(91.489.477.489,12)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(31.061.983.875,41)	(12.277.516.687,98)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(220.613.654.445,02)	(147.125.628.386,91)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(29.753.518.289,65)	(44.473.988.307,46)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(5.633.303.519,12)	(5.581.645.279,33)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(5.521.751.754,26)	(5.091.304.839,69)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(5.097.308.452,97)	(5.376.600.581,27)
9	Dinas Ketahanan Pangan	(8.573.235.334,96)	(4.657.789.579,97)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(7.555.692.308,79)	(7.242.507.351,93)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.714.236.420,71)	(5.292.435.755,05)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(6.763.653.055,24)	(4.512.352.771,24)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	(7.802.940.827,23)	(8.187.361.194,84)
14	Dinas Perhubungan	(7.222.614.107,01)	(6.966.486.990,17)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	(6.351.956.378,23)	(4.737.927.173,35)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	(3.629.705.019,83)	(4.259.211.018,84)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(4.638.071.537,39)	(3.637.811.128,08)
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(14.611.659.776,51)	(11.269.186.009,12)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(4.202.304.998,27)	(3.762.083.954,66)
20	Dinas Perikanan	(9.111.831.809,56)	(8.474.788.382,03)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	(20.776.641.024,03)	(13.967.751.211,91)
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	(10.422.290.205,79)	(8.676.732.684,52)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(7.740.934.608,34)	(6.147.528.153,20)
24	Inspektorat	(9.258.835.230,17)	(7.625.808.750,11)
25	BAPPEDA	(7.814.065.313,28)	(6.217.617.626,87)
26	Badan Keuangan Daerah	944.726.062.353,71	915.842.979.848,69
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	(9.408.363.011,72)	(8.289.842.704,04)
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(4.196.866.081,31)	(3.677.386.938,31)
29	Sekretariat Daerah	(40.172.727.097,46)	(31.392.498.546,67)
30	Sekretariat DPRD	(43.151.273.238,55)	(34.054.426.414,31)
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	(11.655.931.955,77)	(11.183.169.775,19)
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	(6.206.282.581,13)	(6.080.345.207,43)
33	Kantor Camat Mendahara	(3.225.753.204,39)	(3.502.484.968,08)
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	(3.038.236.965,50)	(2.849.081.508,98)
35	Kantor Camat Geragai	(3.536.785.694,12)	(3.418.346.128,75)
36	Kantor Camat Kuala Jambi	(3.544.199.223,64)	(3.553.026.914,91)
37	Kantor Camat Dendang	(3.146.072.858,34)	(3.077.157.842,14)
38	Kantor Camat Berbak	(2.953.688.461,00)	(2.987.208.927,66)
39	Kantor Camat Rantau Rasau	(3.717.383.954,14)	(3.575.665.265,48)
40	Kantor Camat Nipah Panjang	(6.160.759.252,62)	(6.114.231.219,20)
41	Kantor Camat Sadu	(3.326.961.318,12)	(3.276.036.607,25)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(4.979.396.190,17)	(4.356.505.046,89)
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(5.362.916.251,72)	(6.924.579.272,98)
	JUMLAH	35.841.293.399,94	119.892.288.047,53

Lampiran 61
Rincian Ekuitas Akhir Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Dinas Pendidikan	261.749.840.909,29	259.630.653.771,24
2	Dinas Kesehatan	78.481.504.637,34	76.869.468.950,20
3	Rumah Sakit Umum Daerah	48.036.172.889,01	56.792.278.092,96
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.005.573.115.241,28	1.042.411.197.215,26
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	280.089.136.374,45	236.140.963.476,74
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.704.533.152,88	3.902.829.108,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.045.485.976,86	1.071.087.331,81
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.156.543.821,92	6.868.291.903,53
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.617.051.433,65	1.649.652.800,61
10	Dinas Lingkungan Hidup	18.819.223.565,33	18.283.805.341,12
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.615.439.341,98	3.745.351.999,69
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.727.221.640,02	3.439.099.634,68
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3.831.274.964,56	4.461.118.360,79
14	Dinas Perhubungan	31.417.347.998,97	31.391.046.999,46
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.736.037.499,31	2.237.873.567,13
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	164.193.592,58	108.375.015,41
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	491.750.083,80	516.003.133,19
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	32.568.208.043,37	34.106.359.352,15
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.633.860.571,70	4.936.188.211,86
20	Dinas Perikanan	19.456.406.409,16	20.696.979.148,24
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.229.128.984,79	16.825.843.769,35
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	54.263.881.048,50	54.726.395.323,32
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.754.166.412,80	27.559.101.582,65
24	Inspektorat	2.452.396.608,15	2.337.266.343,73
25	BAPPEDA	7.324.065.061,50	7.823.287.891,37
26	Badan Keuangan Daerah	119.390.791.229,37	84.786.477.293,73
27	PPKD	85.856.744.907,42	118.887.935.575,20
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	4.908.664.194,99	4.855.636.348,98
29	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	193.848.628,10	171.338.664,41
30	Sekretariat Daerah	27.984.990.789,33	29.276.307.150,97
31	Sekretariat DPRD	19.784.450.342,39	18.795.883.150,08
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	10.998.801.883,69	12.436.178.485,31
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	3.714.372.239,34	3.919.295.646,34
34	Kantor Camat Mendahara	3.968.399.362,71	3.808.040.946,05
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	2.526.066.764,45	2.598.823.631,95
36	Kantor Camat Geragai	2.562.363.053,13	2.699.248.880,59
37	Kantor Camat Kuala Jambi	6.359.855.620,11	6.360.260.308,39
38	Kantor Camat Dendang	3.124.071.329,84	3.285.527.901,63
39	Kantor Camat Berbak	2.890.991.985,67	3.346.132.971,67
40	Kantor Camat Rantau Rasau	3.440.252.237,12	3.629.291.976,85
41	Kantor Camat Nipah Panjang	4.868.314.013,67	5.192.989.648,11
42	Kantor Camat Sadu	1.931.668.810,25	2.235.794.421,24
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.630.292.982,78	1.673.267.165,95
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.038.758.989,37	2.618.116.589,09
	JUMLAH	2.226.111.685.626,93	2.229.107.065.081,03